

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka disertasi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, 01 Nopember 2011

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
UMAR YAHYA

## PERSETUJUAN DISERTASI

Disertasi an. **Umar Yahya**, NIM. **80100307014**, mahasiswa strata tiga (S3) program studi Dirasah Islamiyah dengan Konsentrasi Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi disertasi yang bersangkutan dengan judul; **Ketaatan Berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang ( Studi Analisis Kesenjangan Pemahaman dan Pelaksanaannya)**, dipandang telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh Ujian Promosi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya .

### Promotor :

1. Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A. (.....)
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT.M.S. (.....)

### Co-Promotor :

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.Ag. (.....)

### Penguji :

1. Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA. (.....)
2. Prof. Dr. H. Moch. Qasim Mathar, MA. (.....)
3. Dr. H. Muammar Bakri Lc., MAg. (.....)

Makassar, Nopember 2011

Diketahui oleh,

Ketua Program Studi  
Dirasah Islamiyah,

Direktur Program Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar,

**Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag.**  
**NIP. 19621016 199003 1 003**

**Prof. Dr. H. Muh. Natsir Mahmud, MA.**  
**NIP. 19540816 198303 1 004**

## KATA PENGANTAR

حيم  
لله العالمين والصدّ  
لام علي اشرف الأنبياء  
د وعلي آله وصحبه اجمعين  
والمرسلين سيّ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan hidayah, taufiq, dan inayah-Nya, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, disampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih tak terhingga.

Disertasi berjudul “**Ketaatan Berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Analisis Kesenjangan Pemahaman dan Pelaksanaannya)**” ini dapat dirampungkan dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Doktor (S3) UIN Alauddin Makassar. Demikian pula sebagai umat Rasulullah saw. patutlah menghanturkan *salam* dan salam kepada beliau para keluarga dan sahabatnya, semoga rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau akan sampai kepada seluruh umatnya.

Dalam penulisan disertasi ini, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kriteria sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif senantiasa penulis harapkan dan semoga kehadiran disertasi ini menjadi rujukan tambahan bagi mereka yang ingin mendalami pengetahuan manasik dan pemahamannya tentang konsep ibadah haji.

Dengan tidak mengurangi rasa syukur penulis kepada Allah swt., maka dengan hati ikhlas□ penulis ucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat membantu menyelesaikan disertasi ini, yaitu :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing H.T. MS. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA., Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si., Drs.H.Gazali Suyuti, M.Hi., dan Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA., masing-masing Pembantu Rektor I, II, III, dan IV yang telah memberikan segala perhatiannya terhadap kelangsungan dan kemajuan lembaga UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Muh. Natsir Mahmud, MA., sebagai Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Baso Midong, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Nasir A Baki, MA., masing-masing sebagai Asisten Direktur I dan II Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan petunjuk dan berbagai kebijakan dalam penyelesaian studi ini.
3. Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A., Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT.M.S., Prof. Dr. H. Ali Parman, M.Ag, masing-masing selaku promotor I, dan II serta co-promotor yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan disertasi ini.
4. Para Guru Besar dan Dosen UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berpikir penulis dalam menghadapi berbagai persoalan.
5. Drs. K.H. Alwi Rajab, dan Dr. H. Ahmad Rusydi, S.E,M.M., masing-masing sebagai Ketua STAI DDI Pangkajene Sidrap dan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memberikan kesempatan dan motivasi kepada penulis dalam rangka penyelesaian Studi pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar.

6. Dr. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismu Makassar, yang telah meluangkan waktu untuk mengedit dan memperbaiki format penulisan disertasi ini agar sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah.
7. Seluruh Karyawan Tata Usaha PPs.UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala persyaratan administrasi dalam masa proses pembelajaran program doktor hingga penyelesaian studi.
8. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Alauddin beserta segenap stafnya, juga karyawan perpustakaan Program Pascasarjana UIN Alauddin yang telah memberikan pelayanan yang prima kepada penulis.
9. Drs.H. Hasanuddin Syafiuddin, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2006-2010, yang memberi bantuan penyelesaian kepada penulis dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya penulis sebagai salah seorang Pengurus BAZ Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Dosen dan staf dalam lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Kabupaten Sidenreng Rappang, atas bantuan yang tulus baik materil maupun moril kepada penulis selama dalam perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi.

11. Kedua orang tua tercinta yang mengasuh dan membesarkan serta membiayai penulis dalam rangka menuntut ilmu mulai dari Sekolah Dasar hingga masuk ke jenjang perguruan tinggi serta dengan iringan do'anya.
12. Terhusus kepada isteri tercinta dan kedua anak kami yang telah memberikan motivasi dan dengan segala pengertian dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang juga membantu serta menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga Perguruan Tinggi STAI DDI Pangkajene Sidrap, para pembaca, khususnya pribadi penulis, dan menyadari bahwa masih banyak pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian disertasi ini yang belum sempat disebut namanya. Oleh karena itu, penulis mendoakan semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Semoga Allah swt. merahmati kita sekalian.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Makassar,  $\frac{10 \text{ ulhijjah } 1432 \text{ H.}}{06 \text{ Nopember } 2011 \text{ M.}}$

Penulis,

UMAR YAHYA

NIM : 80100307014

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DISERTASI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian.....	20
D. Kajian Pustaka.....	31
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	35
F. Garis-garis Besar Isi.....	38
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS PEMAHAMAN KETAATAN BERHAJI DAN PENGELOLAAN HAJI .....</b>	<b>42</b>
A. Relevansi dengan Penelitian sebelumnya .....	42
1. Perspektif Cendekiawan Muslim terhadap Urgensi Pema- haman Ketaatan Haji .....	47
2. Tradisi Masyarakat Muslim terhadap Ritualitas dan Sakralitas Perhajian.....	53
3. Histori Penyelenggaraan Ibadah haji di Indonesia.....	57
B. Pemahaman Ketaatan berhaji dalam Konteks Hukum Islam....	60
1. <i>Term</i> hukum Islam Perubahan Sosial.....	60
2. Konsep Pemahaman Ketaatan Berhaji .....	71
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemahaman terhadap Ketaatan Haji .....	122
1. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan terhadap Ajaran Haji .....	122
2. Pengetahuan dan Pemahaman Ajaran Haji.....	124
3. Lemahnya SDM Pengelola Haji .....	126
4. Tidak Adanya Aanksi bagi Masyarakat yang Melanggar.....	129
5. Keinginan Kuat Mendapatkan Gelar Haji/Hajjah.....	129

	D. Eksistensi KBIH dan IPHI serta Perannya dalam Pembinaan Ibadah Haji .....	139
	E. Pembinaan Pasca Haji dan Pendanaannya dalam Meningkatkan Pemahaman Ajaran Syari'at Islam.....	149
	F. Kerangka Teoritis .....	157
BAB	III METODOLOGI PENELITIAN.....	161
	A. Lokasi dan Jenis Penelitian .....	161
	B. Metode Pendekatan .....	168
	C. Populasi dan Sampel.....	171
	D. Instrumen Penelitian .....	175
	E. Metode Pengumpulan Data .....	178
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	182
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	188
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	188
	1. Letak Geografis.....	188
	2. Kependudukan dan Struktur Sosial Masyarakat, Agama di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	193
	3. Sistem Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang .....	205
	4. Gambaran Keadaan Pemahaman dan Ketaatan Berhaji Masyarakat Sidenreng Rappang .....	209
	B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesenjangan Pelaksanaan Berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	246
	C. Upaya-upaya strategi yang Dilakukan Penyelenggara Haji di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam .....	295
	D. Analisis Pemahaman dan Ketaatan Berhaji serta Faktor yang Memengaruhi Kesenjangan Pelaksanaannya di Kabupaten Sidenreng Rappang .....	315
BAB	V PENUTUP.....	338
	A. Kesimpulan .....	338
	B. Implikasi Penelitian.....	340
	DAFTAR PUSTAKA.....	345
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	353
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	356



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

= a	= d	= d□	= k	= y
= b	=	= t□	= l	
= t	= r	=	= m	
= ts	= z	= ‘	= n	
= j	= s	= g	= w	
= h	= sy	= f	= h	
= kh	= s□	= q	= ‘	

Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun.

Jika ia terletak di tengah atau akhir maka ditulis dengan tanda (’).

*Tā ‘al-Marbūtah* ( ) ditransliterasikan dengan “t” tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasikan dengan “h”, misalnya; *al-risālat al-mudarrisah*; *al-marhalat al-ākhīrah*.

#### 2. Vokal dan Diftong

##### 1. Vokal ( a, i, u ) :

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	a	
<i>Kasrah</i>	i	
<i>Dammah</i>	U	

##### 2. Diftong ( aw, ay ) :

Bunyi	Tulis	Contoh
أو	Aw	<i>Qawl</i>
أي	Ay	<i>Bayn</i>

3. Syaddad dilambangkan dengan konsonan yang ganda
4. Kata sandang al- (*alif lam ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (Al-) Contohnya :

Menurut al-Bukh ri, hadits ini .....

Al-Bukh ri berpendapat hadits ini .....

5. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya, perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), Sunnah dan Umum. Bila istilah itu menjadi bagian yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*FiẒilāl al-Qur'an*

*Al-Sunnah qab al-tadwīm*

*Al-ibrat bī 'umūm al-laf lā khusūs al-sabab*

6. *Laf d al-Jalāla*, yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayhi* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya :

*Dīnillah billah*

Adapun *tā' marbūta* diakhir kata yang disandarkan kepada *laf al-Jalāla*, ditransliterasikan dengan huruf t, Contohnya : *hum fi rahmatillāh*

#### B. Singkatan :

swt. = *Subhānahu wata'ālah*

saw. = *Shallah Allāh 'alayhi wa sallam*

a.s. = *'alayhi al-salām*

H. = Hijrah

M. = Masehi

w. = Wafat

QS..... (...) = Alquran, Surah..., ayat 4

ttp. = Tanpa tempat terbit

tp. = Tanpa penerbit

Cet. = Cetakan

h. = Halaman

s.M. = sebelum Masehi

tth. = Tanpa tahun terbit

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1 : Daftar nama-nama instansi/organisasi yang dijadikan sampel .....	173
Tabel 2 : Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 .....	191
Tabel 3 : Keadaan penggunaan lahan (ha) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 .....	192
Tabel 4 : Penduduk menurut jenis kelamin dan kewarganegaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009.....	194
Tabel 5 : Keadaan tingkat pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009.....	196
Tabel 6 : Tingkat pendidikan keluarga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009.....	198
Tabel 7 : Produk domestik bruto menurut lapangan usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang atas dasar harga berlaku tahun 2008 – 2009.....	206
Tabel 8 : Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2008 – 2009 .....	207
Tabel 9 : Jumlah orang yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009.....	208
Tabel 10 : Daftar rekapitulasi calon jamaah haji batal Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2006 s.d. 2009 .....	237
Tabel 11 : Daftar rekapitulasi calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan bank tahun 1430 H. / 2009 M. ....	238
Tabel 12 : Daftar rekapitulasi calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan pekerjaan tahun 1430 H./ 2009 M.....	239
Tabel 13 : Daftar rekapitulasi calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan jenis kelamin tahun 2008 s.d. 2009.....	241
Tabel 14 : Persentase jenis pekerjaan calon jamaah haji Kabupaten Sidrap berdasarkan wilayah Kecamatan Tahun 2009 M.....	242

Tabel 15	: Persentase calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pendidikan tahun 1430 H./ 2009 M.....	243
Tabel 16	: Daftar rekapitulasi calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang berdasar kelompok umur tahun 1430 H./2009 M.....	245
Tabel 17	: Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengeluarkan zakat harta yang sudah melaksanakan haji.....	249
Tabel 18	: Bimbingan dan penyuluhan zakat pada masyarakat muslim yang telah melaksanakan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	250
Tabel 19	: Membaca dan mendengar tentang fatwa ketaatan berhaji.....	253
Tabel 20	: Sumber informasi ibadah haji sehingga tertarik untuk melaksanakan ibadah haji .....	254
Tabel 21	: Lamanya berencana menunaikan ibadah haji .....	256
Tabel 22	: Alasan pokok melaksanakan ibadah haji .....	258
Tabel 23	: Berapa Kali Telah Melaksanakan Ibadah Haji .....	260
Tabel 24	: Keinginan Untuk Melaksanakan Ulang Ibadah Haji.....	261
Tabel 25	: Rencana Pelaksanaan Ulang Ibadah Haji .....	262
Tabel 26	: Cara Mendapatkan Uang Untuk Membayar BPIH .....	263
Tabel 27	: Keinginan untuk Mencapai Haji <i>Mabrūr</i> .....	265
Tabel 28	: Harapan setelah Mencapai Haji <i>Mabrūr</i> .....	266
Tabel 29	: Pemahaman Masyarakat Muslim Kabupaten Sidrap Terhadap Ketaatan Berhaji .....	268
Tabel 30	: Animo Masyarakat terhadap Pelaksanaan Haji dan Mengeluarkan .....	270
Tabel 31	: Keterlibatan Langsung Pengelola Haji Dalam Penyelenggaraan Haji .....	272
Tabel 32	: Keterlibatan Pengelola Haji dalam Penyusunan Program Kerja.....	273
Tabel 33	: Pengaruh berpengaruhnya sanksi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 terhadap masyarakat di Kabupaten .....	275
Tabel 34	: Hal-hal yang harus disempurnakan pada Undang-Undang RI.	

	Nomor 13 tahun 2008 dalam penyelenggaraan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang .....	277
Tabel 35	: Akankah memakai gelar haji (H) Hajjah (Hj) setelah berhaji.....	280
Tabel 36	: Jika setelah melaksanakan haji kemudian ada orang yang tidak menyebut gelar hajinya, apakah menyahut ?.....	281
Tabel 37	: Perlu tidaknya memberikan gelar haji kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji.....	282
Tabel 38	: Keinginan untuk mendapatkan “haji <i>mabrūr</i> .....	283
Tabel 39	: Harapan setelah mencapai haji <i>mabrūr</i> .....	284
Tabel 40	: Kategori yang didahulukan berhaji ketika mampu .....	286
Tabel 41	: Penting tidaknya kelompok bimbingan ibadah haji .....	288
Tabel 42	: Cara mendapatkan uang untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah haji (BPIH).....	289
Tabel 43	: Pandangan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang tentang kedudukan KBIH .....	291
Tabel 44	: Tempat melakukan bimbingan pra manasik haji dianggap tepat oleh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sehubungan dengan keberadaan KBIH sebagai institusi keagamaan.....	292
Tabel 45	: Jumlah KBIH dan Jumlah Calon Jamaah Haji yang dibimbing Pada tahun 2008 / 2009.....	299

## ABSTRAK

Nama : Umar Yahya  
Nim : 80100307014  
Judul Disertasi : **KETAATAN BERHAJI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ( Studi Analisis Kesenjangan Pemahaman dan Pelaksanaannya)**

---

Permasalahan pokok di dalam disertasi ini “**Mengapa terjadi kesenjangan pemahaman ketaatan berhaji dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang?**” dengan sub-sub masalah yaitu; (1) bagaimana gambaran pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang?, (2) faktor - faktor apa yang memengaruhi kesenjangan pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang?, dan (3) bagaimana strategi yang dilakukan oleh penyelenggara haji dalam meningkatkan pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang? Tulisan ini merupakan salah satu upaya penegakan antara ketaatan berhaji dengan rukun Islam lainnya agar berjalan seiring dan seimbang dalam pelaksanaannya pada masyarakat Islam, haji adalah ajaran Islam memiliki makna spritual yang mendalam juga sarat dengan dimensi sosial dan ekonomi, memang menjadi daya tarik tersendiri untuk dibahas karena merupakan fakta dan riil di tengah-tengah masyarakat Islam.

Dalam kajian disertasi ini digunakan analisis data “*Deskriptif Kualitatif*”, adalah suatu bentuk metode mengolah data dengan mengkaji dan berupaya menggali fenomena dalam masyarakat muslim secara obyektif di lapangan tentang kemauan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji bukan hanya sekali tetapi berulang kali dan faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan berhaji, serta supaya yang dilakukan pengelola haji dalam mewujudkan peningkatan pemahaman dan pelaksanaan haji serta rukun Islam lainnya. Pendekatan yang dipakai untuk membahas masalah penelitian ini menggunakan sosiologis yuridis, teologis normatif, dan pendekatan historis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, interviu, dan dokumentasi.

Di dalam penelitian ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap adanya kesenjangan pemahaman ketaatan berhaji dengan ibadah sosial lainnya, faktor yang lebih dominan melatar belakangi

adalah; a) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap ajaran haji (35%,) dan b) Keinginan kuat untuk mendapatkan gelar “haji/hajjah” setelah melaksanakan ibadah haji, yang memiliki prestise tersendiri di tengah masyarakat (76,66 %). Jika kedua faktor tersebut dianalisa, maka dapat dipahami bahwa masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang yang memahami betul tentang kewajiban melaksanakan haji baru ada 21,34 %, sedangkan yang memahami bahwa orang-orang tertentu saja yang wajib melaksanakan haji masih tinggi yakni 78,66 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap ketentuan berhaji, baik dalam hal persyaratan, ilmu manasik dan konsekuensi berhaji masih kurang. Dalam ketentuan berhaji itu disyaratkan bagi orang yang mampu untuk menuju ke derajat takwa di samping aspek kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial. Adanya pemahaman masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap kewajiban berhaji belum memahami substansi dari ajaran ibadah haji disebabkan oleh beberapa hal; a) pendidikan calon jamaah haji sebagian besar adalah tingkat sekolah dasar (46,84 %), b) sumber informasi untuk berhaji lebih besar melalui ikatan kekeluargaan (50 %) dan c) calon jamaah haji tahun 2008/2009 berdasarkan jenis pekerjaan/profesi yang terbanyak adalah profesi sebagai ibu rumah tangga ( 63,4 %).

Implikasi penelitian ini menghendaki perlu adanya peningkatan pemahaman dan implementasi rukun Islam yang kelima bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melalui ketaatan berhaji dengan rukun Islam lainnya agar tidak ada kesenjangan pada tataran pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu membangun hubungan emosional yang sinergis antara lembaga penyelenggara haji baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (KBIH).

## **ABSTRACT**

**Name : Umar Yahya**  
**Identity Number : 80100307014**  
**Consentration : Islamic Law**  
**Tittle of Dissertasion : The Hajj Obedience in Sidenreng Rappang Regency**  
**(an analytic study of the hajj discrepancy and its application)**

The major problem of this dissertation is "Why does the discrepancy of the hajj obedience understanding to the realization of hajj in Sidenreng Rappang Regency happen?" this research will concern on answering; (1) how are the hajj discrepancy understanding and hajj obedience of society in Sidenreng Rappang Regency?, (2) what are the influencing factors of the hajj discrepancy understanding and hajj obedience in Sidenreng Rappang Regency?, (3) what are the efforts of hajj organizers to improve the balance of the hajj obedience in Sidenreng Rappang Regency? this research is one of the Islamic teaching which not only has spiritual values but also has a strong relation to social and economic values. this discourse will be interesting to dwell on because that is the fact that is happening in our Islamic society.

The research uses the "qualitative descriptive" to analyze the data. this data analysis method will carryout the data by investigating the phenomena in Islamic society objectively. Related to this research, the desire of the society to perform hajj not only once but also many times and the influencing factors of hajj obedience, as well as the efforts done by the hajj organizers will be analyzed. The sociology of the juridical, normative theology, and historical approach will be used. however collecting data will be by ding observation, interview and documentation.

In this research, there are some factors which influences the Muslim society in Sidenreng rappang Regency in the term of hajj obedience discrepancy with the social worship. the dominant factors influencing the background of this research are; (a) the lac of the law awareness of the society and the obedience of hajj teaching (35 percent), and (b) the desire of the society to get the hajj title, haji or hajjah, which can be a pride in their life (76,66 percent). if the both factor are analyzes, we will understand that the Muslim society in Sidenrng Rappang Regency understanding deeply is about 21,34 percent. meanwhile those who think that only certain people can perform hajj is 78,66 percent. this fact shows us that the understanding of society about the hajj rules whether its requirements or its ritual and consequences are still law, and based on the the hajj rule is that those who are able to pursue the Taqwa personally and socially can perform hajj. the Muslim society's comprehension about the hajj obligation is far from true teaching caused by; a) the educational background of the candidate is elementary school (46,84 percent). b) the information of hajj is mostly taken from family (50 percent), and c) the candidate in



2008/2009 is based on their work background, which most of them is house wife(63,4 percent).

The result of this research is that to improve the understanding and implementation of the fifth Islamic pillar for Sidenreng Rappang's society through balancing the hajj obedience with other four Islamic pillars, in order to there is not discrepancy in the application. Therefore, it is needed to develop the emotional relation and cooperation among the hajj organizers both the state and private owned.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Alquran menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., adalah untuk seluruh umat manusia, di mana pun ia berada. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia di atas muka bumi ini, tanpa harus ada “konflik” dengan keadaan dimana manusia itu berada.

Walaupun Alquran, hadits, dan kitab-kitab *fiqh* bentuknya tertulis akan tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai undang-undang (hukum tertulis) karena hukum tertulis dalam konteks keindonesiaan adalah hukum tertulis yang dibuat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar RI. 1945. Ini berarti hukum Islam yang dimaksud oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Pasal 75 (lama) adalah hukum Islam yang tidak tertulis, akan tetapi hidup dalam masyarakat (*living law*).

Tidak adanya kepastian hukum di bidang hukum Islam yang dijalankan di Pengadilan Agama menurut Bustanul Arifin, disebabkan hukum Islam (*fiqh*) tersebar di beberapa kitab susunan *fuqah* beberapa abad silam yang tentunya syarat dengan perbedaan-perbedaan pandangan terhadap satu masalah hukum tertentu oleh para *fuq ha* tersebut, sehingga wajar apabila orang (termasuk hakim Pengadilan Agama) bertanya tentang hukum Islam yang mana harus diterapkan terhadap kasus tertentu ? Kenyataan ini, lanjut Bustanul Arifin bukanlah berarti menafikan perbedaan pendapat karena perbedaan

pendapat itu adalah rahmat, akan tetapi yang diinginkan adalah adanya hukum yang jelas dan sama bagi semua orang atau dengan kata lain harus ada kepastian hukum.<sup>1</sup>

Hukum Allah swt., telah menetapkan bahwa pelaksanaan haji merupakan kewajiban dalam ajaran Islam, dan para hakim (penguasa) diperintahkan untuk memfasilitasi warga negara untuk menunaikan kewajiban tersebut. Sebagai realisasi terhadap perintah Allah swt. sebagaimana QS. *al-Haj* (22); 27 – 28, sebagai berikut :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾  
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ  
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَابَ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya :

” ... Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.<sup>2</sup>

Memperhatikan ayat tersebut, dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan ibadah haji dalam bulan yang telah ditentukan waktunya akan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Perjalanan haji menggunakan sarana transportasi yang tersedia selaras dengan perkembangan teknologi dan jarak tempuh serta daerah asal jamaah haji seluruh dunia.

<sup>1</sup>Bustanul Arifin, *Pemahaman Hukum Islam Dalam Konteks Perundang-undangan*, Majala Mimbar Hukum, No. 108 Tahun VII, Mei. 1998, h. 14

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Edisi Baru; Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 505

Perjalanan antarnegara tentunya memerlukan perhatian serius utamanya menyangkut transportasi dan dan akomodasi.<sup>3</sup>

Ditemukan banyak *nas* yang menegaskan bahwa kewajiban ibadah setiap muslim (*mukallaf*) meliputi salat<sup>4</sup>, zakat,<sup>5</sup> puasa,<sup>6</sup> dan haji.<sup>7</sup> Kesemuanya ini disebut *ark n al-Isl m* sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَآلٌ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ<sup>8</sup>

Artinya :

'Abdullah bin Musa menceritakan kepada kami, berkata Hanzalah bin Abu Sufyan memberitaskan kepada kami, dari Ikrimah binti Khalid dari Ibn Umar r.a. berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima perkara, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah swt. dan sesungguhnya Muhammad saw. adalah utusan-Nya; mendirikan salat; menunaikan zakat, melaksanakan haji; dan berpuasa pada bulan Ramadan." (HR. Al-Bukhari)

Dari lima rukun Islam yang disebutkan dalam hadits di atas, ibadah haji dipandang sebagai rukun tertinggi dan sangat berat pelaksanaannya, karena memerlukan kemampuan material, fisik, dan mental. Hal inilah menjadikan ibadah haji tidak semua orang muslim dapat melaksanakan, bila dibandingkan dengan ibadah salat, puasa, dan zakat. Bukti

<sup>3</sup>Acmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji* ( Cet. IV Jakarta: Media Cita, 2006 ), h. 3.

<sup>4</sup>Lihat misalnya dalam QS. *al-Baqarah* (2):43, 45, 83, 110; QS. *al-Nisa* (4): 103, 162; QS. *al-M idah* (5): 12; QS. *al-An'am* (6): 72, 92, ; QS. *al-Taubah* (9): 11, 18, 71; QS. *al-Ra'ad* (13): 22 ; QS. *al-Ahz b* (33); QS. *al-Muj dilah* (58); 13.

<sup>5</sup>Lihat : QS. *al-Baqarah* (2): 43, 110; QS. *al-M idah* (5): 55; QS. *al-Taubah* (9): 11, 18, 71.

<sup>6</sup>Lihat :QS. *al-Baqarah* (2): 183, 185.

<sup>7</sup>Lihat : QS. *Ali Imran* (3): 97; QS. *al-Haj* (22): 27.

<sup>8</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mugīrah bin al-Bardizbat al-Bukh ri, *Shahih al-Bukh ri*, Jilid I (Beirut: D r al-Fikr, 1992), h. 11. Lihat juga dalam CD Rom Hadits, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman, Bab *Buniyat al-Isl m ' al Khamsah* hadits nomor 7 .

empiris menunjukkan bahwa ada orang yang mampu berhaji secara material, tetapi secara immaterial belum mampu. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang secara immaterial mampu untuk berhaji, tetapi dari segi material orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka yang tergolong dalam kategori ini tentu pada dirinya belum memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, sementara persoalan haji adalah perintah pokok bagi seorang muslim, karena merupakan salah satu rukun Islam.

Selain hadits di atas, masih ditemukan riwayat lain yang semakna serta inti kandungannya adalah memberikan perintah dan motivasi kuat kepada segenap umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Hadits-hadits tersebut menggambarkan janji Allah swt. bagi orang yang mentaatinya dengan sungguh-sungguh dan mendapat haji *mabrur*. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya, yang banyak terjadi bahwa potensi kemampuan umat Islam khususnya di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dikerahkan untuk melaksanakan ibadah haji sepertinya terbuang sia-sia, tidak menjadi energi untuk membangun dan menggerakkan kehidupan umat Islam terutama dalam menggerakkan dan memberdayakan ekonomi umat Islam.

Secara sederhana, ada beberapa hal yang mengindikasikan ke arah itu. *Pertama*, adanya keprihatinan dari sebagian umat Islam melihat kenyataan bahwa yang telah melaksanakan ibadah haji ternyata tidak mampu mengubah perilaku dan gaya hidup sebagian besar umat Islam baik secara individu maupun secara jamaah atau bermasyarakat. Sedangkan jumlah jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji dan umrah semakin bertambah. *Kedua*, dalam pelaksanaan ibadah haji, masih banyak jamaah yang berperilaku

tidak sabar dan sangat tidak tertib sehingga berakibat fatal dengan membawa kematian sampai ratusan orang, kasus seperti ini sangat ironis dan sangat memperihatinkan, *ketiga*, adanya segelintir jamaah yang tidak merasa tersentuh apapun ketika menunaikan ibadah haji, malahan merasa aneh dan mempertanyakan alasan orang meski melakukan ibadah haji.<sup>9</sup>

Penelitian ini merupakan kajian analisis atas pemahaman dan persepsi sebagian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada masyarakat Sidenreng Rappang tentang haji selama ini, baik pada konsep teoritik maupun konsep operasionalnya, serta model pelaksanaannya.

Berangkat dari pemahaman teori-teori tersebut dianalisis dengan konteks kekinian (kontemporer). Ada dua teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah; teori “perubahan hukum”, dikaitkan dengan tiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu; a) unsur struktur hukum, b) unsur substansi hukum, dan c) unsur kultur hukum<sup>10</sup>.

Kemudian teori yang kedua yakni teori “*hierarki kebutuhan*” dikemukakan oleh Maslow. Dijelaskan bahwa motivasi manusia bergantung pada pemenuhan susunan hierarki kebutuhan.<sup>11</sup> Kebutuhan-kebutuhan itu menentukan cara bagaimana orang bertindak laku

---

<sup>9</sup>Maisarah Zas, *Haji dan Pencerahan Jati diri Muslim* (Cet. I; Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. xiv - xv

<sup>10</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1995), h. 6 – 7. Lihat pula: Iskandar Usman, *Istihis n dan Pembaharuan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 103

<sup>11</sup>J. Westernan dan P. Donoghue, *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*, alih bahasa oleh Suparman, (Cet.III; Rineka Cipta, 1994), h. 127

dan memotivasi diri mereka sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebanyak bergerak ke arah yang tinggi.<sup>12</sup>

Hal ini merupakan kajian analisis untuk membangun kembali suatu konsep haji yang utuh dan komprehensif yang padat dengan berbagai konsep terkait, karena persoalan haji menyangkut beberapa faktor yang terkait dengannya, yaitu meliputi pemahaman tentang konsep dan pemilikan harta, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi.

Pada realitas kehidupan umat Islam di Sidenreng Rappang adalah komunitas umat yang menganut beragam corak paham aliran keagamaan yang terwadahi dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik sehingga menampakkan nuansa tradisi keagamaan yang beragam.

Dalam hal pelaksanaan haji terdapat kesenjangan yang sangat mencolok. Animo masyarakat muslim melaksanakan haji lebih besar ketimbang dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya misalnya zakat, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal umat Islam itu sendiri, di antaranya; pengetahuan dan pemahaman syari'at berhaji belum komprehensif serta kurangnya penerapan nilai-nilai ritual manasik haji dalam kehidupan kemasyarakatan, kepercayaan kepada lembaga penyelenggara haji yang belum profesional, kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan haji dan faktor psikologis dalam hal ini status sosial masyarakat meningkat dibandingkan masyarakat yang belum berhaji.

---

<sup>12</sup>Motivasi merupakan pemberian daya penggerak yang menciptakan kemahiran kerja seseorang dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi sebagai kehendak atau dorongan untuk melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan yang dirasakan sehingga seseorang menjadi bergairah, terarah dan tidak mudah putus asa. Lihat: S.P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya* ( Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997 ), h. 128

Bertolak dari pertimbangan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah bahwa pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupten Sidenreng Rappang diharapkan memiliki fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan berlandaskan keadilan yang telah digariskan dalam ketentuan “*nas*” normatif dan historik, baik pada konsep teoritik maupun operasionalnya, dan telah terbukti keberhasilannya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi pada masa kejayaan Islam beberapa abad yang lalu.

Kenyataan sekarang, masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim Sidenreng Rappang, haji dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah swt. (ibadah *mahd*ah), terlepas dari konteks dan tujuan yang berwawasan *mu’amalah ijtima’iyah*, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah swt. sehingga dirasakan bahwa ibadah haji hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Akibatnya, angka kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya di kalangan umat Islam Indonesia, dan khususnya pada masyarakat Islam Sidenreng Rappang masih cukup tinggi. Ibadah haji dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda, yang dipentingkan oleh Islam supaya orang kaya memberikan pertolongan kepada orang miskin, hingga dapat memenuhi hajatnya, atau memberikan bantuan guna kepentingan umum dapat merealisasikan kepentingan tersebut.<sup>13</sup>

Pada aspek ajaran ritual ibadah hajipun diharapkan memiliki nilai sosial, di antaranya dalam bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian

---

<sup>13</sup>Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa al-Syari’ah* ( Kairo: Dar al-Qalam, t.th. ), h. 120. Lihat pula: H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali MA dengan judul *Islam sebagai Aqidah dan Syari’ah* ( Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 29



berat dan luas, maka Alquran memberikan wewenang yang besar kepada negara pemerintah untuk mengelola dan mendayagunakan potensi ajaran haji itu sendiri, sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakatnya.

Begitu pula penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan pelayanan publik dan berpedoman pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan jamaah dengan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan, selain itu juga prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.<sup>14</sup> Suatu kegiatan tidak cukup dengan niat saja, namun perlu manajemen dan ditunjang sumber daya manusia (SDM) yang baik serta dengan efisiensi yang menyeluruh merupakan keharusan namun tidak menghilangkan asas kemudahan, keadilan, keselamatan dan kenyamanan.

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang pelaksanaan ibadah haji perlu dikaji secara komprehensif dan integral dalam penelitian ini, antara lain :

1. Teologis, salah satu bagian yang menjadi persyaratan utama sehingga seorang muslim dapat diakui keislamannya sempurna apabila mengakui rukun iman dan Islam, hal ini sebagai wujud dari eksistensi keberagamaan muslim, pelaksanaan ibadah haji menjadi semarak dan animo masyarakat melakukan ibadah haji sangat kuat. Padahal haji dan rukun Islam lainnya termasuk bagian dari akidah, semestinya tidak ada kesenjangan dari pelaksanaan antara kelima rukun Islam ini, yaitu sebagai implementasi rasa cinta kepada Allah swt. diiringi rasa kerendahan hati dan keikhlasan si hamba kepada-Nya bukan hawa

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI., *Pedoman Penyelesaian Dokumen Haji Tahun 2008* ( Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008 ) h. 1

nafsu.<sup>15</sup> Tetapi dalam pelaksanaannya, salat dan haji semarak, namun pelaksanaan keempat rukun Islam yang lain masih belum optimal (masih kurang). Haji adalah rukun Islam yang kelima sesudah *syah dat*, salat, zakat, dan puasa. Ibadah haji bersifat *ta'abbud*, wajib dilaksanakan jika sudah memenuhi syarat. Kenyataan menunjukkan, kurangnya SDM pengelola, regulasi yang selalu berubah-ubah menjadi penyebab utama belum optimalnya penyelenggaraan haji. Ketidakprofesionalan pengelola haji dan penerapan sistem pelaksanaannya belum sesuai undang-undang menjadi instrumen penting dalam terwujudnya pengelolaan haji yang profesional.<sup>16</sup>

Pada sisi lain, sebagian besar Umat Islam masih memetingkan *fardhu ain* daripada *fardhu kif yah*. Mereka lebih mementingkan ibadah *syahsiah*, dari pada hubungan kemasyarakatan yang merupakan juga bagian dari kesempurnaan ibadah *jam'iyah*, hal itu menunjukkan keinginan kuat mendapatkan pahala atas usahanya sendiri. Sementara ibadah *ijtimâiyah* kurang diperhatikan padahal hubungan dengan sesama manusia itu sama pentingnya dan idealnya berjalan seimbang. Ibadah *ijtimâiyah* adalah hubungan sesama manusia. Ibadah *ijtimâiyah* adalah kewajiban sosial karena dilakukan bersama masyarakat.

Pelaksanaan ibadah haji merupakan ibadah wajib perseorangan (*fardhiyah*) yang disyaratkan apabila seorang muslim memiliki kemampuan untuk melaksanakannya satu

---

<sup>15</sup> Acyadi, *Ideologi Pendidikan Islam* (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 10. Lihat pula: Labib MZ., *Rahasia Ketajaman Mata Hati* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2003), h. 56

<sup>16</sup> Acmad Nidjam dan Alatief Hanan, *op.cit.*, h. 179, lihat pula: Taufiq Kamil, *Realitas dan Tantangan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: PT. Mediacita, 2003), h. vi

kali dalam seumur hidup manusia.<sup>17</sup> Hal ini menggambarkan bahwa syariat Islam, mengharapkan umat Islam dalam penggunaan harta itu secara proporsional dan memiliki multi manfaat bagi sesama muslim.<sup>18</sup> Perhatian umat Islam lebih banyak tertuju kepada kebaikan *ukhr wi* daripada kehidupan sosial, padahal kehidupan sosial membantu sesama manusia termasuk ajaran agama.

2. Yuridis, yaitu haji diakui melalui UUD. RI. 1945 pasal 29, UU. RI. Nomor 17 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan diberlakukannya UU. RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 396 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan haji dan umrah, Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah. Untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan haji telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji.<sup>19</sup>

Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang telah diserap dalam hukum positif yang diberlakukan sebagai hukum yang mandiri. Demikian juga keberlakuan hukum Islam di Indonesia sudah dilaksanakan, tetapi pelaksanaan ibadah haji belum ditaati secara maksimal sehingga perlu teori baru untuk mengimplementasikan secara

---

<sup>17</sup>Ichtiar Baru van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), h. 459. Lihat pula: Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. 19; Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 206 - 207

<sup>18</sup>Lihat: Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), h. 3 – 4. Lihat pula: Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Ekonomi Islam* ( Cet. II; Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 3

<sup>19</sup>Departemen Agama RI., *Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), h. 2 – 3

optimal ketaatan berhaji sebagai realisasi pengamalan perintah Allah swt. dalam ajaran Islam yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim.

3. Sosiologis, yaitu jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang provinsi Sulawesi Selatan yang beragama Islam 234.117 jiwa dan animo masyarakat Islam melaksanakan ibadah haji terus bertambah dari tahun ke tahun, walaupun sudah menganut sistem pendaftaran *waiting list* (daftar tunggu dengan rasio 1/1000 umat Islam dalam menentukan *quota* haji Indonesia).<sup>20</sup> Di Kabupaten Sidenreng Rappang potensi umat Islam sebenarnya cukup besar karena 88 % dari jumlah penduduk muslim, tetapi kenyataannya warga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 208.968. jiwa dan 19.354 masih termasuk keluarga miskin.<sup>21</sup> Mereka miskin struktural karena tidak memiliki sumber penghasilan dan miskin etos kerja karena malas dan tidak bekerja optimal.<sup>22</sup> *Term* miskin juga berarti orang yang terbatas kemampuannya dan memiliki rasa aman yang relatif antara sesamanya atau orang yang kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya, seluruh manusia dengan kondisi demikian termasuk kategori miskin.<sup>23</sup>
5. Ekonomis, yaitu pendapatan PDRB (*Produk Domestik Rate Bruto*) berdasarkan lapangan: Pertanian 35,20% pertambangan 4,60%, industri pengolahan 13,32 %, listrik gas dan air

---

<sup>20</sup>Peraturan Presiden RI. Nomor 20 Tahun 2007 dan Peraturan Penjelasannya; tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 1428 H./2007 M. Lihat pula: Taufiq Kamil, *op.cit.*, h. 23

<sup>21</sup>Bappeda dan BPS Kabupaten Sidrap, *Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2009* (Sidrap; BPS Sidrap, 2009), h. 95

<sup>22</sup>Quraish Shihab, ahli tafsir kelahiran Rappang Sidrap, menjelaskan bahwa faktor penyebab utama kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, tidak mau bergerak dan berusaha. Ketidakmampuan berusaha bisa disebabkan kezaliman (rekayasa) oleh orang lain biasanya diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Lihat: Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iy Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996) h. 177

<sup>23</sup>Muhammad Syahr r, *al-Kit b wa al-Qur' n ;Qir 'ah Mu' shirah*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikir dengan judul, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Cet.I; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 75

7,68%, perdagangan restoran dan hotel/wisma 8,10 %, angkutan dan komunikasi 12,90%, keuangan dan jasa perusahaan 10.84% dan jasa-jasa 9,160 %.<sup>24</sup>

Dilihat dari aspek kemampuan ekonomi masyarakat untuk berhaji sangat signifikan, termasuk kecenderungan sosial yang ditimbulkannya, maka perlu dijaga hubungan sosial antara kaya-miskin melalui pemahaman ajaran haji yang komprehensif dan berorientasi kepada amal *j riyah* termasuk keserasian antara ajaran haji yang *fardhu* 'ain dan ibadah sosial yang *fardhu kif yah*. Pelaksanaan ibadah haji harus memenuhi ketentuan agama sehingga tujuan diperintahkan ajaran haji dapat berfungsi *taabbudiyah* dan juga sebagai ibadah sosial dapat terwujud. Data *base* tentang kemampuan berhaji yang sesuai tuntunan syari'at masih sangat lemah, hal tersebut masih memerlukan akurasi data dengan melibatkan instansi yang berkompeten misalnya BPS (Badan Pusat Statistik).

6. Historis, Umat Islam Indonesia mulai menunaikan ibadah haji dimulai sejak Islam masuk di Indonesia sekitar abad XII M. Sejak berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, perjalanan haji mulai dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dan semakin jumlahnya setelah berdirinya Kerajaan Pasai di Aceh pada tahun 1292.<sup>25</sup>

Sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia menjalani masa yang panjang, dimulai sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, masa penjajahan, masa orde lama, masa orde Baru hingga sekarang. Dari masa ke masa penyelenggaraan haji banyak mengalami dinamika yang bermuara pada persoalan teknis pelaksanaannya; yaitu peraturan yang menyangkut hubungan bilateral antara dua negara yang memiliki perbedaan sosial-budaya,

---

<sup>24</sup>Bappeda dan BPS Kabupaten Sidrap, *op.cit.*, h. 96

<sup>25</sup>Acmad Nidjam dan Hanan Alatief, *Manajemen Haji* ( Cet.II; Jakarta: Media Cipta, 2002 ), h. 30

bentuk pemerintahan dan status kenegaraan, Indonesia yang menganut sistem Republik dan Saudi Arabiyah yang berbentuk kerajaan, serta perbedaan aliran keagamaan (*mazhab*) yang dianut oleh masyarakat ke dua negara (umumnya jamaah haji Indonesia bermazhab Sy fi' sedangkan negara tujuan menganut *mazhab* Hambali).<sup>26</sup>

Pada masa penjajahan, permasalahan utamanya adalah keamanan dan terbatasnya fasilitas. Kini saat dunia telah aman dan fasilitas semakin canggi, besarnya jumlah jamaah haji terkait dengan keterbatasan kuota dan kemampuan sarana dan prasarana menjadi persoalan utama.

Periode penerimaan Islam di Sulawesi Selatan sudah sejak tahun 1603,<sup>27</sup> penyebaran Islam sudah sampai kepada pelosok daerah dengan ditandai dengan kerajaan-kerajaan kecil dan menjadikan ajaran Islam sebagai semangat etika pemerintahan. Tentunya ajaran haji menjadi salah satu instrumen resmi pemerintah dalam meningkatkan ketaatan umat Islam dan semangat keberagamaan serta ketakwaan muslim pada waktu itu.

Islamisasi memasuki wilayah Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis-Makassar telah memiliki hukum adat yang tertuang dalam *panggadereng* (Bugis) dan *pangngadakkang* (Makassar) yang selanjutnya terakulturasi oleh syariat Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 207 – 208, lihat pula: Departemen Agama RI., *Fiqh Haji* (Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), h. 5 – 7, dan Ali Fikri, *Kisah-Kisah Imam Madzhab* (Cet.I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. 180. Lihat pula: Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 80

<sup>27</sup>Acmad Nidjam dan Hanan Alatief, *op.cit.*, h.12

<sup>28</sup>Lihat: Abu Hamid dalam Andi Rasdiyanah (Ed.) *Bugis Makassar Dalam Peta Islamisasi Indonesia*, IAIN Alauddin, tth., h. 82. Lihat pula: Abu Hamid, dkk., *Siri dan Pesse, Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*, (Pustaka Refleksi, Makassar, 2003) h. 3

Dimulailah sosialisasi dan enkulturasi Islam ke dalam masyarakat Sulawesi Selatan melalui tradisi *pangngadereng/panggadakkang*.

Dalam Islam, ibadah haji dipandang sebagai ibadah yang penting. Salah satu bentuk urgensi ibadah haji adalah penegasan Nabi saw. bahwasanya haji yang *mabrur* tidak ada pahala yang pantas untuknya kecuali surga.<sup>29</sup> Khusus dalam masyarakat Indonesia, bentuk ketinggian ibadah haji diwujudkan dengan pemberian gelar penghormatan "Bapak Haji" dan hak menyandang kopiah putih. Agaknya ibadah haji jika dibandingkan dengan ibadah lainnya tidak terletak pada amalan manasiknya, melainkan juga terletak pada makna dan hikmah yang terkandung dalam manasiknya.

Jika demikian, seorang jamaah haji tidak cukup dibekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan manasik yang bersifat teknis, melainkan lebih dari itu, jamaah haji harus juga membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan menangkap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tanpa pengetahuan memahami makna dan keterampilan menangkapnya, ibadah haji terasa seperti permainan anak kecil yang melelahkan saja. Dalam kasus seperti ini, seseorang baru pada taraf melakukan manasik haji secara fisik dan belum sampai pada tataran menyempurnakan ibadah haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt.

Dalam masyarakat juga muncul gejala kalau para haji kemudian memperoleh posisi yang amat baik dalam tata pergaulan sosial, lebih-lebih dalam masyarakat pedesaan. Gengsi sosial bagi para "haji" terangkat sehingga mereka menempati strata sosial yang

---

<sup>29</sup>Lihat hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam CD Room Hadits, *Kitab al-Hajj, Bab Wujub al-Umrah wa Fadlilha*, hadits nomor 1650, teks hadits dikutip lengkap pada Bab II h. 92

setara dengan para *informal leaders* lainnya. Dalam masyarakat pedesaan para "haji" secara otomatis dianggap bagian dari elite sosial sebagai tumpuan harapan dan tempat bertanya warga masyarakat mengenai masalah keagamaan.

Simbol haji dianggap sebagai lambang moral, akibatnya seorang haji dengan serta merta menjadi tolok ukur dan kelompok acuan (*reference group*) atau teladan di masyarakat, sehingga jika ada perilaku seorang oknum "haji" yang dianggap bertentangan dengan moral baik, maka jadilah orang tersebut sebagai bahan cercaan masyarakat.

Tampaknya, ibadah haji merupakan jenis ibadah *mahdah* yang banyak memberi peluang bagi masuknya berbagai unsur budaya lokal. Bukan saja dalam artian campur tangan dalam wujud pelaksanaan manasiknya, termasuk peluang masuknya berbagai ritual dan pengaruh budaya dalam pelaksanaan ibadahnya. Berawal dari bervariasinya persepsi dan pemahaman masyarakat tentang ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah lain pun -seperti puasa- sering juga terlihat adanya penyerapan budaya lokal, tetapi tidak sebesar pada ibadah haji.

Julukan gelar "haji" menjadi kelihatannya mesti diberikan kepada orang yang telah melaksanakan ibadah haji sehingga wajarlah jika rombongan yang menunaikan ibadah haji disebut jamaah calon haji. Di tanah Haramlah jamaah haji itu mulai pertama kali dijuluki "haji". Sapaan itu setiap kali terdengar di Mekkah dan di Madinah, selama musim haji. Dalam komunikasi sosial mereka biasa dipanggil "haji". Dalam atribut, para



haji terbiasa pula mengenakan pakaian tertentu yang menandai telah menunaikan ibadah haji.<sup>30</sup>

Permasalahan seputar haji menangkap makna haji sangat tergantung kepada pemahaman, penjiwaan, dan motivasi yang dimiliki oleh seorang jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Persoalan akidah juga perlu mendapat perhatian ketika melaksanakan ibadah haji. Dalam hal motivasi melaksanakan ibadah haji, ini sangat memengaruhi pelaksanaannya, karena motivasi seseorang akan memberikan pengaruh terhadap apa yang dilakukannya.

Persepsi umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap ibadah haji amat berlebihan, padahal tidak ada dasarnya untuk memandang ibadah haji melebihi jenis ibadah lainnya. Ibadah haji sebagai urutan rukun kelima dalam Islam telah menimbulkan persepsi bahwa ibadah haji menjadi penyempurna dari segala jenis ibadah. Akibatnya seorang muslim yang telah melaksanakan ibadah haji dianggap telah sempurna keislamannya. Pandangan tentu saja bersifat kuantitatif dan belum tentu didasari dengan unsur kualitasnya.

Ketika jumlah orang yang menjadi haji secara kuantitatif amat meningkat dan orang kota telah merasa mapan dengan julukan "haji" tampaknya terjadi inflasi. Sekarang mencari warga masyarakat yang sudah berhaji tidak mengalami kesulitan. Pada segmen masyarakat tertentu, seperti kaum terpelajar maupun kelompok priyayi, kualitas haji pun bukan menjadi jaminan bagi tingginya moral. Anehnya lagi terjadi pula semacam kompromi dalam masyarakat. Masyarakat tidak lagi memandang atribut haji sebagai tolok

---

<sup>30</sup> Abu Su'ud, *Haji: Antara Syara' dan Mitos* (Cet. I; Semarang : CV. Aneka Ilmu, 2003 ), h. 56 - 57

ukur moral. Masyarakat makin permisif, haji tinggal sebuah atribut tanpa kualitas istimewa.<sup>31</sup>

Fenomena lainnya di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang adanya pandangan yang menyakini bahwa meninggal di tanah suci selagi menunaikan ibadah haji dijamin diterima ibadahnya, karenanya langsung masuk surga. Lebih dari itu, pahala haji akan lebih besar kalau dilaksanakan dengan mengalami banyak kesulitan dan rintangan. Akibatnya, banyak dari jamaah haji yang sengaja untuk berpayah-payah diri atau bersusah diri agar mendapat imbalan yang sebesar-besarnya. Sikap masyarakat memahami bahwa imbalan sebuah amal sangat tergantung pada tingkat kesulitan yang dialaminya.

Sebagian jamaah haji sudah semacam teken kontrak untuk mati dalam perjalanan ibadah haji. Belum lagi jika para kiai dan ulama yang menjadi pembimbing haji senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan akan *afdal*nya bisa mati di Tanah Haram. Oleh karena itu, calon haji sudah berharap-harap untuk bisa mati menjalankan ibadah haji. Lebih-lebih kalau sedang dalam keadaan *ihrām*, yaitu mengenakan pakaian serba putih, yang cuma dua lembar kain polos bagi jamaah laki-laki. Motivasi untuk mati di Tanah Haram makin kuat. Itulah haji *mabrūr*, tiada pahala yang lebih tepat melainkan kehidupan surgawi. Begitulah yang dikutip dari sebuah hadits.

Faktor-faktor tersebut memberikan kesan bahwa penanganan pembinaan dan bimbingan para calon jamaah haji serta pengelolaan haji di Sidenreng Rappang belum maksimal sehingga dalam penelitian ini dianggap perlu untuk dibahas lebih lanjut dan komprehensif, sehingga dapat terwujud pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 60

Sidenreng Rappang yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam sehingga pelaksanaan haji dan rukun Islam lainnya di Sidenreng Rappang dapat terwujud.

Upaya penyempurnaan ibadah haji di Indonesia harus dilakukan secara bertahap. Untuk itu, awal pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mencoba menyempurnakan bidang-bidang yang banyak menjadi sorotan dari masyarakat tersebut. Berkenaan dengan adanya keinginan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 RI. Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi berdampak terhadap penyelenggaraan haji, yang semula penekanannya pada masalah ibadah, berkembang kepada masalah-masalah lainnya; bisnis, sosial, budaya, bahkan politik.

Terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji mempunyai nilai historis yang tinggi. Lahirnya Undang-undang tersebut pada hakekatnya merupakan buah perjuangan bangsa, khususnya umat Islam untuk memiliki suatu peraturan bersama (*social contract*) yang bersifat permanen sistem sebagai landasan dan pijakan pemerintah bersama masyarakat untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan, di samping pembinaan bagi setiap warga negara yang melaksanakan ibadah haji dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji lebih jelas arah dan tujuannya sejak lahirnya Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008. Dalam undang-undang ini menjadi pijakan *policy* nasional penyelenggaraan haji dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen

penyelenggaraan haji yang baik, agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai tuntutan agama, serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga menjadi haji *mabrur*.

Aspek positif lainnya dari Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji menepis *image* bahwa pemerintah tetap monopoli penyelenggaraan ibadah haji.

Manajemen penyelenggaraan haji secara terus menerus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan di lapangan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang menghendaki pengelolaan yang lebih baik. Sehingga manajemen haji dapat mendukung sistem penyelenggaraan haji antara lain melalui penetapan prosedur kerja dan standar pelayanan yang berlaku secara universal.

Pemerintah diharapkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Lembaga Sosial Keagamaan dan Ormas-ormas Islam untuk ikut memberikan bimbingan terhadap calon jamaah haji melalui organisasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). KBIH yang melaksanakan bimbingan kepada calon jamaah haji harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama, yaitu melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setelah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.

Untuk saat ini, pemerintah tetap menaruh perhatian untuk melakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan amanat undang-undang dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa

setiap tahun selalu muncul permasalahan, tetapi itu sifatnya operasional dan yang tentunya masih memungkinkan diselesaikan di lapangan.

Langkah-langkah penyempurnaan terus dilakukan oleh pengelola haji dari penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun. Secara bertahap dan berkesinambungan pada prinsipnya terus dilakukan, yang berorientasi kepada profesionalitas, transparan, akuntabel dan semakin melibatkan peran masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam disertasi ini adalah **“Mengapa terjadi kesenjangan antara pemahaman dan ketaatan berhaji serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang”**. Untuk mempermudah pembahasan tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sub masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Faktor - faktor apa yang memengaruhi kesenjangan pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh penyelenggara haji dalam meningkatkan pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang ?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

Desertasi ini berjudul : *Ketaatan Berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang ( Studi Analisis Kesenjangan Pemahaman dan Pelaksanaannya )*

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan, maka penulis mengemukakan pengertian dari beberapa variabel dan maksud yang tersirat dalam judul tersebut di atas. Dipandang perlu untuk diuraikan beberapa pengertian dari beberapa variabel yang difokuskan dalam pembahasan penelitian ini. Beberapa variabel dimaksudkan untuk kesamaan persepsi dalam mengetahui dan memahami landasan pokok serta mengembangkan dan menginterpretasikan pembahasan selanjutnya.

Demikian juga ketika berhubungan dengan kesenjangan antara pemahaman dan ketaatan berhaji dengan rukun Islam lainnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan itu serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan penyelenggaraan haji di Sidenreng Rappang sehingga memberikan manfaat lebih luas pada masyarakat Sidenreng Rappang.

Adapun pengertian dari beberapa variabel dari judul di atas yang penulis maksudkan adalah :

#### 1. Pemahaman dan Ketaatan berhaji

Upaya penerapan dan penegakan ketaatan berhaji serta rukun Islam lainnya berjalan seiring dan seimbang dalam pemahaman dan pelaksanaannya pada masyarakat Islam, haji adalah ajaran Islam memiliki makna spritual yang mendalam di samping juga sarat dengan dimensi sosial dan ekonomi, memang menjadi daya tarik tersendiri untuk dibahas karena merupakan fakta dan riil di tengah-tengah masyarakat Islam.

Kata pemahaman yang dimaksud dalam disertasi adalah “*fiqh*”. *Fiqh* merupakan bentuk *masdar* (*gerund*) dari *tasrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.<sup>32</sup> Yang dimaksud dari dalil-dalil yang terperinci, bahwa setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu *fiqh* masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Ketaatan berhaji dalam disertasi ini adalah pengetahuan tata cara beribadah kepada Allah swt. khususnya haji harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad saw. sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran, di samping berfungsi sebagai *bay'an* terhadap Alquran, juga berfungsi sebagai sumber motivasi bagi setiap muslim dalam menjalankan segala aktifitasnya, terutama yang terkait langsung dengan masalah ibadah.

Ibadah haji adalah ibadah yang khas, memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah haji mengandung nilai pendidikan dan pembelajaran untuk mengarungi hidup di dunia. Allah swt. serta memberi isyarat yang kebanyakan berupa simbol-simbol yang tersimpan dalam rukun-rukun haji, wajib haji, sunah haji, dan bahkan juga dari larangan atau yang diharamkan dalam ibadah haji.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* ( Jakarta: PT. Gelora Aksara Pertama, 2008 ), h. 2. Lihat pula: Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi* ( Makassar: Yayasan al-Ahkam Makassar, 2003 ), h. 14

<sup>33</sup>Maisarah Zas, *Haji dan Pencerahan Jati diri Muslim* (Cet. I; Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. iii - iv

Kata berhaji, yang dimulai dengan afiks “ber” adalah berkunjung ke Ka’bah untuk menunaikan ibadah haji.<sup>34</sup> Kata haji tersebut asal maknanya adalah menyengaja, dan dalam berbagai buku *fiqh* dikatakan bahwa haji adalah menyengaja mengunjungi Ka’bah untuk melakukan amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’.<sup>35</sup>

Dalam bahasa Arab ibadah haji disebut “*hajj*” atau “*hijj*” yang secara bahasa berarti “*al-qasdu il*” yang berarti menuju atau mengunjungi sesuatu (biasanya digunakan untuk mengunjungi sesuatu yang dihormati).<sup>36</sup> Jadi, berhaji yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkunjung ke Ka’bah dan melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukun haji dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah swt.

Telaah hukum Islam ketaatan berhaji tidak dapat dibedakan pelaksanaannya dengan rukun Islam lainnya, karena memiliki dimensi ‘*ubudiyah* dan *ijtim’iyah* serta bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan pada kondisi seorang *mukallaf* wajib melaksanakannya dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan syar’. Ajaran Islam adalah suatu sistem nilai terpadu, meliputi aspek akidah yang intinya tauhid, aspek syari’at yang intinya *al-‘adlah/keseimbangan*, keharmonisan, dan aspek akhlak yang intinya

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 381

<sup>35</sup>Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husayniy al-Dimisqy, *Kif yah al-Akhy r fi Halli Ghay t al-Ikhtishar*, Juz I, ( Bandung: Syirkah al-Ma’arif li al-thaba’ wa al-Nasyr, t.th.), 218. Pengertian haji serupa dengan dalil-dalil yang berkenaan dengannya dapat dilihat dalam Nabilah Lubis, *Menyingkap Rahasia Ibadah Haji*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31

<sup>36</sup>Abi Husain Ahmad bin Faris Zakariyya, *Mu’jam Maq yis al-Lugah*, Juz II (Beirut: D r al-Fikr, 1979), h. 29 .



*al-ihsan*/kebajikan, peradaban yang merupakan pedoman dan tuntunan bagi segenap umat manusia untuk dijewantahkan dalam kehidupan individual dan sosial.<sup>37</sup>

Penulis juga berusaha mengungkapkan upaya-upaya strategis yang dilakukan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan lembaga pelayanan haji lainnya, seperti Kelompok Bimbingan Jamaah Haji (KBIH) dalam rangka memfasilitasi agar ajaran haji dan rukun Islam lainnya dilaksanakan secara seimbang oleh umat Islam di Sidenreng Rappang dengan penyempurnaan manajemen pengelolaannya. Penerapan manajemen haji yang selalu disempurnakan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang selaku institusi pemerintah yang diberi kepercayaan oleh Undang-undang untuk mengelola haji, berusaha memberikan fasilitas berupa pembinaan, pelayanan dan perlindungan serta berkewajiban menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi kendala-kendala penyebab utama sehingga ajaran ini dapat dikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Kata studi berasal dari bahasa Inggris "*study*" yang berarti penyelidikan, mengadakan mengenal keadaan sesuatu.<sup>38</sup> Studi juga diartikan penelitian ilmiah dan telaahan.<sup>39</sup>

Pembahasan difokuskan pada ketaatan berhaji di Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang memengaruhinya sehingga terjadi kesenjangan pelaksanaannya. Penulis berusaha menemukan penyebab utama sehingga animo masyarakat di Sidenreng Rappang

---

<sup>37</sup>Lihat: Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad; Antara Teks, Realitas dan Kemashlahatan Sosial* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2002), h. 14. Lihat pula: Muhammad Syahr r, *op.cit.*,h. 78

<sup>38</sup>Jhon M. Wachols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Cet. 19; Jakarta: Gramedia, 1990), h. 563

<sup>39</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 860

dalam pelaksanaan haji dan rukun Islam lainnya tidak seimbang dan berupaya mencari solusi agar haji dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama agar tujuan hukum Islam dapat terwujud.

Adapun Faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain; a) kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap ajaran haji, disebabkan adanya pemahaman masyarakat terhadap ajaran haji belum komprehensif, b) pelaksanaan manasik yang belum efektif dalam meningkatkan pemahaman calon haji, c) pengelolaan haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang yang belum optimal ditandai SDM pengelolanya masih rendah, dan d) tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran haji baik bagi lembaga pelayanan haji maupun individu pelaksananya, yang dapat memberikan efek jera dan menyebabkan timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap ajaran haji, serta e) keinginan kuat masyarakat mendapatkan gelar haji setelah melaksanakan ibadah haji.

### 3. Upaya Mewujudkan Peningkatan Pemahaman dan Ketaatan Berhaji

Peningkatan pemahaman ketaatan berhaji melalui pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap calon haji diupayakan antara lain melalui penyempurnaan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Penyempurnaan sistem dan manajemen tersebut dimaksudkan agar calon haji lebih siap mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai tuntutan agama sehingga diperoleh haji *mabr r*.

Sararan strategis penyelenggaraan haji adalah tercapainya tingkat kepuasan jamaah haji dalam beribadah dan berbagai pelayanan serta pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat, yang ditandai dengan antara lain; a) terwujudnya jamaah haji yang mandiri, b) terwujudnya petugas profesional dan

dedikatif, c) terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji, d) terwujudnya sistem informasi yang handal, e) terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji, f) tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai, dan g) meningkatnya pengelolaan dana haji.

Manajemen haji secara sederhana dapat dipahami dalam arti mengatur, mengurus, memelihara, merawat, menumbuhkan, dan mengembangkan, serta membimbing dan memimpin agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud serta berdaya dan berhasil guna.

Dalam pengelolaan haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, manajemen yang baik, teratur, dan terbuka merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan haji. Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI. 1945, hal ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen haji penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji *mabr r.*<sup>40</sup>

Upaya peningkatan pemahaman ketaatan berhaji sebagaimana dirumuskan dalam kebijaksanaan teknis penyelenggaraan ibadah haji, yaitu kegiatan bimbingan ibadah haji

---

<sup>40</sup>Departemen Agama RI., *Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Haji* ( Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002 ), h. 6

secara intensif kepada calon haji sejak mendaftar, selama di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan pemahaman ketaatan berhaji dengan rukun Islam lainnya seharusnya dikelola dengan manajemen yang sempurna. Pengelolaannya juga mengacu kepada fungsi manajemen yang biasa disebut POAC, yaitu : *Planning, organizing, actuating* dan *controlling*.<sup>41</sup>

a. *Planning* (perencanaan)

Yaitu mempelajari dan meramalkan masa depan yang menyangkut pelaksanaan haji mengenai beberapa hal yaitu :

- 1) Kegiatan atau aktifitas haji harus disenangi masyarakat pada umumnya (khususnya aktifitas pada kegiatan pengelolaan haji pada aspek; pembinaan, pelayanan, dan perlindungan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2) Sasaran atau tujuan dari aktifitas haji tersebut harus jelas.
- 3) Fasilitas pengelolaan haji yang perlu dipenuhi dan memadai.
- 4) Membuat kebijaksanaan termasuk peraturan atau tata tertib yang akan diberlakukan.
- 5) Memperhitungkan waktu dan cara untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Yaitu menentukan tempat beserta para pelaksananya yang diatur dalam kerangka struktur sekaligus pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kerangka struktur organisasi dalam pengelola haji di Sidenreng Rappang, berorientasi

---

<sup>41</sup>Lihat, Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 4

kepada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, maka perlu diperhatikan potensi orang-orang yang terkait. Dalam hal ini pengelolaan dan pembinaan haji adalah lembaga haji, seperti Kementerian Agama Kabupaten/kota, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kabupaten dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) kabupaten.

c. *Actuiring* (Pelaksanaan)

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Penyelenggaraan haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembiayaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji.

Pembinaan yang dilakukan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jamaah haji, serta pelayanan kesehatan berupa; pemeriksaan kesehatan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah termasuk perlindungan yang diberikan oleh penyelenggara haji baik pada waktu pemberangkatan maupun pada saat pemulangan ke tempat asal jamaah.

Jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara haji. Penyelenggaraan haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.<sup>42</sup>

Penyelenggara haji berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan dan administrasi yang akurat dan memiliki prosedur yang tetap, bimbingan ibadah yang mudah dipahami dan dipraktikkan, akomodasi

---

<sup>42</sup>Undang-Undang RI., Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Bab II Pasal 2

yang memenuhi unsur kesehatan, transportasi yang nyaman dan terjangkau, pelayanan kesehatan yang memadai, keamanan yang optimal termasuk hal-hal yang dibutuhkan oleh jamaah haji dalam memperlancar pelaksanaan ibadah hajinya.

d. *Controlling* ( Pengawasan )

KPIH ( Komisi Pengawas Haji Indonesia) dibentuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan haji dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Ibadah haji di Indonesia. KPIH ini, dalam hal pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. KPIH bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

Keberadaan KPIH memiliki beberapa fungsi antara lain:

- 1) Memantau dan menganalisis kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia .
- 2) Menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawasan dan masyarakat.
- 3) Menerima masukan dan saran masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah haji .
- 4) Merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji.<sup>43</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPIH yang salah satu anggotanya dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI., bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

Presiden dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi Kementerian ini adalah melakukan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam tentang pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha sesuai peraturan perundang-perundangan.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai institusi pemerintah yang berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat Islam untuk melaksanakan ajaran haji merupakan salah satu pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Sidenreng Rappang dan Sulawesi Selatan pada umumnya dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dan terus menerus berupaya melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan haji agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>44</sup>Departemen Agama RI., *Struktur Departemen Agama RI.* (Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI., 2005 ), h. 98

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian terhadap eksistensi haji dan rukun Islam lainnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik penelitian itu sifatnya pribadi ataupun tugas bentuk makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Walaupun demikian perhatian para peneliti terhadap haji dan rukun Islam lainnya belumlah banyak dilakukan. Hasil-hasil penelitiannya juga disebarkan baik berupa buku, majalah, dan makalah. Namun, masih banyak rahasia haji dan rukun Islam lainnya yang belum terungkap oleh para peneliti.

Sebagian dari yang diungkapkan itu adalah bagian-bagian yang memang amat sulit diungkapkan seperti penelitian yang dilakukan oleh Acmad Nidjam dan Alatief Hanan tahun 2002 yang berjudul *Manajemen Haji*, dengan hasil bahwa haji adalah perjalanan ritual yang sangat istimewa, di dalamnya penuh dengan makna hakiki peribadatan, perpaduan antara ibadah batiniah dengan ibadah jasmaniah yang sarat makna. Gerakan-gerakan ritualnya menyiratkan keindahan dimensi spritual yang kadang-kadang sulit ditangkap oleh naluri manusia, namun juga penuh dengan keteladanan yang tidak akan lekang oleh zaman. Juga dipaparkan aspek-aspek teknis pelaksanaan ibadah haji berbagai aspek manajerial penyelenggaraan haji yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Dalam hal penelitian kondisi sosial tentang pelaksanaan haji, juga telah dilakukan penelitian oleh M. Amin Akkas, yang sudah dicetak dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh Media Cita Jakarta tahun 2005 dengan judul, *Haji dan Reproduksi Sosial; Strategi untuk memperoleh Pengakuan Sosial pada Masyarakat Kota Pinggiran*. Hasil penelitiannya telah mengemukakan strategi orang perkampungan di pinggiran kota Jakarta untuk memperoleh pengakuan sosial. Haji dilihat sebagai struktur wilayah simbolis yang



ditandai oleh serangkaian praktik-praktik yang terbangun melalui gaya hidup (*life style*). Juga disebutkan bahwa orang-orang perkampungan di pinggiran Kota Jakarta telah menyandang 'Haji' berarti telah memiliki semacam modal simbolik yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi status kelas sosial yang melingkupinya. Terutama ketika kapital ekonomi yang dimiliki tidak mempunyai pengaruh kuat dalam interaksi sosial akibat modernisasi, kemudian terkonversi kepada kapital simbol 'haji' menjadi suatu kehormatan.

Pada bagian lain, penelitian tentang haji dilakukan oleh Yusuf Abdullah dengan judul penelitiannya, *Naik Haji Apa Susahnya*, mengutarakan dalam bukunya bahwa terdapat beberapa faktor penghambat seseorang untuk pergi haji. *Pertama*, adalah masalah kecukupan harta, *kedua* masalah ketidaksiapan kualitas diri untuk berkunjung ke Baitullah, selain itu, faktor lain yang membuat seorang enggan tidak memiliki keinginan untuk berhaji adalah karena minimnya ilmu dan pengetahuan. Juga dibahas bahwa setiap muslim menyadari bahwa haji itu hukumnya wajib bahkan rukun.

Dalam hal ini juga pernah disinggung oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dalam buku *Dinamika Perhajian*, yang diharapkan menjadi salah satu buku rujukan dalam penyelenggaraan Haji di seluruh Indonesia. Buku tersebut menggambarkan bahwa ibadah haji di luar aspek manasiknya selalu mengalami berbagai perubahan disebabkan perubahan kebudayaan manusia senada dengan perubahan pola pikir yang dieksploitasi kepada penggunaan teknologi di berbagai bidang. Sehingga desakan untuk merubah aspek kebutuhan akan terpengaruhi dengan perubahan tersebut. Manusia cenderung untuk memilih, membandingkan sehingga menciptakan kondisi korektif, kritik baik yang sifatnya membangun secara komprehensif maupun kepentingan yang parsial.

Faktor inilah yang menyebabkan pemerintah dalam hal Kementerian Agama terus mencari teknik, bahkan metode yang *profitable* untuk manajemen penyelenggaraan ibadah semakin baik dan optimal.

Penelitian mengenai hubungan ibadah *fardhiyah* dan ibadah sosial juga disinggung oleh Abdu Rahman Qadir yang meneliti pengaruh ibadah *fardhiyah* dari sudut dimensi *mahdah* dan sosial, akan tetapi secara makro tentang analisis pemahaman ketaatan berhaji dengan ditinjau dari telaah aspek kesenjangan pelaksanaannya dan upaya mewujudkan peningkatan pemahamannya di Sulawesi Selatan masih jarang bahkan belum pernah ada yang sempat menelitinya.

Pada bagian ini, penulis menampilkan beberapa literatur yang memiliki korelasi dengan pokok bahasan penelitian. Penulis menganggap telah terbit beberapa literatur ilmiah yang bersifat teoritis. Dalam hal ini, penulis menelusuri bacaan berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan pokok disertasi ini. Uraian tentang hukum haji dan rukun Islam lainnya di Indonesia dan perkembangannya terutama dalam hal kasus-kasus atau pelanggaran tentang pengelolaan haji baik dari aspek SDM pengelola maupun dari aspek undang-undang masih menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan hukum Islam serta dampaknya terhadap masyarakat telah banyak disinggung oleh berbagai pakar, lokakarya, serta surat kabar, majalah maupun melalui buku-buku yang dijadikan standar dalam menganalisis masalah, antara lain :

Ketidakseragaman hukum Islam di bidang haji, zakat, wakaf, perkawinan, kewarisan, serta lainnya yang tersebar di luar hukum tertulis telah disadari sehingga muncul gagasan-gagasan yang menghendaki agar kejelasan, kesamaan kepastian hukum di bidang-

bidang hukum Islam tersebut terwujud. Gagasan tersebut seperti dilontarkan oleh Bustanul Arifin bahwa :

1. Untuk dapat berlakunya Hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal; *pertama*, ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*Manzalahu*); *kedua*, tidak mendapat kejelasan cara menjalankan syari'ah itu (*Tanfi'iyah*); *ketiga*, akibat kepanjangannya adalah mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga Negara, Hukum Islam diperlukan sebagai perundang-undangan negara, yaitu :
  - a) Di India masa raja An-Rijeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan nama fatwa Almfiri.
  - b) Di Kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majalah al-Ahkam al-Adliyah.
  - c) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.<sup>45</sup>

Hasil upaya yang mengkompilasi Hukum Islam tersebut merupakan salah satu usaha yang sangat positif dalam pembinaan Hukum Islam sebagai salah satu sumber

---

<sup>45</sup>Bustanul Arifin, *op.cit.*, h.15 Lihat pula: Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* ( Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004 ), h. 246 – 247

pembentukan hukum nasional yang akan berfungsi sebagai pegangan dan pedoman bagi hakim-hakim pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memvonis setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain hal tersebut, dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, maka kejelasan, kesamaan, dan kepastian hukum di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan semakin mendekati keberhasilan.

Walaupun kompilasi hukum Islam tersebut telah dilakukan sebagai pedoman atau pegangan bagi hakim-hakim pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di bidang zakat, perkawinan, pewarisan, dan perwakafan melalui Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, bahkan telah disosialisasikan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam, bukanlah berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut luput dari berbagai kekurangan dan kelemahan utamanya menengani substansi (materi), status hukumnya, sanksinya apabila terjadi pelanggaran terhadapnya, diregulasi pemerintah, kesadaran masyarakat, dan bahkan di bidang penerapannya.

Dalam buku yang disusun oleh Anusy Syarif Qasim dengan *Agama sebagai Pegangan Hidup*, membahas antara lain bahwa agama merupakan suatu pedoman yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan serta dapat menuntun umat manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, maka ajaran ketaatan beribadah dan substansi perintah berhaji salah satu aspek yang dikandung nilai-nilai tersebut.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang pemahaman ketaatan berhaji dan analisis kesenjangan pemahaman pelaksanaannya serta strategi pengelola haji mewujudkan peningkatan pemahaman dan ketaatannya yang sesuai dengan Alquran dan sunnah Nabi saw. sebagaimana pemahaman dan ketaatan rukun Islam lainnya di Sidenreng Rappang.

Lebih jauh akan dikemukakan pula kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pemahaman dan ketaatan berhaji pada lokasi yang maksud, sehingga dapat diperoleh informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dan strategi peningkatan pemahaman dan ketaatan berhaji di Sidenreng Rappang. Studi pada beberapa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada di Sidenreng Rappang, Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) termasuk ormas Islam yang dijadikan sampel dalam penelitian ini akan memperkuat informasi dalam penelitian ini.

Di samping itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis aspek-aspek manajemen haji secara konseptual dengan fokus pada manajemen haji secara empirik dalam rangka mencari solusi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan umat Islam terutama kepada umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji lewat lembaga resmi yang mampu menjamin kepercayaan umat Islam yang dikelola secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan penyelenggaraan haji dan

pengelolaannya yang ada di Sidenreng Rappang maupun keunggulan-keunggulan dan kelemahan sistem operasional pengelolaan haji di Sidenreng Rappang.

Tulisan ini diharapkan pula menjadi perbendaharaan pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas .

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah (Bupati Sidenreng Rappang), tokoh masyarakat, ulama, serta pelaku bisnis, untuk mengambil kebijakan pengembangan berkelanjutan melalui upaya sosialisasi penyempurnaan sistem perhajian dan pengelolaannya di Sidenreng Rappang terutama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, Kepala KUA Kecamatan yang memiliki tanggung jawab dan bertugas untuk melayani, membina, dan melakukan perlidungan hukum kepada calon jamaah haji baik sebelum melaksanakan haji maupun pembinaan pasca haji, kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) serta ormas lainnya.

Sebagai lembaga pelayanan dan pembinaan keagamaan yang berkewajiban melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan agama, seyogyanya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan pelayanan dan bimbingan agar umat beragama dapat melaksanakan ajaran agama yang dianutnya secara berkesinambungan dan memberdayakan potensi umat Islam dalam mengatasi berbagai gejala negatif yang mungkin timbul sebagai dampak krisis moral yang terjadi di masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya,

termasuk membina ormas Islam yang bergerak pada bidang pendidikan (*tarbiyah*), sosial (*ijtim 'iyah*) dan syiar Islam (*al-dakwah al-isl miyah*) di Kabupaten Sidenreng Rappang.<sup>46</sup>

Secara praktis diharapkan penelitian ini memiliki implikasi secara langsung dengan memperoleh informasi dan pengetahuan baru tentang strategi penyelenggaraan haji dan pengelolaannya dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada umat Islam dari perspektif manajemen.

Mengingat haji sebagai rukun Islam yang wajib ditunaikan setiap muslim yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berkewajiban melaksanakannya. Di samping itu, harta yang dimiliki oleh masyarakat muslim merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum, agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat di Sidenreng Rappang, perlu adanya pengelolaan secara profesional dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatannya.

## **F. Garis-garis Besar Isi**

Secara garis besar isi hasil penelitian ini didesain secara sistematis, pada bagian ini pula dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran umum kepada para pembaca tentang isi disertasi.

Untuk mempermudah pembahasan, penelitian ini akan dipilah menjadi beberapa bab. Setelah *bab pertama*, pendahuluan yang memuat tentang keseluruhan strategi penelitian akan dilanjutkan dengan *bab kedua*, yakni *bab kedua* berisi tentang konsep

---

<sup>46</sup>Lihat: Tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, Renstra tahun 2010 – 2014, h. 6

pemahaman dan ketaatan berhaji. Bab ini membahas dasar-dasar pelaksanaan ibadah haji, penyelenggaraan haji di Indonesia dan tujuan pelaksanaannya, prinsip dasar pengelolaan haji, dan tujuan pelaksanaan haji menurut hukum Islam.

Hal ini menjadi penting karena ditemukan beberapa faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan berhaji pada obyek penelitian. Sebab salah satu tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) berperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan jamaah haji. Kemudian sub bab terakhir dibahas pembinaan pasca haji dan pendanaannya dalam meningkatkan pemahaman ajaran syari'at Islam. Pada bab ini juga diuraikan kerangka konseptual (*conceptual frame work*) yang menjadi acuan dalam penyelesaian pembahasan disertasi ini.

Dalam *bab ketiga* akan dibahas metodologi penelitian yang menguraikan tentang; Lokasi dan jenis penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang, difokuskan sebagai obyek penelitian adalah umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang, proses penyelenggaraan haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki 11(sebelas) Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan lembaga-lembaga Islam yang membina jamaah haji yang ada di Sidenreng Rappang serta metode *kualitatif* yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab ini juga berisi tentang gambaran pada praktik-praktik sosial orang haji secara individu dan kelompok. Dijelaskan pula pada bab ini, metode pendekatan yang digunakan adalah multidisipliner dan interdisipliner yang relevan dalam pembahasan tentang



pemahaman ketaatan berhaji dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan di *bab empat* akan dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah keberadaan pengelolaan, prinsip dan mekanisme operasional haji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada bab ini pula dijelaskan beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan pemahaman ketaatan berhaji dan upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh pengelola haji dalam meningkatkan pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Terakhir dalam bab ini akan dibahas studi analisis kesenjangan pemahaman ketaatan berhaji dan faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

*Bab lima* merupakan bab penutup dari rangkaian pembahasan penelitian ini. Bab tersebut berisi kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini menjelaskan masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih berminat menunaikan ibadah haji karena dipahami sebagai kepatuhan terhadap kewajiban umat Islam terhadap perintah Allah swt. sebagai penyempurnaan dari keislamannya.

Bab ini pula menjelaskan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang setelah melaksanakan ibadah haji memiliki prestise tersendiri di tengah masyarakat. Terakhir pada bab ini dibahas implikasi hasil penelitian yang menjelaskan ketaatan berhaji itu sangat berpengaruh dalam penegakan hukum Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal tersebut membenarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa faktor pemahaman tentang kesadaran hukum masyarakat memberikan pengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan hukum. Kalau ditelaah hasil penelitian ini menganulir teori Abraham Maslow.

Berdasarkan hasil penelitian dari pemahaman ketaatan berhaji masyarakat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan indikator bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis (*physiologis needs*) tidak menjadi halangan seorang muslim dalam menyempurnakan rukun Islam kelima.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS PEMAHAMAN KETAATAN BERHAJI DAN PENGELOLAAN HAJI

#### A. Relevansi dengan Penelitian sebelumnya

Terdapat beberapa tulisan tentang haji orang-orang Indonesia yang telah sejak masa "kolonial" antara lain Snouck Hurgronje '*Mekka*' ( 1931) intinya mengungkapkan tentang posisi khusus orang-orang Nusantara asal Pulau Jawa yang berdomisili di Mekkah yang disebut "Koloni Jawa".<sup>1</sup> Tulisan lainnya tentang *pengaruh orang-orang yang telah pulang dari haji* juga diuraikan panjang lebar dalam "politik haji" Pemerintah Hindia Belanda" dan *Gerakan Ibadah Haji di Hindia Belanda*" yang semula dimuat dalam *Onze Eeuw* (Hurgronje, 1909) dan dalam *Revue du Monde Musulman*, (Hurgronje, 1911).

Tulisan mengenai perhajian setelah masa kemerdekaan juga sangat banyak antara lain kumpulan tulisan Jacob Vredenburg tentang "*ibadah Haji, Beberapa Ciri dan fungsinya di Indonesia*".<sup>2</sup> Pada akhir tulisan tersebut, menguraikan tentang fungsi ibadah haji sebagai ritus perjalanan kehidupan yang mengikuti *model rite de passage* dari van Gennep.<sup>3</sup> Sumbangan lainnya adalah Bruinessen yang lebih terfokus pada fungsi religius, fungsi sosial dan politik dari ibadah haji dan melukiskan perubahan-perubahan yang terjadi selama abad-abad terakhir dari fungsi-fungsi itu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>C.Snouck Hurgronje, *Ace Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jilid I dan II, terj. dari 'De Atjeher' ( Jakarta: INIS, 1996), h. 156.

<sup>2</sup>Lihat: J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), h.79.

<sup>3</sup>Lihat: Dick Dowes dan Nico Kaptein (Ed.), *Indonesia dan Haji*, terj. ( Jakarta: INIS, 1997), h. 12.

<sup>4</sup>Lihat: Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* terj. ( Bandung: Mizan, 1999 ), h. 98.

Dari beberapa analisis tentang strategi perjalanan orang-orang haji masa lalu, terlihat sangat kuat menggunakan pendekatan ideologis, yang saat itu memang sarat dengan nuansa politis. Perhatikan, misalnya, lahirnya ‘politik etis’ dari pemerintahan Hindia Belanda yang direkomendasikan oleh C. Snouck Hugronje (1895). Hal ini juga terlihat dari penulis setelah masa kemerdekaan Indonesia sebagai awal-awal Orde Baru, antara lain Harry J. Benda, melihat *peranan haji dalam proses politik di Indonesia*.<sup>5</sup> Delia Noor (1980) lebih fokus pada fungsi haji dalam proses mobilisasi masyarakat lokal,<sup>6</sup> demikian juga Sartono Kartodirdjo (1984) dalam “*Pemberontakan Petani Banten Tahun 1888, Suatu Gerakan Sosial di Indonesia*”.<sup>7</sup>

Dari beberapa komentar tersebut, memperlihatkan adanya cara pandang yang bersifat hirarkis dalam memahami tindakan-tindakan orang-orang haji. Para penulis umumnya lebih memfokuskan diri untuk menelaah pengaruhnya setelah menjadi haji status sosial yang diemban oleh para haji setelah kembali dari Mekkah sehingga uraian tersebut, justru memungkinkan terjadinya proses reduksionis terhadap fenomena kultural perjuangan orang-orang haji dan realitas sosial yang melingkarinya yang memungkinkan untuk memperoleh pengakuan.

Terlihat adanya proses parsialisasi, fenomena haji yang direkonstruksi menjadi terpisah dengan konteks sosial mereka yang selalu berada dalam proses perubahan. Haji pun seakan-akan hanya menjadi simbol masyarakat lokal berkaitan dengan kedudukan dan

---

<sup>5</sup>Lihat: Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Pendudukan Jepang*, terj. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980 ), h. 94.

<sup>6</sup>Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900 – 1942* ( Jakarta: LP3ES, 1980 ), h. 120.

<sup>7</sup>Lihat: Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888, Studi Kasus Gerakan Sosial di Indonesia* ( Jakarta: Pustaka jaya, 1984 ), h. 223.

pengaruhnya di pedesaan secara politis (Mobilisasi massa untuk perlawanan kekuatan politik). Haji yang direkonstruksi demikian, seakan-akan berdiri sendiri, parsial dan sangat hirarkis, superfisial, dan kurang memiliki keterkaitan (*ceherence*) dengan konteks sosial lainnya, terbatas pada pandangan *unity structuring*.

Pendekatan tersebut menjadi kurang relevan jika digunakan dalam menganalisis tindakan orang-orang haji dalam masyarakat Indonesia kontemporer yang lebih memperlihatkan dinamika dan perubahan, bahkan lebih memiliki faktor temporal, individual, dan memiliki keragaman kategori. Karenanya, fenomena haji hendaknya dilihat sebagai gejala budaya yang tidak hanya muncul saat sekarang, namun telah ada sejak berabad lamanya, sehingga budaya haji tidak selalu bersifat homogen dan konsesual, namun memiliki keberagaman dalam realitas sosial terutama masyarakat kontemporer sekarang.

Keterkaitannya dengan pengaruh haji terhadap masyarakat Indonesia Kontemporer (termasuk pada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang) juga telah banyak dilakukan penelitian sekalipun hanya sekilas, antara lain adalah Anik Farida tentang haji, dalam “*Strafikasi Sosial Masyarakat Jakarta Selatan*”, menyimpulkan bahwa secara sosial para haji dikelompokkan sebagai kelompok elit keagamaan yang seringkali disejajarkan dengan para ulama dan para aparat desa, dalam relasi sosial memiliki fungsi sebagai pemelihara identitas dan perekat sosial sehingga status haji dimungkinkan memberikan keuntungan sosial ekonomis yaitu semacam modal sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Lihat: Anik Faridah, “*Haji*” Dalam *Stratafikasi Sosial Masyarakat Betawi Pedagang, Studi di Kelurahan Jombang* ( Jakarta: KCB, 2000), h. 89.

Zamakhshari Dhofier (1984) tentang “*Dampak Ekonomi Ibadah Haji di Indonesia*”, menyimpulkan bahwa kalangan orang Jakarta yang telah menunaikan ibadah menjadi lebih mampu mengendalikan pola hidupnya (sekalipun hal ini tidak berlaku umum dengan beberapa pengecualian) yang semula terlalu bersifat konsumtif dan lebih miskin, sehingga sebagian dari mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Artinya haji pada tahun-tahun 80-an ternyata memiliki pengaruh tidak langsung pada perbaikan perekonomian sebagian besar orang Betawi/Jakarta di perkampungannya<sup>9</sup> dan tentunya di tahun 2000-an telah banyak mengalami perubahan.<sup>10</sup>

Penelitian lainnya oleh Amri Marzali (1983) menyimpulkan bahwa secara rasionalitas pandangan kewajiban dan keutamaan untuk pergi haji bagi orang Betawi sedang berangsur-angsur mengalami perubahan penurunan seiring terjadinya perubahan situasi khususnya tentang nilai prestise dalam komunitas. Artinya nilai keutamaan haji sekarang ini sedang berubah menjadi sesuatu hal yang biasa saja dalam agama karena

---

<sup>9</sup>Hal ini dapat dibandingkan dari hasil penelitian yang dilakukan LP3ES bekerja sama dengan The Hajj Research Center, Ummul Qura' University, Makkah pada bulan Maret 1982, dimuat dalam Prisma, nomor 4, 1984:51- 61), yang menggambarkan bahwa secara umum mayoritas jamaah haji Indonesia pada musim haji tahun 1981 berasal dari pedesaan atau 63,6 % dan bukan berasal dari kelompok orang kaya, melainkan justru persentasenya yang miskin cukup tinggi yaitu sebanyak 32,2%. Keadaan ini tentunya telah mengalami perubahan pada tahun 2000-an, dimana data terakhir yang pergi haji di Kelurahan Makassar, menggambarkan bahwa sarjana 40,48%, pada tahun 2001 dan 45,26% untuk tahun 2002, sedangkan SD dan SLTP hanya 28,57 % pada tahun 2001 dan semakin menurun di tahun 2002 yaitu sebanyak 16,84 %, demikian juga yang berangkat haji dari kelompok tani pada tahun yang sama sudah tidak ada lagi atau 0% (sumber dari data SISKOHAT, Departemen Agama tahun 2002). Dari perbandingan data tersebut menggambarkan (bersifat kuantifikasi) bahwa telah terjadi pergeseran yang begitu drastis setelah 20 tahun kemudian dimana latar belakang pendidikan yang pergi haji sudah didominasi oleh berpendidikan tinggi atau ciri orang kota dan semakin berkurang dari kalangan petani dan SD sebagai ciri masyarakat pedesaan, sekalipun bandingan data tersebut mengkhaskan dari Kelurahan Makassar.

<sup>10</sup>Zamakhshari Dhofier, *Dampak Ekonomi Ibadah Haji di Indonesia*, Jakarta: Prisma, 1984 : No. 4, h. 51 – 62.

seakan-akan tidak lagi dimotivasi dan dilatarbelakangi oleh upaya untuk membersihkan dosa (*process of purification.*)<sup>11</sup>

Hal yang menarik dari semua penelitian di atas karena memiliki kesamaan dalam menyimpulkan bahwa penggunaan simbol-simbol keagamaan pada haji bagi orang Betawi merupakan suatu hal yang mendasari dan memotivasi mereka untuk melakukan ibadah haji sekalipun harus mengeluarkan biaya yang besar jumlahnya (seperti menjual tanah untuk biaya pergi haji). Penggunaan simbol-simbol haji dalam relasi sosial sampai sekarang masih tetap mempunyai nilai prestise tersendiri dan menjadi kekuatan simbolik dalam kehidupan masyarakat kota kontemporer.

Bermula dari beberapa tulisan tersebut, dapat memberikan inspirasi kepada penulis bahwa seseorang atau sekelompok haji ternyata memiliki strategi-strategi tertentu untuk menjadi eksis di tengah-tengah pertarungan budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang, karena itu penulis akan menelusuri lebih lanjut tentang praktik pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor-faktor yang memengaruhinya pemahaman dan ketaatan berhaji tersebut melalui pendekatan sosial dan hukum Islam pada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara terus menerus melakukan identifikasi diri terhadap simbol-simbol haji, mereka mengapresiasi dan merepresentasikan simbol-simbol haji untuk memperoleh pengakuan sosial sehingga menjadi lebih dominan dalam arus modernisasi kehidupan masyarakat kontemporer di Kabupaten Sidenreng Rappang.

---

<sup>11</sup>Marzali Amri, *The Dilemma of Development, A Study the Relationship between the Community of Condet and Supralocal Institution in Jakarta* ( Jakarta, t.p., 1983 ), h. 69 – 70.

## 1. Perspektif Cendekiawan Muslim terhadap Urgensi Pemahaman Ketaatan Berhaji

Ghufran Aji Mas'adi, menyatakan bahwa dalam Islam ibadah haji salah satu dari rukun Islam yang penting dan ditempatkan pada posisi rukun kelima yang menjadi tanda kesempurnaan keislaman seorang muslim. Salah satu bentuk urgensi ibadah haji adalah penegasan Nabi saw. bahwasanya haji yang *mabrur* tidak ada pahala yang pantas untuknya kecuali surga. Khusus dalam masyarakat Indonesia, untuk ketinggian ibadah haji diwujudkan dengan pemberian gelar kehormatan. Agaknya ibadah haji jika dibandingkan dengan ibadah lainnya tidak terletak pada amalan ritualnya saja, melainkan pada arti dan hikmah yang terkandung di dalam manasiknya.<sup>12</sup>

Senada hal di atas, dikemukakan pula pendapat Abu Su'ud bahwa dalam ibadah haji merupakan ibadah *mahdah* yang memberi peluang bagi masuknya berbagai unsur budaya lokal. Peluang masuknya berbagai ritual melalui pengaruh budaya juga campur tangan dalam wujud pelaksanaan manasiknya. Pelaksanaan ibadah lain pun seperti puasa sering juga terlihat adanya penyerapan budaya lokal, namun tidak sebesar pada ibadah haji. Sebagai contoh, pertama, tidak ada gelar yang diberikan kepada seseorang yang diberikan kecuali setelah melaksanakan ibadah haji. Julukan atau gelar haji menjadi suatu yang kelihatannya mesti diberikan kepada orang yang telah melaksanakan haji. Dalam komunikasi sosial mereka biasa dipanggil "haji". Kedua dalam atribut, para haji terbiasa mengenakan pakaian yang menandai telah menunaikan ibadah haji.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Ghufran Aji Mas'adi, *Haji: Menangkap Maknah Fisikal dan Spritual* ( Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001 ), h. 2 – 3.

<sup>13</sup>Abu Su'ud, *Haji: Antara Syara' dan Mitos* ( Cet. I; Semarang : CV. Aneka Ilmu, 2003 ), h. 56 – 57.



Mengenai urutan-urutan rukun Islam itu dapat dipahami dalam hadits yang disampaikan oleh Ibn Umar, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

14

Artinya :

'Abdullah bin Musa menceritakan kepada kami, berkata Hanzhalah bin Abu Sufyan memberitakan kepada kami, dari Ikrimah binti Khalid dari Ibn Umar r.a. berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima perkara, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah swt. dan sesungguhnya Muhammad saw. adalah utusan-Nya; mendirikan salat; menunaikan zakat, melaksanakan haji; dan berpuasa pada bulan Ramadhan." (HR. Al-Bukhari)

Al-Asqal ni dalam hubungannya dengan kewajiban berhaji dalam men-syarah hadits yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tentang hirarki rukun-al-Islam. Ia menyatakan bahwa salat yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah salat fardhu yang tidak boleh ditinggalkan. Namun, dalam situasi tertentu ada keringanan, misalnya bagi seorang perempuan yang sedang haid, nifas. Bagi orang sakit boleh salat dengan cara duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Bagi orang musafir boleh meng-qasar salatnya. Demikian pula orang yang fakir, miskin, boleh tidak berzakat, atau orang sakit atau dalam perjalanan boleh membatalkan puasanya, lalu

<sup>14</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mugirah bin al-Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 11 Lihat juga dalam CD Rom Hadits, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman, Bab Buniyat al-Islam 'al Khamsah hadits nomor 7.

menggantinya pada hari-hari lain. Termasuk orang yang tidak mampu secara material dan immaterial, boleh tidak berhaji.<sup>15</sup>

Dari lima rukun Islam yang disebutkan dalam hadits, ibadah haji dipandang sebagai rukun tertinggi dan berat pelaksanaannya, karena memerlukan kemampuan material, fisik dan mental, hal inilah yang menjadikan ibadah haji kelihatannya tidak semua orang muslim mampu melaksanakannya, bila dibandingkan dengan ibadah salat, puasa dan zakat. Bukti empiris menunjukkan bahwa ada orang yang mampu berhaji secara material, tetapi immaterial belum mampu.

Demikian pula sebaliknya, ada orang yang secara immaterial mampu untuk berhaji, tetapi dari segi material orang tersebut tidak sanggup. Terbukti bahwa banyak orang kaya, tetapi kekayaannya tidak digunakan untuk berhaji. Justru yang sangat memperhatikan adanya sebagian orang kaya telah menggunakan hartanya untuk bersenang-senang berwisata ke luar negeri tidak termotivasi untuk melakukan ibadah di tanah suci, sementara ibadah haji perintah pokok karena merupakan salah satu rukun Islam. Dalam hadits Nabi saw. yang mendorong seorang muslim untuk melakukan ibadah haji, hadits yang disampaikan oleh Abu Huraerah, sebagai berikut :

---

<sup>15</sup>Ahmad bin Ali bin bin Hajar al-Asqalaniy, *fath al-Bariy bin Syar al-Bukh riy*, Juz I ( Mesir; D r al-Ilmiyyah t.th.), h. 20 – 21.

<sup>16</sup>*Ibid.*, Bab *al-Salat bi Masjidiy Makkah wa al-Madīnah*, hadits nomor 2469.

Artinya :

”Disampaikan Amr’ al-Naqd dan Zubair bin Harb, sebagaimana diucapkan oleh Amru, berkata Sufyan bin Uyainah dari Zuhri dari Said bin Musayyab dari Abu Huraerah. Berkata Nabi saw.”Salat pada mesjidku ini lebih mulia dari seribu salat selain di Masjidil Haram.”

Selain hadits-hadits di atas, masih banyak ditemukan riwayat lain yang semakna serta inti kandungannya adalah memberikan motivasi kuat kepada segenap umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Hadits-hadits di atas menggambarkan bagaimana janji Allah swt. bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji dengan sungguh-sungguh dan mencapai haji *mabrur*. Tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya, yang banyak terjadi bahwa potensi kemampuan umat Islam dikerahkan untuk melaksanakan ibadah haji terbuang sia-sia, tidak menjadi energi untuk membangun dan menggerakkan umat Islam.

Ghufran Ajib Mas’adi memberikan penjelasan tentang pelaksanaan rukun kelima ini, dengan memberi pernyataan bahwa dalam Islam terdapat tiga prinsip ajaran yang dapat disebut sebagai trilogi Islam. Ketiga prinsip ajaran tersebut adalah iman, Islam, dan *ihsan*. Iman merupakan pembenaran terhadap prinsip-prinsip keyakinan dalam Islam; Islam merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan syariat Islam, sedangkan *ihsan* merupakan penghayatan iman dan Islam.<sup>17</sup>

H. Abu Su’ud lebih mempertegas bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang sering kali dianggap sebagai ibadah pamungkas dan kunci dari segala ibadah. Akibatnya, ibadah haji sering dikaitkan dengan berbagai anggapan dan asumsi dalam kehidupan manusia muslim. Bahkan tidak jarang orang yang tidak beragama Islam memandang tinggi pula sebagian dari barang-barang atau sesuatu yang dikaitkan dengan

---

<sup>17</sup>Ghufran Ajib Mas’adi, *op.cit.*, h. 169 – 216.

ibadah haji. Sementara pada sisi lain, ibadah *shalat* tidak pernah mendapat persepsi yang berlebihan seperti terhadap ibadah haji, padahal ada hadits khusus memberikan nilai lebih pada ibadah salat. Meskipun demikian, banyak orang beranggapan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang paling banyak dikaitkan dengan peleburan dosa-dosa manusia sehingga mereka melakukan ibadah haji dengan motivasi khusus, seperti memohon ampunan dari Allah swt. atas segala dosa-dosa yang telah berlalu, lebih-lebih jika hidupnya memang bergelimang dengan kemaksiatan.<sup>18</sup>

Abdurrahman al-Mukaffi menjelaskan bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Banyak kaum muslimin di tanah air yang sedemikian antusiasnya ingin menunaikannya. Untuk itu, mereka tidak segan-segan melepas harta kekayaannya dengan cara menjual tanah asset lainnya. Bahkan sebelum pembukaan pendaftaran saja banyak bank-bank yang menolak calon nasabah haji, kecuali bagi mereka yang bersedia untuk pemberangkatan tahun berikutnya. Sungguh hal ini merupakan suatu fenomena yang pantas untuk disyukuri.

Al-Mukaffi lebih mempertegas bahwa makna haji itu lebih meresap ke dalam hati, maka hendaknya sebelum keberangkatan setiap calon haji harus mempersiapkan diri dengan ilmu dan amal saleh yang sesuai tuntunan Rasulullah saw. karena tidak sedikit orang yang menyesal sepulang haji, sebab baru mengetahui kekeliruan dalam manasik hajinya. Padahal jika seseorang melaksanakan haji sesuai dengan manasik Rasulullah saw., maka ia akan mendapatkan banyak kemudahan. Haji yang *mabrur* adalah haji yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. adanya

---

<sup>18</sup>Lihat: H. Abu Su'ud, *op.cit*, h. 57.

perubahan sepulang haji sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya adalah bukti terkuat *mabrurnya* haji seseorang.<sup>19</sup>

Urgensi pelaksanaan ibadah haji dikemukakan pula oleh Hj. Maisarah Zas, ia memberi penjelasan hendaknya seorang muslim berkeyakinan bahwa makna haji pastilah sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia karena berbeda dengan rukun Islam yang lain yang juga memberikan manfaat yang besar seperti salat, puasa, dan zakat yang pada hakekatnya diwajibkan berulang kali, tetapi tidak menguras potensi hidup manusia dengan sangat besar. Untuk haji yang hanya diwajibkan sekali seumur hidup bagi setiap muslim, Allah swt. meminta pengeluaran potensi hidup manusia dalam jumlah yang relatif besar. Potensi itu dimulai dari dana yang besar sehingga ada yang menabung sampai puluhan tahun, tenaga fisik dan psikologis yang besar, waktu yang cukup lama, dilakukan bersama jutaan manusia pada tempat yang selain relatif sempit juga harus berpindah-pindah, dengan situasi alam dan budaya yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari.<sup>20</sup>

Jawadi Amuli juga memberi penjelasan tentang rahasia-rahasia yang terkandung dalam ibadah haji, baik rahasia-rahasia yang terkandung dalam ibadah haji itu sendiri maupun rahasia yang terkandung dari setiap tempat yang dikunjungi dalam pelaksanaan ibadah haji. Beliau mengungkapkan bahwa titik yang paling krusial (sebagai sasaran kritik) adalah Ka'bah dan sebuah batu hitam yang terletak di salah satu sudutnya (*Hajrah al-Aswad*). Para jamaah datang dari segenap penjuru dunia untuk melaksanakan sebuah ritus

---

<sup>19</sup>Abdurrahman al-Mukaffi, *Bagaimana Sepulang Haji* (Cet I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 67.

<sup>20</sup>Maisarah Zas, *Haji dan Pencerahan Jati diri Muslim* (Cet. I; Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. 23 – 24.

yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu dan umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, mengelilingi Ka'bah harus dibarengi dengan menguatkan pemahaman tentang perbuatan tersebut, jika tidak, maka akan memunculkan kesan seakan-akan melaksanakan sesuatu yang pernah dilaksanakan pada masa jahiliyah. Menurutny, pada persoalan seperti ini sebagian kalangan yang hanya menerima Islam sebagai sebuah aturan-aturan lahiriah dan terjebak dalam pemahaman dangkal nan sempit mestilah berputus asa. Sebab, ibadah haji berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang relatif mudah penjelasannya secara tauhid mengandung makna dan rahasia yang terpendam.<sup>21</sup> Bahkan buku paket yang membahas perhajian sudah banyak jumlahnya setiap tahunnya diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. diperbaharui sesuai kondisi dan keadaan Arab Saudi.

## **2. Tradisi Masyarakat muslim Terhadap Ritualitas dan Sakralitas Perhajian**

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktik.<sup>22</sup> Senada hal tersebut juga dikatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Sedangkan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang baik dan benar.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Jawadi Amuli, *Shahbo-ye Shafu* diterjemahkan oleh Najib Huesi al-Idrus dengan judul “Hikmah dan Maknah Haji” ( Cet. VI; Jakarta: Cahaya. t.th.) h. 2006.

<sup>22</sup>Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal dari Cirebon* ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 1531 Lihat juga: W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 11. 1088.

<sup>23</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Dep. P&K dan Balai Pustaka, t.th.), h. 599.

Jadi tradisi dalam pembahasan ini adalah kebudayaan yang dilihat sebagai bagian esensial atau warisan kebudayaan masa lalu yang sampai sekarang masih dilaksanakan secara turun temurun.

Tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadikan kekuatan spritual dan moral yang memengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Secara normatif, Islam selalu mengajarkan kepada penganutnya untuk berperilaku baik, saling menghormati, silaturahmi, musyawarah, bersifat sosial, dan melarang umatnya berbuat tidak baik, sikap sombong, iri, tamak, bertindak anarkis, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Islam sebagai suatu ajaran ilahi yang bersumber dari wahyu mengandung nilai-nilai universal ajarannya bagi kehidupan umat manusia baik dalam aktifitas kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Hal ini berarti bahwa Islam diturunkan untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan dunia maupun akhirat.

Kekuatan Islam tersebut, terpusat pada konsep tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu, dan bahwa manusia harus mengabdikan diri sepenuh kepada-Nya. Konsep tauhid ini mengandung implikasi doktrinal lebih jauh bahwa tujuan kehidupan manusia tak lain kecuali menyembah kepada-Nya. Doktrin bahwa hidup harus diorientasikan untuk mengabdikan kepada Allah inilah yang merupakan kunci dari seluruh ajaran Islam. Dengan kata lain, di dalam Islam, konsep mengenai kehidupan adalah konsep yang teosentris dan humanis, yaitu bahwa seluruh

---

<sup>24</sup>Simuh, *Intraksi Islam dalam Budaya Jawa dalam Muhammadiyah dalam Kritik* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), h. 149.

kehidupan berpusat kepada Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri.<sup>25</sup>

Dari konsep humanisme-teosentris itulah, maka Islam dapat terwujud dalam memahami realitas dan praktik Islam sebagai realitas sosial. Dalam wacana sosiologi dan antropologi, kedua realitas tersebut banyak dikenal dengan konsep dualisme agama (Islam), tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*) atau tradisi lokal (*local tradition*). Secara lebih konkret, dalam konteks agama Islam, kedua tradisi ini dapat dikatakan sebagai “Islam Resmi” (*official Islam*) yang berada di tangan para agamawan dan “Islam populer” (popular Islam) yang banyak berkembang dan diaplikasikan dalam masyarakat atau rakyat kebanyakan. Ernest Gellner menyebut kedua model tradisi tersebut dengan tradisi tinggi (*high tradition*) dan tradisi rendah (*low tradition*).<sup>26</sup>

Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, tradisi Islam adalah perpaduan antara wahyu yang diterima Nabi dalam bentuk kitab suci bahwa Islam sebagai agama diserap sesuai dengan fitrahnya sendiri dan berhasil mencapai jati dirinya melalui peralihan dan sintesis. Tradisi Islam mencakup semua aspek religius dan percabangannya berdasarkan apa yang dicontohkan oleh para wali.<sup>27</sup>

Ritual adalah bentuk atau metode tertentu dalam melakukan upacara keagamaan atau upacara penting, atau tata cara dan bentuk upacara. Makna dasar ini menyiratkan bahwa, di satu sisi, aktifitas ritual berbeda dari aktivitas biasa, terlepas dari ada atau

---

<sup>25</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1996), h. 229.

<sup>26</sup>Ernest Gellner, *Menolak Posmodernisme* dalam Paryanto, *Islam Akomodasi Budaya dan Poskolonial*, penterjemah (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah, 2002), h. 61.

<sup>27</sup>Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT. Nusantaralestari Ceriaprata, 2009), h. 17.



tidaknya nuansa keagamaan atau keahluannya. Di sisi lain, aktivitas ritual berbeda dari aktifitas teknis dalam hal ada atau tidaknya sifat seremonial.<sup>28</sup>

Upacara atau ritual sebagai kumpulan aktivitas manusia yang kompleks dan tidak mesti bersifat teknis atau rekreasional, tetapi melibatkan model perilaku yang sepatutnya dalam suatu hubungan sosial. Senada dengan apa yang dikatakan Leach, bahwa ritual adalah setiap perilaku untuk mengungkapkan status pelakunya sebagai makhluk sosial dalam sistem struktural di mana ia berada pada saat itu.<sup>29</sup>

Menurut Siti Chamamah Suratno, fenomena pluralitas kultural dan pemahaman agama menjadi menonjol dilihat dari manifestasinya dalam budaya. Memasuki era modern upaya mencermati produk budaya yang telah dihasilkan dan yang mungkin untuk diciptakan signifikansi bagi penciptaan masa depan Indonesia baru yang damai dalam persatuan bangsa.<sup>30</sup>

Sebagian besar literatur tentang haji berisi dan membahas tentang petunjuk dan pedoman pelaksanaan ibadah haji, di dalamnya berusaha memberikan pembekalan kepada calon jamaah haji dengan penekanan pada aspek *fiqhiyah*, yakni aspek syarat, rukun, wajib, sunnah, makruh, dan haram, dan penekanan pada bimbingan manasik haji yang bersifat teknis, termasuk beberapa buku paket buku pedoman atau tuntunan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.<sup>31</sup> Sedangkan buku yang berusaha memberikan pembekalan

---

<sup>28</sup>Muhaimin, *Islam dalam Bingkai*, loc.cit.

<sup>29</sup>Leach, ER, *Political System of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure* ( London: The Thlon Press, 1964 ), h. 10.

<sup>30</sup>Siti Chamamah Suratno, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal: Dialektikal Pemerdayaan Budaya Islam Nasional* dalam Zakiyuddin, *ibid.* h. 25.

<sup>31</sup>Buku yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam bimbingan manasik haji bagi calon haji di Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman kepada referensi yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian

kepada calon haji dengan penekanan pada pemahaman ketaatan berhaji sesuai ketentuan syara' dan hikmah haji masih langkah, terutama buku yang mengarah kepada pemahaman ketaatan berhaji yang dapat membentuk pribadi haji yang memiliki karakter haji yang ideal.

### **3. Histori Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia**

Sebenarnya sejak tahun 1950 pemerintah telah lebih aktif terlibat dalam penyelenggaraan urusan haji. Di tahun 1950 Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI) dibentuk dan diberi kuasa oleh pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah haji. Selain itu berdiri pula Bank Haji Indonesia dan Pelayaran Muslimin Indonesia (MUSI). Karena alasan politik PHI dibekukan pada tahun 1961, menyusul MUSI tahun 1962. Pada tahun 1961 pemerintah membentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji, kemudian diganti lagi dengan badan baru, yakni Dewan Urusan Haji yang dibentuk berdasarkan Keppres. RI. Nomor 112 tahun 1964.

Sebagai realisasi dari Keppres. tersebut, PT Arafat dibentuk pada tahun itu juga. Ketika itulah PHI diajak kembali untuk turut dalam penyelenggaraan haji. Bagaimanapun juga keadaan yang berkembang sejak tahun 50-an itu menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk lebih banyak perhatiannya terhadap urusan perjalanan haji.<sup>32</sup>

Dari berbagai kebijaksanaan pemerintah dalam soal urusan haji sejak tahun 1950-an terdapat tiga di antaranya yang amat penting dicatat yakni :

---

Agama RI antara lain; a) pedoman bimbingan manasik haji, b) panduan perjalanan haji, dan c) do'a, zikir, dan tanya jawab ibadah haji.

<sup>32</sup>Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* ( Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 104 – 108, Lihat pula: Departemen Agama RI., h. 71 – 72.

1. Bahwa pemerintah pernah memberikan wewenang kepada badan-badan swasta untuk turut dalam penyelenggaraan urusan haji.
2. Pemerintah pernah memberikan subsidi haji berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1960.
3. Pemerintah pernah mengatur batas jumlah jamaah haji setiap tahunnya (sistem *quotum*).<sup>33</sup>

Tiga hal pokok kebijaksanaan di atas, mengalami perubahan di kemudian hari. Kebijaksanaan kedua dan ketiga ternyata ditinjau kembali oleh pemerintah dengan alasan bahwa kehidupan ekonomi umat Islam sudah jauh meningkat dari sebelumnya, sementara jumlah orang yang mendaftarkan diri untuk naik haji dari tahun ke tahun semakin bertambah pula. Dengan dasar itulah, pemerintah menghapus subsidi haji dan sistem *quotum* yang amat terbatas ketika itu. Semua yang berkeinginan menunaikan haji diberikan kesempatan seluas-luasnya asalkan memenuhi syarat menurut agama.<sup>34</sup>

Kebijakan di atas mempunyai nilai plus-minus bagi umat Islam. Penghapusan subsidi haji sudah tentu memberatkan bagi calon jamaah haji yang berekonomi lemah, sementara itu penghapusan sistem *quotum* membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka yang kuat ekonominya.

Namun yang paling banyak mendapat sorotan dari masyarakat ialah pengambil-alihan oleh pemerintah semua urusan yang menyangkut perjalanan haji. Dalam Keppres RI. Nomor 22 tahun 1969, artikel satu menegaskan bahwa keseluruhan penyelenggaraan urusan

---

<sup>33</sup>H. Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya* (Ujungpandang: Yayasan al-Ahkam Makassar, 2002), h. 72.

<sup>34</sup>Acmad Nidjam, Alatief Hanam, *Manajemen Haji* (Edisi Revisi; Jakarta: Mediacita, 1006 ), h. 38.

haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>35</sup> Keppres tersebut menegaskan keinginan pemerintah untuk memonopoli penyelenggaraan haji.

Memang tidak dapat disangkal bahwa sejak berlakunya sistem monopoli urusan naik haji oleh pemerintah, para calon haji tidak merasa bimbang dan gelisah akan keberangkatannya menunaikan ibadah haji.<sup>36</sup> Namun, jika dipandang secara luas, sistem monopoli penyelenggaraan haji oleh pemerintah dahulu itu, tidak pula terlepas dari berbagai kelemahan, antara lain :

1. Calon haji tidak punya alternatif lain kecuali menuruti saja penetapan pemerintah dalam hal jumlah biaya ongkos naik haji (ONH), yang setiap tahunnya selalu saja meningkat .
2. Perbaikan-perbaikan terhadap pola dan sistem penyelenggaraab haji, tidak dapat ditemukan secara tepat dalam waktu yang singkat, karena tidak terdapatnya pola dan sistem lain sebagai bahan perbandingan.
3. Dari segi ekonomi, monopoli tersebut menutup lapangan kerja pihak swasta dan suatu cabang usaha yang cukup potensial, yang diharapkan dapat mengembangkan usaha mereka.<sup>37</sup>

Dalam hal penyelenggaraan haji sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah tampaknya tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aspirasi tersebut.

---

<sup>35</sup>T. Hasan Ali, "*Bagaimana Sebaiknya Penyelenggaraan Haji*" dalam Risalah Islamiyah, No. 9, Vol. I, 1974, h. 44.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 47.

<sup>37</sup>H. Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya* (Ujungpandang: Yayasan al-Ahkam Makassar, 2002 ), h. 73.

Keadaan itu berlangsung cukup lama, nanti pada pemerintahan reformasi era Habibie, suatu Undang-Undang menyangkut perjalanan haji dapat dihasilkan oleh DPR bersama Pemerintah, yakni Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Haji. Secara ringkas, dapat digambarkan bahwa Undang-undang tersebut telah mendukung pelaksanaan syari'at Islam di bidang ibadah, khususnya penyelenggaraan ibadah haji. Akan tetapi, berbagai pihak memandangnya masih belum lepas dari nuansa monopoli, karena dasar Biaya Perjalanan Haji ditentukan sendiri oleh pemerintah.

## **B. Pemahaman Ketaatan Berhaji dalam Konteks Hukum Islam**

### **1. Term Hukum Islam dan Perubahan Sosial**

Istilah hukum Islam adalah hasil pengubahsuaian dari istilah *al-fiqh*.<sup>38</sup> Ini dapat dicermati melalui penelusuran bahwa istilah hukum Islam semula tidak dikenal dalam lektur Qur'ani, *fiqh*, dan *usūl*. Tetapi lebih dikenal adalah istilah *al-hukm*,<sup>39</sup> *hukm al-Allāh*,<sup>40</sup> syari'ah, hukum syar', *al-syari'ah al-islamiyyah*, *al-Tasyr' al-Islām*,<sup>41</sup> dan

<sup>38</sup>Secara etimologis kata *fiqh* berarti; memahami, menguasai, dan mengetahui sesuatu. Lihat: Abu Fadl Jamaluddin, *op.cit.* h. 522, Bandingkan, Thahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit*, jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, cet III, 1970, h. 513. Kata *fiqh* dan yang seakar disebutkan dalam Alquran sebanyak dua puluh (20) kali. Lihat: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfa al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, t.th.), h. 525.

<sup>39</sup>Kata "*al-hukm*" dalam berbagai variasi bentuknya yaitu *fi'il madhi* (*past tense*), *mudhari* (*present tense*), amar (*imperativ*) maupun *masdar* (*adverb*) disebutkan dalam Alquran sebanyak 94 kali. Lihat: *Ibid.*, h. 212 – 213. Secara etimologis, hukum artinya mengadili, memerintah, kembali, peraturan, pemerintahan, dll. Lihat: Lewis Ma'luf, *al-Munjid*, Matba'ah Katulikiyyah, cet. XVII, Beirut: tt., h. 146. Secara terminologis di lingkungan pakar *fiqh* cenderung dimaksudkan dengan hukum syar'.

<sup>40</sup>Kata "*al-Hukm Allāh*" disebutkan dalam Alquran sebanyak dua (2) kali pada surat *al-Midah*: 46 dan *al-Mumtahanah*: 10. Sedangkan dalam arti yang sama diungkapkan dengan kelompok kata lain, "*hukm rabbika*" disebutkan sebanyak tiga (3) kali, yaitu pada surat *al-Thar*: 48, dan *al-Dahr*: 24. Kedua kelompok kata (frasa) tersebut digunakan untuk arti yang sama, yaitu syari'ah secara umum (*syari'ah al-islamiyyah*) Lihat: *Ibid.*, h. 213.

<sup>41</sup>Istilah ini cenderung dimaksudkan searti dengan *al-Fiqh al-Islām*. Lihat, seperti digunakan untuk dulul buku yang ditulis oleh Sya'ban Muhammad Isma'il, *al-Tasyr' al-Islām* dll.

lainnya. Pemaknaan istilah *fiqh* ternyata mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pada awal pertumbuhannya, *fiqh* dipahami dan digunakan searti dengan istilah syari'at dan agama.<sup>42</sup>

Bahwa *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum agama secara menyeluruh baik hukum yang menyangkut dengan keimanan (akidah), akhlak, dan hukum *syar'*.<sup>43</sup> Pemakaian seperti ini berjalan cukup lama bahkan Imam Abu Hanifah menggunakan untuk salah judul bukunya dengan *al-fiqh al-Akbar* yang berisi tentang akidah (ilmu kalam).<sup>44</sup>

Keadaan seperti ini wajar terjadi, sebab pada masa itu belum ada upaya spesialisasi ilmu di kalangan umat Islam. Kemudian pada masa berikutnya, yaitu masa *pentadwinan* (pembukuan) ilmu *fiqh* dan juga ilmu-ilmu yang lain, barulah ilmu *fiqh* mengarah pada spesialisasi pada bidang hukum Islam secara khusus memisahkan diri di bidang akidah dan akhlak. Ini dapat terjadi seiring dengan semaraknya upaya pen-*tadwinan* dan pembidangan ilmu di dunia Islam sehingga mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini terdapat dua persepsi tentang *fiqh* yang terpola di kalangan akar *usūl fiqh* di satu pihak dan di kalangan pakar *fiqh* di pihak lain.

Oleh karena itu, *fiqh* mencakup semua usaha aspek hukum *syar'* baik yang tertuang secara tekstual, hasil penalaran teks, pendapat, fatwa, dan lain-lain. Jadi *fiqh* adalah kumpulan serba-serbi yang terkait dengan hukum Islam.

---

<sup>42</sup>Lihat: *ibid.*, h.10, sehingga *fiqh* Islam searti dengan syari'ah Islam dan agama Islam. Lihat: Muhammad Yusuf Msa, *op.cit.* h. 9.

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 10, Sya'ban Muhammad Ismail, *op.cit.*, h. 11.

<sup>44</sup>Abu Hanifah, *al-Fiqh Akbar* h. 12.

Tanpa bermaksud mengurangi penghargaan terhadap tawaran pemaknaan yang telah ada, akan dipaparkan sebuah pemaknaan tentang hukum Islam dengan memanfaatkan pendekatan sosiolinguistik. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang rasional dengan dukungan keabsahan di samping dukungan yang lain. Kalau pun hasil purna rumusannya juga sama dengan tawaran yang telah ada, tetapi setidaknya ini akan menambah bobot pemaknaan menjadi lebih mantap dan salah satu upaya penyempurnaan dari makna hukum Islam tersebut.

Hukum Islam sebagai hasil ubahsuai dari *fiqh* adalah sebuah kelompok kata (frasa) yang termasuk kategori frasa *atributif*,<sup>45</sup> terdiri dari kata "hukum" dan kata "Islam". Salah satu definisi menyatakan bahwa hukum Islam adalah "seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pemangkunya dan bersifat mengikat secara multilateral bagi warganya sebagai jaminan sosial yang efektif guna mewujudkan keadilan".<sup>46</sup>

Kemudian salah satu definisi tentang hukum Islam menyatakan bahwa Islam adalah "agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw. sebagai rasul-Nya".<sup>47</sup> Jika dua definisi dari dua kata tersebut digabung dalam satu rangkaian kata maka dapat dirumuskan bahwa definisi hukum Islam adalah : "Seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pembuat hukum (*al-sy ri*) berdasarkan wahyu yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan".

---

<sup>45</sup>Frasa atributif adalah frasa yang berfungsi mensifati. Artinya, kata kedua menjadi sifat bagi kata pertama. Maka hukum Islam artinya hukum yang bersifat islami atau digali dari nilai-nilai Islam. Jika pola ini ditransformasimorfologiskan ke dalam bahasa Arab harus menggunakan pola *id fah tab'idiyyah* (frasa partitif).

<sup>46</sup>Lihat: Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, terj. Bharata, (Cet. I; Jakarta, tp. 1988), h. 51.

<sup>47</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jld. I (Cet I; Jakarta: UI Press, 1985), h. 24.

Definisi tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut, Frasa "seperangkat aturan" memiliki makna sejumlah rumusan terperinci yang operasional dalam satu unitas yang utuh dari berbagai peraturan. 'Perbuatan manusia' dimaksudkan perbuatan praktis lahiriah manusia, dalam arti kata manusia muslim. Sedangkan kalimat ditetapkan oleh pembuat hukum (*al-sy ri*)' menunjukkan bahwa tidak boleh sembarang orang yang menetapkan suatu aturan, melainkan hanyalah orang yang memiliki kompetensi memadai dan memenuhi persyaratan yang dibakukan. Dalam hal ini, mereka lazim dikenal sebagai ahli hukum atau mujtahid.

Adapun dimaksud dengan wahyu Allah adalah wahyu yang tertuang di dalam Alquran dan al-hadits. Tiap peraturan itu mengikat masyarakat muslim, maksudnya peraturan itu memiliki daya paksa (imperatif) hanya bagi masyarakat muslim secara merata tidak bagi masyarakat lainnya. Kalimat guna mewujudkan keadilan artinya peraturan itu ditetapkan bertujuan untuk menciptakan keadilan hakiki bagi masyarakat manusia.<sup>48</sup>

Kalau dicermati lebih jauh, akan didapatkan nuansa perbedaan antara tradisi hukum Islam yang dipaparkan ditawarkan dalam pembahasan ini dengan definisi *fiqh* yang sudah lazim dikenal. Nuansa perbedaan itu bersifat sederhana dan bukan prinsip, melainkan hanya bersifat komplementer. Yakni berupa penambahan dalam tiga hal, yaitu; a) oleh pembuat hukum (*al-sy ri*'), b) yang mengikat masyarakat muslim, dan c) guna mewujudkan keadilan.

---

<sup>48</sup>Bandingkan dengan pendapat Mujiyono Abdillah, dalam bukunya *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial* ( Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003 ), h. 16.



Penambahan ketiga hal tersebut dimaksudkan agar batasan pengertian tentang hukum Islam menjadi semakin mapan dan lebih operasional serta lebih verifikatif. Untuk yang disebut pertama sebagai eksplisitasi jawaban atas pertanyaan siapa yang menetapkan hukum Islam yang ditetapkan. Adapun yang disebut ketiga sebagai jawaban atas pertanyaan untuk apa hukum Islam ditetapkan. Ketiga pertanyaan tersebut belum terjawab secara tegas dan eksplisit pada definisi *fiqh* lazimnya. Dengan demikian, rumusan seperti ini pun belum final dan masih selalu terbuka untuk dikaji ulang dan dikembangkan lebih lanjut.

Ekstensifikasi modern hukum Islam merupakan pengembangan yang bersifat inovatif. Artinya, pengembangan materi hukum Islam mengacu pada upaya perubahan tentang materi hukumnya maupun sistem penulisannya. Ini menyebabkan terjadinya pergeseran mencolok bahkan ada perubahan radikal dibanding dengan babak sebelumnya. Perkembangan ini terjadi berkat persinggungan hukum dengan dunia luar yang modern. Hal ini dapat dicermati sejumlah buku *fiqh*<sup>49</sup> yang sistematikanya sudah mengacu sistematika penulisan modern yang lebih spesifik dan mendalam kajiannya untuk bidang tertentu dan materi kajiannya juga menyentuh pada kasus-kasus modern yang belum dijumpai babak sebelumnya .

Kalau dicermati uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam ternyata mengalami perkembangan dan perubahan yang dinamis dari masa ke masa. Perubahan dan perkembangan tersebut meliputi; pemaknaan, karakteristik, dalil, dan materi hukum Islam,

---

<sup>49</sup>Misalnya buku: *Akhw l al-Syakhsyiyah, al-Milk fi al-Isl m, al-Tasyri' al-Jin 'i, al- Qadā' fī al-Isl m, al-Ni am al-Hukm fī al-Isl m, Syari'ah al-Islām ka Masā' dār al-Asasi lil al-Dustur, al-Isl m wa 'Alaqah al-Dauliyyah, al-Mab di al-Iqtisād fī al- Isl m, al-Na am al-Mal fī al-Isl m, Asuransi Islam, Perbankan Islam, dan lail-lain.*

hanya saja, intensitas dan peluangnya saja yang tidak selalu sama dan bersamaan. Fakta historis menunjukkan bahwa hukum Islam telah mengalami perubahan secara dinamis dengan bukti-bukti yang cukup akurat.

Disisi lain, konfigurasi acuan pemikiran hukum dalam Islam dapatlah dikategorikan sebagai pemikiran hukum yang mengacu pada pandangan *yuris legis*, yaitu suatu pandangan yang menitikberatkan pada pengkajian hukum secara murni tanpa mengkaitkan dengan hal-hal lain.<sup>50</sup> Pola pandangan seperti ini menjadi pandangan baku dari masa ke masa sejak masa klasik sampai dengan masa modern, bahkan seakan-akan menjadi pandangan tunggal yang tidak beralternatif.

Pandangan monolitik seperti ini mengakibatkan terjadinya monotonisme kajian dalam hukum Islam, bahkan dapat menimbulkan kejenuhan yang ditandai oleh adanya pendaurulangan kajian hukum Islam yang berkepanjangan, tanpa ada keberanian yang berarti untuk menyodorkan konsep alternatif dan pemikiran baru yang berbeda secara mendasar. Pandangan ini memungkinkan terjadi kajian yang lebih terbuka dan membuka peluang kajian yang diversifikatif.

Dalam rangka upaya pemantapan teori hukum Islam terutama di hadapan disiplin lain, tampaknya sosialisasi yuridis empiris di kalangan pembuat hukum (*al-sy ri'*) Islam perlu segera digalakkan untuk mendampingi visi yuri legis yang telah membaku. Melalui upaya demikian dimungkinkan terwujudnya kemapanan teori hukum Islam dalam jajaran

---

<sup>50</sup>Lihat: Soeryono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Cet. I, Jakarta: Rajawali, 1987 ), h. 193.

ilmu sosial pada umumnya. Selebihnya akan berguna bagi kepentingan upaya ekspansi teori hukum Islam ke disiplin lain dalam arti yang luas.

Konsep hukum Islam itu selalu berubah yang diturunkan dari kerangka pikir yang mapan, bukan kerangka pikir yang spekulatif. Kerangka pikir tersebut didasarkan pada empat (4) prinsip, yaitu : *pertama*, hukum Islam adalah hukum yang terbaik di antara hukum yang ada; *kedua*, tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, *ketiga*; hukum itu selalu mengutamakan pendekatan strategis, dan *keempat*, hukum Islam itu selalu mengutamakan pendekatan preferentif.<sup>51</sup>

Ibn Qayyim kemudian merinci prinsip-prinsip tersebut dan menjadikannya sebagai pilar pertama sebagai penyangga utama konsepnya. Ibn Qayyim memilih bahwa hukum Islam adalah hukum yang di antara hukum yang ada. Dia memberikan penjelasan; "Hukum Islam adalah hukum yang terbaik (di antara hukum yang ada). Jelas ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. adalah hukum yang paling sempurna. Rasulullah saw. menyuruh untuk mengajak agar masuk Islam mereka selalu patuh pada Allah dan Rasul-Nya (agama Islam). Beliau tidak menyuruh untuk mendekteksi hati dan mengorek isi batin manusia. Sebab, tolok ukur hukum Allah di dunia ditetapkan berdasarkan pada pernyataan masuk agama (Islam) seseorang, sedangkan hukum dunia

---

<sup>51</sup>Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003 ), h. 54.

ditetapkan berdasarkan keislaman seseorang dan hukum Allah di akhirat ditetapkan berdasar pada keimanan seseorang”.<sup>52</sup>

Sekilas bahwa, ungkapan Ibn Qayyim di atas mengundang kesan opologetis dan romantis. Sebab, pada dasarnya dia baru menyajikan satu alasan bahwa kesempurnaan hukum Islam memiliki dua dimensi ”keimanan” batin dan motivasi spritual yang *ukhrawiyah*. Ini sudah cukup menunjukkan nilai lebih hukum Islam dibandingkan dengan hukum lain yang hanya memiliki satu dimensi, yaitu dimensi lahiriyah-duniawiyah (formal dan profan) saja. Akan tetapi, sebenarnya ada bukti-bukti lain yang dijadikan pendukung pernyataan tersebut.

Di antaranya adalah argumentasi yang didasarkan pada otoritas wahyu Allah swt. ini sesuai dengan firman Allah swt. pada surah *al-M 'idah* ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

”...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-*ridhai* Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>53</sup>

<sup>52</sup>Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, jilid III h. 5. Lihat: pula uraian Ibn Qayyim tentan hukum Islam; yang dikutip oleh Mujiyono Abdillah, dalam bukunya *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial* ( Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003 ), h. 55.

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Edisi Baru; Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 157.

Keunggulan hukum Islam diakui oleh pakar hukum luaran yang bukan muslim seperti Izkue Ansabatu, Shibril, Hocknag; demikian pula diakui oleh para pakar hukum Barat lain dalam berbagai konggres ahli hukum internasional yang kemudian menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi agar hukum Islam dicermati lebih serius guna diambil manfaatnya dalam pengembangan hukum positif Barat Modern.<sup>54</sup>

Dengan demikian, ungkapan Ibn Qayyim tersebut bukan ungkapan yang bersifat apologi dan romantis, tetapi bersifat obyektif dan subyektif. Dikatakan obyektif karena diakui atau tidak demikianlah keadaan hukum Islam dan dikatakan subyektif karena Ibn Qayyim yang telah mampu menangkap sinyal refleksi dari sifat obyektif hukum Islam tersebut.

Pilar kedua sebagai penyangga konsep pemikiran Ibn Qayyim menyatakan bahwa "Penetapan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat"<sup>55</sup> Selanjutnya, pendapat ini menjelaskan lebih rinci tentang pemikiran ini sangat besar manfaatnya, tanpa memahami asas ini keagungan hukum Islam tidak akan dapat diketahui bahkan terkesan sempit sulit, dan penuh dengan beban yang berlebihan.

Selanjutnya, Ibn Qayyim menjelaskan lebih rinci tentang pemikiran ini bahwa "pemikiran ini sangat besar manfaatnya, tanpa memahami asas ini keagungan hukum Islam tidak akan dapat diketahui bahkan terkesan sempit, sulit, dan penuh dengan beban yang berlebihan.

---

<sup>54</sup>Penjelasan lebih rinci hal ini lihat: Yusuf Qardawi, *Syari'ah al-Islam, Silahun li al-Tatbiq fi kulli Zamān wa Makān* (Cet. I, Kairo: tp.,1973) h. 97 – 101.

<sup>55</sup>Ibn Qayyim Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid III h. 6. Lihat pula: Mujiyono Abdillah, dalam bukunya *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), h. 57.

Pokok pikiran tentang tujuan penetapan hukum Islam dapat disederhanakan bahwa hukum Islam itu memiliki superioritas dan otoritas untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan manusia secara menyeluruh. Meskipun kebahagiaan dan kesejahteraan itu adalah tujuan hidup yang universal, namun hukum Islam memiliki konsistensi dan otoritas yang lebih memadai dibandingkan dengan hukum lain untuk mewujudkan hal tersebut.<sup>56</sup>

Hukum Islam selalu mengacu pada kebahagiaan berasas keseimbangan secara utuh, yaitu keseimbangan rasional dan spritual, obyektif universal dan subyektif parsial, duniawi (profan) dan *ukhrawiyah* (eskatalogis).<sup>57</sup>

Konsep kemaslahatan yang diformulasikan oleh Ibn Qayyim sebagai tujuan hukum Islam ini kemudian lebih diperjelas dan dikembangkan oleh pakar lain dengan pola yang lebih mapan, yaitu al-Syathibi (w.790 H/ 1388 M) dalam bukunya yang berjudul *al-Muwafaq t*. Asas kemaslahatan yang demikian ini memungkinkan terjadinya perubahan hukum Islam, sebab konsep kemaslahatan manusia itu bersifat transformatif dan dinamis.<sup>58</sup>

Hukum Islam menjadi pilar pemancang dunia, pedoman kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup dunia dan di akhirat. Inilah yang dimaksudkan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Pilar ketiga, Ibn Qayyim menyatakan bahwa pada dasarnya hukum Islam mewajibkan masyarakat muslim untuk memberantas perilaku menyimpang dengan pendekatan strategis. Artinya, pemberantasan perilaku menyimpang (kemungkaran) itu

<sup>56</sup>Lihat: S. Waqar Husaini, *Sistem Rekayasa Sosial dalam Islam*, terj. Depag. RI. Jakarta, h. 157.

<sup>57</sup>Lihat: al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jld. II, *D r al-Fikr al- 'Arabi*, Kairo. tt. h. 37 – 58.

<sup>58</sup>Lihat: Mustafa Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam* ( Beirut: *D r al-Nahdhah al- 'Arabiyyah*, 1971 ), h.32 – 322.

harus mengacu pada efektifitas keberhasilan agar kembali kepada nilai luhur yang disukai oleh Allah dan Rasulullah, dan pemberantasan tersebut harus menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih parah yang tidak disukai oleh Allah swt. dan Rasulullah. Dalam hal ini, ia memberi ilustrasi berupa kasus pemberantasan raja/penguasa (yang zalim) dengan cara memberontak atau membelot merupakan sumber kejahatan dan fitnah yang berkepanjangan.<sup>59</sup>

Pemikiran bahwa hukum Islam itu mengacu pada pendekatan strategis ini diangkat oleh Ibn Qayyim berdasarkan hasil pengamatannya tentang latar belakang ketetapan hukum Islam berkaitan dengan taktik dan strategi menghadapi perilaku menyimpang.<sup>60</sup>

Dari berbagai kasus penetapan hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan perilaku menyimpang ditemukan bahwa ada perubahan hukum sesuai perkembangan kesadaran hukum masyarakat.<sup>61</sup> Prinsip yang demikian ini dilestarikan oleh para pakar hukum Islam dalam melakukan tindakan perubahan hukum Islam yang landasi semangat sosiomoral dan sosio religius serta sosiokultural masyarakatnya. Sikap para pakar hukum Islam yang demikian bukan berarti tidak konsisten jika suatu ketika mereka mengadakan perubahan hukum. Kebijakan tindakan demikian, justru menunjukkan kearifan dan penghayatan mereka terhadap semangat, nilai dan strategi politik hukum Islam.

---

<sup>59</sup>Lihat: Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, jilid III h. 4.

<sup>60</sup>*Ibid.*, lihat juga Mujiyono Abdillah, *op.cit.* h. 61.

<sup>61</sup>Hal tampaknya selaras dengan kebijakan Rasulullah saw. dalam menghadapi kemungkaran yang tertuang dalam satu hadis yang artinya: "Jika kamu menghadapi kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaannmu. Jika tidak mampu, maka nasehatmu. Jika masih tidak mampu lagi, maka dengan hatimu".

Pilar penyangga konsep Ibn Qayyim yang keempat bahwa penetapan hukum Islam itu mengacu kepada pendekatan preventif (*sad al- ari'ah*).<sup>62</sup> Kalau tujuan itu hanya akan tercapai jika ada sarana dan pengantarnya, maka sarana atau tindakan pengantara, hukumnya sama dengan hukum tindakan sasaran.<sup>63</sup> Secara umum, pemikiran tentang pertimbangan pencegahan, preventif dalam menetapkan hukum Islam lebih lazim digunakan dalam pendekatan *us liyyah* yang secara teknis disebut metode *sad al- ari'ah*.

Setelah mencermati empat penyangga konsep pemikiran Ibn Qayyim bahwa hukum Islam itu selalu berubah dapatlah dinyatakan bahwa : secara umum pilar-pilar pikiran tersebut memiliki daya dukung untuk diabstrasikan dan diturunkan menjadi satu konsep tentang perubahan hukum Islam. Sebaliknya, ada hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan lebih seksama. Artinya, sistematisasi pilar-pilar penyangga konsep di atas merupakan upaya penulis dengan mengabstraksikan pokok pikiran Ibn Qayyim yang penempatannya semula sangat bervariasi.

## 2. Konsep Pemahaman Ketaatan Berhaji

Secara etimologi *term* ketaatan mengandung dua makna, yaitu kata "*tā'ah*" dan (*ib dah*). Kata "*tā'ah*" antara lain bermakna kepatuhan, takut kepada doanya orang yang dizalimi. Sementara *'ib dah* bermakna menyembah, tunduk, taat, cinta kepada Allah. Ketaatan adalah segala sesuatu yang disukai dan diridhai oleh Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan lahir maupun batin. Konsep ibadah memiliki pengertian cinta

---

<sup>62</sup>Lihat: Ibn Qayyim, *op.cit.* h. 134.

<sup>63</sup>Lihat: Mujiyono, *op.cit.* h. 62.



kepada Allah yang sempurna, ketaatan, dan khawatir. Ibadah maknanya taat dengan sasaran patuh dan tunduk hanya kepada Allah swt.

Lebih dipertegas bahwa orang yang beribadah harus taat dan patuh kepada perintah agama dan aturan pemerintah. Keikhlasan tunduk dan cinta kepada Allah merupakan syarat diterimanya ibadah. Dalam beribadah itu, harus ada motivasi. Bentuk motivasi ibadah, yaitu dorongan rasa takut kepada neraka, dorongan atau harapan masuk surga, dan dorongan cinta kepada Allah swt.

Aspek ketaatan dalam ajaran Islam meliputi, Ketaatan kepada keimanan (akidah) yang sah (benar), Ketaatan kepada hukum Tuhan (syari'ah) dan Ketaatan kepada moral Islami (akhlak). Inti dari ketaatan keimanan adalah tauhid atau mengesahkan Allah swt. Bertauhid ini terwujud secara murni dalam bentuk tunduk, patuh, pasrah, dan berserah diri kepada-Nya dan karena Allah swt. semata. Konsekuensinya, penghambaan antarsesama manusia merupakan perlawanan terhadap tauhid. Tiada yang patut disembah selain Allah swt. *l ma' b da illa All h*. Sikap bertauhid menumbuhkan kesadaran bahwa manusia itu sama-sama sebagai makhluk. Perbedaan warna kulit, ras, bangsa, agama bahasa, keturunan, status sosial, dan lain sebagainya merupakan sunnatullah yang seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai pengesahan dan konflik kekerasan.<sup>64</sup>

Ketaatan kepada ajaran syari'ah Islam; yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablun min All h*) terwujud dalam ketaatan dan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Hal tersebut terwujud dalam bentuk ibadah seperti *syah dat*,

---

<sup>64</sup>Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual; Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Cet.I; Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 179.

salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia (*hablun min al-nas*) terwujud dalam mengatur interaksi sosial antar sesama manusia dalam bentuk *mu'amalah* seperti jual-beli, nikah, kepemimpinan, waris, utang-piutang, kriminalitas, damai-perang, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, syaria'at mengatur hak dan kewajiban manusia baik kepada Tuhannya maupun kepada manusia yang lain agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.<sup>65</sup>

Ketaatan kepada ajaran moral Islam (akhlak) bersangkut paut dengan gejala jiwa yang pada akhirnya menimbulkan perilaku. Bilamana perilaku yang timbul ini baik, maka dikatakan akhlak yang baik. Sebaliknya, bila perilaku yang timbul adalah buruk, maka dikatakan akhlak yang buruk. Ukuran baik dan buruk dalam akhlak mengikuti ketentuan agama yang mendasarkan diri pada ketentuan Allah swt.<sup>66</sup>

Ada beberapa indikator standar perilaku ketaatan dalam berhaji itu, yaitu ;  
*Pertama*, motivasi taat dipengaruhi oleh perilaku rasa takut kepada neraka, rasa harap surga, atau karena rasa cinta kepada Allah.<sup>67</sup> Teori ini dikemukakan oleh Ibn Taimiyah,<sup>68</sup> kemudian diperkuat oleh Yusuf al-Qardawi,<sup>69</sup> M. Quraish Shihab,<sup>70</sup> Azhar Arsyad,<sup>71</sup> Hamka Haq,<sup>72</sup> dan Muin Salim.<sup>73</sup>

<sup>65</sup>Lihat, Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, t.th.), h. 12.

<sup>66</sup>Abd. Rachman Assegaf, *op.cit.*, h. 179 – 180.

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 178.

<sup>68</sup>Lihat: H. Masyhuruddin, *Ibn Taimiyah dan Pembaharuan Tasawuf*, dalam Simuh, *et.all (ed.) Tasawuf dan Krisis* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IAIN Walisongo Press, 2001), h. 107.

<sup>69</sup>Lihat: Yusuf Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syariah al-Islam*, diterjemahkan oleh Abdullah Hakam Shah dengan judul: *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h.135-136, Lihat pula: H.A. Qadir Gassing, *Fiqh Lingkungan, Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklif dalam*

*Kedua*, passport taat umat Islam dalam melaksanakan perintah karena ada jaminan hukum, ada kepastian hukum, dan dilakukan dengan panggilan Ka'bah dan tempat suci lainnya.<sup>74</sup>

Teori ini menghasilkan, seseorang dijamin aman jika melaksanakan perintah sesuai peraturan yang telah ditetapkan.<sup>75</sup>

*Ketiga*, tujuan manusia adalah ingin sejahtera dan memelihara hidup.<sup>76</sup> Sebagaimana yang digagas oleh al-Syatibi kemudian diikuti oleh ahli berikutnya seperti Abu Zahra.

*Keempat*, landasan etika dalam perilaku taat, yaitu manusia harus mengendalikan nafsu konsumtif, penghematan, tidak berlebih-lebihan, tidak terjadi pemborosan, dan penumpukan harta.<sup>77</sup>

Alquran menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai pemborosan atau perilaku konsumtif. Demikian juga, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Alquran mengancam penumpukan harta kekayaan dan memiliki sifat sombong.

---

*Pengelolaan Lingkungan Hidup*, "Pidato Pengukuhan Guru Besar" IAIN Alauddin Makassar, tanggal 8 Februari 2005, h. 15 – 22.

<sup>70</sup>Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iy Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), h. 36 – 37.

<sup>71</sup>Lihat: Azhar Arsyad, *Manajemen Pendidikan Bahasa Arab: Sebuah Tinjauan Teologis, Kultural dan Psikodinamik*, "Pidato Pengukuhan Guru Besar" IAIN Alauddin Makassar, tanggal 11 Januari 2001, h. 4.

<sup>72</sup>Lihat: Hamka Haq, *Membangun Paradigma Teologi Bagi Pelaksanaan Syari'at Islam*, "Pidato Pengukuhan Guru Besar" IAIN Alauddin Makassar, tanggal 15 Nopember 2001, h. 4 – 5.

<sup>73</sup>Lihat: Abd. Muin Salim, *Metodologi Tafsir; Sebuah Rekonstruksi Epistimologis*, "Pidato Pengukuhan Guru Besar" IAIN Alauddin Makassar, tanggal 28 April 1999, h. 6.

<sup>74</sup>Ka'bah adalah bangunan yang berbentuk persegi panjang, dibangun dengan batu berwarna biru, tingginya 15 m, panjang pada bagian Utara 10 m, bagian Barat 12,5 m, Selatan 10,25 m, sebelah Timur 11,88 m, di Ka'bah sebaiknya berpasrah diri, khusu' dan rendah diri. Aisyah ra. mengemukakan bahwa sungguh menakjubkan bagi seorang muslim yang memasuki Ka'bah dengan menengadahkan pandangannya ke atas Ka'bah untuk memuji keagungan dan kebesaran Allah. Lihat: Syek Hasan Ayyub, *Pedoman Menuju Haji Mabr r*, dialihbahasakan oleh H. Said Aqil Husin al-Munawar dkk. (Cet. I; Jakarta: PT.Wahana Dinamika Karya, 2002), h. 91 – 92.

<sup>75</sup>Muhammad Baqir, *Fiqih Praktisi; Menurut Alqur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama* (Cet. I; Bandung: Karisma, 2008), h. 377.

<sup>76</sup>al-Syatibi, *al-Muwafaq t*, Juz I (Beirut: D r al-Ma'rifah, t.th.) h.179 – 181.

<sup>77</sup>Abd. Rachman Assegaf, *op.cit.*, h. 180. Lihat pula: QS.*al-Isra'* (17): 26.

Taat diartikan; 1) senantiasa tunduk (kepada Tuhan, pemerintah dsb.) patuh, 2) tidak berlaku kurang, setia, 3) saleh, kuat beribadah. Ketaatan diartikan kepatuhan, kesalehan, ketaatan azas, keadaan tidak mudah merubah ketentuan yang sudah ditetapkan dan konsisten.<sup>78</sup>

Perspektif Islam, semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah *mahd*□*ah* selalu berpihak pada ajaran sosial. Termasuk dalam hal ini ibadah haji, demikian pula *syah dat*, salat dan puasa pun hakikatnya telah sarat dengan pesan-pesan ajaran yang sama, yakni ajaran yang diharapkan selalu responsif terhadap problema sosial.

Puasa dan zakat merupakan upaya nyata untuk membebaskan manusia dari keterikatan dan belenggu materi, sedangkan ajaran zakat dan sedekah menjadi salah satu bentuk uji kembali atas pembebasan manusia dari keterikatan nafsu belenggu manusia.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah memberikan pandangan tentang ibadah ini secara luas dan mendalam. Menurutnya, arti ibadah menurut bahasa adalah taat dan tunduk secara maksimal. Sedangkan, dalam ibadah terdapat suatu unsur baru yang sangat dominan, yaitu unsur cinta yang fitri tanpa unsur emosi yang menyertai.

Adapun pengertian ibadah menurut Ibn Taimiyah, yaitu :

فعال ظاهرة وباطنة<sup>79</sup>

ما يحبّه ويرضاه

<sup>78</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1116.

<sup>79</sup>Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hakikat ibadah yang dikutip oleh H. Minhajuddin, dalam bukunya “Sistematikan Filsafat Hukum Islam” (Cet.I; Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1996), h. 76. Lihat pula: Yusuf al-Qardawi, *al-Ib dah* ( Beirut: D r al-Ma’rifah, t.th.) h. 72.

Artinya :

“Ibadah adalah nama yang mencakup segala segala sesuatu yang disukai dan diridhai oleh Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan batin dan lahir seperti salat, puasa dan haji. Kebenaran dalam pembicaraan, penunaian amanah, kebaktian kepada kedua orang tua, hubungan kekeluargaan dan sebagainya”.

Sesungguhnya ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt. telah mencakup makna merendahkan diri dan cinta yang mendalam kepada-Nya, karena sesungguhnya akhir dari tingkatan cinta itu adalah pengabdian dan cinta kepada Allah swt. harus melebihi cinta kepada segala sesuatu. Bahkan tidak dibenarkan memberikan cinta dan tunduk yang sempurna selain kepada Allah swt. firman Allah dalam QS. *al-Taubah* (10):24 sebagai berikut :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

”Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan-Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik”.<sup>80</sup>

Mengenai ibadah, Ibn Sina membagi ke dalam dua bagian besar. *Pertama*, satu bagian lahiriah, bentuk ibadah ini merupakan pelatihan yang terdiri dari beberapa kegiatan berisi rukun (unsur) dan syarat sahnya kegiatan ibadah. *Kedua*, satu bagian yang

<sup>80</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Edisi Baru; Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 281.

mendalam, yaitu menyaksikan Allah swt. dengan hati bening, suci, dan jiwa yang terbebas dari materi.<sup>81</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ibadah yang disyariatkan Allah swt. mempunyai dua unsur, yaitu :

1. Berpegang teguh kepada yang disyariatkan oleh Allah swt. dan yang diperintahkan oleh Rasul-Nya, baik berupa perintah, larangan atau seruan yang bersifat menghalalkan atau mengharamkan yang dilambangkan dengan unsur taat dan tunduk kepada Allah swt.
2. Sikap berpegang teguh yang bersumber dari rasa cinta kepada Allah swt.

Segala aktifitas yang dilakukan dapat dinilai sebagai ibadah kepada Allah swt. apabila memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran Islam. Adapun usaha-usaha yang dilarang oleh Islam, seperti perdagangan minuman keras, prostitusi, melakukan riba, dan lain sebagainya tidak bisa dikatakan sebagai ibadah.
2. Dalam melakukan semua pekerjaan harus disertai dengan niat suci, yaitu niat yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah swt.
3. Dalam melakukan pekerjaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan Allah swt., tidak berlaku zalim, khianat, menipu, atau merampas hak-hak orang lain.<sup>82</sup>

Ada beberapa dalil *nas* yang menjadi landasan dasar ketaatan seorang hamba kepada Tuhanya, antara lain :

---

<sup>81</sup>Hisham Thalbah et.al., *Ensiklopedia Mukjizat Alqurán Dan Hadis*, Jilid 4 (Cet. I; Jakarta: PT. Sapta Sentosa, 2008), h. 178.

<sup>82</sup>Abd. Rachman Assegaf, *op.cit.* h. 124.

1. QS. *al-Z riyat* (51) : 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya :

”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.<sup>83</sup>

2. QS. *al-An’ m* (6) :162

قُلْ إِن صَّلَاتِي وَنُفْسِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Terjemahnya :

”Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.<sup>84</sup>

3. QS. *al-Qasās* (28) : 77

وَاتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>85</sup>

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 867.

<sup>84</sup>*Ibid.*, h. 216.

<sup>85</sup>*Ibid.*, h. 862.

4. QS. *Ali Imr n* (3) : 102.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

Terjemahnya :

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”.<sup>86</sup>

5. QS. *al-Muj dalah* (58) : 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

”Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>87</sup>

Dengan merujuk pada ayat-ayat di atas, maka akan lebih mudah dalam merumuskan tujuan hidup manusia muslim yang memberi nilai kehidupan manusia paripurna, duniawi ukhrawiyah, berdasarkan perintah Allah swt. rumusan seperti ini, akan mewujudkan manusia muslim yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Allah swt.

QS. *al-Z riy t* (51) : 56 yang telah dikutip dijelaskan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah menghambakan dirinya pada Allah swt. sejalan dengan QS. *al-An'am* (6)

<sup>86</sup>*Ibid.*, h. 96.

<sup>87</sup>*Ibid.*, h. 911.



dan QS. *al-Qasāṣ* (28):77 yang di dalamnya mengandung interpretasi bahwa tujuan hidup muslim secara implisit adalah senantiasa mengabdikan kepada Allah swt. dan tidak lepas dari eksistensi manusia untuk meraih kebahagiaan setelah matinya, yakni kebahagiaan di akhirat kelak. Sedangkan dalam QS. *al-Mujadilah* (58): 11, berkaitan dengan QS. *Ali Imran* (3): 102 yang di dalamnya mengandung interpretasi secara eksplisit bahwa tujuan hidup muslim untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah swt. dan orang yang dalam kategori ini adalah yang bertakwa, serta segala aktifitasnya ia selalu berserah diri (*muslim n*) kepada Allah swt.

Term “*muslim n*” berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sa, la, ma* menjadi *salama* artinya selamat sejahtera, selamat dari bahaya.<sup>88</sup> Dari kata ini membentuk kata “*al-sal m*” secara lugawi memiliki pengertian ketentraman, kedamaian, hormat, selamat, ketundukan.<sup>89</sup>

Hubungan dari kata di atas, Ibn Taimiyah memberikan penjelasan makna “*al-Islam*” mengandung dua makna. *Pertama*, sikap tunduk dan patuh, jadi tidak sombong. *Kedua*, ketulusan dalam sikap tunduk kepada penguasa.<sup>90</sup> Jadi orang yang berislam adalah orang yang taat kepada Tuhan, tidak musyrik, ia taat kepada hukum Tuhan. Hatinya selalu diliputi kedamaian, ketenangan, dan memancarkan akhlak menyenangkan kepada semua orang, dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi, hakikat muslim sebenarnya adalah

---

<sup>88</sup>Kata “*Salima*” mengandung selamat dari bahaya, damai. Lihat: Ahmad Warson Munawir, *Kamus Almunawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet.25; Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 654.

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>Pandangan Ibn Taimiyah ini menjadi dalil bagi Nurcholish Madjid dalam mengembangkan term “*al-Isl m*” kepada pengertian yang lebih universal. Lihat: Nurcholish Madjid *et.all*, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1991), h. 467. Lihat Juga Abd. Rachman Assegaf, *op.cit.*, h.15.

orang yang tidak saja menyerah secara total kepada kehendak Allah swt. dengan mematuhi kodrat ir dat Allah dan fitrah kemanusiaan yang digariskan kepadanya, melainkan juga mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Kalau tujuan hidup muslim sebagaimana dipahami secara baik, maka dapat dirumuskan tujuan akhir hidup muslim sesungguhnya adalah *al-ahd f al-'ulya* (tujuan yang agung dan mulia). Untuk lebih jelasnya, akan disebutkan beberapa tujuan akhir hidup muslim yang dikemukakan para pakarnya, yakni :

1. Fathurrahman dalam mengutip pendapat al-Gaz li menyatakan bahwa tujuan hidup muslim yang paling mulia dan utama adalah beribadah dan ber-*taqarrub* kepada Allah swt. dan kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan dunia akhirat.<sup>91</sup>
2. Ramayulis menyatakan bahwa tujuan hidup muslim mencakup seluruh aspek kebutuhan hidup masa kini dan masa yang akan datang, manusia tidak hanya memerlukan iman atau agama, melainkan juga ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan spritual yang berbahagia di akhirat kelak.<sup>92</sup>
3. Hasan Langgulung menyatakan tujuan akhir hidup muslim untuk kebahagiaan dunia adalah terhindar dari segala yang mencelakakan hidup manusia, seperti penganiayaan, ketidakadilan, siksaan huru hara, kezaliman, pemerasan, dan segala penyakit berbahaya. Kebahagiaan jenis ini diberikan kepada manusia yang beriman dan beramal saleh,

---

<sup>91</sup>Fathurrahman, *Sistem Pendidikan Versi al-Gazali* ( Cet. X; Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 24.

<sup>92</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* ( Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 25.

sedangkan kebahagiaan akhirat sebelum dan sesudah menjalani pengadilan untuk masuk surga atau neraka.<sup>93</sup>

4. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa tujuan hidup muslim adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah, guna membangun dunia ini berdasarkan dengan konsep yang ditetapkan Allah swt.<sup>94</sup>

Tujuan akhir hidup muslim yang telah dikemukakan oleh para pakarnya, kelihatannya memiliki esensi yang sama dengan yang telah dirumuskan oleh Ishaq Ahmad farhan bahwa tujuan hidup muslim bertujuan untuk mencapai tujuan yang utama agama Islam, dan sebagai upaya untuk membentuk kepribadian mukmin dalam rangka meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>95</sup>

Merujuk pada tujuan akhir hidup muslim yang diperintahkan oleh agama Islam sebagaimana yang telah disebutkan, maka selanjutnya penulis dapat merinci bahwa tujuan hidup muslim pada akhirnya adalah :

1. Mengenalkan manusia akan perannya di antara makhluk lain serta tanggung jawab pribadinya di dalam hidup ini.
2. Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup masyarakat.

---

<sup>93</sup>Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: al-Husna, 1987), h. 7.

<sup>94</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan A-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 173.

<sup>95</sup>Ishaq Ahmad Farhan, *al-Tarbiyah al-Islamiyah Bain Ashlah wa al-Ma'sirah* (Cet. II; t.tp.: Dar al-Furqan, 1983), h. 30.

3. Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajar mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya, serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut.
4. Mengenalkan manusia akan pencipta alam ini (Allah swt.) dan beribadah kepada-Nya.

Berkenaan dengan uraian di atas, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setiap orang beriman yang akan mencapai derajat ketakwaan hendaklah melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang dilakukan, hal ini berarti bahwa manusia beriman harus lebih berusaha mendekatkan dirinya pada Allah swt.<sup>96</sup>

Dari hal ini dapat dipahami bahwa manusia diharapkan mempersiapkan dirinya secara utuh untuk memanfaatkan kehidupan dunia sebagai bekal di hari akhirat, agar nikmat apapun yang didapatinya di dalam kehidupan dunia harus diabdikan untuk mencari kelayakan-kelayakan yang tentunya mematuhi kemauan Allah swt.

Ibadah haji dikenal oleh agama-agama selain agama Islam, namun terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara ibadah haji yang disyariatkan oleh Islam dengan ibadah haji yang dipraktikkan oleh agama-agama lain. Misalnya dalam pandangan terhadap tempat-tempat yang dikunjungi dan tatacara pelaksanaannya. Oleh karena ibadah haji sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, maka Mahm d Syaltut menyebut ibadah haji sebagai bentuk ibadah penyembahan manusia sejak zaman purba. Sebelum Islam, haji berarti

---

<sup>96</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Vol. XIV (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 130.

penziarahan ke tempat-tempat tertentu suatu penyembahan dan penyucian diri pada Tuhan yang disembahnya.<sup>97</sup>

Dalam bahasa Arab ibadah haji disebut “*hajj*” atau “*hijj*” yang secara bahasa berarti “*al-qasḍu il*”<sup>98</sup> yang berarti menuju atau mengunjungi sesuatu (biasanya digunakan untuk mengunjungi sesuatu yang dihormati) atau berkunjung yang sepadang dengan istilah bahasa Inggris ‘*pilgrim*’ yang memiliki arti kegiatan yang dilakukan melalui sebuah perjalanan. Muatan spritual yang terkandung di dalamnya membedakan perjalanan haji dengan seluruh jenis perjalanan manusia.<sup>99</sup>

Haji, artinya menyengaja atau menuju, maksudnya sengaja mengunjungi Ka’bah di Mekkah untuk melakukan ibadah kepada Allah swt. pada waktu tertentu dengan cara tertentu secara tertib.<sup>100</sup> Haji, dalam arti harfiah lainnya yakni, mengunjungi tempat-tempat tertentu yang dihormati, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan yang disembah. Sedangkan menurut istilah agama, Haji ialah mengunjungi Ka’bah dan sekitarnya di kota Mekkah untuk mengerjakan ibadah *tāwaf*, *sa’i*, *wukuf* di Arafah dan sebagainya, semata-mata demi melaksanakan perintah Allah dan meraih keridhaan-Nya.<sup>101</sup>

<sup>97</sup>Mahmud Syaltut, *al-Islām Aqidah wa al-Syari’ah* (Kairo: Dār al-Qalam, t.th.), h. 120.

<sup>98</sup>Lihat Abi Husain Ahmad bin Faris Zakariyya, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 29.

<sup>99</sup>M.Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial* (Cet. I; Jakarta: Media Cita, 2005), h. 187 – 188.

<sup>100</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 60 Lihat pula Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI., *Bimbingan Manasik Haji* ( Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, 2003), h. 4.

<sup>101</sup>Muhammad Baqir, *Fiqih Praktisi; Menurut Alqur’ān, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama* (Cet. I; Bandung: Karisma, 2008 ), h. 377. Lihat pula Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI., *Panduan Perjalanan Haji* ( Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, 2003), h. 21 – 27.

Dalam keyakinan masyarakat muslim, haji merupakan salah satu ibadah yang menempati kedudukan istimewa. Ibadah haji salah satu rukun Islam yang lima juga merupakan ibadah yang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat muslim. Itu sebabnya ibadah ini dikenal sebagai ibadah fisik yang non lisan, karena tidak ada untaian kalimat baku sebagai bacaan formal, seperti yang dilakukan dalam ibadah salat dan maupun *syah datain*.<sup>102</sup>

Niat yang ikhlas merupakan syarat utama dalam setiap perbuatan, utamanya dalam pelaksanaan ibadah. Tanpa niat yang ikhlas, ibadah sama sekali tidak berarti dalam pandangan Allah swt. banyak orang salah sangka telah banyak mengerjakan banyak amal kebajikan sepanjang hidupnya, namun seluruh kebbaikannya tidak dapat dijadikan sebagai bekal kelak ketika menghadap kepada Allah swt. pada akhirat kelak disebabkan karena buruknya niat.

Ibadah haji sesungguhnya mengajari seorang hamba melakukan ketaatan secara total kepada sang Pencipta. Haji mendidik untuk menundukkan hawa nafsu, ikhlas dan jujur dalam rangka menjalankan seruannya. Tidak mungkin seseorang mau mengeluarkan uang banyak, menyiapkan fisik yang sehat dan kuat, mengorbankan waktu, berpanas-panasan ataupun sekedar mencium batu hitam "*Hajrah al-Aswad*", jika semua itu tak dilandasi semangat ketaatan, ketundukan, kepasrahan dan keikhlasan dalam memenuhi seruan-Nya.<sup>103</sup> Ketaatan itu juga tampak dalam penjagaan terhadap ritual haji. Setiap jamaah berusaha untuk menjaga rukun dan syarat haji dengan penuh kehati-hatian. Misalnya, tidak

<sup>102</sup> Abu Su'ud, *Hajji: Antara Syara' dan Mitos* ( Cet. I ; Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003 ), h. 69.

<sup>103</sup> Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI., *Petunjuk Perjalanan Haji* ( Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, 2003), h. 3.

ada yang pernah protes alasan harus melakukan *tawaf* (mengelilingi Ka'bah) hingga tujuh kali dengan pelbagai persyaratan tertentu.<sup>104</sup>

Ibadah haji, seyogyanya memiliki makna ganda. Wujud kesalehan individu, yang dipertontonkan dengan ketaatan terhadap Sang Khaliq, dan juga bukti kesalehan sosial yang direfleksikan dengan perilaku setelah berhaji; hati yang luhur, patuh pada aturan, peduli sesama, tanggungjawab dalam bertindak, hati-hati dalam berbuat dan syukur nikmat. Seseorang yang telah berhaji, harus memiliki perilaku yang lebih baik ketimbang sebelum dia berhaji. Itulah sebabnya, tanpa pemaknaan kesalehan sosial, ibadah haji cenderung menggiring pelakunya kepada sikap egois, bahkan hedonis dalam beragama.

Sebagai perjalanan memenuhi panggilan menghadap Allah swt. haji tidak memerlukan uang kecuali secukupnya saja sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menunaikan ibadah haji. Seseorang pergi ke tanah suci untuk memenuhi panggilan Allah, bertamu kepada-Nya dengan menunaikan manasik haji dan memperbanyak ibadah dan zikir kepada-Nya di sela-sela waktu yang tersisa.<sup>105</sup>

Satu-satunya bekal utama yang dipersiapkan sedini mungkin untuk keperluan perjalanan memenuhi panggilan Allah swt. adalah bekal takwa. Takwa merupakan konsep yang paling integral dalam ajaran Islam. Secara singkat, konsep takwa dipahami sebagai "kepatuhan dalam melakukan perintah Allah swt. dan menjauhi larangan-Nya". Takwa ini

---

<sup>104</sup>Muhammad Baqir, *op.cit.*, h. 396.

<sup>105</sup>Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI., *Doa' Dzikir dan Tanya Jawab Ibadah Haji* ( Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, 2010 ), h. i – ii.

menunjukkan kepribadian seorang mukmin yang benar-benar utuh dan sempurna serta senantiasa waspada dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupannya di dunia.<sup>106</sup>

Dalam berbagai jenis motivasi itu, tentu intinya umat Islam berhaji, karena merupakan rukun Islam. Di sisi lain, khusus dalam masyarakat Indonesia, bentuk ketinggian ibadah haji diwujudkan dengan pemberian gelar penghormatan dengan gelar "haji" atau semacamnya, serta adanya hak memakainya kopiah putih sebagai identitas kehajjiannya.

### 1. *Dasar-dasar Pelaksanaan Haji*

#### a. *Dasar Nas* □ :

1) QS. *Ali Imran* : 96 – 97

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya :

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) *maq m* Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam".<sup>107</sup>

2) QS. *al-Haj* (2) : 27 – 28, sebagai berikut :

<sup>106</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 18

<sup>107</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Edisi Baru; Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 91



وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ هُوَ السَّيِّدُ

Terjemahnya :

”Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.<sup>108</sup>

Ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa haji adalah wajib bagi umat Islam, tetapi ada batasan yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan *Bait All h al-Haram* di Mekkah, Saudi Arabia, pada ayat berikutnya dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan ibadah haji dalam bulan yang telah ditentukan waktunya akan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Perjalanan haji menggunakan sarana transportasi yang tersedia selaras dengan perkembangan teknologi dan jarak tempuh serta daerah asal jamaah haji seluruh dunia.

Dari ayat-ayat tersebut dipahami, bahwa kewajiban berhaji didasari dengan kemampuan fisik (badan), bekal dan transportasi menjadi hal paling utama dalam istit 'ah seseorang baik dalam pelaksanaan haji maupun umrah. Ulama sepakat bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan finansial tidak wajib haji dan umrah, maka berhutang bukanlah

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 276.

cara yang dibenarkan oleh syara' agar menjadi orang yang mampu untuk melakukan haji dan umrah.<sup>109</sup>

Ulama sepakat bahwa haji adalah salah satu rukun Islam yang lima sebagaimana termaktub dalam hadits Ibn Umar sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ<sup>110</sup>

Artinya :

'Abdullah bin Musa menceritakan kepada kami, berkata Han alah bin Abu Sufyan memberitakan kepada kami, dari Ikrimah binti Khalid dari Ibn Umar r.a. berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima perkara, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah swt. dan sesungguhnya Muhammad saw. adalah utusan-Nya; mendirikan shalat; menunaikan zakat, melaksanakan haji; dan berpuasa pada bulan Ramadhan." (HR. Al-Bukhari)

Dari hadits tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa ibadah haji menjadi wajib atas seseorang yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai muslim, baligh, berakal, dan memiliki kemampuan. Kemampuan (bahasa agama disebut *istithāh*) yang merupakan salah satu wajib haji, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kemampuan fisik untuk perjalanan menuju Mekkah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban haji. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan fisik, karena usia lanjut,

<sup>109</sup>Al-Saukani, *Fath al-Qadir* (al-Maktabah al-Syamilah), Jilid 5 h.1. Lihat pula: Jaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahally dan Jaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin al-Suyuty, *Tafsir al-Jal lain*, Juz I (Surabaya: Syirkah Alamy, 1345 H.), h. 22 - 23.

<sup>110</sup>al-Bukhari, Ab Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardizbat, *Sahih al-Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 102.

atau penyakit menahun tidak diharapkan kesembuhannya lagi, sedangkan ia mempunyai cukup harta untuk pergi haji, wajib mewakilkan orang lain (biasa disebut '*badal*' ) untuk berhaji atas namanya. Menjadi syarat orang yang mewakili itu terlebih dahulu melaksanakan haji atas namanya sendiri.

2. Perjalanan aman ketika pergi dan pulang, terhadap jiwa dan harta seseorang. Seandainya terdapat kekhawatiran adanya halangan dalam perjalanan misalnya, kawanan perampok atau wabah penyakit, maka ia belum dianggap berkemampuan untuk itu.
3. Memiliki cukup harta untuk keperluan makanan dan kendaraan untuk dirinya sendiri selama dalam perjalanan, maupun untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan, sampai kembali dari melaksanakan ibadah haji.<sup>111</sup>

Said Aqil Husin al-Munawwar menegaskan bahwa syarat umum, syarat wajib haji dapat dibedakan pada dua bentuk. *Pertama*, syarat wajib yang bersifat umum (laki-laki dan perempuan) adalah : 1) Muslim, 2) *Mukallaf*, yaitu orang yang dianggap cakap bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Seseorang belum dikenakan taklif hukum sebelum ia cakap bertindak hukum. Dasar pembebanan hukum adalah *b lig*, berakal dan punya pemahaman. 3) Merdeka, hamba sahaya tidak diwajibkan haji, karena merupakan ibadah *badaniyah* dan *m liyah* yang mesti dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan dan atas biaya sendiri.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup>Muhammad Baqir, *op.cit.* h. 383. Lihat pula: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Fiqih Haji* ( Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, 2002), h. 16.

<sup>112</sup>Lihat: Said Aqil Husin al-Munawwar, *Fikih Haji: Penuntun Jamaah Haji Mencapai Haji Mabr r* ( Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 21 – 24.

Apabila seseorang telah memenuhi semua persyaratan wajib haji, maka dianjurkan dengan sangat agar segera melaksanakannya, jangan sampai ia terhalang darinya pada tahun-tahun berikutnya. Walaupun demikian, menurut ulama dalam mazhab Syafi', ia tidak wajib melaksanakannya segera, tetapi diperbolehkan menundanya sampai waktu lain. Dalam hal ini, ia tidak dianggap berdosa dengan penundaannya itu.<sup>113</sup>

Pendapat ini beralasan bahwa kewajiban berhaji telah ditetapkan pada tahun keenam setelah hijrah Nabi saw. ke Madinah, namun beliau beserta keluarganya dan banyak dari kalangan sahabat baru melaksanakannya pada tahun ke sepuluh, sekiranya hal itu merupakan kewajiban yang harus terlaksana segera, niscaya Nabi saw. tidak akan menundanya.<sup>114</sup>

Dari sisi ilmu *fiqh*, yang namanya rukun mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban. Seperti dalam ibadah haji ada rukun haji dan ada wajib haji. Meninggalkan wajib haji masih dapat digantikan dengan membayar denda (*dam*), sedang rukun haji mutlak untuk dikerjakan dan tidak dapat digantikan dengan denda apapun, karena itu siapa yang meninggalkan rukun haji maka hajinya tidak sah. Demikian untuk menggambarkan betapa haji adalah kewajiban yang sangat utama, bahkan ia adalah salah satu rukun Islam.

Uraian ayat di atas juga memperjelas bahwa pada saat berhaji keagungan dan kebesaran Baitullah yang demikian besar dan tidak terdapat pada tempat lain, karena

---

<sup>113</sup>Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Fiqh Haji*, *op.cit.* h. 6 – 7. Lihat pula: Ali Khozi ed., *Pedoman Menuju Haji Mabr r* ( Jakarta: PT. Wahana Dinamika Karya, 2002), h. 8.

<sup>114</sup>*Ibid.*, h. 384.

Mekkahlah menjadi tempat yang termulia di bumi dan rumah pertama yang dibangun untuk mengagungkan Sang Pencipta.<sup>115</sup>

Adapun keutamaan berhaji itu, dijelaskan oleh beberapa hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut :

1. Haji merupakan penebus dosa dan balasan haji *mabr r* adalah syurga

حد ثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وس قال العمرة الي العمرة كفرة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء

116

Artinya :

“Telah diceritakan oleh Abdullah bin Yusuf, diberitakan oleh Malik bin Sumayyi Maula Abi Bakr bin Abdurrahman dari Abi Shalih al-Samman dari Abu Huraerah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Umrah yang satu dengan umrah yang lainnya merupakan penebus dosa di antara keduanya dan haji yang *mabr r* tidak ada balasannya kecuali surga”

2. Haji menjadikan manusia bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan

حد ثنا ادم حد ثنا شعبة حد ثنا سيار رابو الحكم قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه

117

<sup>115</sup>Hisham Thalbah et.all., *Ensiklopedia Mukjizat Alqurán Dan Hadits*, Jilid 4 (Cet. I; Jakarta: PT. Sapta Sentosa, 2008), h. 209.

<sup>116</sup>*Al-Bukh ri* dalam CD Rom Hadits, *Kit b al-Hajj, Bab Wuj b al-Umrah wa Fadi ilah* hadits nomor 1650.

<sup>117</sup>*Al-Bukh ri* dalam CD Rom Hadits, *Kit b al-Hajj, Bab Wuj b al-Umrah wa Fad ilah* hadits nomor 1442.

Artinya :

“Diceritakan oleh Adam, diceritakan oleh Syu’bah, berkata Sayyar Abu al-Hakam bahwasanya ia mendengar Abu Hasyim berkata bahwa beliau mendengar Huraerah r.a. berkata bahwa beliau mendengar Nabi saw. bersabda:” Barangsiapa yang melaksanakan ibadah haji dan tidak berkata kotor tidak berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia bagaikan seorang bayi yang baru keluar dari ibunya.”

### 3. Haji merupakan jihad yang utama

حد ثنا عبد الرحمن بن المبارك حد ثنا خالد اخبر نا حبيب بن ابي عمرة عن عثشة بنت طلحة عن  
عثشة ام المؤمنين رضي الله عنهما انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لا  
لكن افضل الجهاد حج مبرور

118

Artinya :

”Diceritakan Abdurrahman bin al-Mubarak, diceritakan oleh Khalid, diberitakan oleh Habib bin Abi Amrah dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin r.a., bertanya: Ya Rasulullah ! Kami memandang jihad adalah perbuatan yang paling mulia, apakah kami juga bisa berjihad ?” Rasulullah menjawab: ”Tidak, akan tetapi semulia-mulia jihad adalah haji *mabr r*”

Dari susunan periwayat hadits yang dijadikan sebagai sampel hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga hadits tersebut termasuk kategori hadits *marfu'*, langsung kepada Nabi Muhammad saw. dan tidak mengalami keterputusan *sanad*, serta para periwayatnya tidak diragukan eksistensinya sehingga dapatlah dikategorikan sebagai hadits *sahih*, dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat, 2) Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang *muhk m* (ketentuan hukum yang tetap), 3) Tidak bertentangan dengan hadits *mutawatir*, 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama *salaf*, 5) Tidak bertentangan dengan

<sup>118</sup>Lihat: *ibid.*, hadits nomor 1423.

dalil yang pasti, 6) Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.<sup>119</sup>

#### 4. Dalil-dalil Indikator Ke-mabruran Ibadah Haji

Berkata Syekh Hassan Muhammad al-Mussyat menjelaskan tentang kriteria haji mabrur:

120

Artinya :

“..Berkata sebagian diantara mereka bahwa ke-mabruran haji seseorang apabila tidak kembali melakukan dosa, riya, sombong, perkataan dan perbuatan keji dengan tanda-tanda mampu membentuk kepribadiannya setelah melaksanakan haji menjadi lebih baik dari pada sebelumnya dan tidak lagi mengulang maksiat”.

Senada hal tersebut Ahmad Atsurbashi mengatakan :

121

Artinya :

“Diantara tuntutan haji mabrur ialah orang yang telah berhaji tidak boleh melalaikan kewajibannya, tidak membiarkan adab dan sunnah-sunnahnya, memperbanyak taat, ibadah dan infaq, berakhlak mulia, memberi makan atau bantuan sesuai kemampuan dan berkata dengan ucapan yang lemah lembut”.

<sup>119</sup>Salahuddin bin Ahmad al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), h. 126. Bandingkan dengan M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang: 1992), h. 44.

<sup>120</sup>Departemen Agama RI., *Panduan Pelestarian Haji Mabrur* ( Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006 ) h. 45.

<sup>121</sup>*Ibid.*, h. 62 dikutip dari Ahmad Atsurbashi dalam bukunya, *Yas'alunaka Fiddini wal-hayat*, jilid 5 h. 78.

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut :

122

Artinya :

“Haji *mabr r* itu tidak ada balasan lain kecuali surga, dan ke-*mabr r*-an haji itu ditandai dengan memberikan makan serta menyebarkan kedamaian kesejahteraan” ( HR. Ahmad ).

Potret haji *mabr r* tidak hanya dinilai pada saat proses ibadah haji berlangsung, tetapi juga harus dinilai sejak persiapan termasuk bekal yang halal. Indikator ke-*mabr r*-an haji adalah tampak pada kepribadian dan sikap-sikap berikut :

1. Patuh melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah swt., patuh melaksanakan *salamat*, konsekuen membayar zakat, selalu rukun dengan sesama umat manusia dan sayang kepada sesama makhluk Allah swt.
2. Konsekuensi meninggalkan yang dilarang oleh Allah swt., baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, seperti syirik, riba, judi, zina, membunuh orang, menyakiti orang lain, *bid'ah* dan lain-lain.
3. Gemar melaksanakan ibadah-ibadah sunnat dan amal saleh serta berusaha meninggalkan perbuatan yang makruh dan tidak bermanfaat.

---

<sup>122</sup>al-Baihaqi, Program Mausu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutb al-Tis'ah, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Kitab Baqiy Sanad al-Ansar, Bab Baqiy al-Musnad as-Sabiq hadits 24764



4. Aktif berkiprah dalam memperjuangkan, mendakwahkan Islam, dan sungguh-sungguh dalam *'amar ma'ruf nahi munkar*.
5. Memiliki sifat dan sikap terpuji seperti sabar, syukur, tawakkal, *tas muh*, pemaaf, *taw dhu*, dan lain-lain.
6. Malu kepada Allah swt. untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang-Nya.
7. Semangat dan sungguh-sungguh dalam menambah dengan mengembangkan ilmu pengetahuan.
8. Bekerja keras dan tekun untuk memenuhi keperluan hidup dirinya, keluarganya, dan dalam rangka membantu orang lain serta berusaha untuk tidak membebani dan menyulitkan orang lain.<sup>123</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka nilai ke-*mabr r*-an haji dalam *ubudiyah* dapat diaktualisasikan melalui beberapa tahapan baik *ubudiyah* yang bersifat *mahdhu* (ibadah murni), maupun *gairu mahdhu* (ibadah yang tidak murni). Ibadah *mahdhu* seperti *salat*, zakat, puasa dan haji, sedangkan *gairu mahdhu* meliputi; ibadah sosial, sabar, syukur, bersikap jujur, berakhlak mulia dan menjaga kebersihan kejernihan hati dan lain-lainnya.

Dambaan setiap muslim yang menunaikan ibadah haji adalah memperoleh haji *mabr r*. Namun untuk mencapai haji yang *mabr r* tidak semudah yang diinginkan karena untuk mencapainya, salah satu prasyaratnya adalah pemahaman mengenai manasik haji yang utuh. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, proses pembelajaran dalam bimbingan manasik haji yang diarahkan pada kemandirian, menuju

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, h. 54 – 55. Lihat pula: Syek Hasan Ayyub, *Pedoman Menuju Haji Mabr r* (Jakarta: PT. Wahana Dinamika Karya, 2002), h. 2 – 3. Lihat juga: Yusuf al-Qardawi, *al-Ib dah* (Beirut: D r al-Ma'rifah, t.th.) h. 294.

kesempurnaan ibadah haji sesuai tuntunan ajaran agama Islam, merupakan suatu keniscayaan.

Tentang status matan hadits di atas, dari redaksi bahasa dan makna kandungan hadits tidak ada satu pun *nas* yang bertentangan dengannya, baik dari Alquran maupun dari *nas*-*nas* hadits, bahkan jika dianalisa lebih jauh, maka ditemukan beberapa ayat-ayat Alquran yang dapat mendukung matan hadits tersebut di atas, di antaranya adalah pada :

1. QS *al-Baqarah* (2): 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Terjemahnya :

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya ber-*fidyah*, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar *fidyah*) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekkah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.<sup>124</sup>

<sup>124</sup>Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 32.

## 2. QS.al-M idah (5): 2 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>125</sup>

Pada sisi lain tampaknya ibadah juga menjadi sebagai penyempurnaan pelaksanaan rukun Islam bagi seorang muslim. Hal menunjukkan bahwa memang secara logika orang yang telah sempurna melaksanakan ibadah yang tertuang dalam rukun Islam akan senantiasa memperoleh pahala dan ampunan dosa atas segala upaya dan usaha yang keras dilakukannya dalam mencapai ridwan Allah swt.

Dari tiga hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hadits-hadits yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah haji jika ditinjau dari segi sanad dan matannya, telah memenuhi persyaratan dan kaidah-kaidah kesahihan hadits.

### b. Dasar Peraturan Perundang - Undangan

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 141.

- 1) UUD 1945 Pasal 29, Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 1999 dan Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji ibadah haji.
- 2) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 396 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji.
- 5) Peraturan Presiden RI. Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia.
- 6) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur persyaratan dan Pendaftaran Jamaah haji.<sup>126</sup>

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama RI., baik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten, yang menjadi harapan semua muslim untuk melaksanakan kewajibannya bagi yang telah memenuhi persyaratan mampu baik secara fisik, materi, terlebih tinggi lagi mampu dalam pelaksanaan manasik.

### **c. Tujuan Haji dalam Hukum Islam**

---

<sup>126</sup>Departemen Agama RI., *Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Haji* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010, h. 12.

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah (*Ka'bah*) untuk melakukan beberapa amalan, antara lain ; *wukuf*, *tā'awaf*, *sa'i* dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah swt. dan mengharapkan ridhah-Nya. Haji merupakan rukun Islam ke lima yang pelaksanaannya hanya dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Zulhijjah setiap tahun, sebagaimana dapat dipahami dari QS. *al-Baqarah*: 197 sebagai berikut :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

Terjemahnya:

”(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh *rafats*, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal”.<sup>127</sup>

Rangkaian kegiatan manasik haji, baik yang berupa rukun maupun syarat wajib seluruhnya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syari'at antara lain *miqat* yang berlokasi permanen; Mekkah, Arafah, Mina dan Muzdalifah. Semua tempat ini berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi dan tidak berubah hingga akhir zaman.

<sup>127</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 48.

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu (*istitā'ah*) mengerjakannya sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan ke dalam dua pengertian, yaitu :

*Pertama*, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu yang antara lain meliputi kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji.

*Kedua*, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan (negara dan pemerintah) mencakup antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas akomodasi, transportasi, dan hubungan antarnegara, khususnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.<sup>128</sup>

Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sebagai kewajiban, ibadah haji merupakan jalan menuju nilai keagamaan seorang muslim untuk menjadi muslim yang *kaffah*. Ali Syari'ati memandang semangat (motivasi) haji sebagai berikut:

”Jika ditinjau dari sudut pandang yang praktis dan konseptual, maka rukun-rukun Islam yang terpenting yang memberikan motivasi kepada *nation* muslim dan yang

---

<sup>128</sup>Achmad Nidjam, Alatief Hanan, *Manajemen Haji* (Cet. IV, Jakarta: Media Cita, 2006), h. 6. Bandingkan dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Panduan Perjalanan Haji*, *op.cit.*, h. 1

membuat warga-warganya sadar, merdeka, terhormat, serta memiliki tanggung jawab sosial adalah tauhid, jihad, dan haji”<sup>129</sup>

Term *man istatā'ah ilayhi sabilah* juga dapat dipahami meliputi kesempurnaan haji, selain sebagai syarat haji. Hal ini dapat memberikan makna bahwa selain syarat-syarat secara *fiqhiyah* juga dibutuhkan syarat adanya pengetahuan dalam memahami persoalan-persoalan yang menyangkut masalah haji. Adapun beberapa amalan haji yang dilakukan ketika seorang muslim melaksanakan ibadah haji : a) *Ihr m*, b) *Tā'awaf*, c) *Wukuf* di Arafah, d) Bertolak dari Arafah menuju Masyāril Haram, e) Melempar jumrah dan menyembeli kurban di Mina, 6) *Sa'i* antara Sā'afa dan Marwah, dan f) *Tahallul*.

Adapun penjelasan dari beberapa istilah di atas sebagai rangkaian pelaksanaan tahapan-tahapan ibadah haji sebagai berikut :

#### 1) *Ihr m*

*Ihr m* adalah permulaan memasuki ibadah haji dan ibadah umrah. Secara bahasa *Ihr m* berarti “pengharaman”, dinamakan demikian karena mengharamkan atau menghalangi sang *muhrim* (orang berihram) dari hal-hal yang dibolehkan sebelum *ihr m*.<sup>130</sup> Kata *ihr m* juga bermakna “kesucian”. Maksudnya, dengan *ihr m* seseorang

<sup>129</sup>Lihat: Ali Syariati, *Ummah dan Imamah* (Cet. III, Jakarta: YAPI, 1990), h. 23.

<sup>130</sup>Makna ini dapat pula dilihat pada istilah “*takbiratul ihr m*” yang bermakna bahwa *takbir* yang dilakukan tersebut mengharamkan melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan di luar waktu *ṣalat*. *Ihr m* bermakna “larangan-larangan” karena dalam pelaksanaannya terdapat banyak larangan yang tidak boleh dilanggar. Seperti larangan melakukan hubungan suami isteri, larangan melakukan kejahatan, larangan bertengkar, larangan memakai pakaian yang dijahit, larangan melakukan akad nikah, larangan memotong kuku, larangan memakai wangi-wangian, larangan membunuh binatang, dan larangan memakan hasil buruan. Lihat al-B ḥi al-Khullī, *Kitab Haji dan Umrah*, penerjemah Fuad M. Facruddin (Kairo: Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam.t.th.), h. 25. Lihat juga Ishak Farid, *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1999), h. 53 – 54.

dapat mensucikan dirinya dan hatinya, atau memusatkan pikiran dan usahanya untuk melaksanakan ibadah haji.

*Ihr m* ditandai dengan mengenakan pakaian *ihr m* berwarna putih. Bagi laki-laki, pakaiannya terdiri dari dua lembar kain yang tidak terjahit, satu lembar kain untuk menutup tubuh bagian bawah (kain ini disebut *izar*), dengan betis terbuka sehingga memudahkan untuk berjalan, dililitkan pada pinggang hingga membentuk lipatan dan tidak mudah lepas atau dapat juga dengan mengenakan pengikat. Satu lembar kain lainnya untuk menutup tubuh bagian atas (kain ini dinamakan *rida*) dikenakan menyilang melewati pundak kiri dan disimpulkan pada pinggang sebelah kanan, tidak dibolehkan memakai penutup kepala. Sedangkan pakaian ihram wanita sama halnya dengan pakaian biasa, yaitu pakaian putih yang menutupi seluruh anggota badan, kecuali muka dan telapak tangan. Adapun waktu pelaksanaan *ihr m* menurut jumhur ulama adalah bulan syawal, Zulqaidah dan 10 Zulhijjah.<sup>131</sup>

Ketika mengenakan pakaian *ihr m*, manusia sebenarnya melepaskan segala label-label duniawi, semua keangkuhan, semua kebanggaan yang bersifat duniawi, kemudian menggunakan kain kafan yang menandakan bahwa manusia tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Bila semua ini dilakukan secara maksimal, maka seorang muslim bagaikan lahir kembali dari perut ibunya. Dalam artian, bahwa seorang haji mempunyai pandangan baru terhadap dunia, terhadap keluarganya, hartanya dan segala perbuatannya. Ia akan memandang bahwa kehidupan ini akan berharga bila instrumental dunia

---

<sup>131</sup>Nashir bin Musfir al-Zarkaniy, *Ibh j al-Hajj* (Cet. IV; Mekkah: Maktabah al-Mukarranah, 1422 H.), h. 33.



menjadikan dirinya semakin bertakwa kepada Allah swt.<sup>132</sup> Sehingga *ihr m* ini dapat dimaknai sebagai gambaran kematian.<sup>133</sup>

Pesan universal kehidupan yang dapat diambil dari pelaksanaan *ihr m*, antara lain; *Pertama*, mengingatkan kepada manusia bahwa dari segi fisik, kehidupan akhirnya sama persis ketika dia terlahir ke dunia ini yakni tubuh tanpa pakaian, yang dibutuhkan untuk memulai dan mengakhiri hidupnya adalah sehelai kain yang tidak berjahit.

*Kedua*, setelah lahir setiap manusia akan melalui siklus tumbuh-kembang yang relatif sama pula sampai matinya, maka semuanya itu memberikan isyarat adanya kesetaraan dan kesamaan kebutuhan fisik antara manusia yang satu dengan lainnya. Hal ini seakan-akan merupakan sebuah penegasan dari Allah swt. bahwa manusia sama di hadapan Allah swt. yang membedakan hanyalah takwa.<sup>134</sup>

*Ketiga*, agar jamaah haji tidak terganggu dengan tuntutan kebutuhan, kesenangan atau kenikmatan terhadap semua simbol-simbol fisik yang sering menjadi diminati oleh setiap manusia.

*Keempat*, menurut ulama bahwa memakai *ihr m* berarti juga meninggalkan pakaian dosa dan menggantikannya dengan baju halal, suci atau baju ketaatan.<sup>135</sup>

*Ihr m* merupakan ikrar niat dengan mengkondisikan fisik (memakai pakaian *ihr m*) untuk memulai proses pencarian jati diri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi

---

<sup>132</sup>Lihat Kamaruddin Hidayat, *Dari Pondok Indah ke Makkah al-Mukarramah*, kata pengantar pada Nurcholish Madjid, *Perjalanan Relegius Umrah dan Haji* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), h. Xvi.

<sup>133</sup>Nashir bin Musfir al-Zakarniy, *op.cit.* h. 13.

<sup>134</sup>Lihat, QS. *al-Hujar t* (49) : 13.

<sup>135</sup>Jawadi Amuli, *Shahboh-ye-Shafo*, diterjemahkan oleh Najib Huesi al-Idrus dengan judul “Hikmah dan Makna Haji” (cet. IV; Jakarta: Cahaya, 2006), h. 34 – 35.

Ibrahim a.s. dengan berpakaian *ihr m* membantu manusia dalam mengkondisikan jiwa berpikir dan bertindak laku dalam upaya menghayati perjuangan Nabi Ibrahim a.s.<sup>136</sup>

Dalam membongkar “tabir” yang menutupi jati diri manusia sebagai hamba. Tabir yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bersifat duniawi yang menutupi segala kehidupan manusia sehingga menyebabkan manusia lupa kepada Allah swt.

## 2) *Tāwaf*

Setelah melaksanakan *ihr m*, jamaah haji menuju ke Makkah untuk melakukan *tāwaf*.<sup>137</sup> Secara bahasa *tāwaf* berarti mengelilingi, yakni berputar mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali putaran dimulai sudut *Hajrah al-Aswad*. Selama melakukan *tāwaf* seorang jamaah haji harus berusaha memusatkan seluruh konsentrasi dan kesadaran tertuju hanya kepada Allah swt. dengan memperbanyak bacaan zikir atau dengan membaca doa-doa *tāwaf*.

*Tāwaf* yang dilakukan Adam pada hakikatnya adalah meniru malaikat mengelilingi Baitul Makmur sebagai wujud permohonan ampun karena telah berani membantah Allah swt. Ketika itu Allah murka terhadap para malaikat sehingga para malaikat memohon ampun kepada Allah swt. dengan mengitari ‘arsy atau *Bait al-Makmur*

<sup>136</sup>Kamaruddin Hidayat, *op.cit.*, h. 144.

<sup>137</sup>Dalam pelaksanaannya terdapat tiga jenis *tāwaf*, yaitu: 1) *Tāwaf qudum*, yaitu *tāwaf* yang dilakukan ketika pertama kali memasuki kota Makkah, hukumnya sunat. 2) *Tāwaf if dah*, yaitu salah satu rukun dalam ibadah haji dan umrah, 3) *Tāwaf wada’* atau *tāwaf* perpisahan, yakni *tāwaf* yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Makkah, biasa juga disebut dengan *tāwaf sādah* (memunculkan). Artinya memunculkan diri sebelum meninggalkan Makkah. Adapun hukumnya sunat. Lihat Sudirman Tebba, *Haji Pasca Perang Teluk* (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 47.

sebanyak tujuh kali dengan mengharap ridā Allah swt. sampai Allah ridā kepada mereka.<sup>138</sup>

Pada saat Ka'bah<sup>139</sup> berfungsi sebagai kiblat dalam pelaksanaan ibadah *sāalat*, maka pada hakikatnya yang dihadapi dalam salat adalah Allah swt. Ka'bah yang berarti kubus adalah rumah ibadah yang pertama dibangun di atas bumi ini.<sup>140</sup> Demikian juga dalam pelaksanaan *tāawaf*, pada hakikatnya yang menjadi pusat *tāawaf* adalah Allah swt. hal ini memberikan makna kepada umat manusia bahwa dalam kehidupannya di dunia ini dari mana pun asalnya pada dasarnya akan terfokus pada satu titik tujuan, yaitu Allah swt.

### 3) Wukuf di Arafah

Secara bahasa wukuf berasal dari kata “*waqafa*”, yang artinya singgah sebentar untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Sedangkan ‘Arafah berasal dari kata ‘*arafah* artinya mengenali atau menyadari.<sup>141</sup>

Dengan demikian, wukuf di Arafah bermakna singgah sejenak untuk menyadarkan diri dari dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, menyadari bahwa manusia selama ini telah tenggelam dan terbelenggu dengan gemerlapnya kehidupan dunia, dan untuk mengenali jati diri manusia sesungguhnya.

<sup>138</sup>Lihat: QS. *al-Baqarah* (2): 30, meskipun menentang Allah swt. dengan mengatakan bahwa mengapa Allah swt. akan menciptakan di muka bumi ini orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, ketika Allah swt. akan menciptakan manusia di muka bumi ini.

<sup>139</sup>Zakiah Daradjat, menyebutkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat, sekitar 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Ka'bah pada saat itu berfungsi sebagai tempat *tāawafnya* malaikat di bumi. Zakiah Daradjat, *Haji Ibadah yang Unik* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Ruhama, 1992), h. 18.

<sup>140</sup>Lihat: QS. *Alimran* (3) : 96.

<sup>141</sup>Said Ibn Abdil Qadir Basyantar, *Khazanah Ilmu Haji dan Umrah* (Cet. I, Bandung; Media Cendekia, 2003), h. 281.

Wukuf merupakan rukun haji yang kedua, bagi haji *tamattu'*, setelah menyandang *ihr m*, jamaah haji segera menuju ke padang Arafah untuk menjalani wukuf, sedangkan bagi haji *ifr d* dan haji *qir n*, wukuf di Arafah dilakukan setelah *tawaf qudum*.

Padang Arafah merupakan tempat penyelenggaraan manasik yang terjauh, yakni sekitar 19 km. di sebelah barat daya kota Makkah, sedangkan tempat penyelenggaraan yang terdekat ialah Mina, yakni sekitar 4 km.

Menurut pandangan ulama bahwa asal penamaan Arafah berasal dari:<sup>142</sup> *Pertama*, para malaikat mengingatkan Nabi Adam a.s. agar mereka mengakui dosa-dosanya dan memohon ampunan kepada Allah swt. Dengan kata lain, manusia pertama yang diturunkan ke muka bumi ini bertempat di padang Arafah. *Kedua*, ketika Adam dan Hawa diturunkan di surga, keduanya berpisah tempat. Adam di India dan hawa di Jeddah.<sup>143</sup>

Setelah seratus tahun kemudian mereka bertemu di Padang Arafah<sup>144</sup>, tepatnya di Jabal Rahmah (bukit kasih sayang). *Ketiga*, Ibrahim a.s. diberitahu oleh Jibril cara menunaikan manasik haji di tempat ini. Jibril bertanya: “’*arafta?*” (tahukah anda ?), Ibrahim menjawab “’*araftu*” (aku mengetahuinya). *Keempat*, pemberian nama Arafah berkaitan dengan penamaan hari-hari, sebagai contoh;<sup>145</sup> Hari kedelapan Zulhijjah disebut *tarwiyah* yang berarti merenung atau berpikir, erat kaitannya dengan peristiwa yang dialami

---

<sup>142</sup>Muhammad bin Ahmad al-Hanafi, *Kisah Para Rasul*, diterjemahkan oleh Mahfud dan Ali Efendi (Jakarta: Rihla Press, 2003), h. 169 – 189.

<sup>143</sup>Itulah sebabnya disebut Jeddah, karena bermakna “Nenek”, artinya nenek manusia pertama diturunkan di tempat itu sehingga disebut “Jeddah”.

<sup>144</sup>Arafah berasal dari kata ‘*arafah-ya’rifu*, yang berarti bahwa “Arafah” bermakna “tahu” atau “kenal”

<sup>145</sup>Iwan Gayo, *Buku Pintar Haji dan Umrah* ( cet. II: Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2001 ), h. 132.

oleh Nabi Ibrahim a.s., yaitu pada hari *tarwiyah* ini Nabi Ibrahim a.s. bermimpi mendapat perintah untuk menyembelih anaknya, Ismail.<sup>146</sup>

Pada malam itu sampai besoknya Nabi Ibrahim gelisah, terus-menerus merenung dan berpikir, mempertanyakan apakah mimpinya itu berasal dari Allah swt. atau dari setan. Karena ragu beliau tidak segera melaksanakan mimpinya pada siang harinya.

Pada malam kesembilan, Ibrahim a.s. bermimpi melihat malaikat mengingatkan dengan perintah yang sama. Setelah mimpi yang kedua inilah, Nabi Ibrahim a.s. yakin bahwa mimpinya itu merupakan wahyu dari Allah swt. oleh karena itu, hari kesembilan ini dinamakan “*’arafah*” (mengetahui).

Pada malam kesepuluh. Nabi Ibrahim a.s. bermimpi ketiga kalinya dengan mimpi yang sama pula, maka keesokan harinya (10 Zulhijjah) Nabi Ibrahim a.s. melaksanakan perintah itu, karena itu disebut hari “*’nahar*”, yang berarti hari penyembelihan.

Wukuf dengan amalan yang dianjurkan di Arafah merupakan waktu dan tempat untuk membongkar tabir penutup jati diri. Untuk memudahkan pembongkaran itu, jiwa harus dibebaskan dari simbol-simbol fisik, seperti disimbolkan dengan pakaian putih tanpa jahitan, berpindah dari situasi alam yang sejuk ke suatu alam yang tandus dan panas. Kondisi ini akan sangat memungkinkan memberi pelajaran kepada manusia tentang pentingnya melepaskan simbol-simbol fisik dan menunjukkan tingkat persamaan antara manusia.

---

<sup>146</sup>Lihat: QS. 37: 102 – 107.

#### 4) Bertolak dari Arafah menuju *Masy'aril Har m*

Menjelang terbenamnya matahari, jamaah haji secara berbondong-bondong bergerak menuju padang *masy'aril har m* di Muzdalifah sehingga padang Arafah benar-benar kelihatan sunyi, tidak satu pun orang yang tertinggal di sana, perkemahan segera dirobohkan. Kesunyian di Padang Arafah ini berlangsung sepanjang sebelum adanya wukuf pada tahun berikutnya.

Memasuki malam tanggal 10 Zulhijjah merupakan sebaik-baik malam. Pada malam ini jamaah haji melaksanakan wukuf (singgah) kedua di *Mas'aril har m* sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. *al-Baqarah* (2): 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>147</sup>

Fokus perintah dalam ayat tersebut di atas adalah diperintahkannya kepada jamaah haji untuk berzikir kepada Allah swt. di *Mas'aril Har m*, yakni di Bukit Quzah di Muzdalifah, sebagai bentuk kelanjutan zikir dari Arafah. Zikir di Arafah mengarah kepada penyadaran akan dosa-dosa dan penyadaran tentang jati diri manusia itu, sedangkan zikir di

<sup>147</sup>Departemen Agama RI., *op.cit.* h. 79.

*Mas'aril har m* mengarah kepada penyadaran akan tujuan yang hendak dicapai, ke neraka atau ke surga.<sup>148</sup>

Jika wukuf di Arafah berlangsung pada siang hari, maka *m bit* di *Mas'aril Har m* berlangsung malam hari sampai terbit fajar. Jika wukuf di Arafah melambangkan kebangkitan dari kubur untuk menghadiri pengadilan akhirat, maka sebagai kelanjutannya, wukuf di *Masy'aril har m* di tengah malam gelap melambangkan perjalanan seseorang menuju surga melewati *sir t al-mustaqim*. Amalan yang dilakukan di Muzdalifah adalah *salat* Magrib dan Isya dengan menjamak zikir.<sup>149</sup> Di Muzdalifah digunakan waktu untuk *m bit* dan memungut batu-batu kerikil guna melempar *jumrah* di Mina. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS *al-Baqarah* (2): 198

Beberapa hikmah yang dapat ditarik dari *m bit* di Muzdalifah, adalah: *Pertama*, tahap persiapan pembekalan. Setelah melewati tahap Arafah, yang berfungsi membuka tabir yang menutup jati diri manusia, maka masuklah manusia kepada persiapan atau pembekalan untuk pengujian tauhid yang baru tercerahkan.

Ujian itu bertujuan untuk menilai manusia mampu mempertahankan keyakinan tauhidnya jika diperhadapkan dengan musuh manusia yang sangat berat, yakni setan. Dengan kata lain, ujian itu diperlukan untuk membuktikan benar-benar apakah telah melakukan taubat-*nasihah* (taubat sungguh-sungguh) atau belum di Arafah. Ujian itu adalah “perang” melawan setan, musuh yang sangat nyata dalam hidup manusia. Perang itu

---

<sup>148</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Bekal Menuju Tanah Suci: Haji, Menangkap Makna Fisikal dan Spritual* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 145.

<sup>149</sup>Muctar Adam, *Tafsir Ayat-Ayat Haji* ( cet. VII; Bandung: Mizan, 1978), h. 135.

harus dihadapi oleh setiap manusia yang telah melawan pintu seleksi yaitu pintu taubat. Ujian ini dilakukan di Mina.

Olehnya itu, persiapan “bekal atau strategi” dalam menghadapi musuh perlu dipersiapkan sematang-matang jika ingin menang dalam peperangan. Strategi yang jitu dalam melawan setan. Salat dan zikir sebagai bentuk komunikasi dengan Allah swt. yang tidak boleh terputus, hal ini dapat dihayati dari teladan yang diberikan oleh Ibrahim a.s. ketika dengan sepenuh hati menyerahkan dirinya kepada Allah swt. untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian guna pembuktian keteguhan jati dirinya, melalui tata cara yang sangat “berat”, yaitu pembakaran dan penyembelihan”.<sup>150</sup> Olehnya itu, para ulama sepakat bahwa kata *m bit* di Muzdalifah wajib mengerjakan salat Magrib dan Isya dengan menjamak.<sup>151</sup>

Dari segi rukun Islam, masuk ke tahap *kedua* setelah meyakini dan menyaksikan kebenaran *syah dat* di Arafah, maka dapatlah memasuki tahap berikutnya, yakni *salat*. Bukankah disunnahkan (sebagian ulama mengatakan diwajibkan) kepada para jamaah untuk melaksanakan salat Magrib dan Isya di Muzdalifah, sebagai simbol pembekalan. Tidak mungkin orang yang tidak mengakui *syah dat* akan masuk ke dalam tahap salat sebagai rukun kedua dari rukun Islam. Secara otomatis juga tidak dapat memasuki tanah haram karena wilayah itu hanya untuk orang bersyah dat. Jika seseorang tidak sungguh-sungguh melakukan taubat di Arafah, maka secara spritual mengisyaratkan kurangnya persiapan untuk memasuki Muzdalifah.

---

<sup>150</sup>Maisarah Zas, *Haji dan Pencerahan Jati Diri Muslim* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 154.

<sup>151</sup>Muctar Adam, *loc.cit.*



### 5) Melempar *jumrah* dan menyembelih kurban di Mina

Setelah melaksanakan salat subuh, ketika malam mulai memudar menjadi remang-remang, jamaah haji harus segera bergerak menuju Mina untuk melempar *jumrah* dan menyembelih kurban. Inilah siang tanggal 10 Zulhijjah, yang disebut sebagai *yaum al-nahr* (hari penyembelihan kurban) dan disebut juga Idul Adha.

Peralihan malam ke siang hari melambangkan peralihan dari kehidupan dunia kepada Allah swt. kepada kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia manusia harus berjuang keras untuk mengalahkan segala godaan yang dibisikkan oleh iblis maupun godaan yang dibisikkan oleh nafsu manusia sendiri.

Mina menurut Ali Syariati dapat berarti cinta.<sup>152</sup> Amalan yang dilakukan di Mina adalah melontar tiga *jumrah*. Hari pertama (hari *nahr*) melontar *jumrah* '*aqabah*'<sup>153</sup> saja. Hari kedua dan seterusnya melontar *jumrah* berturut-turut mulai dari *ul* , *wust* , terakhir '*aqabah*', masing-masing sebanyak tujuh kali. Setiap melontar *jumrah* mengangkat tangan kanan sambil membaca *Allahu Akbar*. Di Mina dilakukan penyembelihan hewan kurban.<sup>154</sup>

Dipahami dalam perintah *m bit* di Mina, bahwa pelaksanaan ibadah di Mina ibarat medan pembuktian akan kesungguhan taubat atau keyakinan yang telah diperoleh di Arafah. Mina yang juga berarti cinta melambangkan tahap dalam kehidupan manusia untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah, atau lebih cinta kepada aturan Allah swt.

<sup>152</sup>Lihat: Ali Syariati, *al-Hajj*, *op.cit.* h. 24.

<sup>153</sup>'*Aqabah* bermakna besar. Melontar *jumrah* '*aqabah*' dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan *m bit* di Mina tanggal 11, 12, dan 13. Ini tidak termasuk rukun, tetapi termasuk wajib haji. Lihat Sudirman Tebba, *op.cit.* 47.

<sup>154</sup>Menurut riwayat masyhur peristiwa penyembelihan Ismail a.s. terjadi di Jabal *al-Kubsyi* di Mina, dinamakan bukit itu Jabal *al-Khubsyi* karena di atas gunung itu domba pengganti Nabi Ibrahim diturunkan. Lihat: M. Mutawalli asy-Sya'rawi, *Rahasia Haji Mabrar*, Edisi Bahasa Indonesia (Cet. V; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 43.

dibanding aturan-aturan yang dibuat selain Allah swt. Untuk membuktikan itu, manusia haruslah berperang dengan musuh nyata, yakni setan. Peranan Mina sebagai sebuah tempat yang dikunjungi dapatlah dikatakan sebagai “Monumen Abadi Cinta Sejati”, yakni cinta hanya kepada Allah, atau “Melontar abadi ujian terhadap eksistensi jati dari manusia”.<sup>155</sup>

Pada tanggal 10 Zulhijjah ini, jamaah haji melaksanakan pelemparan jumrah ‘*aqabah* atau dinamakan jumrah *kubra* (tugu yang besar), dengan tujuh kali lemparan, yang masing-masing dengan menggunakan sebutir batu kecil (kerikil). Ini merupakan salah satu bentuk kewajiban haji, bukan sebagai rukun haji.

Setelah pelemparan *jumrah*, amalan haji di Mina dilanjutkan dengan menyembelih binatang kurban. Waktu penyembelihan kurban antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, namun yang paling utama adalah tanggal 10 Zulhijjah sesuai pelemparan *jumrah* ‘*aqabah*. Amalan kurban ini mengingatkan kepada kebulatan tauhid dan kebulatan ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah swt. yaitu menyembeli putranya sendiri, Nabi Ismail as.

Dari segi ritual rukun Islam, melontar jumrah di Mina melambangkan melontar setan dan mengisyaratkan penegasan kembali bentuk komunikasi dengan setan, yang dilambangkan dengan tidak ada kata kompromi dan negoisasi dengan setan dalam hal melaksanakan perintah Allah swt. manusia menolak segala rayuan setan dengan cara menahan (puasa) nafsu untuk mengendalikan dirinya dari berbuat pelanggaran-pelanggaran agama.

---

<sup>155</sup>Lihat: Maisarah Zas, *op.cit.*, h. 158.

6) *Sa'i* antara Sāf dan Marwah

Secara bahasa kata *sa'i* berarti “berusaha”<sup>156</sup> dalam konteks haji dan umrah, *sa'i* diartikan sebagai berjalan setengah berlari pulang pergi dari Bukit Sāf ke bukit Marwah tujuh kali. Jalan yang dilalui sa'i disebut *mas'a* yang sekarang disatukan dengan lingkungan Masjidil Haram.

Saf dan Marwah adalah nama dua bukit. Sejak zaman pra-Islam, Sāf dan Marwah merupakan bukit yang dimuliakan oleh masyarakat Arab. Masyarakat Arab pra-Islam pergi ke bukit Sāf untuk mendapatkan keberuntungan, seperti keberuntungan perdagangan, dan mereka datang ke bukit Marwah untuk mendapatkan penyembuhan suatu penyakit.<sup>157</sup> Dalam konteks jahiliyah praktik tersebut sarat dengan kemusyrikan. Demi tercapainya permohonan, mereka melakukan praktik pemujaan atau peribadatan terhadap kedua bukit tersebut.

Dalam rangkaian manasik, *sa'i* dilakukan setelah *tā'awaf if dah*. *Tawaf* melambangkan gerakan menuju pendekatan diri kepada Allah swt. lalu *mi'raj* menuju kulminasi di hadirat-Nya dengan melepaskan diri dari belenggu bumi, dunia. Yakni kembali kepada gerakan dinamika dalam kehidupan nyata. *Sa'i* juga melambangkan upaya keterlibatan secara aktif dan interaktif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Justru kehidupan dunia ini merupakan media pengejawantahan yang akan mengantarkan manusia mencapai puncak situasi dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia, kutub dunia dan

<sup>156</sup>Pengertian ini banyak ditemukan dalam Alquran antara lain QS. *al-Isra'*: 19, QS. *al-Najm*: 39 – 40; QS. *al-Jumu'ah* : 9.

<sup>157</sup>Lihat: Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ibadat al-Hajj* (Beirut: Darul Ulum al-Haditsah, 1983) dialihbahasakan oleh H. Said Aqil Husin al-Munawar dengan judul “*Pedoman Menuju Haji Mabrur*” (Cet. I; Jakarta: PT Wahana Dinamika Karya, 2002), h. 116 - 117

akhirat, kutub lahir dan batin, kutub individual dan sosial, dan lain-lain. Sa'af dan Marwah juga melambangkan dua sisi yang berlawanan, yaitu antara kebaikan dan kejahatan sehingga manusia harus menjatuhkan pilihan kepada salah satunya.<sup>158</sup>

*Sa'í* dapat berarti usaha. Usaha manusia tentulah mencakup semua aspek guna memenuhi semua kebutuhan hidup manusia yang terkait dengan kebutuhan biologis dan psikologis. Misalnya kepuasan, keamanan, kesenangan, kenyamanan, atau dalam hal eksistensi dan aktualisasi diri. Segala bentuk usaha apapun yang dilakukan oleh manusia hendaklah dengan sungguh-sungguh dengan selalu berserah diri kepada Allah swt.

#### 7) *Tahallul*

*Sa'í* merupakan amalan terakhir dalam ibadah haji dan umrah. Amalan *sa'í* berakhir di pintu gerbang Marwah. Di pintu gerbang inilah kebanyakan jamaah haji melepaskan dan mengakhiri masa *ihr m* mereka dengan memotong rambut kepala. Terdapat di antara jamaah yang mencukur gondul rambut kepalanya, meskipun memotong sebagian saja sudah cukup. Mengakhiri masa *ihr m* dengan mencukur rambut kepala ini dinamakan *tahallul kubra* (*tahallul* besar)<sup>159</sup>

Secara bahasa *tahallul* berarti melepaskan, maksudnya adalah melepaskan atau mengakhiri masa *ihr m*; juga berarti menghalalkan. Artinya, dengan berakhirnya masa *ihr m* tersebut segala harapan halangan selama *ihr m* menjadi boleh, halal hukumnya. Dengan *tahallul* ini selesailah seluruh rangkaian ibadah haji.<sup>160</sup>

<sup>158</sup>Gufon A. Masádi, *Bekal Menuju Tanah Suci, Menangkap makna Fisikal dan Spritual* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 158 – 159.

<sup>159</sup>Lihat: Syekh Hasan Ayyub, *op.cit.*, h.139.

<sup>160</sup>*Ibid.*

Hikmah yang dapat diambil dari *tahallul* ini adalah menyelesaikan ibadah haji ibarat jiwa telah tercerahkan. Bukti jiwa telah tercerahkan secara fisik-materi adalah dengan memotong rambut yang merupakan penutup otak paling luar yang dapat dipotong.

Pada masa penjajahan Belanda, yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1602 M., sebagian besar jamaah haji berasal dari kalangan umat Islam yang kebanyakan mendalami prosedur dan prosesi ibadah haji. Calon jamaah haji pada waktu itu umumnya terbiasa dengan kehidupan yang serba apa adanya, sehingga problematika dan tuntutan yang terjadi karena perbedaan situasi dan kondisi dalam menunaikan ibadah haji tidak terjadi beban dan masalah yang cukup berarti.

Hal ini tentunya didasari oleh keyakinan dan pandangan umum masyarakat tradisional bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan pengejawantahan *tauhidul 'ib dah* (kesatuan beribadah) dan *tauhidul ummah* (kesatuan umat). Bagi mereka, makna filosofi yang terkandung di dalamnya adalah upaya mempersatukan pengabdian, baik kepada Allah swt. maupun sesama.

Terdapat keyakinan di kalangan umat Islam bahwa ibadah merupakan kondisi eksistensial manusia untuk mencapai tujuan hidup serta mendekatkan diri kepada Allah swt. secara total. Dalam hal ini Ali Syari'ati menyatakan :

”Ibadah haji mencerminkan kepulangan kepada Allah swt. yang mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan, dan yang tak dapat disetarakan dengan sesuatu yang lain. Pulang kepada Allah swt. adalah sebuah gerakan menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan, nilai dan fakta-fakta. Dengan melakukan perjalanan

menuju keabadian ini engkau tidak akan sampai kepada Allah swt. Dia hanya memberikan petunjuk yang benar tetapi Dia bukan merupakan tujuan yang hendak dicapai”.<sup>161</sup>

Setiap ibadah yang disyariatkan jelas mempunyai hikmah tertentu. Hikmah dapat dibagi menjadi dua bagian:

*Pertama*, hikmah yang berupa sifat yang jelas dan terukur. Hikmah jelas ini yang dalam kajian *usul fiqh* biasa disebut *illat*. Misalnya, kebolehan meng-*qasar* salat bagi orang yang melakukan perjalanan, adapun hikmahnya adalah sifat atau melakukan perjalanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. *al-Nisa*:101.

*Kedua*, hikmah dalam bentuk dorongan atau tujuan, hal ini dimaksudkan untuk mencari kemanfaatan yang harus diambil dan kemudharatan yang harus dihindari. Hikmah seperti ini tidak tampak jelas dalam *nas* dan memerlukan pendalaman.<sup>162</sup> Hikmah kedua ini akan dijadikan tolok ukur dalam menilai hikmah yang terkandung dalam ibadah haji. Hikmah diartikan dengan suatu motivasi dalam persyaratan hukum dalam rangka pencapaian suatu kemaslahatan atau menolak suatu kerusakan.<sup>163</sup>

Dalam Islam, haji dipandang sebagai puncak ibadah yang dengannya manusia diharapkan dapat mencapai puncak kesadaran akan kehadiran Tuhan dengan sejelas-jelasnya. Kesadaran bahwasanya Tuhan akan selalu hadir dalam setiap kehidupannya, selalu mengawasinya, selalu menjaganya, dan mendengarkan pengaduannya.

---

<sup>161</sup>Lihat: Ali Syariati, *op.cit.* 37, lihat juga Ali Syariati, *al-Hajj*, diterjemahkan oleh Mahyuddin dengan judul “Haji” (Cet. III; Bandung: Pustaka, 1995) h. 153.

<sup>162</sup>Said Aqil Husin al-Munawar, *Fikih Haji, Penuntun Jamaah Haji Mencapai Haji Mabr r* (Cet.I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 12.

<sup>163</sup>*Ibid.*, h. 13.

Kesadaran tersebut akan senantiasa membekas dalam dirinya yang berimplikasi pada kesadaran akan kebenaran ajaran-ajaran moral Islam dengan kesadaran yang sedalam-dalamnya untuk menjalankan kehidupan kesehariannya sesuai dengan ajaran-ajaran moral Islam yang agung tersebut. Kesadaran tersebut akan melahirkan sikap tanggung jawab dan kepedulian atas diri, masyarakat dan lingkungannya, menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Melihat sejarah Nabi Ibrahim a.s. dalam menegakkan nilai-nilai tauhid di muka bumi ini melalui "pembongkaran cara berpikir yang fundamental" dan amat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, sehingga perjuangan Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah swt. dalam suatu ritual rukun Islam yang agung yaitu "haji". Hal ini berarti bahwa menjalankan haji berarti menapak-tilasi perjalanan tokoh Nabi Ibrahim a.s. dalam membongkar, menemukan dan menegakkan kalimat tauhid bagi setiap umat Islam di muka bumi ini. Sungguh merupakan isyarat yang amat jelas bahwa makna haji yang banyak ini bermuara kepada suatu pelabuhan yang besar, yang bernama "pencerahan jati diri sebagai muslim" atau "meningkatkan ketakwaan".<sup>164</sup>

Secara simbolis sebenarnya ketentuan haji mulai dari persiapan, pemilihan ritual dan urutan ritual, larangan selama haji dan dalam wilayah haji, pemilihan wilayah dan ketentuan waktu semuanya merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena kesemuanya memiliki hubungan yang saling menunjang untuk pencapaian haji yang *mabrur*.

---

<sup>164</sup>Maisarah Zas, *Haji dan Pencerahan Jati Diri Muslim* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 143.

Sebagai perjalanan memenuhi panggilan menghadap Allah swt. maka secara analogi perjalanan haji indentik dengan kepergian manusia menghadap Allah swt. untuk selama-lamanya, yakni kematian. Keduanya sama-sama merupakan panggilan Allah swt. keduanya memerlukan bekal takwa dan sama sekali tidak ada artinya berbekal harta kekayaan, kedudukan, atau jabatan. Jika perjalanan haji menuju ke tanah suci, maka kematian juga merupakan sebuah "perjalanan" panjang menuju "tanah suci" disisi Allah swt. jika perjalanan haji berpulang ke kampung asal, maka kematian merupakan perjalanan berpulang ke "negeri asal".

Secara umum dalam pelaksanaan ketaatan berhaji yang dilakukan oleh seorang muslim memiliki tujuan:<sup>165</sup>

- 1) Memperteguh dan memperbaharui keimanan dan penolakan terhadap kemusyrikan. Hal ini dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim a.s. yang dengan teguh dan kuat imannya dapat memperbaharui keimanan dan meneguhkan kembali keimanan walaupun berada di tengah-tengah berbagai cobaan yang menimpanya.
- 2) Menunjukkan keadilan Allah swt. yang puncaknya diperoleh di hari akhirat. Bentuk keadilan Allah swt. adalah ketika Allah swt. memberikan kemampuan ada sebagian orang untuk menjalankan ibadah haji, baik kemampuan fisik, materil mapun kemampuan psikologi. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah swt. QS. *Ali Imran* (3): 26 sebagai berikut :

---

<sup>165</sup>Said Aqil Husin al-Munawwar, *op.cit.*, h. 14 – 19.



قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيدِكَ  
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٦﴾

Terjemahnya :

”Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.<sup>166</sup>

- 3) Mempertebal rasa sabar dan meningkatkan ketaatan. Hal ini dapat dijumpai dalam pelaksanaan ibadah, seperti masalah kesabaran, seorang muslim yang melaksanakan ibadah haji haruslah memiliki sikap sabar, baik sabar ketika dalam pelaksanaan ibadah haji, maupun sabar untuk meninggalkan kampung halaman, keluarga serta berpisah dengan segala yang dicintainya demi untuk melaksanakan ibadah haji.
- 4) Meningkatkan rasa syukur. Hal ini nampak dalam pelaksanaan ibadah haji, ketika seorang jamaah sudah menyaksikan kemahakuasaan Allah swt. Dengan mengunjungi Ka'bah serta segala hal-hal yang dapat menciptakan rasa syukur bagi seorang jamaah, terutama sekali karena adanya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji.
- 5) Haji merupakan kongres umat Islam sedunia, hal ini ditandai dengan adanya pertemuan umat Islam dari seluruh dunia ketika tiba musim haji. Sehingga ibadah haji akan mewujudkan *ukhwah islamiyah* secara internasional.<sup>167</sup>
- 6) Setelah dari tanah suci, maka dengan sendirinya akan memunculkan kesadaran universal, karena sudah menyaksikan keuniversalan ciptaan Allah swt.

<sup>166</sup>Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 79.

<sup>167</sup>Kamaruddin Hidayat, *Dari Pondok Indah ke Mekkah al-Mukarramah*, kata pengantar pada Nurcholis Madjid, *Perjalanan Religius Umrah dan haji* ( Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1997 ), h. Xv.

- 7) Dari segi ekonomi sangat memberikan sumbangsi yang tinggi dalam pengembangan perekonomian, baik bermanfaat bagi pemerintahan dan masyarakat Arab Saudi, maupun dari negara asal jamaah.
- 8) Setiap gerakan dan ritual dalam ibadah haji senantiasa memiliki hikmah yang tinggi, terutama sekali di dalamnya terkandung semacam orientasi akhirat.

Olehnya itu, dalam perjalanan ibadah haji sebaiknya melibatkan tiga aspek, yaitu akal, hati, dan fisik, ketiga-ketiganya harus aktif. Dalam pelaksanaan ibadah haji ketiganya harus berfungsi secara bersamaan. Misalnya ketika *t<sup>awaf</sup>* (mengelilingi *Ka'bah*), pikiran harus sadar dan paham tentang apa yang sedang dilakukan, sebaliknya juga tahu sejarah disyariatkan *t<sup>awaf</sup>*. Sementara itu, hati harus *khusyu'*, karena menyadari bahwa yang didekati bukan bangunan *Ka'bah* secara fisik, melainkan Allah Swt.<sup>168</sup>

Melalui ibadah haji kaum muslimin dilatih secara sadar untuk mengakui bahwa dunia ini hanya tempat sementara saja. Karenanya, ketika hari perpisahan itu tiba, sedangkan manusia yang bersangkutan belum siap, maka penyesalanlah akibatnya.<sup>169</sup> Jadi ibadah haji merupakan suatu metode yang luar biasa yang menyentuh kesadaran eksistensial, bahwa dunia ini hanya sementara.

Selama melaksanakan ibadah haji, setiap jamaah diwajibkan melakukan ritual yang tercakup dalam rukun haji dan wajib haji. Rukun haji terdiri dari: *Ihr m*, *wukuf* di Arafah, *t<sup>awaf</sup> ifadah* (*t<sup>awaf</sup> haji*), *sa'i*, *tahallul*/bercukur, dan tertib. Sedangkan wajib

---

<sup>168</sup>*Ibid.*

<sup>169</sup>*Ibid.*

haji terdiri dari *ihr m*, *miqat*, *m bit* di Muzdalifah, *m bit* di Mina, melontar jumrah, menghindari larangan *ihr m*, *tawaf wada'* (perpisahan).

### C. Faktor - faktor yang Memengaruhi Pemahaman Ketaatan berhaji

Dalam pelaksanaan ketaatan berhaji itu ada 4 (empat) faktor menurut penulis yang berpengaruh dalam pelaksanaan ketaatan berhaji dan menjadi penyebab animo masyarakat sangat besar untuk melaksanakan ibadah haji. Faktor yang dimaksud antara lain;

#### 1. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan terhadap Ajaran Haji

Perlunya diterapkan perubahan pemahaman ajaran umat Islam yang tekstual-skriptual ke pemahaman yang kontekstual-kritikal dengan mengoptimalkan pembinaan umat dan segenap lembaga serta pranata sosial untuk suatu kebersamaan sesuai dengan tuntutan zaman.

Ibadah dalam Islam merupakan ajaran yang sangat esensial. Hal ini berdasar pada pernyataan Alquran bahwa tujuan utama diciptakannya manusia (termasuk Jin) adalah untuk beribadah kepada-Nya.<sup>170</sup> Seorang muslim yang taat, tentulah termotivasi untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah swt. tetapi realitasnya ditemukan sebagian umat Islam belum memiliki motivasi yang kuat untuk beribadah. Diduga bahwa mereka yang kurang memiliki motivasi dikarenakan pemahamannya yang belum mendalam terhadap hakikat ibadah, fungsi dan tujuannya.

Secara matematis, imbalan yang akan diberikan Allah swt. ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk

---

<sup>170</sup>Lihat: QS. *al-Z riyat* (51): 56, dan QS. *al-Baqarah*: (2): 21

berhaji, Betapa tidak, *pertama*, potensi yang dipakai untuk berhaji hanyalah sebagian potensi manusia sedang balasannya tidak terhitung yaitu dunia dan segala isinya. *Kedua*, kewajiban melaksanakan ibadah hanya satu kali seumur hidup, namun imbalannya luar biasa besar.

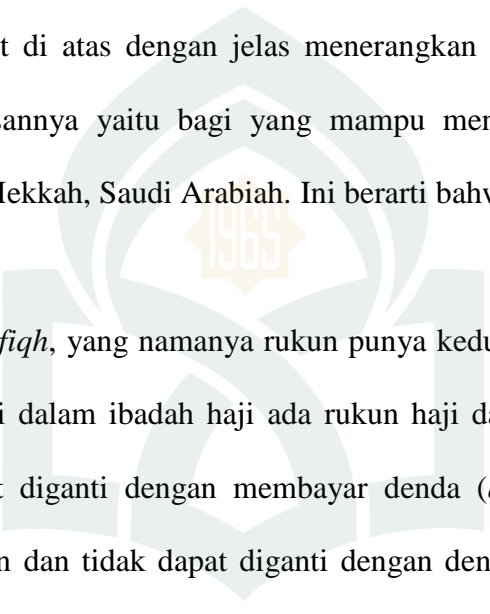
Jika demikian, maka seorang jamaah haji tidak cukup membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan manasik yang bersifat teknis, melainkan lebih dari itu, jamaah haji harus juga membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan menangkap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dalam kasus seperti ini, seseorang baru pada taraf melakukan manasik haji secara fisik dan belum sampai pada tataran menyempurnakan ibadah haji sebagaimana diperintahkan Allah swt.

Ibadah haji adalah ibadah yang khas, memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Untuk itu, Allah swt. menempatkannya pada rukun Islam yang kelima. Tentu memiliki hikmah tersendiri, yaitu bahwa dengan melaksanakan ajaran agama Islam secara lengkap dari sisi amaliah dan *'ub diyah* seorang muslim sudah dianggap paripurna. Ibadah haji mengandung nilai pendidikan dan pembelajaran untuk mengarungi kehidupan dunia. Allah swt. memberikan isyarat yang kebanyakan berupa simbol-simbol tersimpan dalam rukun-rukun haji, sunnah haji, dan bahkan juga larangan atau yang diharamkan dalam ibadah haji.<sup>171</sup>

## 2. Pengetahuan dan Pemahaman Ajaran Haji

---

<sup>171</sup>Maisarah Nas, *op.cit.*, h. iii - iv .

Semua ulama sepakat bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang lima sebagaimana termaktub dalam hadis  Ibn Umar, yang mengungkapkan bahwa, Islam itu didirikan dengan lima pilar yaitu ; a) Kesaksian bahwa tiada sesembahan yang haq kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, b) Mendirikan salat, c) Mengeluarkan zakat, d) puasa di bulan ramadhan dan e) Mengerjakan haji.

Hadits tersebut di atas dengan jelas menerangkan bahwa haji wajib bagi umat Islam, tetapi ada batasannya yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan menuju Baitullah al-Haram di Makkah, Saudi Arabia. Ini berarti bahwa haji merupakan kebutuhan manusia itu sendiri.

Dari sisi ilmu *fiqh*, yang namanya rukun punya kedudukan yang lebih tinggi dari pada kewajiban. Seperti dalam ibadah haji ada rukun haji dan wajib haji. Meninggalkan wajib haji masih dapat diganti dengan membayar denda (*dam*), sedangkan rukun haji mutlak untuk dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan denda apa pun, karena itu siapa yang meninggalkan rukun haji maka hajinya tidak sah.<sup>172</sup> Demikian untuk menggambarkan betapa haji adalah kewajiban yang sangat utama, bahkan ia adalah salah satu dari rukun Islam.

Tidaklah Allah mewajibkan sesuatu kepada manusia kecuali karena Allah menghendaki kebaikan pada diri manusia. Disebabkan kasih sayang-Nya, maka Allah membebaskan sesuatu kewajiban. Seperti halnya orang tua yang membebaskan kepada anak-anaknya kewajiban bersekolah karena cinta dan menghendaki kebaikan pada diri mereka.

---

<sup>172</sup>Yusuf Abdussalam, *Naik Haji, Apa Susahnya* ( Cet. I, Yogyakarta: Media Insani, 2004), h. 5.

Ibadah haji ini memiliki satu keistimewaan yaitu bahwa manusia dapat menyaksikan manfaat dari kewajiban haji pada saat itu pula. Karena itu biasanya ibadah haji ini sangat membekas dalam diri tiap jamaah haji yang telah pulang ke tanah air, hingga banyak kebaikan yang ia rasakan sepulang dari tanah suci.

Tak dapat dipungkiri bahwa harta adalah salah satu bekal seseorang dalam berhaji. Akan tetapi, kemampuan harta bukanlah salah satu faktor saja seseorang mampu menjadi haji. Sungguh sangat kompleks permasalahan orang akan berhaji, karena sesungguhnya kemampuan itu hanyalah milik Allah semata.

Dalam melaksanakan ibadah haji seseorang harus memiliki motivasi yang kuat, kunci dalam menggali motivasi ini adalah dengan mempelajari ilmu tentang haji dari Alquran dan Sunnah Rasul (termasuk di dalamnya berbagai manfaat dan keutamaan haji di dunia dan akhirat) dan ditambah dengan hikmah dari umat Islam yang telah melaksanakan ibadah haji. Dengan ilmu mencukupi, akan mendorong hati untuk menjadi tamu Allah dan muncul rasa optimis terhadap rahmat dan kemurahan Allah swt.

Dengan motivasi yang kuat pula segala yang sulit dan tidak mungkin dapat berubah menjadi sesuatu yang mungkin dengan kehendak Allah swt. Besarnya biaya yang menjadi penghalang bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Dalam hal berhaji motivasi utama menjadi hal yang pokok, karena itu prasangka yang baik dan benar kepada Allah swt. sangat menentukan kemudahan dalam mewujudkan cita-cita berhaji.<sup>173</sup>

Ada dua kenikmatan yang dirasakan oleh orang melakukan ibadah haji dan mendapatkan haji *mabrur*; yaitu kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat nanti

---

<sup>173</sup>*Ibid.*, h. 19.

berupa surga. Inilah kekhususan ibadah haji yang sering tidak terdapat pada ibadah-ibadah lain, manfaatnya baru terasa untuk jangka waktu yang panjang yaitu di akhirat.

Khusus untuk ibadah haji ini ada kenikmatan langsung Allah berikan di dunia sehingga dalam tiap diri para haji hampir tidak akan ada yang mengatakan jera untuk pergi berhaji. Semuanya memiliki kerinduan untuk bisa datang lagi meski perjalanan haji begitu berat, banyak pengorbanan, dan membutuhkan bekal materi dan non materi yang besar.

Manfaat berhaji sebagian dapat dirasakan di dunia, biasanya berupa kejadian yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah swt. karena itulah masing-masing jamaah haji selalu mempunyai pengalaman batin tersendiri yang berkesan sehingga membuatnya makin taat kepada Allah dan pasti ada perasaan rindu untuk menunaikan ibadah haji.

### **3. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Haji**

Komitmen Kementerian Agama untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan sehingga tujuan penyelenggaraan haji secara bertahap dapat tercapai, yakni memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jamaah haji melalui penyempurnaan sistem dan manajemen yang baik.

Penyelenggaraan haji saat ini telah terjadi peningkatan yang cukup berarti dalam berbagai bidang, seperti dalam pendaftaran, proses dokumen haji, sistem pembinaan haji, sistem pembinaan petugas, pengkloteran dan pemberangkatan serta pemulangan haji, pemondokan, pelayanan di Arab Saudi dan pemulangan di tanah air.

Penyelenggaraan haji yang dikelola oleh Kementerian Agama berdasarkan Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 selalu menjadi perhatian masyarakat. Hal yang

sangat disoroti oleh media massa, adalah persoalan fungsi regulator dan operator yang melekat pada Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji, sejak orde baru berlanjut sampai sekarang. Dua fungsi dalam satu tangan ini, dianggap merupakan titik lemah yang utama dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.<sup>174</sup>

Sorotan kritikan terhadap Kementerian Agama khususnya penyelenggaraan ibadah haji, banyak pihak menyatakan, karena adanya kepentingan dari setiap warga yang mengambil manfaat dari penyelenggaraan ibadah haji, dan kurang mengedepankan perlindungan terhadap jamaah haji, ada beberapa hal menjadi sorotan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji antara lain ;

- a. Pelayanan yang pas-pasan
- b. Harga mahal
- c. Mengabaikan hak-hak konsumen, di antaranya; 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, 2) hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan, 3) hak atas informasi yang benar, hak didengar pendapat dan keluhannya, 4) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa hak, 5) hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen, 6) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tak diskriminatif dan 7) hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian.<sup>175</sup>

Faktor ini diduga berpengaruh karena suksesnya suatu Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 dalam kaitannya dengan penyelenggaraan haji, sangat ditentukan

---

<sup>174</sup>Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI., *Mendialogkan Agenda Reformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji* ( Jakarta: Media Cita, 2004), h. 5.

<sup>175</sup>*Ibid.*, h. 31 – 32.



oleh pengurus/petugas yang menegakannya. Di antara prasyarat yang harus dimiliki oleh petugas penegak hukum untuk berhasil dalam menjalankan/menegakan Undang-undang adalah tingkat pengetahuan dan profesionalitas petugas yang bersangkutan. Oleh karena faktor petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, tentu ada masalah. Demikian pula, apabila aparatnya buruk sedang kualitas peraturannya baik maka mungkin pula timbul masalah.

Sesuai dengan Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008, sistem penyelenggaraan haji mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen modern, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan. Manajemen penyelenggaraan haji secara terus menerus disempurnakan dengan tuntutan kebutuhan pada teknis operasional dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang menghendaki pengelolaan yang lebih baik. Sehingga manajemen haji dapat mendukung sistem penyelenggaraan haji, antara lain, melalui penetapan prosedur kerja dan standar pelayanan yang berlaku secara universal.

#### **4. Adanya Sanksi bagi Masyarakat yang Melanggar Ketentuan Berhaji**

Faktor ini diduga berpengaruh karena tegaknya suatu hukum banyak ditentukan atauran-aturan yang terdapat dalam suatu undang-undang sudah dapat menjamin tercapainya tujuan dari pada penerapan undang-undang tersebut.

Faktor-faktor yang semula berpengaruh hubungan dengan aturan hukum ini adalah tidak adanya sanksi pidana berat pada Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008

atas pelanggaran pertanggungjawaban dalam pelaporan penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pengelola haji itu sendiri.

Hal ini dilakukan lebih menunjukkan bahwa tidak adanya sanksi pidana berat atas pelanggaran pengelolaan haji telah terbukti berpengaruh terhadap tidak terlaksananya sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa, keberadaan sanksi amat diperlukan pada setiap perintah berupa hukuman yang membuat pelakunya jera melakukan pelanggaran, termasuk dalam hal pengelolaan haji.

### **5. Keinginan Kuat Mendapatkan Gelar “Haji/Hajjah”**

Salah satu fenomena yang juga senantiasa terjadi setelah jamaah haji kembali ke tanah air adalah banyaknya pertanyaan kerabat keluarga dan tetangga yang bersilaturahmi mempertanyakan tentang hal-hal yang bersifat kerohanian atau keanehan-anehan selama menunaikan ibadah haji, termasuk keberhasilan mencium *Hajrah al-Aswad*, yang dianggap sebagai kenikmatan rohani.

Tampaknya, ibadah haji merupakan jenis ibadah *mahdah* yang banyak sekali memberi peluang bagi masuknya berbagai unsur budaya lokal. Bukan saja dalam artian campur tangan dalam wujud pelaksanaannya atau manasiknya, juga masuknya berbagai ritual dan pengaruh budaya dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebagai contoh pertama, tidak ada gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan ibadah kecuali pelaksanaan ibadah haji. Gelar “haji” menjadi sesuatu yang kelihatannya mesti diberikan kepada orang yang telah melaksanakan ibadah haji, sehingga wajarlah jika rombongan yang menunaikan ibadah haji disebut jamaah calon haji. Di Tanah Haramlah jamaah itu mulai pertama kali dijuluki “haji”. Dalam komunikasi sosial mereka biasa dipanggil “haji”.

*Kedua*, dalam atribut, para haji terbiasa pula mengenakan pakaian tertentu yang menandai telah menunaikan ibadah haji.<sup>176</sup>

Dalam masyarakat juga muncul gejala kalau para haji kemudian memperoleh posisi yang amat baik dalam tata pergaulan sosial, lebih-lebih dalam masyarakat pedesaan, gengsi sosial bagi para “haji” terangkat sehingga mereka menempati strata sosial yang setara dengan para *informal leaders* yang lain. Dalam masyarakat pedesaan, para “haji” secara otomatis dianggap sebagai bagian dari elite sosial, sebagai tumpuan harapan dan tempat bertanya warga masyarakat.<sup>177</sup>

Gelar haji dianggap sebagai lambang moral. Akibatnya, seorang haji dengan serta merta menjadi tolok ukur dan kelompok acuan (*reference group*) atau teladan di masyarakat sehingga jika ada perilaku seorang oknum “haji” yang dianggap bertentangan dengan moral dan etika sosial, maka jadilah orang tersebut sebagai bahan cercaan dan celaan di masyarakat sekelilingnya.

Haji merupakan dimensi religius yang melekat secara *inhern* pada setiap individu muslim, yang pelaksanaannya tak dapat dilepaskan dari aspek-aspek non-religius sangat menentukan jaminan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syari’at. Oleh karena itu, terdapat korelasi yang tak terpisahkan antara dimensi religius dengan dimensi non-religius dalam penyelenggaraan haji, meliputi dimensi ibadah, sosio-budaya, ekonomi dan politik.

### **1. Dimensi Ibadah, Sosial dan Budaya**

---

<sup>176</sup>Abu Su’ud, *op.cit.*, h. 56 – 57.

<sup>177</sup>Lihat: *ibid.*

Haji merupakan rukun Islam kelima dan hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam yang memiliki kesanggupan dan dilakukan sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya sunnah.

Adapun tatacara pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut ; a) melakukan *ihr m* dari *miq t* yang telah ditentukan. *Ihr m* dapat dimulai sejak awal bulan syawal dengan melakukan: mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian *ihr m*, salat, sunah *ihr m*, berniat haji dengan mengucapkan “*Labbaik Allahumma hajjan*”. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca *talbiah* (menyatakan niat), b) wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari *nahar* (hari menyembelih kurban) tanggal 10 Zulhijjah. Ketika wukuf, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu: *salat* jamak *taqdîm* (pembukaan) dan *qasar* zuhur-asar, berdoa, berzikir, membaca Alquran, *salat* jamak *taqdîm*, dan *qasar* Magrib-Isya, c) *M bit* (mengingat) di Muzdalifah walaupun sebentar. Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Dalam hal ini Pelaksanaan *m bit* dilakukan proses mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melontar jamrah di Mina dan melakukan *salat* subuh di awal waktu, dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina, 4) Melontar *jamrah ‘aqabah* (tempat untuk melempar batu yang terletak di bukit ‘*Aqabah*) pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih kurban, 5) *Tahallul* (berlepas diri dari *ihr m* haji sesudah selesai mengerjakan amalan-amalan haji) awal, dilaksanakan setelah selesai melontar *jamrah ‘aqabah* dengan cara mencukur/menggunting rambut sekurang-kurangnya tiga helai, 6) bermalam di Mina pada hari *tasyrik* (tanggal 11,12,dan13 Zulhijjah) dan setiap siang pada hari *Tasyrik* melontar *jamrah ul , wust , dan ‘aqabah*

masing-masing tujuh kali, 7) bagi yang belum melaksanakan *tawaf if dah* ketika berada di Mekkah, maka harus melakukan *tawaf if dah* dan *sa'i*, kemudian melakukan *tawaf wada'* bagi yang akan meninggalkan Mekkah untuk kembali kekampung halamannya.<sup>178</sup>

Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, menunaikan ibadah haji bukan hanya merupakan suatu kewajiban yang bersifat ritual-religius semata, melainkan juga merupakan suatu kegiatan ritual-budaya yang turut memperkaya khasanah sosio-budaya masyarakat Indonesia. Peristiwa menjelang keberangkatan jamaah haji menunjukkan besarnya penghormatan masyarakat terhadap orang yang akan menunaikan ibadah haji. Keberangkatan calon haji dari dusun atau kampung ke kota, tempat calon haji tinggal, biasanya merupakan peristiwa yang ramai dan penuh kegembiraan.

Suasana keberangkatan calon jamaah haji ke Mekkah pada masa itu sudah tampak semarak dan memerlukan persiapan-persiapan yang matang. Kesibukan calon jamaah haji haji mempersiapkan keberangkatannya ke tanah suci kemungkinan besar melebihi kesibukan sehari-hari, sebagaimana dilukiskan sebagai berikut :

“Sejumlah kendaraan sekarang mengangkut calon jamaah haji. Mereka dielakkan oleh seisi desa; baik yang tua maupun yang muda ikut serta mengantar, di serambi stasiun orang saling berpelukan. Suatu pemandangan yang mengharukan, disamping uang, sang jamaah juga membawa bermacam-macam barang; ikan, garam, cabai, buah-buahan, ayam, pendek kata, semua bahan makanan yang lezat rasanya; barang-barang itu dibawanya dalam peti besar yang dibungkus goni dan diikat erat”.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup>Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, diterjemahkan oleh Ghufroon A. Mas'adi (Cet. I Jakarta: Raja Grafindo, 1996) h. 61 – 62.

<sup>179</sup>Sebagaimana dikutip dalam buku *Indonesia dan haji* (Empat karangan di bawah redaksi Dick Doves dan Nico Kaptein) seri INIS 30, h. 82.

Penghormatan masyarakat terhadap orang yang telah melaksanakan ibadah haji, sebagai orang yang dianggap memiliki nilai tambah sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini telah berjalan sejak zaman sahabat Nabi Muhammad saw. dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Banyak di antara sahabat justru memberikan penghormatan secara berlebihan, namun hal itu tidak berpengaruh bagi mereka. Kekhawatiran muncul manakala penghormatan tersebut dapat memengaruhi kadar keikhlasan dan keimanan mereka.<sup>180</sup>

Budaya seperti itu telah mengakar kuat pada masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan tidak sedikit anggota masyarakat yang berupaya untuk menunaikan ibadah haji walaupun secara personal belum dikategorikan *istitq'ah* tetapi memaksa diri untuk menunaikan ibadah haji, misalnya terpaksa harus menjual tanah warisan untuk membiayai naik haji tanpa berpikir ulang tentang kelanjutannya setelah menunaikan ibadah haji. Fenomena yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa orang menunaikan ibadah haji berulang kali dengan berbagai latar belakang dan motivasi.

Maraknya penggunaan gelar “haji/hajjah” pada masa sekarang sebagai sebuah “status” bagi sebagian besar masyarakat menyebabkan masyarakat cenderung meletakkan titel “haji/hajjah” sebagai suatu gelar kehormatan atau keagamaan, di depan nama mereka yang dipandang setara dengan gelar keilmuan, padahal “gelar” haji di negara atau bangsa lain tidak diminati.

---

<sup>180</sup> Ahmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji* (Cet. I; Jakarta Timur: PT. Mediacita, 2006), h. 9.

Budaya ini telah dimulai sejak awal pelaksanaan haji di Indonesia dan semakin dikuatkan dengan kebijakan pemerintah kolonial melalui salah satu Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda tahun 1859, menyebutkan bahwa seseorang dibenarkan untuk menyandang gelar haji dan memakai busana khusus haji apabila ia telah lulus dari ujian yang membuktikan bahwa ia benar-benar telah menunaikan ibadah haji sekembali menunaikan ibadah haji (di Mekkah).<sup>181</sup>

Sehubungan dengan fenomena yang ada, Jalaludin Rahmat memberi penjelasan bahwa terdapat kecenderungan di kalangan pesantren untuk membudayakan sifat kes<sup>□</sup>alehan (*asceticisme*) menjadi satu ideologi perilaku sehari-hari. Predikat haji merupakan suatu manifestasi dari fenomena tersebut, bahwa segala sesuatu dikerjakan oleh seorang haji merupakan ukuran perilaku baik dan buruk yang tidak dapat ditawar-tawar lagi; apabila seorang haji berbuat maksiat maka perbuatan tersebut adalah hubungan individu dari buah hajinya, begitu juga sebaliknya.<sup>182</sup> Diharapkan predikat haji dapat menjadi filter dan alat kontrol terhadap perilaku keseharian masyarakat, sehingga citra haji, baik atau jelek ada dasarnya lebih disebabkan oleh sikap perorangan.

Masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad sekitar 12 M. menyebabkan bangsa Indonesia banyak berhubungan langsung dengan bangsa Arab, sehingga kultur bangsa Arab memberikan pengaruh yang sangat kental terhadap sosio-religius bangsa Indonesia. Pengaruh ini di antaranya tampak dalam struktur kerajaan-kerajaan di nusantara yang berbentuk kesultanan dengan rajanya yang disebut sultan. Hubungan religius dan

---

<sup>181</sup> Ahmad Nidjam dan Alatief Hanan, *op.cit.*, h. 10.

<sup>182</sup> *Ibid.*

akulturasi budaya tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa menunaikan ibadah haji ke tanah suci bagaikan membesuk kampung halaman.<sup>183</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara budaya sangat berpengaruh besar, namun bagi calon jamaah haji yang berasal dari kalangan modernis, yang terbiasa dengan kehidupan serba nyaman, jauh dari kesusahan dan tidak terbiasa dengan perjalanan panjang dan melelahkan, maka kondisi alam yang sangat berbeda antara tanah air dengan tanah suci, seperti tingkat kelembaban dan kondisi yang sangat panas melebihi kondisi di tanah air, kondisi yang terjal, berpasir, berbatu, dan tandus dengan sengatan matahari yang menusuk kulit, menimbulkan beban tersendiri yang cukup berat.

Perbedaan kondisi ini sampai sekarang masih dirasakan oleh banyak calon haji secara merata dari segala lapisan sehingga seluruh perjalanan haji yang sangat panjang tersebut akan sangat memengaruhi kondisi fisik dan mental jamaah haji.

## **2. Dimensi Ekonomi**

Perjalanan haji memerlukan biaya yang cukup besar sehingga kemampuan ekonomi masyarakat dapat dilihat dengan beragamnya strata dan status sosial dalam masyarakat, baik dari segi tingkat ekonomi, kaya atau miskin, tingkat pengetahuan agama, latar belakang calon haji, dan tingkat pendidikan formal atau informal, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan haji. Kondisi seperti ini terutama berlaku di daerah pedesaan yang pemahaman religiusnya masih mengakar kuat dalam budaya tradisionalnya. Di daerah

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, h. 11.



perkotaan pun seseorang yang telah menunaikan ibadah masih dianggap mempunyai nilai tambah, sesuai dengan strata sosialnya.

Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun cenderung selalu meningkat bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan semakin bervariasinya latar belakang profil jamaah haji. Jumlah jamaah haji yang selama ini sebagian besar (lebih dari 63,4 %) berasal dari daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, sebaliknya semakin banyak tokoh penting, pegawai negeri maupun swasta, militer, pengusaha, kalangan selebritis, dan intelektual yang menunaikan ibadah haji. Angka statistik menunjukkan peningkatan jumlah jamaah haji yang berasal dari perkotaan dengan tingkat pendidikan tinggi yang semakin bertambah dalam setiap tahunnya (*lihat tabel 13 dan 16 pada bab iv*).

Daerah luar Jawa berpotensi mengalami kenaikan jumlah jamaah haji setiap tahunnya, karena masyarakat di daerah tersebut termasuk giat dalam pembudidayaan tanaman ekspor yang menguntungkan perekonomian dan memberikan pendapatan yang cukup besar. Bahkan pada saat kepulauan nusantara (Indonesia) masih berada di bawah penjajahan Belanda, minat, dan hasrat masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk berhaji sudah menampakkan kemajuan dan peningkatan jumlah jamaah yang cukup menonjol dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

### **3. Dimensi Politik**

Sistem penyelenggaraan haji di Indonesia mengalami dinamika yang penuh diwarnai dengan nuansa ekonomi dan politik mulai dari masa penjajahan, masa Orde Baru hingga sekarang. Pada masa penjajahan penyelenggaraan haji dimaksudkan untuk

mengambil hati rakyat sebagai bagian dari penerapan politik etis kolonial Belanda terhadap pribumi untuk menjamin kelestarian kekuasaan pemerintahan kolonialnya. Peraturan tentang perhajian seringkali dicabut dan ditetapkan sesuai dengan kepentingan kolonial, termasuk berbagai upaya pengawasan dan pembatasan dengan dalih melindungi jamaah haji penyakit, penipuan, pencurian, dan kejahatan lainnya.

Kendala yang dihadapi jamaah haji saat itu sangat kompleks, mulai dari perjalanan yang sulit hingga keamanan yang tidak terjamin serta tekanan yang bersifat fisiologis maupun psikologis. Sungguh pun demikian, semangat menunaikan ibadah haji tetap tinggi dan bahkan setiap tahunnya jumlah jamaah haji senantiasa mengalami peningkatan.

Sistem perhajian dalam bentuk tulisan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda mulai dikenal pada tahun 1931, pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hourgronje dalam sebuah karya terbitan edisi bahasa Inggris dengan judul “Makkah”, sebagai wacana perhajian pada masa kolonial yang esensinya berisi “pembatasan” dan pengekangan. Namun, hal ini tidak menyurutkan minat umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji, baik yang berasal dari kalangan keraton maupun pesantren.<sup>184</sup>

Dinamika dan problematika penyelenggaraan haji yang tumbuh dari masa ke masa lebih banyak disebabkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hubungan antara dua negara yang memiliki perbedaan sosio-budaya serta perbedaan mazhab yang dianut masyarakatnya.

---

<sup>184</sup>*Ibid.*, 14.

Perubahan sistem perhajian di Indonesia tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang menjadi sebab dilakukannya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. dalam perjalanan sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia, berbagai peraturan perundangan-undangan yang diberlakukan banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada masanya.

Dimulai dengan; *Pertama*, Pelgrims Ordonnantie Stb. tahun 1922 Nomor 689, *Kedua*, Pelgrims Verordening Tahun 1938, *Ketiga*, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, *Keempat*, Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969' *Kelima*, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989, *Keenam*, Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 juncto Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995 juncto Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 dan dikutkan 2 (dua) keputusan terakhir yaitu; Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>185</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan di atas, sebagai hasil keputusan politik telah memberikan wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama sebagai koordinator dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional. Sedangkan secara

---

<sup>185</sup>Said Aqil Husin al-Munawar, *Penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*, makalah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, *Mendialogkan Agenda Reformasi Penyelenggaraan Haji* (Cet. I; Jakarta: PT. Mediacita, 2004), h. 11.

institusional, Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator sekaligus operator pengendalian secara menyeluruh melalui unit teknisnya.

Kebijakan tentang ibadah haji yang berlaku di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Dasar RI. 1945 Pasal (1) dan Pasal 29 ayat (2), selanjutnya diamanatkan kepada Pemerintah. Dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji secara nasional adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang dalam penjabaran operasionalnya ditindaklanjuti dengan kebijakan yang bersifat teknis yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI. beserta jajarannya sebagai pelaksana teknis.

#### **D. Eksistensi KBIH dan IPHI serta Perannya dalam Pembinaan Ibadah Haji**

Aktifitas ibadah merupakan suatu kegiatan perjalanan panjang atau sebagai bentuk berpergian yang melintas daerah, bukan antarnegara namun justru melintasi benua. Karena lokasi tempat dilakukannya ritual haji pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dan sah menurut perintah agama adalah di Padang Arafah, yang letaknya 25 Km. dari Kota Makkah, Arab Saudi. Oleh karena itu, masalah haji menjadi domain negara (melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan dan Bimbingan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI) pengelolaan oleh pemerintah sudah berlangsung sejak masa kolonial.<sup>186</sup> yang mengurus ratusan ribu orang (lebih kurang 200.000 jamaah haji), dan mengelola triliunan

---

<sup>186</sup>Pengurusan penyelenggaraan dan operasional haji di Indonesia, tidak terlepas dari peninggalan masa kolonial, semula diatur dan dikendalikan melalui aturan penguasa Belanda, kemudian beralih kepada pemerintahan Orde Lama (Soekarno) pada Pemda di setiap daerah, kemudian beralih kepada Pemerintah Orde Baru atau tahun 1994 mulai beralih kepada Departemen Agama. Namun koordinator harian tetap berada di masing-masing Gubernur. Pengaturan oleh pemerintah saat sekarang terutama pada urusan *quota* haji untuk pendaftaran calon haji, akomodasi, angkutan udara, dokumen dan visa, dan bimbingan ibadahnya serta urusan kesehatan. Hal ini semua diatur dalam UU. RI. No. 13 Tahun 2008, yang semula hanya dengan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Agama saja.

uang umat sehingga menggambarkan betapa penting dan seriusnya mengurus haji ini yang menyebabkan secara langsung melibatkan tanggung jawab negara.

Bukan hanya negara, melainkan juga melibatkan dunia (swasta) pengusaha besar lainnya menyebabkan aktifitas perhajian menjadi konstruksi berbagai *stakeholder* kelompok kepentingan dan kekuatan tertentu yang hidup dalam masyarakat untuk memengaruhi terjadinya tindakan seseorang atau sekelompok orang yang ingin melakukan ibadah haji. Selain itu, suasana perjalanan ibadah haji juga sangat banyak disangkutpautkan dengan tindakan sehari-hari sejak awal keinginan untuk pergi haji sampai kepulangannya di tanah air.

Pelaksanaan ibadah haji, dengan sendirinya berbeda dengan aktivitas ibadah lainnya dalam Islam, model ibadah sehari-hari lainnya dikonstruksi dan dilaksanakan oleh para pelakunya sendiri secara individu atau bersama tanpa harus berhubungan dan melibatkan pihak-pihak lain. Pelaku utama sebagai *stakeholder* yang dominan dalam praktik perhajian adalah institusi birokrasi pemerintah, sejak dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten sampai ke Arab Saudi (Konsulat Haji di Jeddah). Hal ini ternyata sudah berlaku sejak dulu kala, Pemerintah selaku penguasa yang memiliki otoritas dan paling kuat untuk memengaruhi proses konstruksi tindakan sosial perhajian, melalui perhajian, peraturan-peraturan kenegaraan dan keterlibatan langsung pemerintah dalam melakukan kontrol, bimbingan dan perlindungan setiap aktivitas pelayanan urusan perhajian di Indonesia. Namun demikian masih terdapat ruang untuk pihak publik yang memiliki kemampuan dalam pengurusan ibadah haji yang secara detail juga diatur dalam Undang-Undang Perhajian.

Institusi sosial keagamaan berupa kelompok pengajian atau kelompok majelis taklim dan atau untuk menyediakan jasa pelayanan pengurusan perhajian seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mulia tumbuh subur baik di Pusat/Propinsi maupun di Daerah /Kabupaten sekitar tahun 1994.<sup>187</sup>

Para KBIH mengatasnamakan dan menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam melakukan hubungan-hubungan dengan masyarakat umum, yang secara tradisional kebanyakan para calon haji secara kebetulan sering muncul dan dari proses pembicaraan dengan sesama kawan dalam pengajian sehingga jaringan kelompok pengajian dan majelis taklim tersebut juga menjadi arena sosialisasi untuk saling memengaruhi pergi haji.

Kelompok KBIH ini dikenal dalam masyarakat sebagai institusi haji yang proses pembentukannya (cikal bakal) dari pertumbuhan dan perkembangan kelompok pengajian yang secara tradisional tumbuh subur dalam masyarakat, selanjutnya mengembangkan dirinya menjadi lebih terorganisir dalam bentuk Majelis Taklim. Kelompok Majelis Taklim di tanah air saat ini, telah terorganisir dari tingkat lokal (Desa/Kelurahan dan Kecamatan) sampai ke tingkat nasional yang dikenal dengan istilah Forum Koordinasi Majelis Taklim (FKMT) secara nasional yang diketuai oleh Ibu Tuti Alawiyah (Mantan Menteri Peranan Wanita tahun 1997).<sup>188</sup>

KBIH adalah bentuk lain dari kelompok-kelompok pengajian Majelis Taklim, yang sudah bersifat modern, karena telah memiliki akta notaris, izin dari pemerintah, bergerak dalam bidang usaha ekonomi yang dibungkus melalui bimbingan ibadah haji.

---

<sup>187</sup>M. Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial, Strategi Untuk Memperoleh Pengakuan Sosial pada Masyarakat Kota Pinggiran* (Cet. I, Jakarta: Mediacita, 2005), h. 137 – 138.

<sup>188</sup>*Ibid.*, h. 139.

Wilayah garapan KBIH ini, dari pandangan pemerintah sebagai perpanjangan atau mitra pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pembekalan urusan ibadah atau masalah “manasik” yang diatur dalam Kepurusan Menteri Agama Nomor 390A tahun 1998 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, (dari Pendaftaran, pembuatan dokumen, pemberangkatan, dan selama di Arab Saudi). Fungsi KBIH adalah sebagai mediator antara masyarakat calon haji dengan pemerintah. Untuk wilayah DKI Jakarta, hampir seluruh calon haji mengikuti dan tergabung dalam KBIH, yang seluruhnya berjumlah 290 kelompok yang secara resmi mendaftarkan diri pada pemerintah setempat.

Adapun pungutan biaya yang harus dibayarkan kepada KBIH adalah sangat bervariasi, sesuai dengan tingkat pelayanan yang dikembalikan kepada masing-masing calon haji, atau dengan rata-rata pembayaran pelayanan di sekitar Rp. 750.000.- hingga 3.000.000.-. setiap KBIH biasanya menggunakan simbol-simbol tersendiri dalam meraih banyak mungkin anggota binaan, seperti memanfaatkan Kiyai atau usta terkenal, dan biasanya para pengurus dan pendiri KBIH adalah mereka sudah pernah naik haji, atau pernah bermukim di Arab Saudi. Perkantornya pun sarat dengan simbol-simbol perhajian, seperti foto-toto yang bernuansa ke Arab-araban dan atau simbol-simbol kesucian yang dikenal dalam masyarakat Islam, seperti Ka’bah, Masjidil Haram, dan gambar-gambar orang berhaji, yang dipajang di depan kantor atau di setiap ruang dalam bangunan tersebut. Sedangkan bangunan gedungnya, juga dipadukan dengan simbol-simbol bangunan yang umumnya sudah dipahami dalam masyarakat .

Hampir seluruh orang yang pernah melakukan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengikuti KBIH dalam proses pembinaan ibadahnya. Seperti yang

diinformasikan oleh Pak Haji Muh. Ramli, BA. menggambarkan bahwa: “Saya bersama isteri dulunya ikut dengan KBIH Armina, dan kami seluruhnya berjumlah 45 orang yang ikut dalam bimbingan KBIH yang kelihatannya sebagian besar berasal satu daerah namun tidak menutup kemungkinan ada juga orang lain yang bergabung dengan kami, saya dan keluarga membayar biaya tambahan kepada KBIH tersebut sebesar Rp. 750.000.- perorang pada tahun 2008”.<sup>189</sup>

Peranan KBIH cukup kuat dalam melakukan akses memengaruhi masyarakat umum (sebagai calon haji) untuk melaksanakan haji, dan tentunya juga punya pengaruh kuat atau memiliki akses langsung terhadap proses pembentukan praktik-praktik haji dalam kehidupan sehari-hari pada komunitas sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengaruh lain dalam perhajian, pengaruh ekonomi salah satu yang disimbolkan melalui perbankan berfungsi sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Bank Swasta maupun Bank Pemerintah, sekali pun dalam dunia perhajian dengan istilah BPS-BPIH. Sebagai salah satu lembaga perekonomian modern yang mempunyai kekuatan tarik-menarik dalam memperebutkan keuntungan ekonomi dari proses aktivitas perhajian dalam masyarakat, yang juga dilakukan dengan cara menampakan dan berbunyi di balik simbol-simbol haji berkomunikasi simbol-simbol teknologi dalam mekanisme komunikasinya untuk menarik perhatian sebanyak mungkin masyarakat calon haji.

Penyelenggaraan haji di Indonesia secara nasional diatur seluruhnya oleh pemerintah pusat, dan pemerintahan lokal merupakan perpanjangan tangan pemerintah

---

<sup>189</sup>H. Muh. Ramli, BA., Anggota Jamaah Bimbingan Haji KBIH Armina, *Wawancara*, tanggal 28 Juni 2009, di Pangkajene.



pusat untuk pengurusan penyelenggaraan perhajian di daerah. Kebijakan yang bersifat terpusat ini, sama dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan di bidang lainnya dalam usaha untuk melayani kepentingan khalayak umum, khususnya stigma pembangunan dalam semua bentuk-bentuk pelayanan umum, seperti pembangunan kota dan pedesaan, transportasi, kesehatan, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam mengkonstruksi pembangunan sosial budaya yang di dalamnya termasuk masalah agama dan perhajian tersebut, pemerintah menggunakan sudut pandang demi untuk memberikan peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah hajinya.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah antara lain, menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji, pendaftaran calon haji, pembinaan dan penyuluhan manasik haji, pelayanan kesehatan, kemigrasian, transportasi, akomodasi, dan penyiapan dokumen dan aturan barang bawaan haji. Dalam hal ini, pemerintah bagaikan sebuah biro jasa *traveling* yang mengurus proses pemberangkatan orang ke luar negeri dalam satu paket sesuai tujuan negara dengan jumlah biaya yang ditetapkan oleh biro perjalanan dimaksud, juga tersedia ruang bagi pelayanan yang disediakan bagi masyarakat umum dan lembaga-lembaga sosial untuk berpartisipasi dalam pelayanan bimbingan dan penyuluhan ibadah haji, termasuk penyelenggaraan untuk ONH Plus.

Banyak kebijakan pemerintah pusat telah memengaruhi pengembangan dan pembentukan kelompok bimbingan ibadah haji (termasuk ONH Plus) dalam masyarakat tingkat lokal dalam upaya untuk melayani kepentingan pemerintah dan memfasilitasi para calon haji.

Dalam kondisi seperti ini, bentuk-bentuk kelompok, yayasan atau pun biro jasa keagamaan yang semula bersifat informal dan dianggap statusnya tidak jelas. Situasi semacam ini tumbuh subur di kalangan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, semula berbentuk kelompok pengajian dan majelis taklim yang tumbuh sendiri dari kalangan internal masyarakat setempat dan bersifat lokal sebagai media pembelajaran pengetahuan keagamaan, namun sejak 1997 sebagai besar telah berkembang menjadi kelompok bimbingan haji. Sekali pun bentuk kegiatan dan kelompoknya tetap seperti semula dalam hal pengajian, namun muatan aktivitasnya sudah mulai disarati dengan semacam promosi yang bernuansa masalah-masalah perhajian.

Para tokoh kharismaniknya disebut sebagai “orang-orang terhormat” yang selama ini selalu memberikan ceramah pengajian di hampir setiap kelompok pengajian dan majelis taklim, sudah mulai dikembangkan melalui tampilan dalam bentuk formal yang mempromosikan perilaku kooperatif dan mensosialisasikan Bank-Bank swasta yang siap menampung uang tabungan cicilan para calon haji. Model pengajian ikut bergeser ke arah yang lebih terbuka, lebih modernis, melalui brosur yang bersumber dari bank diedarkan saat pengajian berlangsung sehingga kelompok pengajian yang semula bersifat tradisional dan konvensional mulai beralih dan berkembang kepada pembentukan model-model hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomi.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah membuka jalan bagi keinginan luhur para pendiri negara Indonesia agar kaum muslimin Indonesia dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci dengan aman, mudah, tertib, lancar, dan khidmat serta memperoleh haji *mabrur*. Untuk tercapainya maksud

tersebut diperlukan suasana ibadah haji agar calon jamaah haji lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji. Untuk itu, diperlukan pembinaan yang meliputi bimbingan, penyuluhan dan penerangan.

Bahwa para haji Indonesia menyadari sedalam-dalamnya, negara berkewajiban melindungi segenap bangsanya dan seluruh tumpah darahnya dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pengamalan haji *mabr r* merupakan panggilan dan sekaligus jawaban nurani dan naluri para jamaah haji Indonesia.

Para jamaah haji Indonesia merupakan potensi yang dapat dikembangkan diarahkan dan dibina guna berperan aktif dalam pembangunan Indonesia untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama melalui pengabdian dan pengamalan ajaran agama Islam.

Berdirinya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) merupakan keinginan para haji untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, keimanan dan ketakwaan serta amal nyata dalam upaya melestarikan ke-*mabr r*-an hajinya.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebagai organisasi kebajikan merupakan wadah untuk menampung dan penyalur aspirasi *hujjaj* yang berpedoman pada Undang-

Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>190</sup>

IPHI didirikan oleh muktamar organisasi-organisasi persaudaraan haji tanggal 22-24 Sya'ban 1410 Hijriyah bertepatan dengan 20-22 Maret 1990 Miladiyah, yang diprakarsai oleh organisasi persaudaraan haji Indonesia. Persaudaraan haji berakidah Islam dan berasaskan Pancasila Islam dan merupakan organisasi kebajikan bersifat independen, yang bertujuan memelihara dan mengupayakan pelestarian haji *mabrur* guna meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan bangsa dan negara yang diridhai Allah swt.<sup>191</sup>

Organisasi ini bertugas melaksanakan pembinaan, bimbingan penyuluhan, dan penerangan kepada calon jemaah haji dan pasca haji. Organisasi juga berfungsi sebagai :

1. Wahana menghimpun potensi para haji Indonesia, penyerap dan penyalur aspirasi umat,
2. Organisasi kemasyarakatan untuk menyukseskan program pembangunan bangsa,
3. Sarana untuk mempererat *ukhwah Islamiyah* sesama umat.<sup>192</sup>

IPHI menyusun program umum yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, program umum persaudaraan haji ini ditetapkan pada pelaksanaan muktamar. Keanggotaan IPHI adalah umat Islam Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji, syarat-syarat untuk menjadi anggota, hak dan kewajiban serta pemberhentiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dalam organisasi ini.

---

<sup>190</sup>IPHI Kabupaten Sidrap, "Pedoman Program Kerja Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sidenreng" masa bakti 2005 – 2010, hasil Musyawarah IPHI Kabupaten Sidrap tanggal 12 - 14 September tahun 2004, h. 5.

<sup>191</sup>Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, IPHI Kabupaten Sidrap periode, 2004 – 2009, h. 8

<sup>192</sup>Lihat *ibid.*, h. 12.

Susunan organisasi IPHI terdiri atas tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat cabang/kecamatan, tingkat ranting/kelurahan dan desa. Pengurus pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengurus wilayah berkedudukan di Ibukota provinsi, Pengurus daerah berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota, Pengurus cabang berkedudukan di Ibukota kecamatan dan Pengurus ranting berkedudukan di kelurahan/ desa.

Hubungan kerja antara Pengurus pusat dengan Pengurus wilayah, Pengurus daerah, Pengurus cabang, Pengurus ranting dan sebaliknya, merupakan hubungan kerja vertikal organisatoris. Seorang pengurus tidak diperbolehkan merangkap kepengurusan Ikatan Persaudaran haji Indonesia dalam masa bakti yang sama. Musyawarah, rapat-rapat dan keuangan/kekayaan persaudaraan haji diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui muktamar.<sup>193</sup>

#### **E. Pembinaan Pasca Haji dan Pendanaannya dalam Meningkatkan Pemahaman Ajaran Syari'at Islam**

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima dan merupakan ibadah yang sangat didambakan oleh setiap orang Islam, walaupun hanya rata-rata 200.000.<sup>194</sup> umat Islam Indonesia pertahunnya dapat diberi kesempatan oleh pemerintah melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Hal ini disebabkan jumlah *quota* yang terbatas, juga karena ibadah haji

<sup>193</sup>IPHI Kabupaten Sidrap, *op.cit.* h. 23.

<sup>194</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Jamaah Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 1.

membutuhkan kemampuan dana yang cukup besar dan kemampuan fisik serta jasmani yang prima.

Jumlah masyarakat Islam Indonesia yang selesai melaksanakan ibadah haji (jamaah pasca haji) sudah dapat diperhitungkan setiap tahunnya akan bertambah  $\pm 200.000$  orang sehingga diasumsikan 10 tahun ke depan jumlah jamaah pasca haji bertambah  $\pm 2.000.000$  orang.

Mengingat jumlah mereka yang cukup besar ini dan keberadaan mereka yang potensial di tengah-tengah masyarakatnya, baik karena kemampuan ekonomi maupun karena sikap pandang, masyarakat Indonesia yang menempatkan mereka pada posisi memiliki nilai lebih dan pantas didambakan. Di samping usia mereka yang rata-rata masih dapat usia produktif (50 – 60 tahun = 51 % dari jumlah jamaah pertahunnya), ke semuanya itu memberikan kontribusi pemikiran akan potensi yang tidak dapat diabaikan oleh semua pihak. Atas dasar hal tersebut, muncul keinginan untuk memberdayakan mereka sebagai ujung tombak syi'ar Islam di tengah-tengah masyarakat yang sekaligus merupakan realisasi dan reaktualisasi akan ke-*mabr* r-an haji mereka melalui suatu program pembinaan pasca haji (*lihat tabel 17*) .

Secara sederhana, program ini telah ada di tengah-tengah masyarakat sejak awal sesuai dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang senang berkelompok (*homo sapeins*), akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai suatu pembinaan produktif karena ketidakjelasan arah dan sasarannya serta belum terbinanya dalam sebuah sistem yang baku dan jelas.

Keinginan untuk mewujudkan peran serta jamaah haji ini dalam kehidupan sosial di samping sebagai upaya pelestarian ke-*mabr r*-an haji mereka. Pemerintah telah mewadahnya melalui KMA. No.1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Pembinaan jamaah pasca haji sebagai prosesi yang amat besar dan merupakan kelompok masyarakat yang sangat dihormati, baik pada masa sebelum, saat penjajahan, maupun setelahnya, sebelum mereka telah menempati posisi strategis di lingkungannya. Umat Islam/orang Islam yang telah menunaikan ibadah haji telah memiliki kedudukan yang lebih terhormat di mata masyarakat maupun dari sisi kedudukan sosial ekonominya termasuk pengalaman ibadah dan kelebihan-kelebihan lainnya.

Hal ini menempatkan mereka pada posisi yang sangat diteladani. Posisi dan potensi semacam ini telah terbukti dalam lembaran-lembaran sejarah kehidupan berbangsa bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan baik jumlahnya maupun pengaruhnya.

Untuk lebih memperjelas subbab ini, diuraikan sekilas perjalanan sejarah pembinaan pasca haji dari 3 (tiga) periode tersebut di atas, yaitu :

#### **1. Periode sebelum kemerdekaan**

Jamaah pasca haji pada periode ini di mata masyarakat sebagai sosok manusia/muslim yang suci sehingga menyebutnya pun dengan panggilan yang suci yaitu Haji atau Hajjah. Mereka tampil dalam pergaulan sebagai manusia yang berkepribadian baik dari tutur bahasanya, tata busananya, maupun ibadah amaliyahnya. Mereka yang pada masanya tergolong kelompok langka karena jumlah mereka yang terbatas ternyata memiliki

jalanan silaturrahi yang kental dan tinggi dan mereka senantiasa saling bertemu dengan reuni nostalgia.

Terbukti dalam perjalanan Syeh Abdussamad al-Falembani dan Syeh Muhammad Arsyad al-Banjari serta Syeh Muhammad Yusuf bin Hidir Majjalawi Hidayatullah Tajul Halwati al-Maqasari, selalu saling berkunjung dan saling berhubungan, baik secara langsung maupun melalui tulisan-tulisan (surat).

Di dalam buku Zabdatul Asror dan Risalah Assalaini yang ditulis oleh Syeh Yusuf Tajul al-Hawati memberikan gambaran eratnya para *hujjaj* ini, sehingga pada saat Syeh Yusuf dalam pembuangan di Sailor, jamaah haji dari Banten maupun Bugis bahkan dari Banjar dan Palembang selalu menyempatkan diri berkunjung ke tempat syeh Yusuf dibuang. Sehingga pemerintah penjajah Belanda pada saat itu khawatir dengan pertemuan-pertemuan seperti itu akan melahirkan semangat revolusi, menyebabkan Syeh Yusuf dipindahkan ke Afrika Selatan yaitu Cafe Town.<sup>195</sup>

Pemerintah Belanda dan Jepang merasa sangat khawatir dengan misi haji, yang dapat menularkan jiwa revolusi pan Islamisme yang pada saat itu sedang bangkit di Timur Tengah, termasuk gelombang misi Istambul (Turki) sebagai pusat kekuatan agama Islam yang ditakuti saat itu. Masih banyak lagi data, baik dalam sejarah maupun kamuskrip termasuk tulisan-tulisan ilmiah dan warta tempo dulu dalam bentuk microfilm yang tersimpan di perpustakaan nasional, memberikan gambaran nyata kekhawatiran para penjajah terhadap kelompok *hujjaj* ini menjadi penular/pelopor kebangkitan perlawanan rakyat Indonesia sangat khawatir saat itu. Di antara pergerakan kelompok-kelompok

---

<sup>195</sup>H. Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perhajian* ( Jakarta: ), h. 6



kedaerahan (regional) yang ada yaitu di Cirebon, Gresik, dan Surabaya serta Kanjen Demak memberikan sosok haji mempelopori pergerakan perlawanan terhadap Belanda.<sup>196</sup>

## 2. Periode Orde Lama

Banyak sekali data yang mendukung pada saat ini, kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga jamaah pasca haji lahir dan mulai terbentuk, salah satu di antaranya yang mempelopori munculnya Mukersah (Musyawaran Kerjasama Haji) tahun 1964 adalah para *hujjaj* yang berjuang untuk mencari-mencarikan kemudahan-kemudahan bagi para umat muslim yang berhaji, dibantu dengan pihak pemerintah dan organisasi sosial Islam yang ada saat itu. Monumental sampai saat ini sekaligus menjadi embrio lahirnya Organisasi Persaudaraan Haji, yaitu organisasi yang dibentuk oleh KH. Matori dan kawan-kawan memproklamirkan berdirinya Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia di Mekkah tahun 1952 yang lebih dikenal dengan nama PDHI. PDHI yang dimaksud sampai saat ini eksis dengan berbagai prioritas programnya berpusat di gedung PDHI alun-alun utara Yogyakarta.<sup>197</sup>

## 3. Periode Orde Baru

Pada periode ini lembaga-lembaga jamaah haji pasca haji makin semarak dan kiprah sosial keagamaannya pun semakin nyata sehingga hampir seluruh ibukota Propinsi bahkan sebagian telah menembus ke tingkat pedesaan dan kecamatan telah terbentuk wadah lembaga jamaah pasca haji dengan nama beragam antara lain, persaudaraan haji, Jamiyatul Hujjaj, Ikatan Persaudaraan Haji, dan nama-nama sejenis itu.

---

<sup>196</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 5 - 6

<sup>197</sup>*Ibid.*, h. 7.

Salah satu contoh adalah propinsi Sulawesi Selatan sudah dapat dikatakan hampir seluruh pedesaan telah membentuk kelompok pengajian persaudaraan haji dan dipelopori Andi Palaguna (saat itu belum menjadi Gubernur Sulawesi Selatan), pada periode ini pulalah IPHI Pusat dibentuk tepatnya pada tahun 1992. Di antara kelompok persaudaraan haji yang muncul pada periode ini dan memiliki program yang menjadi kebanggaan jamaah pasca haji sampai saat ini, yaitu :

- a. Aspek sosial: menghimpun dana dari jamaah pasca haji sehingga berdiri Rumah Sakit Klaten di Jawa Tengah .
- b. Aspek ekonomi : terbentuknya badan usaha milik organisasi Persaudaraan Haji Indonesia (BUMO-IPHI) antara lain : Koperasi *al-Mabr r*, BPR, Persaudaraan Haji dan Majalah Amanah.
- c. Aspek agama: pengajian rutin, pengajian bulanan dan peringatan hari besar Islam.
- d. Dan daerah-daerah lain yang memiliki program unggulan kemasyarakatan.<sup>198</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa organisasi yang merumuskan, mengelola dan melaksanakan pembinaan jamaah haji pada tingkat Kabupaten / kota, sebagai berikut :

- a. Pembina jamaah pasca haji tingkat kabupaten adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
- b. Kelompok kerja jamaah pasca haji tingkat Kabupaten/Kota adalah Kasi Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf / Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah / Kasi

---

<sup>198</sup>*Ibid.*, h. 8.

Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji, panitia pelaksana pembinaan jamaah pasca haji dan pengurus cabang organisasi persaudaraan haji untuk tingkat Kabupaten / kota.

Pembina jamaah pasca haji tingkat kabupaten / kota melaksanakan tugas :

- a. Merumuskan kebijaksanaan tingkat kabupaten / kota
- b. Memberikan dukungan dan bimbingan ;
- c. Mengusulkan dan merumuskan prioritas program ;
- d. Melaksanakan program sesuai kebijaksanaan dan rencana ;
- e. Menggali potensi kabupaten / kota ;
- f. Mengkordinir program kegiatan ;
- g. Memonitor dan mengevaluasi ;
- h. Membina Kecamatan ;
- i. Melaporkan ke pembina Propinsi dan Kabupaten / kota.<sup>199</sup>

Pembinaan terhadap jamaah pasca haji dilaksanakan dalam bentuk antara lain :

- a) Majelis taklim, b) Arisan kelompok, c) Reuni, d) Peguyuban, e) Wirausaha, dan f) Pengabdian masyarakat.<sup>200</sup>

Pelaksanaan pembinaan terhadap jamaah pasca haji diatur melalui menetapkan bentuk dan sifat pembinaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Pelaksanaan terlebih dahulu menyusun rencana sesuai dengan bentuk dan sifat program. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan jamaah haji disesuaikan dengan bentuk dan

---

<sup>199</sup>*Ibid.*, h. 9 - 14.

<sup>200</sup>*Ibid.*, h. 16.

sifat pembinaannya, dengan standar pembinaan untuk masing-masing bentuk sifat tersebut. Pendanaan dari setiap pelaksanaan pembinaan pasca haji dapat diperoleh dalam beberapa bentuk, yaitu: a) Swadaya anggota, b) Subsidi, dan c) Sponsor / simpatisan.<sup>201</sup>

Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) disusun antara pemerintah bersama DPR berdasarkan kebutuhan riil jamaah, kemudian besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan oleh presiden atas usul menteri agama setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).<sup>202</sup>

Biaya penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan dalam US Dollar dan Rupiah. Hal ini disebabkan karena 98 % pembiayaan operasional penyelenggaraan haji dalam bentuk valuta asing, yaitu US Dollar dan Real Arab Saudi.

BPIH ditetapkan oleh Presiden RI. atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 1999, dan pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 sebagai berikut :

”Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR. BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan biaya Penyelenggaraan ibadah haji. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur dengan Peraturan Menteri.”<sup>203</sup>

---

<sup>201</sup>*Ibid.* h. 19.

<sup>202</sup>Departemen Agama RI., *Dinamika Perhajian* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008 M./1429 H.), h. 49.

<sup>203</sup>Departemen Agama RI., *Pembakuan Sarana Alat Peraga Bimbingan Manasik Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2006), h. 71.

Pada prinsipnya dana BPIH bersifat *in-out*, dengan maksud hal yang diterima dari calon haji sama dengan keperluan jamaah dalam keperluan penyelenggaraan haji, dengan demikian dana BPIH telah digunakan secara efisien.<sup>204</sup>

Pengawasan dana BPHI sama dengan pengawasan dana APBN/APBD, yaitu dilakukan oleh pengawasan fungsional yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Departemen Agama.<sup>205</sup>

Penatausahaan dana BPIH sesuai dengan sistem keuangan negara, atau pengadministrasian dana BPIH dilakukan pada dana APBN/APBD, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa berpedoman.

### **E. Kerangka Teoritis**

Untuk mengilustrasikan secara menyeluruh intisari pembahasan dalam disertasi ini, lebih lanjut penulis perlu memaparkan hal-hal sebagai berikut :

Ketaatan berhaji studi analisis antara kesenjangan pemahaman dan pelaksanaannya serta upaya pengelola haji mewujudkan peningkatan pemahamannya di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal tersebut penting untuk dikaji dan menunjukkan adanya kesan bahwa umat Islam lebih memprioritaskan satu rukun Islam dengan rukun lainnya; pelaksanaan haji dilaksanakan berulang kali dan animo masyarakat untuk berhaji lebih

---

<sup>204</sup>*loc.cit.*

<sup>205</sup>Departemen Agama RI., *Dinamika Perhajian* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008 M./1429 H.), h. 50

besar setiap tahunnya melalui daftar tunggu (*waiting list*) termasuk adanya upaya-upaya strategis yang dilakukan pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui tiga hal;

1. Melakukan pembimbingan penyelenggaraan haji yang sesuai dengan undang-undang dan syari'at Islam demi tewujudnya jamaah haji yang mandiri dengan membangun hubungan emosional yang baik dengan masyarakat untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga haji melalui perbaikan sistem pelayanan, sarana dan prasarana, dan peningkatan sumberdaya pengelola sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat.
2. Mensosialisasikan Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 sebagai landasan pijakan pemerintah dan masyarakat (KBIH) untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan, bimbingan dan perlindungan bagi setiap warga negara yang melakukan ibadah haji. dan
3. Memberikan pelayanan yang baik, kehidupan serba modern serta teknologi semakin canggi, maka masyarakat pun semakin berkembang maju mengikuti perkembangan zaman. Lembaga pelayanan haji atau pihak pengelola haji telah mengusahakan membuat sistem dan prosedur dengan baik agar kepuasan dari pihak yang membutuhkan pelayanan dapat terwujud .

Penelitian ini juga mengungkap faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki keinginan besar untuk berhaji, faktor yang dimaksud antara lain; 1) Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat kepada ajaran haji, 2) Pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran haji, 3) Fungsi-fungsi manajemen belum diterapkan sepenuhnya, dengan lemahnya SDM pengelola haji, 4) Tidak adanya sanksi bagi masyarakat dan lembaga pelayanan haji yang melanggar ketentuan berhaji, dan 5) Keinginan kuat untuk memperoleh gelar “Haji/Hajjah”. Dalam hal ini perlunya

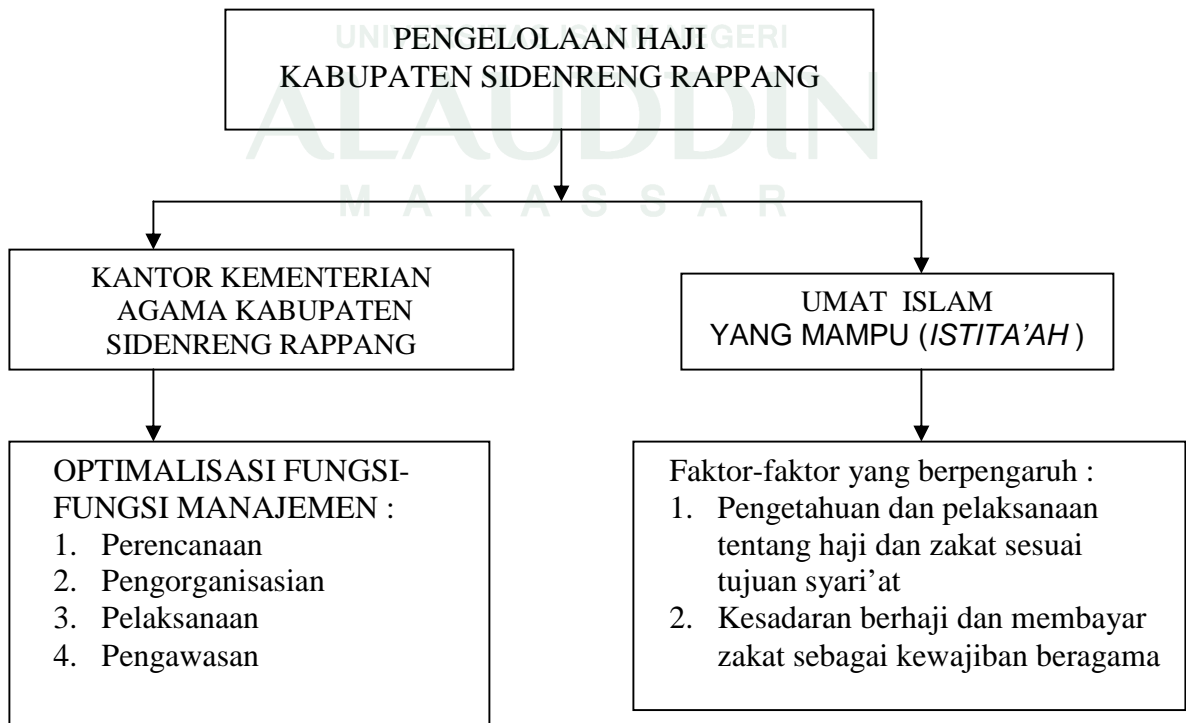
diterapkan perubahan pemahaman ajaran umat Islam yang tekstual-skriptual ke pemahaman yang kontekstual-kritikal dengan mengoptimalkan pembinaan umat dan segenap lembaga serta pranata sosial untuk suatu kebersamaan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dari beberapa faktor yang memengaruhi ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini berarti masyarakat muslim mengakui rukun iman dan Islam tetapi kurang perhatian kepada kesempurnaan berhaji dengan kepedulian kepada kaum lemah (*du' fa*) dan ketimpangan sosial lainnya (misalnya; pendidikan dan dakwah), pengentasan kemiskinan dan kepedulian terhadap saudara muslim yang hidup dalam keadaan kekurangan, ketimbang dengan melakukan ibadah haji berkali-kali yang sifatnya kurang proporsional dari sisi ibadah sosial.

Kecenderungan umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih mendahulukan ibadah *syahsiah*, orang lain tidak diperlukan, ingin mendapatkan pahala atas usahanya sendiri. Sementara *ijtim iyah* kurang diperhatikan, padahal ibadah *ijtim iyah* adalah kewajiban sosial karena dilakukan bersama masyarakat.

Karena kajian ini bersifat *deskriptif*, maka lingkup pembahasannya diorientasikan pada upaya mengungkap terjadinya kesenjangan pemahaman berhaji dan pelaksanaannya serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Kabupaten Sidenreng Rappang dan upaya-upaya strategi yang dilakukan oleh pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kerangka Konseptual ( *Frame Work*) Pemahaman Ketaatan Berhaji







### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini akan memusatkan perhatiannya pada praktik-praktik sosial orang haji secara individu dan atau kelompok. Pengategorisasi pemilihan informan dari masyarakat Sidenreng Rappang. Informan yang melakukan pembinaan dan penyelenggaraan haji yang tergolong sudah haji dan belum melaksanakan haji.

Perhatian informan lebih tertuju kepada para pelaku haji (yang sudah dan belum berhaji) yang melakukan praktik-praktik sosial keagamaan. Adapun kriteria pemilihan informan antara lain berdasarkan tingkat usia (sebelum dan di atas 40 tahun), jenis kelamin, jenis pekerjaan (pedagang, pegawai, rumah tangga dan profesi lainnya serta yang tidak memiliki pekerjaan tetap), dan kedudukan sosial yang bervariasi dari kedua kelompok tersebut.

Selain dari pelaku itu sendiri (haji dan yang belum berhaji), informan juga berasal dari instansi yang terkait dengan aktivitas keagamaan dan atau perhajian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan variasi data dari berbagai perspektif lebih banyak dan melihat keterkaitan yang terjadi di dalam wilayah dan di luar Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga informan tidak terbatas dari kriteria, status, dan kesatuan domisili dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perhatian lebih diarahkan kepada unit observasi yang berkenaan dengan :

1. Para pelaku haji (sosial keagamaan) yang bertindak sebagai agen, aktor dan subyek,

2. Struktur - struktur sosial, institusi-institusi keagamaan (haji) dan ranah-ranah lainnya sebagai realitas budaya masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Mekanisme dan proses yang sudah (semacam pengalaman atau sejarah) maupun sedang berlangsung dalam dialetika (prosesual), dalam hubungannya dengan apresiasi diri terhadap haji dan pengesahan sosial setempat.
4. Peristiwa-peristiwa beserta tindakan pelaku haji yang membentuk proses itu dalam arena sosial haji.

Pengumpulan data selama penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan terlibat (*participant observation*). Disamping pengamatan (*observation*), juga dilakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dan pemeriksaan dokumentasi. Observasi lapangan ini berlangsung lama, demikian juga kajian tentang haji khususnya yang terkait dengan tugas penulis.

Untuk mendapatkan data lebih detail dalam memahami kompleksitas permasalahan haji sebagai subyek penelitian, maka digunakan pula metode lainnya seperti *personal narrative* dan *life history*. Metode ini digunakan agar para individu sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu dibiarkan bicara bagi dirinya sendiri tentang perkembangan dan perubahan lingkungannya.<sup>1</sup>

Pendekatan ini digunakan sebagai usaha untuk lebih menampilkan kepribadian individu dalam etnografi dan menfokuskan diri pada perubahan waktu dalam rancangan

---

<sup>1</sup>Kaitannya metode *narrative personal*, Williams (1991:ix), mengungkapkan bahwa masih tetap terdapat kemungkinan adanya distorsi atau mengidealkan ungkapan mereka menghindari topik-topik tertentu, sehingga posisi metode ini bukanlah suatu kebenaran mutlak, namun semacam upaya pemahaman seseorang terhadap apa yang telah dan sedang terjadi, maka kemampuan penulis dituntut untuk memilih topik yang paling penting dan sesuai bagi seseorang yang dapat diceritakannya.

sistem budaya sehingga *perspektif emic* (dari dalam) suatu kebudayaan bisa diperoleh, meskipun tentunya masih belum benar-benar sempurna.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pengamatan yang dikembangkan oleh Bourdieu (1985) tentang metode '*generatif structuralism*' sebagai suatu alat konseptual untuk mengkaji kehidupan praktis, yang menggambarkan suatu cara berpikir dan cara bertanya. Melalui metode tersebut, selanjutnya penulis dan mengamati fenomena dengan cara melakukan observasi langsung di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari hasil pengamatan, menggambarkan asal-usul seseorang, mengklasifikasi struktur-struktur sosialnya dan kelompok-kelompoknya, kemudian menelusuri hubungan dialektis antara struktur dan agen. Penelusuran ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan maksud untuk memahami sumber struktur-struktur sosial.

Selain itu, penelitian lapangan ini juga menggunakan studi kepustakaan, mengumpulkan, menyortir, mengklasifikasi, dan menyimpulkan seluruh hasil penelitian lapangan-secara timbal balik dan berulang-ulang, yang hasilnya kemudian diproses menjadi tulisan etnografi.

Berdasarkan obyek penelitian, baik tempat maupun sumber data, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya dengan pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Metode wawancara, akan dikembangkan menjadi metode analisis *life history*, apabila peneliti hendak memperoleh pandangan dari dalam; melalui reaksi, tanggapan interpretasi dan penglihatan para warga terhadap dan mengenai masyarakat yang

bersangkutan. Dengan mempelajari data pengalaman hidup<sup>2</sup> dalam kehidupan masyarakat, peneliti akan dapat memperdalam pengertiannya secara kualitatif.

Sebagai suatu penelitian yang bersifat fenomenologis,<sup>3</sup> penelitian ini berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan saling mempengaruhi dengan manusia dalam situasi tertentu. Kerangka kerja penelitian fenomenologis ini merupakan konsep budaya. Karena salah satu ciri khas yang ditonjolkan adalah pemahaman *interpretatif* terhadap interaksi antara manusia dan segala sesuatu yang dibuat digunakan manusia. Adapun usaha untuk mendeskripsikan budaya atau aspek-aspeknya disebut etnografi.<sup>4</sup>

Data yang terkumpul secara *deskriptif* akan dipilah-pilah untuk kemudian direduksi sesuai dengan kepentingan kajian. Analisis dilakukan dengan *deskriptif* dan analisis budaya, sehingga dapat menghasilkan suatu tesis, dengan interpretasi dalam analisis *kualitatif* dengan interpretasi sebagai tiang pokok. Hal ini akan dilakukan dengan tiga tahapan analisis, yaitu; tahap reduksi data, tahap *display* data, dan tahap verifikasi (penyimpulan).

Dalam pengumpulan data, digunakan berbagai teknik pengumpulan data sebagaimana dalam penelitian etnografi.<sup>5</sup> Yakni kegiatan pengumpulan bahan keterangan atau data yang dilakukan secara sistemik mengenai cara hidup serta berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan itu dan berbagai benda kebudayaan masyarakat tersebut.

---

<sup>2</sup>Data pengalaman individu adalah bahan keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu-individu tertentu sebagai warga dari suatu masyarakat yang sedang menjadi obyek penelitian.

<sup>3</sup>Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 37.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Lihat dalam James P. Spradley, *Metode Etnografi*, penterj, Misbah Zulfah E (Cet. III; Jogjakarta: Tiara Wacana, 2007), h. 29.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang difokuskan sebagai obyek penelitian adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Lembaga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Organisasi Masyarakat Islam (ORMAS) dan KBIH, termasuk anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang ada di Sidenreng Rappang serta umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji dan umat Islam yang sudah melaksanakan ibadah haji.

Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan haji dan bertanggung jawab dalam hal proses pelaksanaannya sekaligus memberdayakan KBIH serta pembinaan pascahaji yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga yang resmi mengelola haji dan membina KBIH juga berkewajiban membina pascahaji melalui wadah IPHI yang ada di Sidenreng Rappang dinilai sangat strategis dan potensial untuk diteliti. Salah satu faktor pendukung penelitian ini adalah kesamaan latar belakang baik dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa pertimbangan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa faktor, antara lain :

1. Lokasi penelitian merupakan daerah dengan jumlah umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sangat tinggi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan sesuai dengan *setting* penelitian yang diharapkan.

2. Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten yang terpadat penduduknya di wilayah Ajattapareng (Barru, Pinrang, Enrekang, dan Sidenreng Rappang), dan dalam Kabupaten Sidenreng Rappang berkembang dengan pesat Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) sebagai salah satu *stakeholder* pelaksana bimbingan jamaah haji baik sebelum maupun sesudah penyelenggaraan ibadah haji.
3. Lokasi penelitian merupakan daerah tempat tinggal peneliti, sehingga dapat mempermudah komunikasi dan pencarian data serta menghemat biaya penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif*, dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap persoalan-persoalan yang diangkat dalam penelitian, untuk menyederhanakan fenomena yang ditemukan, terutama tentang pemahaman dan ketaatan berhaji dan faktor-faktor yang memengaruhinya di tengah-tengah masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian adalah masyarakat yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai warga masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), sedangkan fenomena dari unit sosial yang diangkat sebagai bahan kajian dalam membahas fenomena perhajian di Kabupaten Sidenreng Rappang dan semangat umat Islam terhadap pelaksanaan rukun kelima ini.

Di tengah-tengah masyarakat ditemukan beragamnya motivasi untuk berhaji, sehingga pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji sangat dipengaruhi oleh motivasi dari setiap individu. Akan tetapi, motivasi yang beragam itu, motivasi keagamaan kelihatannya menjadi motivasi yang sangat berpengaruh, terutama sekali karena

persoalan haji ini adalah persoalan yang sangat terkait dengan masalah keagamaan. Salah satu bentuk motivasi keagamaan adalah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menggambarkan keberuntungan dan kelebihan jika seorang muslim sedang dan telah melaksanakan haji.

Walaupun banyak *nas* yang memberikan motivasi kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji, namun persoalan motivasi sangat tergantung kepada individu yang bersangkutan, yang tentunya akan memunculkan beragam bentuk motivasi.

Meskipun demikian, penelitian ini ditujukan pada pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang baik yang sudah melaksanakan haji maupun yang belum. Hal ini perlu dipertajam, agar arah tujuan penelitian ini berbeda dengan beberapa kajian penelitian sebelumnya.

Untuk itu perlu dirumuskan tentang rumusan pemahaman ketaatan berhaji di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai dengan semangat yang diberikan oleh *nas* motivasi berhaji dan sesuai pula dengan semangat berhaji menurut ajaran Islam. Penelitian ini membutuhkan kajian yang mendalam dan didukung oleh data yang akurat di lapangan, agar penelitian ini dapat membuahkan hasil akurat pula.

Penelitian pada umumnya dianalisis dari sumber data tertulis dan tidak tertulis, maka jenis data yang digunakan adalah *library research* dan *field research*. *Library research*, yaitu penelitian melalui buku-buku kepustakaan yang menunjang akuratnya data penelitian. Sedangkan *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan menyaksikan



langsung pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti, sedangkan informan adalah bukan sampel tetapi yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman ketaatan berhaji dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Data sekunder, merupakan jenis data yang bersumber dari instansi terkait dan dokumentasi-dokumentasi dari beberapa lembaga penyelenggara dan pembinaan haji, seperti; Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, SKPD Pemda Sidenreng Rappang, anggota DPRD Sidenreng Rappang, Ormas Islam yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, KBIH dan IPHI Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian ini.

## **B. Metode Pendekatan**

Penelitian ini membahas tentang pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka metode pendekatan yang digunakan adalah multidisipliner dan

interdisipliner dengan menonjolkan pendekatan teologis normatif,<sup>6</sup> filosofis,<sup>7</sup> dan sosio kultural.<sup>8</sup> Penonjolan metode-metode pendekatan seperti yang telah disebutkan, sangat relevan dalam pembahasan tentang pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Agama dipandang sebagai doktrin yang diyakini secara mutlak kebenarannya. Agama sebagai doktrin diduga memberikan kontribusi terhadap dinamika dan tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Secara lebih terperinci gejala-gejala keagamaan yang menjadi pembahasan penelitian ini ialah; a) masalah-masalah kognitif keagamaan, seperti pengetahuan tentang perangkat tingkah laku yang baik dan dikehendaki agama, tingkat pemahaman kepada ajaran agama (*religious literacy*) dan tingkat ketertarikan untuk mempelajari agama; b) perasaan keagamaan yang bergerak dalam empat tingkat, yakni konfirmatif (merasakan kehadiran Tuhan), responsif (merasa bahwa Tuhan menjawab kehendaknya), estetik (merasa hubungan akrab dan penuh cinta dengan Tuhan), partisipatif (merasa menjadi kawan dengan Tuhan); c) pelaksanaan ritus dalam kegiatan sehari-hari yang meliputi frekuensi, prosedur, pola sampai pada makna ritus-ritus tersebut secara

---

<sup>6</sup>Pendekatan teologis normatif, bila obyek kajiannya dibahas berdasarkan norma-norma keagamaan yang diyakini kebenarannya. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 107.

<sup>7</sup>Pendekatan filosofis, bila obyek kajiannya dibahas berdasarkan penalaran ilmu hikmah (kefilsafatan). Lihat: *ibid.*, h. 9.

<sup>8</sup>Pendekatan sosiokultural, bila obyek kajiannya dibahas berdasarkan ilmu sosial dan kemasyarakatan. Lihat: Noeng Muhadjir, *op.cit.* h. 101. Pendekatan sosiologis, salah satu bagian metodologi penelitian agama yang menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain. Lihat: U. Maman Kh, dkk., *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik* ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 128.

individual, sosial dan kultural; dan (d) konsekuensi pelaksanaan ajaran agama bagi kehidupan baik individu maupun sosial, seperti etos kerja, hubungan interpersonal, kepedulian terhadap penderitaan orang lain dan sebagainya.<sup>9</sup>

Metode pendekatan teologis normatif (*syar'i*)<sup>10</sup> dan filosofis bertujuan untuk merumuskan konsepsi pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan dalam metode pendekatan sosiokultural, juga digunakan karena sesuai dengan kenyataannya, pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang diperhadapkan oleh berbagai persoalan kebudayaan.

Lebih jelasnya, dalam menghasilkan penelitian yang akurat, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Sosio-yuridiks, yaitu pendekatan dengan menganalisis kondisi sosial masyarakat calon jamaah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang yang sangat memengaruhi pemahaman ketaatan berhaji dan menjadi penyebab utama dalam meningkatkan animo masyarakat melaksanakan ibadah haji serta aspek Undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan ibadah haji.
2. Pendekatan Teologis-normatif, yaitu pendekatan dengan menganalisis faktor-faktor keagamaan dan penetapan hukum-hukumnya yang berdasarkan *nas*□-*nas*□ Alquran dan

---

<sup>9</sup>Lihat: Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama* ( Jakarta: t.p., 1989 ), h. 92 – 94.

<sup>10</sup>Lihat: UIN Alauddin Makassar, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* ; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, ( Makassar; 2008 ), h. 11.

hadits Nabi saw. termasuk dalam hal ini adalah gejala sosial kemasyarakatan, sebagai salah satu yang memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia / masyarakat.

3. Pendekatan Historis (*tarîkhîy*), yaitu pendekatan dengan menggunakan peristiwa masa lampau (sejarah) sebagai bahan perbandingan dalam meneliti yang dimaksud.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi pada umumnya berarti keseluruhan obyek penelitian, mencakup semua elemen yang terdapat dalam wilayah penelitian. Mardalis mengemukakan bahwa populasi meliputi individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.<sup>11</sup>

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah melaksanakan ibadah haji dan calon jamaah haji yang terdaftar tahun 2008 sampai dengan 2010 terutama mengikuti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan IPHI di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Informasi mengenai pemahaman ketaatan berhaji dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi bahan penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang, Ketua KBIH dan IPHI di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan data pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang memengaruhinya diperoleh melalui angket yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada

---

<sup>11</sup>Lihat: Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 92, lihat pula: Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 53.

penggalan motivasi, pemahaman ketaatan berhaji, dan faktor-faktor yang melatar belakangi umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan ibadah haji.

Populasi pada penelitian ini adalah pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, IPHI, KBIH, Ormas Islam, dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah melaksanakan ibadah haji dan yang belum melaksanakan ibadah haji, termasuk ulama dan akademisi yang memberikan pendapat dan pandangannya dalam rangka perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan, serta *stakeholder* yang berperan dalam pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*,<sup>12</sup> di sisi lain memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap populasi yang telah ditetapkan untuk dapat dipilih sebagai sampel.

Sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Menurut Singarimbun dan Sofyan disebutkan bahwa penelitian dengan menggunakan sampel berguna mewakili individu dalam populasi sehingga tidak memakan biaya dan waktu, dan yang penting diharapkan dari hasil penelitian dengan sampel itu dapat menggambarkan sifat populasi yang dimaksud.<sup>13</sup>

Penelitian ini menetapkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng, Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Badan Perencanaan Daerah pada

---

<sup>12</sup>Menentukan dan menunjuk langsung sampel lebih awal sebelum penelitian dilakukan sebagai sumber utama dalam pengambilan data di lapangan. Lihat: S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1970), h. 126, pada pengertian bahwa *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya, lihat: Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. VII; Jakarta, 2005) h. 97.

<sup>13</sup>Lihat: Husain Usman dan Pornomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. II, Jakarta: PT. Aksara, 2000), h. 44, lihat pula: Masrin Singarumbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. I, Jakarta: PT Aksara Alp3es Indonesia, 1989), h. 149.

Instansi PEMDA Sidenreng Rappang, 11 Kantor Urusan Agama Kecamatan, Organisasi IPHI (Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji Indonesia) Kabupaten Sidenreng Rappang, 9 KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), dan Ormas Islam yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti PD. Muhammadiyah Kabupaten Sidenreng Rappang, PC. NU Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk MUI Kabupaten Sidenreng Rappang dan 120 orang sebagai responden, dengan perincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1

## DAFTAR NAMA-NAMA / ORGANISASI YANG DIJADIKAN SAMPEL

NO.	NAMA / ORGANISASI	PROFESI/JABATAN	BANYAKNYA	KET.
1.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.	Kepala Kantor / Kasi	08 orang	
2.	Kantor Badan Perencanaan Daerah Pemda Sidenreng Rappang (SKPD).	Ketua Bappeda Sidrap	01 Orang	
3.	Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Sidenreng Rappang	Kepala KUA Kecamatan	11 Orang	
4.	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang (IPHI)	Ketua/Pengurus	20 Orang	
5.	Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kabupaten Sidenreng Rappang	Ketua	9 Kelompok	
6.	Organisasi Masyarakat Islam	Ketua	05 Ormas	
7.	Tokoh Agama	Ulama	20 Orang	
8.	Cendekiawan Muslim	Akademisi	20 Orang	
9.	Muslim yang belum berhaji	PNS, TNI, Petani, dll.	20 Orang	
10.	Muslim yang sudah berhaji	PNS, TNI, Petani, dll	20 Orang	
11.	Anggota DPRD Kabupaten Sidrap	Wakil Rakyat	08 Orang	
	J U M L A H		150 Orang	

**Sumber data: Hasil pengelolaan data Kuesioner**

Dalam suatu penelitian telah menjadi ketentuan seorang peneliti yang tidak mampu untuk meneliti seluruh populasi yang ada, akan tetapi selalu menggunakan sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian sampel sebagai berikut : “Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi”.<sup>14</sup>

Jelaslah bahwa yang dimaksud sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan populasi yang menjadi obyek penelitian. Dapat pula berarti bahwa sampel berupa individu yang mewakili sebagian dari seluruh responden dalam suatu penelitian. Atas dasar itulah sehingga penulis menetapkan sampel sebagai wakil dari populasi sebanyak 150 orang.

Adapun daftar nama-nama responden dan jabatannya dalam organisasi pengelolaan dan pembimbingan ibadah haji yang menjadi responden dan diwawancarai oleh peneliti sekaligus dijadikan sebagai sumber data primer penulis ( terlampir dalam sub lampiran).

Penarikan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui masalahnya secara mendalam dan dipercaya, untuk menjadi sumber data yang mantap. Sedangkan pada penetapan sampel untuk dijadikan sebagai sumber pokok dan informan kunci dalam pengambilan data pada penelitian ini melalui sistem acak (*random sampling*).<sup>15</sup> Sehingga populasi dapat terwakili, dan dapat memberikan informasi serta data-data yang kuat dalam proses keberhasilan penelitian.

---

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Methodologi Research 2* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1984), h. 70.

<sup>15</sup>Teknik *random sampling* digunakan oleh peneliti apabila populasi sampel diambil merupakan populasi homogen yang mengandung satu ciri. Sampel dikehendaki dapat diambil secara sembarang (acak) saja, lihat: Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 95.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti obyek yang telah ditetapkan ditentukan (disesuaikan) dengan sumber dan jenis data serta metode yang digunakan untuk memperoleh data yang ada relevansinya dengan topik permasalahan disertasi ini.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti obyek yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Penggunaan instrumen-instrumen tersebut sangat ditentukan (disesuaikan) dengan sumber dan jenis data serta metode yang digunakan untuk memperoleh data yang ada relevansinya dengan topik permasalahan disertasi ini.

Data yang ingin diperoleh dari penelitian ini terbagi atas dua dimensi yaitu data primer dan data skunder. Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan dokumen yang sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh melalui bacaan pustaka misalnya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan haji juga termasuk peraturan-pertauran lainnya seperti Keputusan Presiden (Kepres) dan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan dan pembinaan haji di Indonesia dalam lingkup Kementerian Agama dan lain-lain.

Dalam memperoleh data atau informasi secara valid, lengkap, dan akurat, maka peneliti menggunakan dua instrumen pokok yaitu *library research method* dan *field research method*, yang uraiannya sebagai berikut :

---

<sup>16</sup>Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah dirinya dalam melaksanakan tugas mengumpulkan data, lihat Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 116.



1. *Library research methodh*, yaitu metode penelitian dengan menelaah buku-buku, karya ilmiah, majala, atau peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan penelitian.<sup>17</sup> Misalnya fungsi dan peran penyelenggara dan pembinaan haji dalam meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji di Indonesia, manajemen perhajian di Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Masa depan kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji baik yang dilakukan Majelis Taklim maupun KBIH yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat Islam serta upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman ketaatan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang dan relevansinya dengan tantangan masa kontenporer.
2. *Field research methodh*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk melihat, mengamati obyek yang akan diteliti.<sup>18</sup>

Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan mencocokkan (*cross check*) antara data atau informasi yang diperoleh melalui kajian teoritis dari buku-buku dengan kondisi di lapangan. Sehingga melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang obyektif dan lengkap.

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penggunaan *field research methodh*, yaitu antara lain :

- a. Teknik observasi, yaitu teknik penelitian yang dipergunakan untuk mendapatkan data atau informasi melalui pengamatan langsung ke obyek penelitian yaitu di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki sebelas (11) Kecamatan .

---

<sup>17</sup>Sanafiah Faisal, *Format Penelitian Sosial Dasar dan Aplikasi* ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), h. 27.

<sup>18</sup>*Ibid.*

Pada tahapan observasi ini, peneliti menggunakan berbagai sarana bantu misalnya laptop, komunikator yang dilengkapi berbagai fasilitas, buku catatan, dan lain-lain dalam rangka kevalidan data serta pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.

- b. Teknik wawancara, yaitu yang dipergunakan untuk mendapatkan data atau informasi melalui wawancara (*interview*) dengan menggunakan berbagai alat bantu misalnya pedoman wawancara, buku catatan, tape recorder dan lain-lain.

Mengenai sumber data (responden) yang akan diwawancarai, peneliti menggunakan standar dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu;

- 1) Memiliki kompetensi intelektual dan pemahaman yang mendalam tentang ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang, berprofesi sebagai ketua ormas Islam, berperan dalam KBIH dan melakukan pembinaan serta bimbingan haji dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan haji baik perspektif Undang-undang Haji maupun aspek manajemennya;
- 2) Memiliki penguasaan secara baik terhadap obyek yang diteliti;
- 3) Memiliki garis keterkaitan dengan obyek penelitian baik langsung maupun tidak langsung, dan
- 4) Sumber tersebut memiliki komitmen tinggi terhadap penegakan hukum Islam di Indonesia dan profesional dalam mengelola kelompok-kelompok bimbingan haji yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan jamaah haji itu sendiri.

### E. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mempermudah mendapatkan serta menganalisis data maka perlu menetapkan prosedur pengumpulan data.<sup>19</sup> Dalam pengumpulan data ditempuh prosedur sebagai berikut :

1. Penulis mencatat data melalui pencatatan statistik seperti besarnya jumlah populasi yang akan diteliti.
2. Menarik sampel dari populasi sebagai bagian yang akan diteliti.
3. Mencatat hasil wawancara yang diperoleh melalui daftar pertanyaan atau wawancara langsung.
4. Mengambil jawaban dari angket yang telah diedarkan sebagai informasi untuk kemudian diolah melalui analisis yang akurat.

Dalam penelitian ini diarahkan kepada penelitian *kualitatif deksriptif*, maka dalam proses dan cara pengumpulan data, dilakukan beberapa langkah-langkah, yaitu :

1. Pengamatan/observasi

Observasi adalah pengamatan langsung pada obyek yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti yaitu pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang pada aspek telaah kesenjangan pelaksanaannya dan upaya mewujudkan peningkatan pemahamannya.

---

<sup>19</sup>Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya. Terdaftar sebagai metode penelitian adalah: angket (*questionnaire*), wawancara atau interviu (*interview*), pengamatan (*observation*), ujian atau tes (*test*), dokumentasi (*documentation*), dan lain sebagainya. Lihat: Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 100 - 101

Kunci dari observasi ini adalah realitas, dan realitas adalah pengalaman. Pengalaman itu sendiri terkait dengan indra manusia. Dalam konteks penelitian sosial. Observasi pada umumnya diartikan sebagai pengumpulan informasi dengan menggunakan indra terhadap realita atau pengalaman manusia.<sup>20</sup>

Maka cara yang ditempuh oleh peneliti adalah membuat catatan-catatan harian terhadap segala kejadian yang terjadi dan kondisi lingkungan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dengan pemahaman ketaatan berhaji dan faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan ibadah haji, sebelum penelitian dilakukan serta pada waktu sedang berlangsung berdasarkan fakta.

## 2. Angket Kuisioner

Angket adalah menyebarkan daftar pertanyaan kepada obyek yang diteliti (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Badan Perencanaan Daerah Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang, 11 KUA Kecamatan se Kabupaten Sidenreng Rappang, IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kabupaten Sidenreng Rappang, Ormas Islam, MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Sidenreng Rappang, dosen STAI DDI Pangkajene Sidrap, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang sudah dan belum berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang).

Dengan prinsip keterkaitan, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan ketaatan berhaji masyarakat Kabupaten Sidenreng

---

<sup>20</sup>A. Kadir Ahmad. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar, CV. Indobis, Media Center, 2003), h. 33.

Rappang serta implementasi ajaran haji itu sendiri termasuk faktor-faktor yang memengaruhinya sehingga terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya sekaligus upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng dalam mewujudkan peningkatan pemahaman dan pelaksanaan haji serta rukun Islam lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 3. Wawancara/*interview*

Wawancara salah satu teknik dalam mengumpulkan data. Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung obyek atau persoalan yang diteliti. Wawancara ini peneliti melakukannya dalam bentuk terstruktur.

Selain pengumpulan data tersebut di atas, peneliti juga melakukan studi pustaka dan dokumentasi yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis literatur-literatur, serta sumber bacaan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Lebih jelasnya, metode pengumpulan data dalam pembahasan disertasi melalui 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisis, menginterpretasi, menginferensi dan menyimpulkan beberapa aspek yang terkait dengan masalah yang dijadikan kajian dalam karya ilmiah ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti mengambil data secara langsung pada sasaran penelitian, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang

berkeinginan melaksanakan ibadah haji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yakni peneliti mengadakan wawancara langsung dengan responden.
- b. Observasi, yakni peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala tingkah laku yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Angket, yakni peneliti mengadakan pengumpulan data melalui sederet daftar pertanyaan dan pernyataan yang dipilih berdasarkan alternatif pilihan.
- d. Dokumentasi, yakni peneliti membuka dokumen-dokumen yang terkait dengan hal-hal yang akan diteliti.

Berdasarkan masalah yang diteliti dan jenis data yang diperoleh, maka penelitian ini dilakukan dan beberapa tahapan :

*Tahapan pertama*, meneliti landasan teologis normatifnya tentang pemahaman dan ketaatan berhaji, baik dalam *nas*□- *nas*□ Alquran maupun dalam *hadis*□-*hadis*□ yang mengandung perintah dan anjuran melaksanakan ibadah haji serta menguraikan tujuan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.

*Tahapan kedua*, survei yang dilakukan dengan angket/kuesioner dan wawancara yang berpedoman kepada instrumen yang telah ditetapkan sebelumnya, serta ditujukan kepada seluruh sampel yang dipilih dengan maksud untuk menjaring data yang diinginkan.

*Tahapan ketiga*, merumuskan bentuk-bentuk perspektif masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang tentang pemahaman dan ketaatan haji, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, dengan berdasar pada hasil angket/kuesioner yang telah diramu dan diolah

datanya, yang pada akhirnya menuangkannya dalam bentuk deskriptif tentang pemahaman dan ketaatan berhaji bagi calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang.

*Tahap Keempat*, mengambil kesimpulan tentang pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan oleh pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam disertasi ini teknik pengolahan data dilakukan melalui proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lainnya. Proses analisis data dilakukan serempak pada saat pengumpulan data. Teknik analisis data dilakukan dengan cara membuat sistem kategori pengkodean, penyortiran data, perumusan kesimpulan sebagai temuan sementara dan mensintesis beberapa temuan sementara untuk mendapatkan temuan lebih luas.

Analisis informasi dari setiap informan dilakukan dengan cara membandingkan dengan sumber informan yang lain. Penentuan tentang jumlah calon jamaah haji dilakukan dengan cara mengidentifikasi calon jamaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang (Laporan Seksi Penyelenggara haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009/2010).

Miles dan Huberman menjelaskan tentang cara pengecekan kredibilitas dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan mengecek keterwakilannya, mengecek dampak peneliti, triangulasi, mempertimbangkan kembali data; mempertentangkan dan membandingkan

data; membandingkan sumber dan tempat lainnya; mengecek makna interpretasi dari temuan penelitian; menggunakan kasus yang berbeda sangat tajam, membuang hubungan-hubungan temuan yang tidak berhubungan dengan data yang dibutuhkan; mengulangi temuan ; mengecek penjelasan yang memiliki pendapat yang bertentangan; mencari bukti-bukti negatif dan memperoleh balikan dari informan.<sup>21</sup>

Analisis data menurut Suharsimi Arikunto adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>22</sup> Sementara itu, Burhan Bungin mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan rumusan hipotesis seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha memberikan bantuan terhadap tema dan hipotesis itu.<sup>23</sup> Definisi tersebut dapat disintesiskan menjadi analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar hingga dapat ditemukan tema yang dapat merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data tersebut.

Perolehan data yang akurat membutuhkan suatu teknik analisis sebagai langkah pengujian akurasi data. Dalam penyajian akurasi data tersebut penulis mempergunakan analisis data sebagai berikut :

1. Mentransfer hasil wawancara langsung atau hasil angket yang menjadi nilai.

---

<sup>21</sup>M.B. Miles dan J.D. Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi ( Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 24.

<sup>22</sup>Lihat: Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* ( Cet. VII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 273

<sup>23</sup>Lihat: Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 76 – 78.



2. Nilai angket faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang dianalisa lebih akurat dengan melalui statistik dalam bentuk tabel atau stratifikasi *random*.<sup>24</sup>

Dengan melalui cara-cara sebagaimana diuraikan di atas, penulis dapat memperoleh kesimpulan akhir dalam penulisan atau penelitian ini.

Dalam proses analisis data, dilakukan serangkaian kegiatan dengan teknik sebagai berikut :

- a. Data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi menurut kategori data.
- b. Data yang telah diklasifikasi ditelaah unsur relevansinya.
- c. Data dipandang relevan, diinterpretasi ke dalam bahasa baku menurut perspektif responden.
- d. Selanjutnya dituangkan dalam rangkaian pernyataan deskripsi untuk kajian sebuah tesis.<sup>25</sup>

Setelah data diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian baik secara *library research method* maupun *field research method*, maka data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data di bawah ini, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang utuh dan obyektif, yaitu :

- a. Teknik Induktif, yaitu teknik pengolahan data dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah diperoleh, namun masih berserakan, kemudian dikumpul, ditata dan dianalisis sehingga dapat memberi informasi yang utuh dan dapat memberikan gambaran

---

<sup>24</sup>Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, *op.cit.*, h. 96.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 268.

yang sebenarnya tentang obyek yang diteliti. Dalam teknik ini peneliti mengolah data khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum.

Relevansinya dengan penelitian disertasi ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui pustaka, observasi lapangan, wawancara akan diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga memberikan informasi dan kesimpulan yang utuh dan obyektif.

b. Teknik Deduktif, yaitu teknik pengolahan data secara deduksi yaitu data yang telah dikumpulkan dan telah diramu sedemikian rupa, ditelaah kembali dan dianalisis sehingga memberi pengertian sekaligus kegunaan data tersebut. Jadi teknik ini merupakan cara balik dengan teknik induksi. Dalam teknik ini peneliti mengolah data umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus.

c. Teknik Komparatif, yaitu teknik pengolahan data melalui upaya pembadingan, artinya hasil penelitian yang diperoleh tentang kondisi obyektif atas suatu obyek penelitian diperbandingkan dengan kondisi obyektif dengan obyek penelitian lainnya. Dalam hal ini, hasil penelitian dari satu pengelola dan penyelenggara haji kabupaten/kota yang satu akan dibandingkan dengan hasil penelitian dari pengelola dan penyelenggara haji Kabupaten/kota lainnya.

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun sekunder, peneliti kemudian menganalisis data tersebut dengan :

#### 1. Analisis *Kualitatif*.

Hal ini digunakan untuk menganalisis data yang sukar untuk dikuantitatifkan atau dihitung dengan angka-angka. Dalam hal ini peneliti merujuk kepada teori yang ada dalam tinjauan pustaka.

## 2. Analisis *Kuantitatif*

Analisis digunakan untuk mengkuantitatifkan data yang diperoleh dari pendekatan empiris. Model *kuatitatif* digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat dikualitatifkan yaitu melalui uji persentase, dari proses ini penulis meneliti dan memilah-milah data sesuai dengan jenis dan tema melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Reduksi dan merupakan proses eksklusi dan inklusi data, yaitu proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dan dari *fieldnote*. Pada saat pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat singkatan, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo.
- b. Sajian data atau *display* data adalah kegiatan ketika peneliti berusaha menampilkan data yang sudah dikumpulkan.
- c. Penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan dan memverifikasinya juga merupakan suatu kegiatan yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data.<sup>26</sup>

Selanjutnya data yang diperoleh melalui angket diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji persentase dengan menggunakan rumus, sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 25, lihat juga U. Maman Kh. dkk., *Metodologi Penelitian Agama* ( Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 86 – 87.

**Keterangan :**

**P = Persentase**

**F = Frekuensi pada klasifikasi**

**N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi**

**100 % adalah angka pembulat.**

Setelah dihitung dengan persentase, maka selanjutnya digunakan analisis *deskriptif* untuk memberikan gambaran tentang kondisi obyek penelitian. Dalam mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *kualitatif* dan *kuantitatif*.<sup>27</sup> Metode *kualitatif* ini digunakan untuk mengkategorikan data menurut gambaran kualitas obyek yang diteliti, sedang metode *kuantitatif* digunakan dengan menggambarkan data yang berbentuk bilangan atau angka-angka.




---

<sup>27</sup>Lihat: I Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* ( Cet I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 76 - 77 Lihat pula: Suharsimi Arikunto, *op.cit.* h. 268 – 272.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Sebelum ditetapkan menjadi satu Kabupaten, Sidenreng Rappang atau lebih akrab disingkat Sidrap, memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan Bugis yang cukup disegani di Sulawesi Selatan sejak abad XIV, di samping kerajaan Luwu, Bone, Gowa, Soppeng dan Wajo.

Berbagai literatur menyebutkan, Sidenreng dan Rappang adalah dua kerajaan yang terpisah, eksistensi kedua kerajaan ini turut memberi warna dalam percaturan politik dan ekonomi kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Kerajaan Sidenreng dan Rappang merupakan dua kerajaan yang tercatat dalam kitab *La Galigo* yang amat melagenda.<sup>1</sup> Dalam perjalanan kerajaan Sidenreng dan Rappang mengalami pasang surut pemerintahan, hingga tahun 1906 yang ketika itu diperintah La Sadapotto, Addatuang Sidenreng XII sekaligus Arung Rappang XX, akhirnya dipaksa tunduk kepada kolonial Belanda setelah melalui perlawanan yang sengit.

Wilayah kedua kerajaan ini kemudian berstatus distrik dalam wilayah *onderafdeling* Parepare. Selanjutnya pada tahun 1917 kedua wilayah tersebut digabung menjadi satu, sebagai bagian dari wilayah pemerintahan *afdeling* Parepare. Seiring dengan

---

<sup>1</sup>Lihat: Yasser Latief, ed. *Selayang Pandang Sidenreng Rappang* ( Sidrap; Bappeda Kab. Sidrap, 2006) h. 6.

peristiwa kemerdekaan yang diraih pada tanggal 17 Agustus 1945, Sidenreng Rappang menyatakan diri sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketika Parepare menjadi Daerah Swatantra Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 34 Tahun 1952, Sidenreng Rappang menjadi kewedanaan yang di dalamnya terdapat Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang yang berotonomi sebagai lembaga pemerintahan adat berdasarkan *Staatblat* 1938 Nomor 529.<sup>2</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, kewedanaan Sidenreng Rappang yang meliputi Swapraja Sidenreng dan Swapraja Sidenreng dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng.

Seiring dengan itu, setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P.7/73-374 tanggal 28 Januari 1960 yang menetapkan Andi Sapada Mappangile sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang yang pertama. Pada tanggal 18 Pebruari 1960 Andi Sapada Mappangile kemudian dilantik sebagai Bupati oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.<sup>3</sup> Atas dasar pelantikan Bupati tersebut, maka ditetapkanlah tanggal 18 Pebruari 1960 sebagai hari jadi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diperingati setiap tahunnya.

Kabupaten Sidenreng Rappang juga dikenal dengan sebutan Bumi Nene' Mallomo. Nama ini diambil dari seorang cendekiawan yang diyakini pernah hidup di

---

<sup>2</sup>Lihat: *ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 7.

kerajaan Sidenreng di masa pemerintahan La Patiroy Addatuang Sidenreng VII.<sup>4</sup> Nene' Mallomo adalah penasehat utama Addatuang dalam hukum pemerintahan. Ia dikenang karena kecendekiannya dalam merumuskan hukum ketatanegaraan dan kejujurannya dalam menegakkan keadilan.

Kabupaten Sidenreng Rappang beribukota di Pangkajene dan terletak antara 3°43' - 4°09' Lintang Selatan dan 119°41' - 120°10' Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan kota Pinrang dan Kabupaten Enrekang di sebelah utara, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo di sebelah timur, Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng di sebelah Selatan, serta Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare di sebelah Barat.

Wilayah administratif Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dalam 11 Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan dengan luas 1.883.25 Km<sup>2</sup>. Adapun Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing 84.477 Ha dan 21.047 Ha. Sebagian besar keadaan tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang berbentuk datar. Jumlah sungai yang mengalir wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang sekitar 38 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kecamatan Watang Pulu dan Kecamatan Dua Pitue, yakni 8 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 3 sungai yaitu Sungai Bilokka dengan panjang sebesar 20.000 meter, kedua adalah Sungai Bila dengan panjang sungai 15.100 meter dan yang ketiga adalah Sungai Rappang dengan panjang sungai sebesar 15.000 meter.

Kondisi geografi suatu daerah meliputi keadaan alam yang memengaruhi potensi sumber daya alam yang tersedia dan dihasilkan. Keadaan sumber daya alam

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 9.



tersebut membawa pengaruh langsung terhadap tingkat ekonomi masyarakat setempat yang selanjutnya akan berdampak pada pembangunan pendidikan. Pengelolaan sumber daya alam yang baik, terencana dan terarah akan membawa dampak positif terhadap kehidupan roda perekonomian masyarakat yang akan berimbas pada pendidikan. Secara umum keadaan geografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat kondisi topografi seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 2**  
**KEADAAN TIPOGRAFI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2009**

KECAMATAN	KEADAAN TANAH			
	DATAR (%)	BERBUKIT (%)	BERGUNUNG (%)	DANAU/RAWA (%)
1	2	3	4	5
PANCA LAUTANG	15	25	57	3
TELLU LIMPOE	15	35	49	3
WATANG PULU	25	5	70	-
BARANTI	100	-	-	-
PANCA RIJANG	52	3	45	-
KULO	-	-	-	-
MARITENGNGAE	85	15	-	-
WT. SIDENRENG	-	-	-	-
PITU RIAWA	-	-	-	-
DUA PITUE	35	25	40	-
PITU RIASE	-	-	-	-

*Sumber data:* Kantor BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009

Keadaan topografi Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya berbentuk dataran, bukit, gunung, danau, dan rawa. Kondisi topografi yang ada tersebut menjadi salah satu

pertimbangan dalam menyusun Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten, yang kemudian menjadi rujukan dalam pendirian sekolah-sekolah yang diperlukan.

Berikut ini akan disajikan tabel lahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang

**Tabel 3**  
**KEADAAN PENGGUNAAN LAHAN (HA)**  
**DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2009**

PENGGUNAAN	LUAS (HA)	KET.
1	2	3
SAWAH	46.985.18	Produktif
PERKEBUNAN	14.700.94	Produktif
KAWASAN HUTAN	61.35751	Produktif
PERKEBUNAN CAMPURAN	20.562.67	Produktif
LADANG/TEGALAN	281.00	Produktif
PADANG RUMPUT	19.153.66	Produktif
KOLAM/TAMBAK/RAWA	765.05	Produktif
DANAU	2.896.00	Produktif
BELUKAR	17.899.41	Produktif

*Sumber data:* **Kantor BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009**

Berdasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya alam serta pola penggunaan lahan maka Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai penghasil tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedele. Khusus untuk tanaman padi, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Sulawesi Selatan, selain itu terdapat pula tanaman pertanian non pangan seperti kelapa, jambu mente, kakao dan berbagai tanaman lainnya. Untuk peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah penghasil telur unggas seperti ayam ras dan ayam buras dan jenis peternakan sapi. Pemasaran hasil-hasil pertanian dilakukan hingga ke luar pulau

Sulawesi bahkan sampai ke luar negeri terutama untuk tanaman kakao. Sedang potensi danau, kolam, dan tambak merupakan penghasil ikan air tawar selain dapat dikonsumsi masyarakat setempat juga dipasarkan di luar daerah terutama di daerah Kabupaten yang bertetangga dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kabupaten Sidenreng Rappang mengenal 2 jenis musim setiap tahun yaitu musim kemarau yang terjadi antara bulan Mei sampai dengan Oktober dan musim hujan yang berlangsung pada bulan Nopember sampai dengan April. Jumlah curah hujan pertahun 13.057 milimeter/hari hujan dengan rata-rata curah hujan 964,21/66,7 milimeter/hari hujan.<sup>5</sup>

## **2. Kependudukan dan Struktur Sosial masyarakat, Agama di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2008/2009 berjumlah 250.666 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan, yang terdiri atas 121.158 orang berjenis kelamin laki-laki dan 129.508 orang yang berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 40.473 jiwa yang mendiami Kecamatan MaritengngaE. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Kepadatan penduduk per desa sebesar 2.387 orang, kepadatan penduduk sebesar 133 orang/km dan rata-rata anggota rumah tangga (ART) sebanyak 4 orang tiap keluarga. Struktur umur penduduk juga dapat menggambarkan angka beban tanggungan, penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Usia tergolong non produktif kelompok umur 0-14 dan 65 tahun atau lebih, sedangkan usia

---

<sup>5</sup>*Sumber data:* Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap, tanggal 20 Januari 2009.

produktif adalah kelompok umur 15-64 tahun, persentase penduduk usia dewasa (15-64 tahun) sedikit mengalami penurunan dari 69,05 % tahun 2006 menjadi 68,34 % tahun 2008/2009.

Keadaan penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kewarganegaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4**  
**PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KEWARGANEGARAAN**  
**DI KABUPATEN SIDENRENG RAPANG TAHUN 2009**

NO.	KECAMATAN	WARGA NEGARA INDONESIA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Panca Lautang	8.055	8.893	16.948
2.	Tellu Limpoe	10.027	11.329	21.356
3.	Watang Pulu	12.648	13.124	25.772
4.	Baranti	12.596	13.782	26.378
5.	Panca Rijang	12.057	13.020	25.077
6.	Kulo	5.136	5.447	10.583
7.	Maritengngae	19.518	20.955	40.473
8.	Watang Sidenreng	7.551	8.065	15.616
9.	Pitu Riawa	11.743	12.295	24.038
10.	Dua Pitue	12.595	13.556	26.151
11	Pitu Riase	9.232	9.042	18.274
JUMLAH		121.158	129.508	250.666.-

*Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009*

Dalam keseluruhan jumlah penduduk tersebut, yang masuk dalam usia 7 sampai 12 tahun berjumlah 34.916 orang. Jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun adalah 11.200 orang. Jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun adalah 13.990 orang.

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang beribukota Pangkajene terdiri dari 11 Kecamatan yang terdiri dari 38 Kelurahan, 67 Desa, 10 Desa Swadaya, 64 Desa Swakarsa dan 30 desa Swasembada. Tingkat kemajuan desa/kelurahan dibedakan atas desa swasembada,<sup>6</sup> swakarya<sup>7</sup> dan swadaya.<sup>8</sup>

Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tingkat kelahiran dan tingkat kematian di suatu daerah. Struktur umur penduduk juga dapat menggambarkan angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*), penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Penduduk yang tergolong usia non produktif adalah penduduk kelompok umur 0 - 14 dan 65 tahun atau lebih. Penduduk usia produktif adalah penduduk kelompok umur 15 - 64 tahun.

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah cukup memadai, sarana pendidikan yang ada mulai dari Tingkat Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Untuk Tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak sebanyak 93 sekolah, Sekolah Tingkat Dasar

---

<sup>6</sup>Desa yang cepat tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri (*self proving group*). Bila mendapat bantuan dari luar (pemerintah, Swasta dan perbankan) meskipun jumlahnya kecil, maka akan mendorong dengan cepat laju pertumbuhan pembangunan pada seluruh sektor ekonomi. Lihat Yasser Latiet, ed. *Selayang Pandang Sidenreng Rappang* (Sidrap; Bappeda Kabupaten Sidrap, 2006) h. 46

<sup>7</sup>Pertumbuhan pembangunan terjadi karena adanya sebagian pendapatan dapat diinvestasikan untuk kegiatan produksi yang selanjutnya akan mendapatkan pendapatan. Namun bantuan dari luar sangat diharapkan untuk merangsang kegiatan pada seluruh sektor ekonomi, lihat: *ibid*.

<sup>8</sup>Untuk menggerakkan sektor ekonomi maka diperlukan bantuan dari luar (pemerintah, swasta dan perbankan) terutama bantuan dari pemerintah, lihat: *ibid*.

sebanyak 93 sekolah, Tingkat SLTP sebanyak 32 sekolah, dan Sekolah Tingkat SLTA sebanyak 25 Sekolah.<sup>9</sup>

Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5**  
**KEADAAN TINGKAT PENDIDIKAN**  
**DI KABUPATEN SIDENRENG RAPANG TAHUN 2009**

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2
TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH	29.068
TIDAK/BELUM TAMAT SD	34.401
TAMAT SD	58.145
TAMAT SMP	36.133
TAMAT SMA	25.262
TAMAT SMK	6.791
TAMAT DIPLOMA I/II	1.309
TAMAT DIPLOMA III/SARJANA MUDA	1.394
TAMAT PERGURUAN TINGGI	5.133
JUMLAH	197.636

*Sumber Data:* **Kantor BPS Kabupaten Sidrap tahun 2009**

Dari seluruh jumlah penduduk yaitu 250.666 jiwa, yang pernah mengecam pendidikan mulai dari tidak tamat SD hingga tamat Perguruan Tinggi sebanyak 178.562 orang. Yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan sebanyak 29.068 orang.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Yasser Latief, ed., *op.cit.*, h. 87 – 89.

<sup>10</sup>Bappeda Kabupaten Sidrap, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap, Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2009*, h. 29.

Dari 178.562 orang yang pernah memperoleh pendidikan, 174.467 orang diantaranya masuk dalam kategori buta huruf sebanyak 22.169 orang. Dibanding dengan jumlah penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan, maka jumlah penduduk yang buta huruf lebih sedikit yaitu terdapat selisih 6.899 orang. Adanya selisih tersebut dikarenakan adanya upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk terus belajar baik seara formal, informal, maupun non formal melalui Pendidikan Luar Sekolah seperti mengikuti Kejar Paket A, B, dan C.

Keadaan angkatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang sampai tahun 2009 berjumlah 92.545 orang yang terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 84.267 orang (91,06%) dan yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 8.278 orang (8,94%). Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja sampai dengan tahun 2009 tercatat sebanyak 105.091 orang terdiri dari penduduk bersekolah 30.284 orang (28%), mengurus rumah tangga 63.998 orang (60,90%) sedang sisanya 10.809 orang (10,28) masuk kategori lain-lain.

Perbandingan jenis kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan perbedaannya tidak terlalu mencolok. Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk, maka lebih banyak pada usia muda antara 15 - 19 tahun berjumlah 134.931 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang paling kecil adalah 0 - 4 tahun 25.999 jiwa. Ditinjau dari segi pendidikannya, sebagian besar penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang berusia 10 tahun ke atas telah tamat SD dan ini menandakan pula bahwa tingkat pendidikan yang paling menganggur adalah tamatan SD.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang juga masih terdapat penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Secara umum penduduk miskin karena telah tidak memiliki asset untuk kegiatan produksi, tidak memiliki pekerjaan tetap dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Jumlah penduduk miskin sampai dengan tahun 2008 tercatat sebanyak 39.110 orang. Ciri yang menonjol pada masyarakat miskin di Sidenreng Rappang adalah pendidikan yang sangat minim. Berikut tabel tingkat pendidikan keluarga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Tabel 6**  
**TINGKAT PENDIDIKAN KELUARGA MISKIN**  
**DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2009**

KECAMATAN	USIA (Thn)	PENDIDIKAN (%)			JUMLAH KELUARGA (ORG)
		NN	< SD	> SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PANCA LAUTANG	45	79	18	3	6
TELLU LIMPOE	46	25	48	27	5
WATANG PULU	52	45	42	13	4
BARANTI	53	37	46	17	3
PANCA RIJANG	46	73	24	3	4
KULO	46	46	32	22	4
MARITENGNGAE	47	46	41	13	4
WATANG SIDENRENG	56	23	42	35	5
PITU RIAWA	48	39	40	15	3
DUA PITUE	43	27	36	37	4
PITU RIASE	49	42	21	11	4
RATA – RATA	48	44	35	18	4

*Sumber data: Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Sidrap tahun 2009*



Rata - rata jumlah penduduk miskin yang sama sekali tidak pernah bersekolah atau mengikuti pendidikan sebanyak 44 persen, tidak tamat sekolah dasar 35 persen dan yang tamat Sekolah Dasar ke atas 18 %.<sup>11</sup>

Keadaan di atas merupakan tantangan bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk terus berbenah diri dengan melakukan terobosan dan inovasi untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan penduduk baik melalui jalur sekolah maupun melalui pendidikan luar sekolah dengan mengoptimalkan sistem pembelajaran kejar paket A, B, dan C. Secara keseluruhan jumlah penduduk miskin sampai dengan tahun 2009 tercatat sebanyak 39.110 orang.<sup>12</sup>

Seperti umumnya masyarakat di Indonesia, kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang banyak dipengaruhi oleh agama, adat istiadat, dan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun. Dalam kehidupan beragama masyarakat Sidenreng Rappang dikenal sangat relegius dan hal tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Sidrap yaitu ***“Mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat pengembangan agrobisnis Modern dan lima terbaik di Propinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan sumber daya manusia”***.

Mayoritas penduduk Sidenreng Rappang menganut agama Islam, kemudian agama Hindu, Budha, dan Kristen. Khusus untuk pemeluk agama Hindu dikenal dengan sebutan To Lotang atau To Wani. Jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 221.152 orang,

---

<sup>11</sup>Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap, *Profil Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009*, h. 11.

<sup>12</sup>*Ibid.*

pemeluk agama Hindu 15.277 orang, agama Budha 6.265 orang dan agama Kristen 370 orang.

Untuk mendukung pelaksanaan ibadah para penganut agama Islam tersedia 286 mesjid, 27 musalla dan 7 buah langgar. Sedang untuk sarana peribadatan agama lain belum tersedia karena jumlah penganutnya relatif terbatas.

Selain sarana peribadatan juga tersedia lembaga pendidikan khusus keagamaan seperti TPA/TPQ sebanyak 153 unit, 9 unit *Raudathul Athfal*, 9 Madrasah Diniyyah, 13 Madrasah Ibtidaiyyah, 15 Madrasah Tsanawiyah dan 7 Madrasah Aliyah, 2 Perguruan Tinggi Agama Islam (STAI), 153 TPA/TPQ ditambah 4 Pondok Pesantren.

Dalam melaksanakan kehidupan, bermasyarakat, selain berpegang pada kaidah dan aturan agama khususnya agama Islam, penduduk Sidenreng Rappang juga memiliki kebiasaan yang bersumber dari adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Beragam adat dan kebiasaan yang biasa dilakukan mulai upacara kelahiran bayi dengan mengadakan *Aqîqah* (pengguntingan rambut), upacara *mappettu ada* (peminangan calon pengantin), upacara perkawinan yang dimulai dengan *mappacci* (pemasangan daun pacar) nikah dan *mapparola* (membawa pengantin wanita ke rumah mempelai pria) termasuk dalam hal melakukan acara manasik haji berbentuk pengajian bagi orang muslim yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Selain itu dikenal pesta seperti *mappadendang* dan *mattojang* yang merupakan upacara pernyataan syukur kepada yang Maha Kuasa setelah pelaksanaan panen raya.

Pembangunan sektor agama di Kabupaten Sidenreng Rappang ditujukan untuk mewujudkan kualitas manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa serta mampu menciptakan kedamaian, keselarasan dan keseimbangan baik dalam hubungannya dengan masyarakat maupun lingkungannya. Kehidupan beragama di Kabupaten ini terasa nyaman dalam suasana kerukunan yang harmonis bagi umat yang beragama. Salah satu indikasi keberhasilan pembangunan sektor agama adalah sarana peribadatan yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, termasuk pelayanan calon jamaah haji sudah memuaskan.

Masyarakat Sidenreng Rappang mayoritas memeluk agama Islam, selain itu, juga ada penganut kepercayaan *Towani Tolotang* yang kemudian menjadi agama Hindu *Towani*. Menurut sejarah, kelompok *Tolotang* ini datang dari Wajo pada awal abad XVII dan menetap di Kerajaan Sidenreng atas izin *Addatuang*. Agama lainnya seperti Kristen, namun jumlahnya sedikit karena hanya dianut oleh pendatang.<sup>13</sup>

Menurut Lontara yang ditulis oleh Ibrahim Gurunna Andi, sekretaris *Addatuang* Lasadapotto, masyarakat Rappang memeluk Islam pertama kali pada tahun 1017 H. atau 1608 M. di masa pemerintahan *Arung Rappang* La Pakolongi. Satu tahun sesudahnya, juga diterima oleh masyarakat Sidenreng yang ketika itu di bawah pemerintahan *Addatuang* Sidenreng VII, La Patiroi MatinroE ri Massepe. La Pakolongi dan La Patinroi merupakan raja yang pertama kali dikuburkan secara Islam setelah sebelumnya para raja yang mangkat dibakar sesuai kepercayaan ketika itu.<sup>14</sup>

Agama Islam bagi masyarakat Sidenreng Rappang memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam dan adat dipandang sebagai

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 56.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 57.

sistem nilai dalam masyarakat Sidenreng Rappang. Dalam Lontara *Latoa* disebutkan, *Tellumi rupanna ade'. Iyamani nagenne eppa engkamani sara'e. Ade' mappura onro, ade' maraja, ade' biasa, ade' sara'* (hanya ada tiga adat, menjadi empat dengan masuknya syarak)<sup>15</sup>

Penerimaan masyarakat Sidenreng Rappang terhadap Islam demikian tinggi sehingga dikenal lembaga syarak di samping adat. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah yang populer di Minangkabau juga dianut masyarakat Sidenreng Rappang sejak dulu. Muncullah sebutan *q d□i* (Bugis; Kali) bagi pemuka agama Islam yang merupakan wakil raja di bidang Agama Islam. Ia menempati posisi terhormat di samping *Addatuang* dan *Arung*.

Dalam Lontara disebutkan *Mabbali saloi arungngE kaliE* (raja dan *q d□i* bersebelahan sungai). Maksudnya, dalam tata kenegaraan raja dan *q d□i* diberikan penghormatan/perlakuan yang hampir sama. Secara teknis dalam upacara-upacara kerajaan *Addatuang* menghadapi 19 bosara, sedangkan *q d□i* menghadapi 17 bosara. Manakalah raja berhalangan hadir, maka *Q d□i* berhak atas 19 bosara yang diperuntukkan bagi raja. Di bawah *q d□i* ada pejabat syarak lainnya yaitu imam, *katte (kh tib)*, *bilala*, (*muadzin*), dan *doja* (pembatu syarak).

*Q d□i* memiliki otoritas dalam menentukan permulaan puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Ad□ha, serta layak tidaknya sebuah masjid di tempati *s□alat* Jumat. Fungsi *Q d□i* lainnya adalah menyelenggarakan tata nikah, t□alak dan rujuk raja beserta

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

keturunannya, memimpin penyelenggaraan pemakaman jika raja mangkat, memimpin sidang syarak, serta menetapkan harta pusaka dan waris. Dalam perkembangannya, Islam kemudian membentangkan cara hidup yang baru bagi masyarakat Sidenreng dan Rappang. Kelahiran, sunat, atau khitan, pernikahan, kematian, dan warisan, semuanya diterapkan secara Islam.

Perkembangan agama Islam selanjutnya memberikan pengaruh besar terhadap adat dan kultur budaya masyarakat Sidenreng Rappang. Banyak pemuda yang kemudian meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu agama di Sumatera sampai di Mekkah. Sekembalinya, mereka menata sistem pendidikan yang bertujuan memperbaiki akhlak, kepribadian dan kecerdasan rakyat melalui “*mangngaji tudang*”<sup>16</sup> sampai kepada pendirian madrasah.

Seorang ulama dalam kehidupan masyarakat Sidenreng Rappang disebut *to panrita*. Gelar yang diberikan kepadanya sebelum menyebut namanya adalah *anregurutta* atau *gurutta* yang berarti “guru kita”. Ia menjadi tempat bertanya masyarakat dalam berbagai hal. Karena itu seorang *to panrita* adalah cendekiawan yang luas ilmunya dan menjadi hati nurani masyarakatnya.

Peranan ulama di Sidenreng Rappang tak hanya mengenai agama, tetapi juga membawa semangat nasionalisme yang kemudian diwariskan kepada murid-muridnya. Sejarah mencatat, ketika La Sadapotto akhirnya dipaksa menyerah kepada Belanda pada

---

<sup>16</sup>Salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru/usta kepada santrinya dengan cara berhadap-hadapan dalam satu majelis/tempat yang biasanya membahas satu persoalan keagamaan dengan menjadikan kitab kuning/klasik sebagai media pembelaran, cara ini umumnya juga dipergunakan di pondok pesantren disebut metode *sorogan* dan *bandongan*. Lihat: HM. Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global* ( Cet. 1; Jakarta: IRD Press, 2004 ), h. 41 - 42

tahun 1905, La Noni *Arung Tellang-Tellang* memilih untuk terus berjihad melawan kolonial yang disebutnya kafir. Lontara Rappang mencatat kalimat La Noni sebagai berikut: “*Kotiyai Addatuangnge yakkasiriseng , Nabi Muhammad-na. Nasaba tiyaka iyya naparenta kapere*”. Artinya, “Jika raja sudah enggan dibela kehormatannya, cukup Nabi Muhammad saja yang saya bela. Karena saya tak mau diperintah oleh orang kafir”. La Noni akhirnya gugur setelah terdesak sampai di Letta, Pinrang. Ia gugur dalam keyakinannya dalam membela kehormatan diri dan agama Islam yang dianutnya.<sup>17</sup>

Dalam bidang kesehatan, pemerintah menyediakan sarana berupa rumah sakit, Puskesmas, Pustu, balai pengobatan dan BKIA. Jumlah Rumah Sakit Umum yang ada di daerah ini 2 buah, Rumah Sakit Bersalin 2 buah, Rumah Sakit Swasta 2 buah. Jumlah Puskesmas yang tersedia sesuai dengan jumlah Kecamatan yaitu 11 Puskesmas dengan dibantu 37 Puskesmas Pembantu (Pustu), 9 Puskesmas Keliling, 122 Posyandu dan 36 Pondok Bersalin Desa. Di samping itu, tersedia 17 unit tempat praktek Dokter, 6 unit tempat praktek Dokter gigi, 1 buah Laboratorium Kesehatan, 4 apotik dan 42 Toko Obat.<sup>18</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berusaha untuk mengadakan penambahan tenaga kesehatan, meningkatkan sarana kesehatan dan mengoptimalkan penggunaan keseluruhan sarana yang telah tersedia demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sidenreng Rappang termasuk peningkatan sarana jamaah haji dengan memberikan bantuan biaya operasional perjalanan haji bagi pegawai/karyawan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang penetapannya melalui dana APBD

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 60.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 19.

Kabupaten yang sekaligus menjadi amanah Undang-Undang RI. Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji Pasal 6 yang menyatakan, sebagai berikut.

“Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji”<sup>19</sup>

### 3. Sistem Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

Untuk mengetahui kemajuan suatu daerah dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan masyarakat yang selanjutnya memberi pengaruh pada pelaksanaan pembangunan di segala bidang termasuk bidang pendidikan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin sejahtera suatu masyarakat diharapkan semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk memperoleh dan mengikuti pendidikan, sehingga tercipta sumber daya manusia yang tangguh, terdidik, dan berkualitas baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan.

Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1989, juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang pascakrisis moneter tersebut, Kabupaten Sidenreng Rappang terus menggeliat dan berusaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu berbagai sektor unggulan tersedia. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada nilai PDRB (*Produk Domestik*

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI., *Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji* ( Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2009), h. 6.

*Regional Bruto*) yang dihasilkan. Berikut ini perkembangan PDRB berdasarkan lapangan usaha.

**Tabel 7**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**TAHUN 2008 – 2009 (Juta Rp.)**

LAPANGAN USAHA	2008	2009
1	2	3
PERTANIAN	516.666,59	570.076,61
PERTAMBANGAN DAN PENGALIHAN	19.225,97	21.247,28
INDUSTRI DAN PENGOLAHAN	31.301,93	33.336,30
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	7.195,37	8.302,99
BANGUNAN	61.301,93	66.457,34
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTAURANT	169.802,30	182.644,64
ANGKUTAN & KOMUNIKASI	27.219,66	30.566,37
KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	32.322,14	35.026,58
JASA-JASA LAINNYA	72.744,45	87.975,21
JUMLAH	937.780,34	1.035.624,32

*Sumber data:* Kantor BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009

Pada tabel 7 di atas dapat dilihat nilai-nilai PDRB untuk semua sektor lapangan usaha mengalami peningkatan, meskipun jumlah kenaikannya tidak terlalu besar. Sektor pertanian masih dominan dalam menyumbangkan nilai PDRB yaitu Rp. 570.076,61 juta, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 182.644,64, sektor jasa-jasa lainnya Rp. 87.975,21 juta. Secara keseluruhan PDRB mengalami kenaikan sebesar 4,06 %.



Kenaikan PDRB tersebut memberi pengaruh pada PAD, PBB dan pendapatan perkapita masyarakat. Di bawah ini disajikan ini tabel perkembangan PAD Kabupaten Sidenreng Rappang yang terus mengalami peningkatan sebagai berikut :

**Tabel 8**

**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2008 – 2009**

TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4
2008	14.864.932.400	12.603.162.091	84,78
2007	10.591.714.187	9.424.917.792	88,98
2006	5.608.555.287	4.525.568.305	82,15
2005	4.320.062.648	2.943.833.668	68.14
2004	4.297.090.000.	3.172.043.234	73.83

**Sumber data : Kantor BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009**

Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak lepas dari kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk tahun 2008 besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 7.700.700.000.- mengalami peningkatan dibanding tahun 2007 yang hanya sebesar 1.261.970.000.- sedang rata-rata pendapatan perkapita mengalami peningkatan dari Rp. 1.784.114 pada tahun 2004 naik menjadi Rp. 4.583.735.- pada tahun 2007. besarnya Upah Minimum Provinsi pada tahun 2008 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 20.400 per bulan dibanding dengan tahun 2007 sebesar Rp. 17.500.-

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, terkondisikan dengan keadaan alam yang luas yang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, maka mata pencaharian utama

masyarakat berada pada sektor pertanian dan perkebunan dan selebihnya bekerja pada sektor wirausaha, pegawai pemerintah dan sektor lainnya. Berikut ini disajikan tabel yang memuat jumlah orang yang bekerja pada sektor berikut :

**Tabel 9**  
**JUMLAH ORANG YANG BEKERJA**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SIDRANG TAHUN 2009**

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH ORANG BEKERJA (ORANG)
1	2	3
1.	PERTANIAN,KEHUTANAN,PERKEBUNA DAN PERIKANAN	45.780
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	380
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	5.235
4	LISTRIK, GAS DAN AIR	1.235
5	BANGUNAN	1.708
6	PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, RUMAH MAKAN DAN PENGINAPAN	14.332
7	ANGKUTAN, PENGGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	2.930
8	PERBANKAN DAN KEUANGAN	2.450
9	JASA LAINNYA	15.028

**Sumber data : Kantor BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009**

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor pertanian tetap merupakan lapangan usaha yang dominan dilakukan masyarakat oleh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan terakhir tahun 2009 persentase penduduk yang bekerja dalam sektor pertanian sebesar 61,52 persen. Sedangkan lapangan usaha dalam bidang keuangan masih kurang dilakukan masyarakat Sidenreng Rappang yaitu sebesar 0,12 persen.

#### 4. Gambaran Keadaan Pemahaman Ketaatan Berhaji Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pengelolaan Haji di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pembangunan sektor agama di Kabupaten Sidenreng Rappang ditujukan untuk:

*”Mewujudkan kualitas manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menciptakan kedamaian, keselarasan dan keseimbangan baik dalam hubungannya dengan masyarakat maupun dengan lingkungannya”*. Kehidupan beragama di Kabupaten Sidenreng Rappang terasa nyaman dalam suasana kerukunan yang harmonis bagi umat beragama. Salah satu indikasi keberhasilan pembangunan di sektor agama adalah sarana peribadatan yang semakin berkembang dari tahun-tahun, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, juga pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap calon jamaah haji semakin meningkat.

Di Indonesia *quota* haji mencapai 200 ribu. Sekitar 20 ribu dari jumlah tersebut mengikuti program ONH plus.<sup>20</sup> Selain biaya formal, seorang jamaah biasanya mengeluarkan biaya non-formal (misalnya untuk tasyakuran sebelum keberangkatan dan kepulangan jamaah). Biaya formal untuk ONH biasa dan Plus masing-masing 3000 dollar AS dan 4000 dollar AS (*Idem*). Ini artinya, secara keseluruhan, rata-rata setiap jamaah haji mengeluarkan biaya kurang lebih 38 juta rupiah ONH Biasa, dan 63 juta rupiah untuk jamaah ONH plus.

Ketua MUI Kabupaten Sidenreng Rappang menguraikan bahwa dari keseluruhan jamaah haji, dapat dikategorikan dalam beberapa bagian; *Pertama*, Jamaah haji ONH Plus, yaitu mereka melakukan ibadah haji bukan untuk pertama kalinya. Padahal ibadah haji

---

<sup>20</sup>Koran Kompas, 31/I/2009.

diwajibkan sekali seumur hidup, itupun bagi mereka yang secara ekonomi mampu. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan asset harta yang dimiliki. Ini berarti bahwa total biaya keseluruhan yang dikeluarkan jamaah haji kategori ini dalam jumlah milyaran rupiah. *Kedua*, jamaah haji ONH biasa, yaitu adalah muslimin yang secara ekonomi termasuk kategori menengah. Biasanya, biaya haji yang mereka keluarkan didapatkan dari hasil menjual asset keluarga yang sebenarnya merupakan harta yang relatif masih dibutuhkan untuk menunjang perekonomian keluarga. Namun, karena motivasi dan sekian banyak “tendensi” (misalnya, prestise sosial) mereka mempertimbangkan untuk berhaji. Padahal, selain haji, Islam menyediakan berbagai bentuk ritual lainnya, yang selain dapat dijalankan tanpa biaya (gratis), juga tidak kalah efektifnya untuk menempah iman dan takwa jika diaplikasikan secara serius dan konsisten. Inilah latar belakang mengapa haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu”.<sup>21</sup>

Lebih jauh beliau menyatakan bahwa : ”*Ketiga*, jamaah haji yang tergolong dalam kelompok menengah ke bawah. Biasanya biaya yang mereka gunakan untuk menunaikan ibadah haji didapatkan dari hasil pinjaman atau dari hasil menjual asset keluarga satu-satunya dan paling berharga. Maka tak jarang keputusan untuk menunaikan ibadah haji ini memberi pukulan telak pada perekonomian mereka. Ditinjau dari hukum haji, pelaksanaan sebagian haji dalam kondisi perekonomian keluarga yang demikian, bahkan dapat dikategorikan hukumnya haram. Sebab menafkahi keluarga jauh lebih wajib dari

---

<sup>21</sup>KH. Muh. Makkah Abdullah, Ketua MUI Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 12 Juni 2009.

ibadah haji, sehingga jika seorang muslim yang tidak mampu secara ekonomi memaksakan untuk beribadah haji, maka itu berarti ia telah meninggalkan sebuah kewajiban demi sesuatu yang tidak diwajibkan baginya, sungguh ironis”.<sup>22</sup>

Calon jamaah haji masyarakat Sidenreng Rappang dalam melaksanakan rukun ibadah haji memiliki motivasi yang berbeda-beda. Sebagian yang berhaji karena ingin masuk surga, sebagian termotivasi karena ingin mensucikan dirinya dari dosa sebagaimana ia keluar dari perut ibunya ketika terlahir, sebagian termotivasi berhaji karena ingin berhaji dengan isterinya, ada yang termotivasi karena sesuatu yang dianjurkan oleh agama, sebagian termotivasi karena ingin memperbanyak amal dengan cara *salat* di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi.

Apapun ragam motivasi dan tujuan yang melekat dalam hati seseorang, jika ia mampu mendorong kehendak melaksanakan kebajikan, misalnya haji, oleh sebagian orang dipandang sebagai motivasi dan tujuan yang dapat dibenarkan. Pandangan semacam ini sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan bahkan cenderung akan menyesatkan. Dalam keadaan seperti ini, seorang melaksanakan kebajikan, misalnya haji, tidak dengan kesadaran agama sehingga ia tidak akan mendapatkan kebajikan atau haji kecuali sebatas pemuasan atas dorongan hawa nafsunya.<sup>23</sup> Dengan kata lain, orang tersebut telah menginvestasikan kebajikannya untuk kepentingan prestise pribadinya di hadapan sesama manusia.

---

<sup>22</sup>KH. Muh. Makkah Abdullah, Ketua MUI Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 12 Juni 2009.

<sup>23</sup>Lihat: pendapat Ghufuran Ajib Mas'adi, *Haji: Menangkap Maknah Fisikal dan Spritual* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 15 – 17.

Terlepas dari apa yang memotivasi mereka untuk berhaji, jamaah haji Indonesia senatiassa mengalami peningkatan yang signifikan. Jamaah haji Propinsi Sulawesi Selatan saja pada tahun 2008 berjumlah 7.143 orang dan tahun 2009 berjumlah 7.462 orang.<sup>24</sup> Khusus untuk Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2008 berjumlah 225 orang<sup>25</sup> untuk tahun 2009 berjumlah 235 orang.<sup>26</sup> Tahun 2010 Calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, karena yang sudah mendaftar untuk tahun 2010 sebanyak 2.028 orang,<sup>27</sup> namun untuk tahun 2009 hanya sebagian saja yang dapat diberangkatkan.

Dari sekian banyak jamaah haji untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, baik yang berangkat tahun 2009, maupun yang akan diberangkatkan tahun 2010, sebagian besar telah bergabung dalam kelompok-kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dikelola oleh Ormas Islam, yayasan/masyarakat maupun yang dibina langsung oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di 11 (sebelas) kecamatan.

Para calon jamaah haji yang tergabung dalam KBIH yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang tentu masing-masing memiliki motivasi yang berbeda untuk berhaji. Olehnya itu, setiap pengelola dan pembina haji berusaha dengan kemampuan maksimal untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada jamaahnya agar pelaksanaa haji

---

<sup>24</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, "Buku Registrasi Haji" Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, tahun 2009.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sideneng Rappang, "Buku Registrasi Haji" Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rapang, tahun 2010.

nantinya sesuai dengan tujuan tuntunan syari'at Islam, yang tentunya agar tujuan dan motivasi dari setiap individu untuk berhaji sesuai manasik haji itu sendiri.

Salah seorang jamaah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa: "Ia melaksanakan haji dengan termotivasi untuk mati di Tanah Haram, karena pahala berhaji dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah swt. adalah surga, menurutnya telah menanti di seberang kematian itu. Pahala haji *mabr r* diyakini sebagai tiada pahala kecuali surga sebagaimana diungkapkan dalam hadis □ Nabi saw. terlampau murah bagi seorang jamaah haji untuk mengeluarkan ongkos naik haji (ONH), kalau surga sudah berada di tangan. Kiranya berapa pun ongkos untuk mendapatkan jaminan surga menjadi tak lagi perlu dipermasalahkan".<sup>28</sup>

Dari lima rukun Islam, ibadah haji dipandang sebagai rukun tertinggi dan sangat berat pelaksanaannya, karena memerlukan kemampuan material, fisik dan mental. Hal ini menjadi penyebab sehingga ibadah haji tidak semua muslim dapat melaksanakan, bila dibandingkan dengan ibadah lainnya. Bukti empiris menunjukkan bahwa ada orang yang mampu berhaji secara material, tetapi secara immaterial belum mampu. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang secara immaterial mampu untuk berhaji tetapi dari segi material orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berhaji. Mereka yang tergolong dalam kategori ini tentu pada dirinya belum memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, sementara persoalan haji merupakan salah satu rukun Islam.

Ketua IPHI Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan penjelasan tentang pemahaman dan ketaatan berhaji pada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

---

<sup>28</sup>H. Nuryadin, Ketua KBIH al-Takwa, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 22 Oktober 2009.

menyatakan bahwa: "Beberapa hal yang menjadi kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang antara syari'at berhaji dengan fakta sosial di lapangan. Secara sederhana ada beberapa hal yang mengindikasikan ke arah itu. *Pertama*, adanya keprihatinan dari sebagian umat Islam melihat kenyataan bahwa yang telah melaksanakan ibadah haji ternyata tidak mampu mengubah perilaku dan gaya hidup sebagian besar umat Islam baik secara individu maupun secara jamaah atau bermasyarakat. Sedangkan jumlah jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji dan umrah semakin bertambah. *Kedua*, adanya segelintir jamaah yang tidak merasa tersentuh apapun ketika menunaikan ibadah haji, malahan merasa aneh dan mempertanyakan kenapa orang meski melakukan ibadah haji".<sup>29</sup>

Ketua KBIH *Ash-Shafah* menyatakan bahwa: "Dalam hal pelaksanaan ibadah haji ini terdapat kesenjangan yang sangat mencolok. Animo masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan haji lebih besar ketimbang dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya misalnya zakat, padahal dalam syari'at Islam perintah berhaji Allah swt. menempatkannya pada urutan kelima. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan ibadah ini harus dibarengi kesempurnaan dari pelaksanaan rukun Islam lainnya. Namun disisi lain ada juga sisi positifnya, bertambahnya jumlah calon jamaah haji yang masuk dalam kelompok KBIH yang ia bina dan memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi pengelola KBIH itu sendiri".<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Drs. Abu Bakar Deni, MH., Ketua IPHI Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Majjelling Watang, tanggal 23 Juli 2009.

<sup>30</sup>H. Asri Kasman Lc., Ketua KBIH Ash-Shafah Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Rappang, tanggal 24 Juli 2009.



Lebih jauh beliau menambahkan bahwa: "Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal umat Islam itu sendiri, di antaranya; pengetahuan dan pemahaman syari'at berhaji belum dipahami secara baik dan komprehensif juga faktor psikologis dalam hal ini status sosial masyarakat meningkat dibandingkan masyarakat yang belum berhaji".<sup>31</sup>

Senada hal tersebut salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang mengemukakan bahwa; "Faktanya masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim Sidenreng Rappang, haji dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah swt., terlepas dari konteks dan tujuan yang berwawasan ibadah sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi sosial. Ibadah haji hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Akibatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial misalnya kemiskinan semakin meningkat di kalangan umat Islam Indonesia, dan khususnya pada masyarakat Islam Sidenreng Rappang masih cukup tinggi".<sup>32</sup>

Ibadah haji dalam pelaksanaannya membutuhkan dana untuk biaya perjalanan dan kebutuhan lainnya. Sebenarnya yang dipentingkan oleh Islam, supaya orang kaya itu memberikan pertolongan kepada orang miskin dengan bantuan hartanya, hingga ia dapat memenuhi hajatnya, atau memberikan bantuan guna kepentingan umum agar dapat merealisasikan kepentingan umat yang lebih besar berupa amal *j riyah*.

---

<sup>31</sup>H. Zasri Kasman Lc., Ketua KBIH Ash-Shafah Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Rappang, tanggal 24 Juli 2009.

<sup>32</sup>H. Ali Hafid Am.Pd., Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 21 Oktober 2009.

Senada hal tersebut di atas, seorang tokoh agama mengungkapkan bahwa: "Dalam hubungan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, muncul gejala kalau para haji kemudian memperoleh posisi yang amat baik dalam tata pergaulan sosial. Gengsi sosial bagi para "haji" terangkat, sehingga mereka menempati strata sosial yang setara dengan para pemimpin informal lainnya. Dalam masyarakat pedesaan para "haji" secara otomatis dianggap bagian dari elite sosial sebagai tumpuan harapan dan tempat bertanya warga masyarakat mengenai masalah keagamaan. Simbol haji dianggap sebagai lambang moral, akibatnya seorang haji dengan serta merta menjadi tolok ukur dan menjadi teladan di masyarakat".<sup>33</sup>

Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan penjelasan bahwa; "Persepsi sebagian umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pelaksanaan rukun kelima Islam ini amat berlebihan, padahal tidak ada dasarnya untuk memandang ibadah haji melebihi jenis ibadah lainnya. Urutan rukun kelima bagi ibadah haji telah menimbulkan persepsi bahwa ibadah haji menjadi penyempurna dari ibadah lainnya. Akibatnya seorang muslim yang telah melaksanakan ibadah haji dianggap telah sempurna keislamannya. Pandangan tentu saja bersifat kuantitatif, dan belum tentu didasari dengan unsur kualitasnya".<sup>34</sup>

Penjelasan tersebut juga dikuatkan oleh pendapat salah seorang pengurus MUI Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa: "Jumlah orang muslim yang menjadi

---

<sup>33</sup>AG.KH. Muhammad Thoi, Mustasyar NU Cabang NU Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 26 Juli 2009.

<sup>34</sup>Drs. H. Muh. Tahir, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah, *Wawancara*, di Majjelling Timoreng, tanggal 20 Juli 2009.

haji secara kuantitatif amat meningkat dari tahun ke tahun dan orang kota telah merasa mapan dengan julukan "haji" tampaknya terjadi inflasi. Sekarang mencari warga masyarakat yang sudah berhaji tidak mengalami kesulitan".<sup>35</sup>

Pada level masyarakat tertentu, seperti kaum terpelajar maupun kelompok *priyayi*, kualitas haji pun bukan menjadi jaminan bagi tingginya moral. Namun anehnya lagi terjadi pula semacam kompromi dalam masyarakat. Sebagian masyarakat tidak lagi memandang atribut haji sebagai tolok ukur moral. Haji tinggal sebuah atribut tanpa kualitas istimewa.

Fenomena lain tentang pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menyatakan bahwa: "Adanya sebagian masyarakat berpandangan dan menyakini bahwa meninggal di tanah suci selagi menunaikan ibadah haji dijamin diterimanya ibadah, karenanya langsung masuk surga. Lebih dari itu, pahala haji akan lebih besar kalau dilaksanakan dengan mengalami banyak kesulitan dan rintangan. Akibatnya, banyak dari jamaah haji yang sengaja untuk berpayah-payah diri atau bersusah diri agar mendapat imbalan yang sebesar-besarnya. Sikap masyarakat memahami bahwa imbalan sebuah amal sangat tergantung pada tingkat kesulitan yang dialaminya".<sup>36</sup>

Fakta ini dipahami bahwa sebagian jamaah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah semacam teken kontrak untuk mati dalam perjalanan ibadah haji di Mekkah. Belum lagi jika para kiai dan ulama yang menjadi pembimbing haji senantiasa memberikan

---

<sup>35</sup>Drs. Madaling, Pengurus MUI Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 20 Juli 2009.

<sup>36</sup>Drs. H. Hasanuddin Syafiuddin, Msi., Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Ketua BAZ Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 29 Oktober 2009.

motivasi dan bimbingan akan *afdalnya* jihad dengan meraih haji *mabrur* dan bisa mati di Tanah Haram.

### **1. Simbolisasi Haji dalam Tradisi Masyarakat**

Entah darimana asal usul pemaknaan simbol haji sebagai orang kaya, tetapi yang pasti menurut tradisi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana halnya ditemukan di daerah lain di Indonesia, masih cukup kuat dipahami bahwa orang-orang haji itu dipandang dan diidentikkan sebagai orang kaya di lingkungan sosialnya. Hal ini, mungkin erat kaitannya dengan biaya hidup dalam perjalanan yang dihabiskan untuk pergi haji cukup besar (terakhir tahun 2009 biaya pergi haji sebesar U\$ 3.517),<sup>37</sup> dan terkadang-kadang mereka harus mempersiapkan diri dalam waktu lama antara setahun atau dua tahun bahkan lebih. Demikian pula mereka yang sudah menyangand predikat haji secara kebetulan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi. Sehingga orang yang sudah haji seakan-akan hanyalah orang yang betul-betul sudah kaya dan berduit.

Keberadaan salah seorang tokoh agama di Kecamatan di Maritengngae yang dianggap kaya dan tiap tahunnya melaksanakan ibadah haji, adalah haji Ranga, yang melaksanakan ibadah haji pada tahun 1960-an sampai diberlakukannya penetapan porsi haji tahun 2004. Haji Ranga adalah seorang yang dulunya tuan tanah setempat dan kemudian diikuti oleh seluruh putranya untuk pergi haji pada tahun-tahun berikutnya. Mereka inilah penduduk asli yang dianggap kaya dan sering menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Oleh

---

<sup>37</sup>Peraturan Presiden RI., Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M .

karenanya masyarakat setempat memahami orang-orang haji itu identik dengan orang kaya. Demikian pula warga pendatang yang telah menjadi haji, sebagian besar dari mereka kebetulan secara ekonomi tergolong orang kaya. Hal ini diperkuat oleh informasi yang disampaikan dari orang penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Haji Sanre Manike ( 54 tahun).<sup>38</sup>

Berikut pengalaman mengenai persepsi tentang status haji bagi orang kaya dikemukakan oleh anggota DPR Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa: "Pada masa sebelum kemerdekaan, diceritakan oleh pejabat Daerah yang mengkonstruksi para haji biasanya dari kalangan "orang kaya dan terpandang", dan membuat dia terkejut setelah mengetahui bahwa selain di kalangan orang kaya dan terpandang, ternyata juga dari kalangan "kuli jalanan dan pengemudi becak motor".<sup>39</sup> Artinya, sejak dahulu kala telah mentradisi dalam pandangan suatu masyarakat bahwa para haji itu selalu saja dianggap orang kaya. Sekalipun dalam kenyataan sosial, orang haji ternyata sebagian juga tidak demikian, dari sekian orang yang sudah berhaji, terlihat perekonomian mereka tidak tergolong sebagai orang kaya dan terpandang sebelum dan sesudah haji.

Seiring dengan hal tersebut Ketua STAI DDI Pangkajene Sidrap mengatakan bahwa: "Dalam kenyataannya, banyak orang yang menunaikan ibadah haji, masih memperlihatkan pola kehidupan yang biasa dan tidak mengalami perubahan dalam tindakan sehari-hari, dan pergaulannya dalam masyarakat masih saja seperti semula sebelum

---

<sup>38</sup>H. Sanre Manike, Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene tanggal 21 Oktober 2009

<sup>39</sup>H. Sanre Manike dan Ali Hafid, Am.Pd. Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene tanggal 21 Oktober 2009

menunaikan ibadah haji. Menu makan dalam rumah tangga umpamanya, tidak mengalami perubahan, pola berbelanja dan tingkah laku ekonomi tergolong pas-pasan. Sehingga secara individual tidak terlihat adanya kejadian dan perbedaan yang istimewa, kecuali pada awal-awal keberangkatan dan setelah kepulangan atau kedatangannya ke kampung halaman. Karena menggunakan pakaian yang serba putih, serban haji yang selalu terlilit di leher dan pundak mereka, sehingga memperlihatkan simbol-simbol haji pada penampilan pakaian dan mendapat sambutan yang sangat antusias dari keluarga, kerabat dan lingkungan tetangga di tingkat lokal. Namun kepentingan akan simbol-simbol haji sebagai orang kaya setempat, masih saja kuat dan dimutlakan mempunyai arti religius sebagai orang kaya dalam kenyataan sosial”.<sup>40</sup>

Tampaknya sudah mentradisi dalam pandangan masyarakat setempat, yang dimaklumi dan diyakini dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kedudukan yang istimewa para haji, yakni dengan memberikan tempat yang istimewa di kalangan orang-orang kaya di tengah-tengah komunitasnya. Itulah yang membentuk ruang kelompok status orang haji yang dianggap sebagai orang kaya (*the have*). Walaupun sebenarnya mereka justru tidak mau dipanggil sebagai orang yang ”berada” dan merasa ”lebih” dibandingkan dengan tetangga sekitarnya. Namun tradisi dan kebiasaan lingkungan setempat yang sudah terwariskan secara turun-temurun untuk mengubah dan membentuk status sosial mereka yang sudah haji.

---

<sup>40</sup>Drs.KH. M. Alwi Rajab, Ketua STAI DDI Pangkajene Sidrap, *Wawancara*, di Lautang Benteng, tanggal 21 Juni 2009.

Senada dengan hal tersebut Ketua Forum KBIH Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa: "Penggunaan tolok ukur oleh masyarakat umum yang memandang orang haji sebagai "orang kaya" tidak bisa diabaikan begitu saja oleh si pelaku haji dalam ekspresinya. Karenanya yang terjadi adalah praktik orang yang diedentikkan sebagai kaya, akhirnya merespon balik dengan cara-cara yang kadang harus merasionalisasikan dan mendemonstrasikan perilakunya dalam berbagai bentuk ekspresi untuk penamaan dimaksud. Seperti seringnya memberikan perjamuan upacara *slametan* dengan memberikan suguhan istimewa (menu makan) yang tidak biasanya pada setiap acara".<sup>41</sup>

Proses konstruksi menjadi orang haji yang identik dengan sebutan orang kaya dalam arena sosial di perkampungan, semakin menguat melalui berbagai bentuk tindakan sosial, dan dimanifestasikan dalam setiap peluang perkumpulan atau peristiwa. Tindakan mendemonstrasikan diri dalam setiap kelompok-kelompok sosial semakin terstruktur pada perilaku sosial di perkampungan. Akhirnya pelaku haji terlihat ikut memperkuat terbentuknya predikat dan karakteristik gaya hidup para haji sebagai 'orang kaya', sebagai sistem struktur telah menempatkan dan semakin melembagakan posisi orang-orang haji dalam kelompok-kelompok sosial lainnya dalam arena sosial di perkampungan. Karena posisi mereka sebagai orang kaya lokal, orang terpandang dan elit lokal, yang sejak semula sudah memiliki peran sosial dalam struktur kemasyarakatan setempat, sehingga semakin memperkuat posisi mereka dalam struktur melalui upacara dan demonstrasi penampilan mereka yang terbungkus dengan perilaku yang menyerupai orang kaya di perkotaan.

---

<sup>41</sup>H. Asri Kasman, Lc., Ketua Forum KBIH Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Rappang, tanggal 12 Oktober 2009.

## 2. Persepsi Haji sebagai Orang "Suci"

Persepsi masyarakat awam terhadap orang-orang haji sebagai orang yang telah menyucikan dirinya, dipahami cukup kuat dalam tradisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Bahwa seorang yang telah pergi haji telah sempurna kehidupan agamanya sehingga keberadaan mereka biasanya dipahami sebagai 'orang suci'. Pandangan tersebut dikuatkan oleh salah seorang Calon Haji Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa: "Mereka (para haji) dianggap telah mengunjungi Ka'bah dan berziarah ke tempat-tempat yang dikramatkan, yang disucikan dan yang diagungkan oleh umat Islam di kota-kota suci di Arab Saudi yaitu Mekkah dan Madinah. Karenanya, pada saat kepulangan di tanah air, mereka disambut dengan suasana kesucian, dan dipercayai sebagai orang yang telah menyucikan diri mereka di Tanah Suci".<sup>42</sup>

Seiring hal tersebut juga dikemukakan oleh salah seorang Pengurus MUI Kabupaten Sidenreng Rappang menyebutkan bahwa: "Bentuk praktik dalam memahami kesucian ini dimanifestasikan dengan cara sebelum berangkat dan saat kepulangannya dengan diawali dan diakhiri dengan *salat* khusus di masjid saat akan meninggalkan / keluar dari kampung dan atau saat kedatangannya kembali ke kampung".<sup>43</sup>

Kaitan orang yang akan pergi atau pulang haji harus melaksanakan *salat* sunnat dan dia *ankan* atau *diiq matkan* di masjid, merupakan manifestasi dari bentuk-bentuk kesucian yang erat hubungannya dengan simbol-simbol kesucian masjid. Bahkan dipahami

---

<sup>42</sup>M. Arfah BA., Calon Haji dari Kecamatan Watang Pulu, *Wawancara*, di Lawawoi, tanggal 03 Agustus 2009.

<sup>43</sup>AG. KH. Husain Badwai, Ketua Dewan Fatwa Pengurus MUI Kabupaten Sidenreng Rappang., *Wawancara*, di Pangkajene tanggal 21 Oktober 2009.



bahwa selama 40 hari terhitung sejak kedatangannya kembali ke kampung halaman, di (haji) itu masih dianggap sebagai orang yang sedang berada dalam keadaan suci bersih dari dosa. Artinya, suatu proses pembaharuan persepsi keagamaan untuk menjadi orang ‘suci’ yang sekaligus sebagai media menaikkan ‘prestise kesucian’ dalam relasi sosial mereka saat awal-awal kedatangan para jamaah haji di kampung halaman dari Arab Saudi.

Pernyataan salah seorang pejabat publik di Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa: “Sebagian dari proses ritual dalam perjalanan ibadah haji menurut pandangan masyarakat setempat adalah melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di Arab Saudi (Mekkah dan Madinah) yang diyakini sebagai tempat yang disucikan oleh umat Islam dalam seluruh dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa orang yang telah mendatangi tempat suci dimaksud, dianggap telah mengikuti prosesi ritual-ritual kesucian, dan dengan sendirinya di sana, mereka juga telah dapat mensucikan diri. Pandangan dan keyakinan masyarakat akan kesucian tempat-tempat ini, diperkirakan telah ada bersamaan saat Islam masuk ke Nusantara yang dibawah oleh para pedagang yang sekaligus sebagai missionaris agama Islam yang mendatangkan bentuk-bentuk perilaku kesucian di tanah air”.<sup>44</sup>

Impian komunitas sosial yang menjadi cita-cita orang haji tersebut hendaknya dilihat sebagai suatu proses reproduksi yang berlangsung sejak dari dulu, sejak awal mula masuknya Islam ke negeri ini.

---

<sup>44</sup>Ir.H. Dollah Mando, Wakil Bupati Sidenreng Rappang juga selaku Anggota Komisi Pengawas BAZ Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene tanggal 21 Oktober 2009.

Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa budaya perhajian di Indonesia berikatan erat dengan Mekkah – pada awal Islam di Jawa- Mekkah dianggap sebagai pusat kosmis utama, kiblat umat Islam, Tanah Suci, dan menjadi pusat keilmuan Islam abad ke-17 terutama dari kalangan keraton-keraton atau raja-raja Jawa di masa lalu yang mencari legitimasi politik di Mekkah. Seperti pada raja Banten dan Raja Mataram yang saling bersaing, mengirim utusan ke Mekkah untuk, antara lain mencari pengakuan dari sana dan minta gelar ‘Sultan’ sebagai sokongan supranatural terhadap kekuasaan mereka, atau simbol pengesahan sakral bagi kedudukan tinggi mereka.<sup>45</sup>

Rekonstruksi fenomena sosial di atas (antara warisan sosial simbol kesucian konteks yang telah berubah), yang dikaitkan dengan fenomena perhajian dekade belakangan ini, menunjukkan adanya pergeseran dan telah terjadi perubahan dalam fungsi religius, sosial, dan politik dan ibadah haji.

Dahulu kala ibadah haji berperan sangat penting dalam proses islamisasi di Indonesia, untuk komunitas yang masih homogen, terisolir dan sangat kental komunitasnya, dengan sarana komunikasi dan transportasi yang belum semaju sekarang, demikian pula orang pergi ke Mekkah demi mendapatkan pengetahuan sakral. Namun kini, kecenderungan subyektivitas telah berubah secara drastis, orientasi kehidupan seakan-akan bemuara pada tuntutan modernitas, gaya perkotaan yang serba populis, dan pragmatisme yang semakin mendapatkan tempat dalam proses komunitas di dalam dunia sosial, hal yang sama juga tumbuh sumbur di Kabupaten Sidenreng Rappang.

---

<sup>45</sup>Misalnya Sultan Abdul Muhammad Maulana Mataram, Sultan Agung (1613 – 1645) dan Sultan Agung (1650 – 1682) Lihat H.J.de Graaf, *Geschiedenis van Indonesia* ‘s-Gravenhage, 1949, h. 84 – 113 dan h. 228 – 236 dalam Martin van Bruinessen, 1999, h. 42 – 46.

### 3. Representasi Simbol Haji dalam Hubungan Sosial

Haji dalam persepsi komunitas lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang ternyata memiliki keanekaragaman sesuai dengan konteks kelokalan dan kecenderungan-kecenderungan di tengah-tengah masyarakat, selain memberikan rasa hormat terhadap orang yang telah melakukan ibadah haji ke Mekkah, juga ditemukan adanya cemohan bagi masyarakatnya, sehingga seakan tampak perbedaan yang kontras antara satu dengan lainnya, yaitu antara para haji yang mendapatkan pengakuan sosial dengan yang tidak. Salah seorang tokoh Muhammadiyah menyatakan bahwa: “Terutama dikarenakan perilaku mereka yang sudah haji ternyata kurang mampu mengindahkan norma-norma religius dan kehidupan sosial lainnya dalam kehidupan keseharian mereka, dan tidak menunjukkan kemajuan kehidupan ritual dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dengan demikian, selain pengakuan status juga dapat menurunkan bahkan menghilangkan serta memudahkan pengakuan sosial lingkungannya atau justru menjadi cemohan”.<sup>46</sup>

Bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, menguraikan pemahaman tentang berhaji, sebagaimana diceritakan oleh Ketua MUI Kecamatan Baranti menyebutkan bahwa : “Dulunya orang kampung ini, memahami agama Islam dari guru ngaji yang dikenal dengan sebutan *ust* /tuan guru, yang mengajarkan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan dijadikan sebagai penyempurna empat ibadah lainnya (yaitu pembacaan *syahadat*, salat, zakat, dan puasa)”.<sup>47</sup> Muncul pemahaman bahwa menunaikan

---

<sup>46</sup>Drs. H. Akhyaruddin Hakim, MAP., Unsur Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga selaku Kepala Bagian KESRA PEMDA Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 25 Mei 2009.

<sup>47</sup>H. Imran Lc.M.Hi., Ketua MUI Kecamatan Baranti, *Wawancara*, di Baranti, tanggal 24 Mei 2009.

ibadah haji membuat keislaman seseorang menjadi sempurna, apa pun latar belakang tingkat keagamaan seseorang. Oleh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, doktrin tersebut telah diterima secara turun temurun. Mereka memahami ibadah haji memiliki posisi lebih daripada ibadah lainnya, bukan saja prosesi ibadahnya yang membedakan tetapi juga imbalan yang diperoleh. Masyarakat sangat percaya bahwa dengan menunaikan ibadah haji secara 'benar' seseorang akan diampuni dosa-dosanya.

Konsep 'benar' dalam berhaji sering dinamakan sebagai 'haji *mabr r*' suatu kepercayaan atas pahala dan ampunan yang dijanjikan oleh Allah swt. melalui ke-*mabr r*-an tersebut, atau hajinya telah mendapatkan 'perkenan' diterima' oleh Tuhan.

Senada hal tersebut juga dikemukakan oleh Ketua Aisyiyah Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa: "Haji juga dipahami sebagai media 'pembuktian' atas amal baik dan buruk sebelumnya. Pemahaman berkembang dari pengalaman keagamaan yang diperoleh para haji selama di tanah suci. Bagi mereka yang sebelumnya berperilaku kurang terpuji, selama prosesi haji berlangsung akan mengalami kesulitan, kehilangan barang, tersesat, atau dipukuli oleh orang yang tak dikenal, yang kesemua itu selalu dikaitkan dengan perilaku buruk sebelumnya. Sebaliknya jika seseorang banyak memperoleh pertolongan, maka serta merta diartikan sebagai ganjaran atas perbuatan atas kebijakan sebelumnya, dengan istilah yang dikenal dalam masyarakat setempat adalah sangat tergantung pada amalnya. Haji diibaratkan sebagai 'akhirat' karena di sana ditunjukkan azab dan ganjaran dari amal perbuatan di tanah air. Karenanya, keberangkatan haji ke tanah suci sering diedentikkan sebagai perjalanan maut, sehingga mereka menganggap perlu melakukan

semacam pelepasan berpergian melalui upacara keagamaan dan shalat sunat ‘berpergian’ yang terakhir biasanya dilakukan di masjid di sekitar lingkungan mereka”.<sup>48</sup>

Ketua MUI Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa: “Perlakuan terhadap orang haji, seakan-akan penuh dengan aturan semacam kebiasaan untuk menegur mereka secara sopan, di mana sebelum berangkat pun sudah dipanggil dengan sebutan pak haji, dengan anggapan bahwa ia bukan seorang bangsat, karena dia telah melaksanakan beberapa kewajibannya yang utama secara teratur. Seakan-akan tercipta semacam penghormatan bagi orang-orang haji, sekalipun tidak terlepas dari kedudukan seseorang dalam masyarakat adat, tingkat keilmuan yang dimilikinya, atau tingkat kesalehan dalam pengamalan syariat Islam. Haji dalam konteks strata sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjadi wahana tambahan bagi ekspresi kesadaran kelas, penegasan kembali yang ditambahkan oleh status kesucian pada identitas keilmuan dan kedudukan adat atau keagamaan (ustaz, pemceramah agama/khotib, guru ngaji dan lain-lain) yang telah dimiliki sebelumnya dalam posisinya di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus menjadi pengukuhan identitas status mereka dalam strata sosial pada posisi dari mana mereka berasal”.<sup>49</sup>

Artinya, seakan-akan pemaknaan haji itu, dimana pun dan kapan pun memberikan tempat yang khusus dikategorikan sebagai satu bentuk praktik-praktik individu atau sekelompok orang yang menggunakan obyek-obyek, seperti pakaian atau

---

<sup>48</sup>Dra Hj. Khaerati, Ketua Aisyiyah Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Rappang, tanggal 24 Mei 2009.

<sup>49</sup>KH. Muh. Makkah Abdullah, Ketua MUI Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Lautang Benteng, tanggal 29 Oktober 2009.

asesori tertentu sebagai akomodasi kekuasaan dan kekuatan dalam relasi sosial untuk menghasilkan makna-makna yang baru. Sehingga kekuatan simbol haji dalam dunia sosial, dapat dikatakan sebagai suatu elemen pembentuk kesadaran yang dahsyat tentang pandangan dunia, sebagai wahana bagi pendefinisian 'diri' (*self*), dan sekaligus sebagai wahana untuk memahami masyarakat dalam arena sosial.

Dalam konteks keseharian, haji dikonstruksi dengan status tersendiri yang dikaitkan dengan perilaku sehari-hari seseorang yang pergi haji, dimana gelar haji di kalangan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang ternyata sebagian memiliki status tersendiri.

Di satu pihak terdapat rasa hormat yang tulus terhadap tindakan naik haji itu sendiri dan kharisma kesakralan agama yang diberikan oleh ibadah haji, namun di lain pihak, juga tidak sedikit dari haji ini tidak terpuji karena perilakunya yang tidak menyenangkan bagi masyarakat sekitar.

Hal yang sama juga terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menempatkan haji pada status yang memiliki martabat tinggi bagi seorang laki-laki yang telah berhaji. Status haji bagi mereka yang sudah berhaji menjadi idola dan anutan tersendiri di lingkungan masyarakatnya, yang menyebabkan banyak anak muda saat itu berkeinginan melaksanakan ibadah haji. Terutama mereka yang belajar agama tekun dan mereka yang mampu berangkat ke Mekkah. Karena kembalinya dari tanah suci, mereka melengkapi diri dengan serban dan sebagainya sebagai lambang-lambang status haji yang digunakan di Mekkah.

#### **4. Dinamika Sosial Haji Sebagai Kekuatan Simbolik**

Dunia sosial orang-orang haji sekali pun secara kuantitatif 0,30 % yang berstatus haji dari jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang berstatus haji dapat menjadi arena kekuatan yang sangat dinamis, karena di dalamnya terdapat distribusi berbagai kapital yang dapat memberikan kekuatan, kekuasaan dan keuntungan bagi pemiliknya, sebagai kapital simbolik (*symbolik capital*) pada masyarakat yang semakin meningkat tingkat religiusitas (kesucian) seseorang atau sekelompok orang yang mengidentifikasi dirinya dengan 'haji'. Artinya bentuk kapital dengan jenis-jenisnya yang berbeda-beda, dianggap dan diakui sebagai *legitimate* dalam menghadirkan dan menciptakan persepsi yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk dinamika relasi sosial secara terus menerus melalui dialektika sosial.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang mengemukakan bahwa; "Keberadaan kekuatan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan sendirinya terletak pada kekuatan simbol-simbol yang melekat secara inheren pada 'haji' itu sendiri, juga dimiliki oleh siapapun yang mengapresiasi dan merepresentasikannya dalam relasi sosial. Kapital ekonomi pada esensinya tidak dapat dipisahkan dari uang atau kepemilikan materi sebagai persyaratan utama bagi orang akan menunaikan ibadah haji, yang dibedakan dengan kapital budaya ataupun kapital sosial yang dimanifestasikan dan direpresentasikan dari simbol-simbol haji itu dalam masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang".<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Dr. H. Ahmad Rusydi S.E.M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 23 Juli 2009.

Senada hal tersebut Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa: "Dalam dunia sosial orang-orang haji Kabupaten Sidenreng Rappang, seorang haji tetap dapat mempertahankan dan bahkan memperbaiki posisinya dalam arena dunia sosial mereka. Bukan karena kelebihan dalam hal kapital ekonomi, tetapi oleh-oleh ke-haji-annya serta kemampuannya merepresentasikan simbol-simbol haji itu dalam kenyataan obyektif masyarakat setempat. Karenanya, sekalipun sudah tidak menjabat lagi, sudah tidak menempati posisi penting dalam starata sosial di masyarakat karena telah pensiun, namun karena kedudukannya sebagai orang yang telah berpredikat sebagai 'haji', maka secara umum dalam setiap peristiwa kemasyarakatan yang bernuansa keagamaan mereka masih tetap ditempatkan dan diposisikan sebagai orang terhormat, terpercaya dan dituakan dalam berbagai bentuk pemecahan permasalahan sosial dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi jika yang bersangkutan termasuk orang-orang sukses dalam mengurus dan mensejahterakan keluarganya, maka dia tetap diperlukan sebagai orang dituakan, diteladani dan menjadi ditokohkan dalam lingkungannya".<sup>51</sup>

Selanjutnya lebih jauh beliau mengemukakan bahwa: "Demikian pula, karena tingkat hubungan-hubungan sosial yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat akrab bertemanan dan beriteraksi, sehigga bagi setiap individu yang sudah tidak berfungsi lagi secara formal atau informal dalam peran sosial, mereka masih tetap diperlakukan sebagai orang yang terhormat, karena kharisma keagamaannya masih

---

<sup>51</sup>Dra. Hj, Jamaliah, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 29 Oktober 2009.



menempati posisi dan status tersendiri di mata masyarakat. Proses dinamika seperti ini juga dilanggengkan dan dilestarikan melalui berbagai aktivitas kelompok-kelompok pengajian, dan upacara ritual keagamaan yang masih cukup semarak berlangsung di lingkungan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang”.<sup>52</sup>

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa: ”Simbol-simbol yang melekat pada ’haji’ itu bersifat *open acces* dan telah menjadi milik publik, yang diakses oleh dan dari berbagai lapisan dan strata sosial dalam masyarakat. Haji tidak lagi milik perorangan, suku dan etnik tersendiri, dan atau kelompok-kelompok komunitas keagamaan tertentu, yang modernis atau konvensional, yang maju atau yang terkebelakang, yang rasional dan moderat atau yang tradisional dan irrasional, apalagi hanya sekedar dimiliki dan atau diidentikkan”.<sup>53</sup>

Lebih jauh beliau menambahkan bahwa: ”Karena itu, ruang ’haji’ dalam konteks ini, tidak semata-mata menjadi ruang keagamaan ’haji’ yang digunakan sebagai predikat khusus untuk simbol keagamaan, tetapi kini telah meluas memasuki ruang-ruang publik secara umum dan terbuka bagi siapa saja, seperti pada ruang iklan untuk aktivitas dunia bisnis di berbagai mass media cetak atau elektronik”.<sup>54</sup>

Peningkatan pembinaan dan pelayanan terhadap calon jamaah haji diupayakan di antara lain melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Penyempurnaan sistem manajemen tersebut dimaksudkan agar calon jamaah haji lebih siap

---

<sup>52</sup>Dra. Hj, Jamaliah, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 29 Oktober 2009.

<sup>53</sup>Dr. H. Ahmad Rusydi S.E.M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 23 Mei 2009.

<sup>54</sup>Dr. H. Ahmad Rusydi S.E.M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 23 Mei 2009.

dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai tuntutan agama, sehingga memperoleh haji *mabrur*.

Sasaran strategis penyelenggaraan haji adalah tercapainya tingkat kepuasan jamaah haji dalam berbagai pelayanan ibadah haji dan tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat, yang ditandai dengan antara lain :

1. Terwujudnya jamaah haji yang mandiri.
2. Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif.
3. Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji.
4. Terwujudnya sistem informasi yang handal.
5. Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji.
6. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai, dan
7. Meningkatnya pengelolaan dana haji.<sup>55</sup>

Upaya peningkatan tersebut senantiasa terus dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, hal tersebut telah dirumuskan dalam visi dan misi Kantor Kementerian Agama. Adapun misinya telah dirumuskan, yakni **"Menjadikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelopor dan Motivator pembangunan material, spritual bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang agamis, maju, mandiri dan sejahtera"**.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Majala al-Marahah, No. 161 Thn. XII Desember 2010, h. 06.

<sup>56</sup> Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, *Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 s/d 2014*, tahun 2010, h. 2.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang yang ”dinakhodai” oleh Dr.H. Ahmad Rusydi, S.E.,M.M., selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang di masa jabatannya telah mampu membawa perubahan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perubahan baik perubahan fisik Kantor Kementerian Agama maupun mental para pegawai/pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. Terutama dalam hal pelayanan dan pengelolaan haji terus ditingkatkan dalam menjalin koordinasi dengan departemen/instansi serta lembaga terkait lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat terutama kepada calon jamaah haji.

Dasar hukum pelayanan dan pengelolaan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI. Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-undang.
2. Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat.
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003.
7. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
8. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran ibadah haji.
9. Peraturan Presiden RI. Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M.
10. Peraturan Presiden RI. Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia.
11. Peraturan Menteri Agama RI. Tahun 2010 tentang Prosedur, Persyaratan dan Pendaftaran Jamaah Haji.<sup>57</sup>

Ketaatan umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan haji sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari membludaknya pendaftar calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji.

Untuk tahun 2009 saja jika porsi Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 235 orang jamaah. Maka diperkirakan calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu tidak kurang lebih 2.028 orang. Hal ini berarti bahwa nanti delapan tahun baru habis. Di sisi lain

---

<sup>57</sup>Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, *Profil Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Tahun 2010*, tahun 2010, h. 3 - 4

pendaftaran terus berjalan sepanjang tahun. Jadi jika seorang yang mendaftar di bulan ini, maka jatahnya untuk naik haji diperkirakan paling cepat empat tahun yang akan datang.<sup>58</sup>

Olehnya menurut Hj. Jamaliah ”Hingga sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang masih terus meminta kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi Sulawesi Selatan, jika ada kelebihan dan penambahan porsi haji agar Kabupaten Sidenreng Rappang tetap jadi prioritas, karena jumlah daftar tunggunya masih sangat besar”.<sup>59</sup>

Menyinggung tentang perlunya penambahan *quota* jamaah calon haji Kabupaten Sidenreng Rappang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, Ahmad Rusydi menegaskan bahwa Kementerian Agama memprioritaskan penambahan *quota* haji untuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal itu didasarkan karena salah satu Kabupaten memiliki daftar tunggu yang banyak di Sulawesi Selatan. Mengenai *quota* haji untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, Ahmad Rusydi menjelaskan, sebagai berikut :

”Hingga saat ini kita masih menunggu kabar dari pusat, sampai saat ini jatah haji Kabupaten Sidenreng Rappang masih 235 orang. Kita belum tahu apakah mendapat jatah tambahan *quota* haji sesuai dengan 5.000 *quota* tambahan yang dijanjikan. Tahun lalu Indonesia mendapat jatah 205.000 orang, sedangkan tahun ini *qouta* bertambah menjadi

---

<sup>58</sup>Dra. Hj. Jamaliah, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, ”Wawancara” di Pangkajene pada tanggal 12 Desember 2009.

<sup>59</sup>Dra. Hj. Jamaliah, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, ”Wawancara” di Pangkajene pada tanggal 12 Desember 2009.

210.000 orang. Sebanyak 189.000. dialokasikan untuk jamaah haji reguler dan 21.000 dialokasikan untuk jamaah haji plus”.<sup>60</sup>

Begitu kuatnya kemauan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga ditemukan kurang lebih 459 orang calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengundurkan diri dari daftar tunggu di Kabupaten Sidenreng Rappang, mereka berharap mendapatkan jatah yang lebih cepat pada daerah-daerah yang kurang daftar tunggu. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

”Dalam hal besarnya keinginan calon haji jamaah untuk cepat berangkat menunaikan ibadah haji, sudah kurang lebih 459 orang lebih yang telah mendaftar dalam daftar tunggu (*waiting list*) yang mengundurkan diri. Sebagian memang membatalkan niatnya untuk berhaji melalui Kantor Kementerian Agama karena tidak sabar menunggu dalam daftar tunggu, dan berharap melaksanakan haji lewat jalur swasta (ONH Plus). Sebagian lagi berburu keberuntungan berangkat ke tanah suci melalui daerah lain yang daftar tungguanya lebih sedikit karena merasa kesempatannya menunaikan ibadah haji melalui Kabupaten Sidenreng Rappang sangat kecil”<sup>61</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tabel berikut ini akan menguraikan calon jamaah haji

---

<sup>60</sup>Dr.H. Ahmad Rusydi, S.E.,M.M, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap,”Wawancara” di Pangkajene pada tanggal 20 Desember 2009.

<sup>61</sup>Dr.H. Ahmad Rusydi, S.E.,M.M, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap,”Wawancara” di Pangkajene pada tanggal 20 Desember 2009.

yang membatalkan pemberangkatan dan memilih daerah lain dengan harapan dapat diberangkatkan dalam waktu tidak terlalu lama.

**Tabel 10**

<b>DAFTAR REKAPITULASI CALON JAMAAH HAJI BATAL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2006 S.D 2009</b>										
NO	JENIS KELAMIN	T A H U N								KETERANGAN
		2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	PRIA	2	25,00%	45	28,13%	35	26,51%	21	13,21%	
02	WANITA	6	75,00%	115	71,87%	97	73,87%	138	86,79%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>160</b>	<b>100%</b>	<b>132</b>	<b>100%</b>	<b>159</b>	<b>100%</b>	<b>459 Orang</b>

*Sumber data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009*

Banyaknya daftar calon jamaah haji yang akhir-akhir ini menarik BPIH setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena kurangnya *quota* haji untuk Kabupaten Sidenreng Rappang sementara animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang menarik BPIHnya dan berpindah ke Kabupaten lain yang lebih memungkinkan untuk berangkat lebih cepat bahkan banyak juga yang berpindah ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Hal ini sebagai wujud kepatuhan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada perintah Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi seorang untuk melaksanakan haji senantiasa ada melekat dalam dirinya akan tetapi kemampuan dan kesiapan untuk melaksanakannya memakan waktu yang lama untuk mempersiapkannya.

Tabel 11

<b>DAFTAR REKAPITULASI CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BERDASARKAN BANK TAHUN 1430 H / 2009 M</b>				
NO	BANK	JUMLAH	PERSENTASE	KETERANGAN
1	2	3	4	5
01	BRI	174	73,42%	
02	BNI	57	24,00%	
03	BNI Syariah	-	0,00%	
04	Mandiri	-	0,00%	
05	Bank Syariah Mandiri	-	0,00%	
06	BTN	-	0,00%	
07	BPD Sulsel	6	2,58%	
08	Bukopin	-	0,00%	
09	BMI	-	0,00%	
10	Lain – Lain	-	0,00%	
	<b>J U M L A H</b>	<b>237</b>	<b>100,00%</b>	

**Sumber data:** Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009

Data tabel 11 di atas menunjukkan kemungkinan yang muncul membuat niat seseorang untuk melaksanakan ibadah haji tertunda adalah karena banyaknya calon jamaah haji yang terdaftar untuk haji, sementara *quota* haji sangat terbatas, sehingga seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah haji harus masuk dalam daftar antrian yang panjang, dan inilah salah satu faktor yang membuat pelaksanaan haji tertunda. Hal ini juga menunjukkan bahwa semangat seorang muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang masih tinggi, dibuktikan dengan adanya niat untuk berhaji walaupun memerlukan waktu bertahun-tahun lamanya untuk mewujudkan niat tersebut.



Tabel 12

<b>DAFTAR REKAPITULASI CALON JAMAAH HAJI</b> <b>KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG</b> <b>BERDASARKAN PEKERJAAN</b> <b>TAHUN 1430 H / 2009 M</b>				
NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE	KETERANGAN
1	2	3	4	5
01	Pegawai Negeri Sipil	39	16,88%	
02	TNI / POLRI	-	0,00%	
03	Pedagang / Wiraswasta	33	14,35%	
04	Petani	17	7,17%	
05	Pegawai Swasta	-	0,00%	
06	Ibu Rumah Tangga	143	60,34%	
07	Pelajar / Mahasiswa	3	1,26%	
08	Pegawai BUMN/BUMD	1	0,00%	
09	Lain – Lain	-	0,00%	
	<b>J U M L A H</b>	<b>237</b>	<b>100%</b>	

*Sumber data:* Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009

Keterangan :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Pegawai BUMN/BUMD

3. Pegawai Swasta

4. TNI / POLRI

5. Petani

6. Pedagang

7. Ibu Rumah Tangga

#### 8. Mahasiswa/Pelajar

#### 9. Lain-lain Profesi.

Berdasarkan tabel 12 di atas terungkap bahwa calon jamaah haji tahun 2008/2009 berdasarkan jenis pekerjaan/profesi yang terbanyak adalah profesi sebagai ibu rumah tangga yang berkisar 143 orang ( 63,4 %), menyusul calon jamaah haji yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 39 (16,88 % ), menyusul pedagang/wiraswasta sebanyak 33 orang (14,35 %), petani sebanyak 17 orang (7,17 %) kemudian mahasiswa atau pelajar sebanyak 3 orang (1,26 %), 1 pegawai BUMN/BUMD sebanyak 1 orang (0,00 %), TNI/Polri, Pegawai Swasta dan lain-lain tidak ada (0,00 %).

Uraian tersebut di atas memberikan gambaran tentang status ibu rumah tangga yang mendominasi ingin memenuhi ketaatan berhaji. Bahwa Secara umum, syarat wajib haji dapat dibedakan pada dua bentuk, *pertama*, syarat wajib yang bersifat umum (laki-laki dan perempuan) adalah; 1) Muslim, 2) *Mukallaf*, yaitu orang-orang yang dianggap cakap bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Seseorang belum dikenakan *taklif* hukum sebelum ia cakap bertindak hukum. Dasar pembebanan hukum adalah *b lig*, berakal dan punya pemahaman, 3) Merdeka, hamba sahaya tidak diwajibkan haji, karena haji merupakan ibadah *badaniyah* dan *m liyah* yang mesti dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan dan atas biaya sendiri.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Said Aqil Husin al-Munawwar, *Fikih Haji: Penuntun Jamaah Haji Mencapai Haji Mabr r* ( Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003 ), h. 21 - 24

Secara khusus, diberlakukan syarat khusus bagi wanita, yaitu: 1) Harus didampingi oleh suami atau *mahram*-nya. Jika tidak, maka haji menjadi tidak wajib, 2) Wanita yang tidak sedang menjalani masa *iddah*, baik karena t $\square$ alak atau karena ditinggal suaminya.<sup>63</sup>

**Tabel 13**

<b>DAFTAR REKAPITULASI CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2008 S.D 2009</b>						
NO	JENIS KELAMIN	T A H U N				KETERANGAN
		2008	%	2009	%	
1	2	3	4	5	6	7
01	PRIA	52	22,12%	46	19,00%	
02	WANITA	184	78,29%	191	80,59%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>235</b>	<b>100%</b>	<b>237</b>	<b>100%</b>	

*Sumber data:* Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009

Dari jenis kelamin kelihatannya kaum perempuan lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pada tabel di atas digambarkan bahwa perempuan yang menjadi calon jamaah haji tahun 2008 sebanyak 184 orang ( 78,29%) dan tahun 2009 sebanyak 191 orang ( 80,59 %). Sedangkan laki-laki tahun 2008 sebanyak 52 orang ( 22.12 %) dan tahun 2009 sebanyak 46 orang (19,00 %).

Berdasarkan tabel 13 di atas bahwa jumlah calon haji di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih didominasi oleh kaum perempuan. Padahal persentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan untuk Kabupaten Sidenreng Rappang jumlah perbedaanya tidak terlalu jauh. (*lihat tabel 5*)

---

<sup>63</sup>*Ibid*, h. 26

Jika persentase perbandingan laki-laki dan perempuan menurut kecamatan, maka perbandingan calon jamaah haji perempuan dan laki-laki dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14

PERSENTASE JENIS PEKERJAAN CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BERDASARKAN WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2009 M				
NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		PRESENTASE
		PRIA	WANITA	
1	2			5
01	MaritengngaE	13	49	21,94%
02	Panca Rijang	10	39	20,68,20%
03	Baranti	6	33	16,46%
04	Kulo	-	-	0,00%
05	Tellu Limpoe	3	6	3,80%
06	Panca Lautang	2	7	3,80%
07	Watangpulu	4	10	5,90%
08	Watang Sidenreng	-	-	0,00%
09	Dua Pitue	9	47	23,63%
10	Pitu Riase	-	-	0,00%
11	Pitu Riawa	-	-	0,00%
	J U M L A H	46	191	100%
2 3 7				

Data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009

Hampir seluruh kecamatan didominasi oleh profesi ibu rumah tangga calon jamaah haji yang menunaikan tahun 2008 / 2009, hanya beberapa kecamatan yang calon jamaah hajinya paling banyak dari profesi pedagang dan petani. Data ini menunjukkan bahwa

tingginya keinginan dari kalangan ibu rumah tangga melaksanakan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang

**Tabel 15**

<b>PERSENTASE CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 1430 H / 2009 M (%)</b>				
NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE	KETERANGAN
1	2	3	4	5
01	SD	111	46,84%	
02	SLTP	31	13,10%	
03	SLTA	58	24,47%	
04	DIPLOMA	12	5,06%	
05	SI	25	10,55%	
06	S2	-	0,00%	
07	S3	-	0,00%	
08	LAIN – LAIN	-	0,00%	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>237</b>	<b>100%</b>	

**Sumber data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap tahun 2009**

Dari Tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang masih banyak yang berpendidikan rendah olehnya itu calon jamaah haji perlu diberikan bekal pengetahuan tentang manasik haji. Hal ini bisa berjalan sesuai dengan harapan jika pembimbing/instruktur mempunyai pengetahuan yang memadai tentang ilmu manasik haji serta didukung oleh sarana bimbingan manasik haji yang memadai.

Dari segi tingkat pendidikan calon jamaah haji tahun 2009 di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tampak bahwa tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak

111 orang (46,84 %), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTP) sebanyak 31 orang (13,10 %), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sebanyak 58 Orang (24,47 %), Diploma sebanyak 12 orang (5,06 %), strata satu (S1) sebanyak 25 orang (10,55%), untuk strata dua (S2) dan strata tiga (S3) tidak ada (0,00 %). Calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang dari segi tingkat pendidikan yang terbanyak adalah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 111 (46,84 %), kemudian terbanyak kedua adalah tamatan sekolah lanjutan atas (SLTA) sebanyak 58 orang ( 24,47 %) dan yang paling sedikit adalah Diploma sebanyak 12 orang ( 5,06%).

Mengamati profil pendidikan calon jamaah haji pada tabel 15 di atas, dari tahun ke tahun sebagian besar adalah rakyat biasa yang berpendidikan rendah, belum berpengalaman pergi jauh, hidup dalam kultur tradisional, tidak sedikit yang buta huruf dan kebanyakan tidak mampu berbahasa asing.

Kondisi pelaksanaan ibadah haji memaksa mereka berhadapan dengan satu kenyataan bahkan tidak pernah dibayangkan, yaitu harus melakukan perjalanan antar negara ke negara modern dan berintraksi dengan jamaah haji dari berbagai bangsa dan latar belakang sosial, budaya peradaban yang berbeda-beda.

Melihat kondisi tersebut di atas maka pembinaan, bimbingan dan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan yang dibutuhkan oleh jamaah harus dibekali ilmu pengetahuan yang cukup bahkan sebelum calon haji mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Pembinaan haji yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (KBIH) adalah rangkaian yang menyangkut penerangan, penyuluhan dan bimbingan ibadah haji yang terus dilakukan kepada calon jamaah haji.

Tabel 16

<b>DAFTAR REKAPITULASI CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 1430 H/ 2009 M.</b>				
NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE	KETERANGAN
01	0 S.D. 10 TAHUN	-	0,00%	
02	11 S.D. 20 TAHUN	2	0,84%	
03	21 S.D. 30 TAHUN	15	6,33%	
04	31 S.D. 40 TAHUN	73	30,80%	
05	41 S.D. 50 TAHUN	71	29,96%	
06	51 S.D. 60 TAHUN	51	21,52%	
07	61 S.D. 70 TAHUN	21	8,86%	
08	71 S.D. 80 TAHUN	3	1,27%	
09	81 S.D. 90 TAHUN	1	0,42%	
10	91 TAHUN LEBIH	-	0,00%	
	<b>J U M L A H</b>	<b>237</b>	<b>100%</b>	

**Sumber data:** Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari segi usia, calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang untuk kelompok umur 31 s/d 40 tahun yang terbanyak, yaitu sebanyak 73 orang (30,80 %) dari jumlah total calon jamaah haji tahun 2009, peringkat kedua terbanyak adalah kelompok umur 41 s/d 50 tahun sebanyak 71 orang (29,96%), selanjutnya kelompok umur 51 s/d 60 tahun sebanyak 51 orang (21,52%) , lalu kelompok umur 61 s/d 70 tahun sebanyak 21 orang (8,86%) , kelompok umur 21 tahun s/d 30 tahun sebanyak 15 orang (6,33%), kelompok umur 71 s/d 80 tahun sebanyak 3 orang (1,27%), kemudian 11 s/d 20 tahun sebanyak 2 orang (0,84 %) dan yang terakhir adalah kelompok umur 81 s/d 90 tahun sebanyak 1 orang (0,42%).

Sedangkan untuk calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009 tidak ada yang menunaikan haji untuk kelompok umur 0 s/d 10 tahun dan kelompok umur 91 tahun lebih. Hal ini disebabkan karena ketatnya aturan yang diterapkan, yang menegaskan bahwa untuk anak-anak belum bisa berhaji karena terlalu banyak wajib haji yang masih masuk daftar tunggu dan yang sudah terlalu tua diupayakan digantikan saja oleh muhrimnya (*badal haji*) karena sangat beresiko tinggi kalau dipaksakan menunaikan ibadah haji.

#### **B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesenjangan Pelaksanaan Haji di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan bahwa faktor dominan yang memengaruhi terhadap kesenjangan pelaksanaan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain; a) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran haji b) Pelaksanaan bimbingan manasik haji belum efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon haji, c) Lemahnya SDM (sumberdaya manusia) pengelola haji/lembaga haji, d) Tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan berhaji, dan e) Kuatnya keinginan masyarakat mendapatkan gelar/titel “Haji/Hajjah”.

Untuk terwujudnya kondisi yang ideal dalam pelaksanaan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu diterapkan perubahan pemahaman ajaran umat Islam yang tekstual-skriptual ke pemahaman yang kontekstual-kritikal dengan mengoptimalkan pembinaan umat dari segenap lembaga organisasi kemasyarakatan serta pranata sosial sesuai dengan tuntutan zaman.



Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

### **1. Kurangnya Kesadaran Hukum masyarakat dan Kepatuhan terhadap Ajaran haji**

Dalam penelitian yang dilakukan tentang faktor yang berpengaruh dalam ketaatan berhaji bagi calon jamaah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan data yang diolah ditemukan beragamnya motivasi yang melatar belakangi pelaksanaan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penulis memahami bahwa haji yang dilaksanakan oleh seorang muslim tentu sangat erat hubungannya dengan kesiapan ilmu pengetahuan dan pemahaman konsep haji itu sendiri, melalui informasi haji yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pemberi informasi inilah yang dijadikan sebagai motivator awal yang tentunya menambah pengetahuan dan pemahaman calon jamaah haji.

Hal ini telah memberikan informasi tentang ketaatan berhaji termasuk tata cara pelaksanaan ibadah haji dan urgensinya bagi seorang muslim. Sebagaimana dinyatakan dalam Alquran bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima sesudah mengeluarkan zakat dan *shalat*, keduanya merupakan kewajiban setiap muslim. Ini berarti bahwa pelaksanaan ibadah haji setelah mengeluarkan zakat.

Zakat harta bukanlah masalah kewajiban berdasarkan kondisi dan keadaan yang semuanya orang melakukan, akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan yakni mau tak mau harus dikeluarkan jika telah memenuhi syarat syar'i. Dalam

perspektif Islam, secara tegas mensyari'atkan kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikan zakat harta.

Perintah berzakat pada hakikatnya bertujuan memecahkan persoalan kemiskinan umat dan menghendaki kemakmuran yang merata bagi seluruh umat Islam. Diyakini bahwa kemiskinan dapat menyebabkan melemahkan daya beli masyarakat, hal ini akan berakibat pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang akhirnya berdampak pada perekonomian masyarakat Islam. Zakat harta merupakan ibadah pokok yang bersifat sosial *property m liyyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari aspek ajaran Islam maupun dari aspek pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Dari sisi ajaran Islam, zakat harta termasuk rukun Islam yang lima, kalau ibadah haji dimaknakan sebagai simbol komunikasi dan berhubungan vertikal secara kongkrik antara manusia dengan Tuhannya, maka zakat harta juga dimaknakan sebagai wujud nyata komunikasi dan berhubungan horizontal antar sesama manusia. Hubungan vertikal dan horizontal bagi kehidupan manusia merupakan satu kesatuan interaksi yang tak bisa diabaikan.

Begitu juga dalam hal zakat harta, jika seorang muslim yang dikaruniai kekayaan harta (lebih dari satu *nisāb*), kemudian ia tak peduli dengan nasib sesamanya yang diperhadapkan dengan pahit getirnya kemiskinan, baik kemiskinan kultural maupun struktural, maka orang itulah yang disebut oleh Tuhan sebagai pendusta agama (Q.S. *al-M 'un* : 1-3) sekaligus orang yang bakhil ( Q.S. *al-Nisa'* : 37)

Dalam kenyataannya masih ada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang belum memahami betul tentang kewajiban berzakat dan lebih memilih melaksanakan ibadah haji ketimbang dengan mengeluarkan zakat hartanya padahal aspek *ta'abbudiyah* sama saja.

Untuk membuktikan kenyataan tersebut di atas maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa pernyataan dari masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 17**

**TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG DALAM MENGELUARKAN ZAKAT HARTA YANG  
SUDAH MELAKSANAKAN HAJI**

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	20	13,34
2.	Kadang-kadang tergantung pada Keadaan	95	63,33
3.	Tidak pernah	35	23,33
JUMLAH		150	100 %

**Sumber data : Data Primer yang diolah tahun 2010**

Berdasarkan hasil dari pada tabel di atas, terlihat bahwa ada 13,34 % responden yang sudah melaksanakan haji dan juga sering mengeluarkan zakat harta. Selanjutnya pernyataan responden yang hanya kadang-kadang mengeluarkan zakat harta 63,33 % dan

bahkan ada responden yang tidak pernah sama sekali mengeluarkan zakat harta sebanyak 35 %, padahal telah melaksanakan ibadah haji.

Jelas bahwa masyarakat yang sering mengeluarkan zakat harta hanya 13,34 % dan kadang-kadang tergantung pada keadaan atau sewaktu-waktu mengeluarkan zakat 63,33 % sedangkan yang tidak pernah 35 % ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang belum mengeluarkan zakat harta walaupun mereka sebenarnya telah melaksanakan ibadah haji dan mengetahui serta memahami bahwa zakat harta itu merupakan suatu kewajiban yang jika tidak dilakukan/ditunaikan akan mendapat dosa.

Dengan demikian jelas bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang tentang pentingnya zakat harta, sangat rendah/belum memadai, sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-undang RI. Nomor 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat.

**Tabel 18**  
**BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ZAKAT**  
**PADA MASYARAKAT MUSLIM YANG TELAH MELAKSANAKAN**  
**IBADAH HAJI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Sering kali	65	43,34
2.	Kurang sekali	75	50
3.	Tidak sama sekali	10	6,66
JUMLAH		150	100

*Sumber data : Data Primer yang diolah tahun 2010*

Berdasarkan pada tabel 18 di atas dapat dilihat jawaban responden bahwa masyarakat muslim sangat kurang yang menyatakan kurang sekali menerima bimbingan atau penyuluhan dari lembaga zakat dan para ulama di Kabupaten Sidenreng Rappang tentang zakat harta.

Dari 150 responden diperoleh jawaban responden yang menyatakan seringkali menerima bimbingan atau penyuluhan sebanyak 65 responden (43,34 %), yang menyatakan kurang sekali menerima bimbingan dan penyuluhan sebanyak 75 responden (50 %) dan yang menyatakan tidak sama sekali menerima penyuluhan tentang zakat baik melalui lembaga zakat dan maupun para ulama di Kabupaten Sidenreng Rappang 10 responden ( 6,66 %).

Dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase yang menjawab bahwa mereka kurang seringkali menerima bimbingan dan penyuluhan dari lembaga zakat dan ulama jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan responden yang menjawab bahwa ia sering sekali memperoleh bimbingan dan penyuluhan, dalam artian bahwa 50 % yang kurang sekali memperoleh bimbingan dan penyuluhan sedangkan yang sering atau selalu memperoleh bimbingan dan penyuluhan hanya 43,34 %. Sedangkan yang tidak sama sekali pernah menerima atau mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari lembaga zakat dan ulama sebanyak 6,66 %.

Dengan melihat analisis tersebut di atas bahwa lembaga zakat sudah melakukan Bimbingan dan penyuluhan namun belum optimal kepada masyarakat muslim yang sudah melaksanakan haji di Kabupten Sidenreng Rappang, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban berzakat, fungsi zakat, dan pendayagunaan zakat, termasuk di dalamnya tentang

masyarakat muslim yang melaksanakan haji sudah sepatutnya melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakat harta karena telah dianggap memiliki kemampuan lebih dalam hal ekonomi.

Faktor ini diduga berpengaruh karena budaya hukum masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam merupakan salah satu faktor penentu berlakunya hukum Islam, apalagi terlaksananya Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 dan Undang-Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999 sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan atau persepsi masyarakat terhadap ajaran haji dan zakat. Salah satu sudut pandang yang dapat dipakai untuk mengamati bekerjanya hukum itu adalah dengan melihat sebagai suatu proses yaitu apa yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga hukum dan umat Islam itu sendiri, dan bagaimana mereka melakukan dan mentaatinya.

## **2. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji belum efektif dalam meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Calon Haji**

Motivasi awal telah memberikan kesan kepada responden tentang pentingnya melaksanakan ibadah haji dan memberikan kesan yang kuat dalam diri seseorang. Hal itu bisa dipahami karena motivator awal sebagai salah satu pendorong yang sangat akrab dengan orang yang bersangkutan.

Tabel berikut ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang . Termasuk media pemberi informasi pertama tentang haji dan urgensi serta menjadikan responden tertarik untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.

**Tabel 19**  
**MEMBACA DAN MENDENGAR**  
**TENTANG FATWA “KETAATAN BERHAJI”**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	115	76,66
2	Tidak pernah	35	23,33
Jumlah		150	100

**Sumber data: Data Primer tahun 2010**

Tabel di atas memberikan gambaran tentang frekuensi menyimak, mendengar dan membaca fatwa “Ketaatan berhaji” yang menyatakan 76.66% responden menyatakan pernah mendengar, membaca atau menyimak fatwa tersebut.

Data ini menunjukkan bahwa semua responden sudah memahami fatwa “ketaatan berhaji”. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya hasil bacaan dan penyimak terhadap fatwa “ketaatan berhaji” itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan seseorang. Olehnya penulis beranggapan bahwa fatwa itu sangat memberikan pengaruh, karena sebagian besar responden menyatakan pernah membaca dan mendengar fatwa tersebut.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah mendengar dan menyimak tentang fatwa “ketaatan berhaji” memberikan motivasi yang kuat sehingga masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji.

**Tabel 20**  
**SUMBER INFORMASI IBADAH HAJI SEHINGGA**  
**TERTARIK UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Keluarga	75	50
2	Ulama/usta	25	16,66
3	KBIH	23	15,33
4	Kementerian Agama	17	11,33
5	Lain-lain	10	6,66
Jumlah		150	100

***Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010***

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa sebanyak 75 orang (50 %) responden memperoleh informasi tentang pentingnya haji kemudian menjadikan tertarik untuk melaksanakannya. 16,66% informasi haji diperoleh dari ulama dan cendekiawan muslim yang ada disekitarnya, selebihnya informasi melalui Kementerian Agama.

Data ini menunjukkan bahwa dalam persoalan informasi untuk berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang, ikatan kekeluargaan masih sangat erat dan sangat berpengaruh. Dari data ini juga mendapat dorongan untuk melakukan ibadah dari kalangan keluarga, baik dalam lingkup keluarga dekat maupun lingkup keluarga besar. Hal ini juga bisa dipahami bahwa dalam masyarakat Bugis-Makassar ikatan kekeluargaan masih sangat kuat.

Informasi yang diberikan oleh ulama hanya sekitar 16,67 % menunjukkan bahwa persoalan ketaatan berhaji dalam hubungan antara masyarakat dalam ulama kurang efektif dalam memberikan motivasi kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini



kemungkinan besar terjadi karena materi-materi berupa dakwah islamiyah atau khotbah dimasjid yang diberikan oleh ulama secara persentase kurang menyentuh kepada persoalan substansi berhaji, yang banyak disentuh hanyalah persoalan ibadah yang bersifat umum saja. Pembahasan tentang haji dalam materi dakwah hanya dilakukan bersifat temporer hanya ketika sedang memasuki musim haji dan dalam acara hajatan haji atau syukuran setelah melaksanakan ibadah haji.

Fenomena kedua yang terjadi di tengah masyarakat adalah seorang jamaah calon haji mendatangi seorang ulama untuk mendapatkan bimbingan setelah calon jamaah haji yang bersangkutan sudah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga ada kesan bahwa peran ulama dalam persoalan haji hanya berfungsi sebagai petunjuk tentang syariat pelaksanaan ibadah haji.

Responden juga memberikan informasi tentang peran dan tugas Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan dan bimbingan melalui informasi tentang ketaatan berhaji sebesar 11,33%. Data ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama sedikit banyaknya telah ikut memberikan andil dalam memfasilitasi proses pendaftaran sampai pembimbingan manasik haji sekaligus memotivasi umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan ibadah haji.

Data di atas juga memberikan jawaban tentang peran KBIH. 15,33 % responden menyatakan bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) ikut memberikan informasi tentang berhaji, tidak lain menunjukkan KBIH hanya berfungsi membimbing langsung calon jamaah haji yang akan berangkat, tidak berfungsi secara optimal memberikan motivasi sebelum seseorang mendaftar haji. Hal ini sesuai kenyataan bahwa fungsi

terpenting KBIH yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah fungsi pembimbingan mulai dari kursus tatacara pelaksanaanya hingga pendampingan di Tanah Suci.

Setelah memiliki niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, seorang muslim tidak dapat langsung menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji menuntut banyak persiapan dan kesiapan seseorang. Hal ini yang menjadikan sehingga niat untuk melaksanakan ibadah haji baru dapat terlaksana pada saat yang bersangkutan telah siap.

Tabel berikut ini menggambarkan lamanya seorang muslim berencana untuk kemudian mewujudkan niatnya melaksanakan ibadah haji.

**Tabel 21**

**LAMANYA BERENCANA MENUNAIKAN IBADAH HAJI**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	1 tahun	25	16,66
2	2 tahun	15	10,00
3	3 tahun	53	35,33
4	4 tahun	37	24,66
5	Lebih 4 tahun	10	6,66
Jumlah		150	100

**Sumber data:** Data Primer yang diolah tahun 2010

Dari tabel 21 di atas dapat digambarkan bahwa sekitar 35,33 % responden menyatakan bahwa niatnya untuk melaksanakan ibadah haji baru terlaksana kemudian. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji bagi sebagian besar masyarakat sangat dikaitkan ketika sudah memiliki kemampuan dana atau

tabungan yang cukup. Sehingga terhitung dari mempunyai dalam segi dana pembayaran BPIH, masih harus menunda selama tiga sampai empat tahun lamanya.

Sebanyak 24,66 % responden menyatakan bahwa niat dan rencana untuk melaksanakan ibadah haji sudah sejak lama ada, yaitu sudah lebih dari 4 tahun yang lalu, akan tetapi niat itu baru dapat dilaksanakan dalam jangka waktu panjang.

Data ini menunjukkan bahwa keinginan seorang calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji senantiasa ada dan melekat dalam dirinya akan tetapi kemampuan dan kesiapan untuk melaksanakannya membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkannya.

Kendala yang muncul dihadapi oleh calon jamaah haji sehingga membuat niat seseorang untuk melaksanakan ibadah haji tertunda adalah karena banyaknya jamaah calon haji yang terdaftar untuk melaksanakan ibadah haji, sementara *quota* haji sangat terbatas, sehingga seorang muslim yang akan menunaikan ibadah haji harus masuk dalam daftar antrian yang panjang disebabkan pendaftaran haji menggunakan sistem daftar tunggu (*waiting list*), dan inilah salah satu faktor yang membuat pelaksanaan ibadah haji tertunda.

Data ini juga menunjukkan bahwa semangat umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan haji sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya niat untuk berhaji walaupun memerlukan waktu bertahun-tahun lamanya untuk mewujudkan niat tersebut.

Hal tersebut juga memberikan peluang kepada KBIH dan Kementerian Agama untuk melakukan Bimbingan dan penyuluhan manasik haji dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon jamaah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tentang adanya niat dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, secara kongkrik tentu memiliki alasan-alasan tertentu hingga dapat termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji. Alasan pokok inilah yang senantiasa mendorong seseorang untuk melaksanakan ibadah haji walaupun menunggu selama bertahun-tahun dan memerlukan banyak persiapan dan kesiapan.

Tabel berikut ini menggambarkan alasan-alasan pokok yang menjadikan seorang jamaah calon haji sangat termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji.

**Tabel 22**  
**ALASAN POKOK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ingin memperoleh gelar haji	35	23,33
2	Kewajiban yang diperintahkan	65	43,33
3	Ingin memperoleh surga	20	13,33
4	Ingin dihargai di tengah masyarakat	25	16,66
5	Lain-lain	5	3,33
Jumlah		150	100

**Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Mayoritas responden menyatakan bahwa alasan pokoknya melaksanakan ibadah haji adalah karena ketaatan kepada kewajiban berhaji itu sendiri, responden yang memberikan jawaban ini sebanyak 43,33 %.

Data ini memberikan gambaran bahwa kesadaran akan wajibnya haji bagi seorang muslim sangat tinggi, akan tetapi jika dihubungkan dengan data pada tabel sebelumnya, menunjukkan adanya waktu yang lama untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan

ibadah haji juga memberikan gambaran perlunya sikap sabar dan sadar terhadap pemenuhan kewajiban berhaji itu membutuhkan kesiapan dan pengorbanan yang cukup besar. Dari data ini penulis memahami bahwa semangat masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tinggi untuk melaksanakan ibadah haji.

Sebanyak 23,33 % responden memberikan jawaban bahwa alasan pokok melaksanakan ibadah haji adalah karena ingin mendapatkan gelar haji setelah melaksanakan haji. Alasan ini dapat dipahami oleh adanya kemungkinan pengaruh pemahaman keistimewaan ibadah haji bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Termasuk adanya pemahaman calon jamaah haji berupa balasan surga bagi seorang haji *mabr r*, dalam masyarakat Islam di kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel ini juga memberikan gambaran bahwa adanya pernyataan responden sebanyak 16,66 %, bahwa melaksanakan ibadah haji karena ingin dihargai di tengah masyarakat. Hal ini memberikan petunjuk bahwa orang yang sudah melaksanakan haji memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Sebagai panutan dalam hal pengamalan keagamaan juga dianggap sebagai tokoh agama dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Gelar haji memiliki pengaruh tersendiri di tengah pergaulan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, salah satu inilah yang menjadi pendorong utama untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun terkadang belum mampu dalam hal ekonomi namun ada kecenderungan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji karena memiliki prestise tersendiri di tengah masyarakat.

Seorang muslim yang taat, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah haji. Karena memang dalam ajaran Islam, salah satu yang menghancurkan nilai pahala dari ibadah yang dilakukan adalah karena adanya unsur *riya'* atau ingin dipuji oleh orang lain. Sehingga agama Islam menetapkan bahwa orientasi ibadah semata-mata karena Allah swt.

Kuatnya motivasi melaksanakan ibadah haji dalam masyarakat Islam Kabupaten Sidenreng Rappang juga tergambar dari intensitas pelaksanaan haji seseorang. Tabel berikut menggambarkan intensitas pelaksanaan haji responden.

**Tabel 23**

**BERAPA KALI TELAH MELAKSANAKAN IBADAH HAJI**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	1 kali	95	63,00
2	2 kali	35	24,00
3	3 kali	20	13,00
4	4 kali	0	0
5	Lebih 4 kali	0	0
Jumlah		150	100

**Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Sebanyak 63,33 % responden telah melaksanakan ibadah haji sebanyak satu kali dan 24,00 % responden telah melaksanakan haji yang kedua kalinya. Selanjutnya ada 13,00 % responden menyatakan telah melaksanakan ibadah haji sebanyak tiga kali. Data ini menunjukkan bahwa kurang lebih seperempat dari masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang dijadikan sebagai sampel telah melaksanakan haji sebanyak dua kali. Hal

ini menunjukkan ketaatan berhaji dan animo masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pelaksanaan ibadah haji sangat tinggi.

Disisi lain bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah melaksanakan ibadah haji masih berniat untuk melaksanakan lagi, hal ini terjadi karena rupanya pelaksanaan ibadah yang walaupun membutuhkan dan persiapan fisik serta pengorbanan yang tidak sedikit, masih tetap menjadi ibadah yang diidam-idamkan dalam kehidupan seorang muslim.

Tabel berikut ini menggambarkan keinginan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengulang-ulang atau melaksanakan lagi haji, baik untuk yang kedua kalinya maupun yang ketiga kalinya dan seterusnya.

**Tabel 24**

**KEINGINAN UNTUK MELAKSANAKAN ULANG IBADAH HAJI**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ya	135	90
2	Tidak	15	10
Jumlah		150	100

**Sumber data: Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Berdasarkan tabel 24 di atas menunjukkan bahwa 90 % responden menyatakan tetap akan melaksanakan kembali ibadah haji ke tanah suci. Data ini memberikan gambaran bahwa betapa antusiasnya dan besarnya keinginan masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan ibadah haji, karena keinginan itu selalu ada ketika

memiliki kemampuan finansial yang cukup dan tetap berkeinginan untuk melaksanakan ulang ibadah haji walaupun sudah pernah melaksanakannya.

Data ini juga menggambarkan bahwa rupanya pelaksanaan ibadah haji yang *notabenenya* memerlukan banyak biaya dan tenaga masih menjadi cita-cita seorang muslim sepanjang hidupnya. Keinginan itu kelihatannya tidak dipengaruhi oleh apakah biaya haji itu mahal atau tidak, yang jelas keinginan untuk berhaji tetap ada dalam diri seorang muslim. Tentang berapa kali lagi akan mengulang ibadah hajinya setelah melaksanakan yang pertama kalinya, tabel berikut ini memberikan gambaran tentang volume keinginan untuk melaksanakan haji.

**Tabel 25**

**RENCANA PELAKSANAAN ULANG IBADAH HAJI**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	2 kali	80	53,0
2	3 kali	20	13,0
3	4 kali	10	0,6
4	5 kali	20	13,0
5	Lebih 5 kali	20	13,0
Jumlah		150	100

**Sumber data:** Data Primer yang Diolah tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa 53,0 % responden menjawab tetap akan berhaji sebanyak 2 kali, 13,0 % menyatakan akan berhaji sebanyak 3 kali, 0,6 % menyatakan akan berhaji sebanyak 4 kali, dan 13 % yang menyatakan akan berhaji lebih dari 5 kali.



Data tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun telah melaksanakan haji, keinginan itu bahkan akan dilaksanakan lebih dari lima kali jika memungkinkan. Untuk mewujudkan keinginan dan niat berhaji itu, tentu memerlukan persiapan dan kesiapan yang matang, sehingga dibutuhkan strategi tertentu untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ibadah haji. Salah satu persiapan pelaksanaan ibadah haji adalah dengan kemampuan membayar Biaya Perjalan Ibadah haji (BPIH), yang tentu harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya.

**Tabel 26**

**CARA MENDAPATKAN UANG UNTUK MEMBAYAR  
BIAYA PERGI IBADAH HAJI (BPIH)**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Meminjam uang/kredit	75	50,0
2	Menabung	25	16,0
3	Dana talangan	05	3,0
4	Arisan	20	13,0
5	Menjual asset/harta	25	18,0
Jumlah		150	100

**Sumber data:** Data Primer yang Diolah tahun 2010

Tabel 26 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 50 % responden menyatakan meminjam/kredit untuk membayar BPIH 16,0 %, menyatakan menabung untuk pembayaran BPIH, 3,0 %, menyatakan membayar BPIH melalui dana talangan, 13,0 %,

menjelaskan membayar BPIH dengan cara arisan, dan menjelaskan membayar BPIH dengan menjual asset/harta untuk membayar BPIH 18,0 %.

Data ini memberikan gambaran bermacam-macam cara seseorang untuk memenuhi pembayaran BPIH, secara umum responden memberikan jawaban meminjam/kredit untuk pemenuhan pembayaran BPIH, nanti setelah melaksanakan ibadah haji atau pulang ke tanah air menyicil kredit atau pinjaman tersebut, yang tentunya juga menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya, dan juga terjadi kemungkinan melakukan penghematan supaya dapat menabung dengan harapan dapat melaksanakan ibadah haji tahun mendatang.

Fenomena yang lain adalah banyaknya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjual asset/harta keluarga yang dimilikinya demi melaksanakan ibadah haji dan untuk kategori ini tidak kecil jumlahnya, bahkan menempati urutan kedua setelah dengan cara menabung. Sebagian lagi yang lain ikut berhaji dan membayar BPIH dengan jalan mengikuti arisan haji.

Cara-cara yang dilakukan oleh jamaah calon masyarakat untuk memenuhi pembayaran BPIH ini menunjukkan tinggi semangat untuk melaksanakan ibadah haji, yang walaupun kelihatannya beberapa cara akan mempersulit kehidupannya.

Keinginan untuk mencapai haji *mabr r* tetap menjadi sebuah prioritas utama dari setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang keinginan untuk mencapai haji *mabr r*.

Tabel 27

**KEINGINAN UNTUK MENCAPAI HAJI *mabr r***

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ya	150	100
2	Tidak	–	–
Jumlah		150	100

**Sumber data:** Data Primer yang Diolah tahun 2010

100 % responden menyatakan berkeinginan untuk mencapai haji *mabr r*. Keinginan ini adalah sesuatu yang sangat wajar, karena ukuran keberhasilan haji seseorang ditentukan oleh pencapain haji *mabr r* tersebut. Secara toritis memang ditemukan bahwa tujuan pelaksanaan ibadah haji adalah untuk mencapai haji *mabr r*, dan ibadah haji yang diterima oleh Allah swt. hanyalah haji *mabr r* dengan berdasar pada hadi yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Dambaan setiap muslim yang menunaikan ibadah haji adalah memperoleh haji *mabr r*. Namun untuk mencapai haji yang *mabr r* tidak semudah yang diinginkan karena untuk mencapainya, salah satu prasyaratnya adalah pemahaman mengenai manasik haji yang utuh. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, proses pembelajaran dalam bimbingan manasik haji yang diarahkan pada kemandirian, menuju kesempurnaan ibadah haji sesuai tuntunan ajaran agama Islam, merupakan suatu keniscayaan.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas di berbagai sektor kehidupan semakin tinggi, termasuk tuntutan terhadap pelayanan dalam bimbingan manasik haji. Berbarengan dengan itu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi

komunikasi dan informasi terus berkembang, menuntut setiap orang termasuk pengambil keputusan pada level manapun berinovasi untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan tersebut, apabila tidak ingin ketinggalan atau ditinggalkan perubahan itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa berkeinginan untuk memperoleh haji *mabr r*. Karena dianggap bahwa dengan haji *mabr r* akan mendapat balasan yang sangat besar dari Allah swt., baik balasan itu diterima di dunia maupun di akhirat kelak. Walaupun keinginan haji *mabr r* menjadi cita-cita semua orang yang melaksanakan ibadah haji, namun beragam harapan atau hasil yang ingin diperoleh dari haji *mabr r* itu.

Berikut ini adalah data tentang keinginan yang akan diperoleh setelah mencapai haji *mabr r*.

**Tabel 28**  
**HARAPAN SETELAH MENCAPAI HAJI MABR R**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Mendapat ketenangan dan ketemtraman hidup di dunia	30	20,0
2	Dihargai di tengah masyarakat	45	30,0
3	Mendapat balasan surga	50	33,4
4	Mendapat gelar haji	25	16,6
Jumlah		150	100

**Sumber data:** Data Primer yang Diolah tahun 2010

Tabel 28 di atas menunjukkan bahwa harapan responden setelah mencapai haji *mabr r*, atau hal-hal yang diinginkan dari pencapaian haji *mabr r*. 20,0 % responden menyatakan bahwa yang akan dicapai ketika memperoleh haji *mabr r* adalah mendapatkan ketenangan dan ketemtraman hidup di dunia, 30,0 % responden menyatakan bahwa hal yang ingin diperoleh dari pelaksanaan ibadah haji dengan meraih haji *mabr r* adalah ingin dihargai dalam pergaulan di masyarakat. 33,4 % menjelaskan pelaksanaan berhaji yang ia lakukan adalah balasan surga. Sebagaimana dijanjikan oleh Nabi saw. 16,6 % responden menyatakan bahwa hasil pencapaian haji *mabr r* adalah mendapatkan gelar haji sebenarnya.

Dari data di atas menggambarkan bahwa masih ada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan ibadah haji dengan orientasi dunia, memperoleh ketenangan dan prestise hidup. Oleh karena itu, ditemukan dalam kenyataan ketika pelaksanaan haji di Mekkah, hampir seluruh jamaah haji memanjatkan doa yang bernada orientasi untuk urusan dunia seperti dipermudah rezeki, diperlancar dagangan dan urusan dunia lainnya serta meminta keutuhan rumah tangga dan keturunan.

Data ini juga memberikan bukti yang kuat tentang besarnya pengaruh pemahaman ketaatan berhaji terhadap pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu sekitar 33,4 % responden yang menginginkan balasan surga sebagaimana yang dijanjikan Nabi saw. hal ini juga menjadi bukti bahwa hadi Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa haji *mabr r* itu balasannya adalah surga, sudah menjadi sebuah tujuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Walaupun semua orang ingin melaksanakan ibadah haji dan memperoleh haji *mabr r* balasannya adalah surga, akan tetapi ketika kemampuan dana tidak mencukupi

untuk seluruh anggota keluarga, maka tentunya akan dilakukan skala prioritas dalam pelaksanaan berhaji.

**Tabel 29**  
**PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SIDRAP**  
**TERHADAP KETAATAN BERHAJI**

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Semua orang Islam wajib	32	21,34
2.	Hanya Orang-orang tertentu Wajib	118	78,66
JUMLAH		150	100

***Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010***

Berdasarkan hasil dari data tabel 29 di atas, terlihat ada 21,34 % responden yang menjawab bahwa semua orang Islam wajib melaksanakan haji dan 78,66 % yang menjawab hanya orang-orang tertentu yang wajib melaksanakan haji.

Apabila data tersebut di atas dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang yang memahami betul tentang kewajiban melaksanakan haji baru ada 21,34 %, sedangkan masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memahami bahwa orang-orang tertentu saja yakni orang mampu yang wajib melaksanakan haji masih tinggi yakni 78,66 %.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap ketentuan berhaji, baik dalam hal persyaratan, ilmu manasik dan konsekuensi pelaksanaan syari'at berhaji masih kurang. Padahal yang dimaksud dalam ajaran Islam, ketentuan

berhaji itu disyaratkan bagi orang yang mampu untuk menuju ke derajat takwa disamping aspek kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial.

Sehubungan dengan masih adanya pemahaman masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap kewajiban berhaji belum memahami substansi dari ajaran ibadah haji secara sempurna, pada orang-orang tertentu saja, sehingga memengaruhi pula tingkat kesalehan dan kesejahteraan kaum muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat muslim tentang rukun Islam khususnya kewajiban mengeluarkan zakat harta di Kabupaten Sidenreng Rappang berdampak pula kepada kurangnya pemasukan ke Badan Amil Zakat Kabupaten dan Lembaga Zakat (LAZ) lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga pendistribusiannya kepada kaum muslimin yang kurang mampu (miskin) sangat kurang terutama kepada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup para fakir miskin dan lembaga keagamaan lainnya.

Alquran telah menegaskan tentang kewajiban melaksanakan haji bagi muslim yang memiliki kemampuan baik mental dan fisik maupun materil, begitu pula kewajiban menunaikan zakat bagi muslim yang telah memiliki harta yang cukup (*kadar* dan *h<sup>q</sup>aul*) sesuai dengan ketentuan agama untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakatnya sebagaimana telah ditetapkan kepada delapan golongan.

Dalam hal ini untuk penulis, akan menggambarkan hasil kuesioner pernyataan masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang tentang pelaksanaan satu rukun Islam yakni pelaksanaan haji dan rukun Islam yang lain dalam hal ini mengeluarkan zakat, digambarkan melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel 30**

**ANIMO MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN HAJI DAN ZAKAT HARTA  
PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN SIDRAP**

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Mendahulukan pelaksanaan haji ketimbang mengeluarkan zakat harta	60	40
2.	Antara pelaksanaan haji dan zakat harta dilaksanakan secara bersamaan	65	43,3
3.	Pelaksanaan kedua rukun Islam tersebut dilaksanakan berdasarkan prioritas.	25	16,7
4	Antara keduanya tidak ada kewajiban secara bersamaan	-	0,00
JUMLAH		150	100

**Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Pada tabel 30 di atas 43,3 % responden masih menghendaki antara ketaatan berhaji dan kewajiban mengeluarkan zakat harta dilaksanakan secara bersamaan. Namun disisi lain, kecendrungan responden pun banyak yang menghendaki mendahulukan pelaksanaan haji ketimbang mengeluarkan zakat harta terbukti responden memilih sebanyak 40 %. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan haji masih tinggi dan terbukti sebagaimana data pada tabel 30.

Dalam hukum Islam, antara ajaran haji dan zakat tidak ada kesenjangan karena pada dasarnya kedua ajaran tersebut menghendaki keridhaan Allah swt. semata. Namun karena beberapa faktor yang memengaruhi nampaknya kedua rukun Islam (ketaatan berhaji dan kewajiban berzakat) ini ada kesenjangan pada tataran pelaksanaannya di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, salah satu faktor yang dominan adalah pemahaman



masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap substansi ketaatan berhaji masih kurang.

Dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase yang menjawab mendahulukan kewajiban berhaji ketimbang dengan rukun Islam lainnya masih tinggi 40 %, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran umat Islam di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengeluarkan zakat terbukti jumlah zakat harta yang dikelola oleh pengelola zakat baik BAZ ( Badan Amil Zakat) Kabupaten dan BAZ Kecamatan masih sangat kurang.

### **3. Lemahnya SDM Pengelola Haji / Lembaga Haji**

Faktor ini diduga berpengaruh tingkat profesionalisme dan kemampuan pelaksana, karena suksesnya suatu peraturan perundang-undangan termasuk Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji, sangat ditentukan oleh pegawai/petugas yang melaksanakannya. Di antara prasyarat yang harus dimiliki oleh petugas atau karyawan untuk berhasil dalam menjalankan/menegakkan Undang-undang adalah tingkat pengetahuan dan profesionalitas petugas yang bersangkutan. Oleh karena faktor petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya suatu peraturan. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, tentu ada masalah. Demikian pula apabila aparatnya buruk sedang kualitas peraturannya baik maka akan pula menimbulkan masalah.

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kurang profesionalnya pengelola terhadap tugas-tugasnya sebagai pengelola haji, merupakan salah satu faktor berpengaruh sehingga undang-undang tersebut tidak dapat terlaksana secara

maksimal, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan, pembinaan dan perlindungan pada masyarakat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang terutama pada calon jamaah haji.

Kesimpulan ini ditarik dari komposisi personil pengelola penyelenggaran haji dilihat dari segi pengalaman kerja dan tingkat pendidikannya para pengelola dan Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dapat di gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 31**  
**KETERLIBATAN LANGSUNG PENGELOLA HAJI**  
**DALAM PENYELENGGARAAN HAJI**

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Pernah terlibat	40	26,67
2.	Sering terlibat	15	10
3.	Tidak pernah terlibat	95	63,33
J U M L A H		150	100

**Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Berdasarkan data pada tabel 31 di atas dapat dilihat jawaban responden bahwa sebagian besar pengelola haji menyatakan dirinya tidak cukup memiliki pengalaman dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan haji, sebelum ia diangkat sebagai pengelola haji.

Dari 150 responden diperoleh jawaban bahwa 95 responden (63.33%) yang menyatakan tidak pernah terlibat langsung, 40 responden (26,67%) yang menyatakan pernah 15 responden (10 %) yang menyatakan seringkali.

Dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase yang bahwa dirinya tidak pernah terlibat secara langsung dalam hal pengelolaan haji sebelum

diangkat sebagai pengurus jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan responden yang menjawab bahwa dirinya seringkali atau pernah terlibat secara langsung dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan haji, sebelum diangkat jadi pengelola haji.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata kegiatan-kegiatan yang digambarkan sebagai bentuk penerapan manajemen yang baik sampai saat ini belum dilaksanakan sepenuhnya untuk penerapannya oleh pengelola haji yang disertai tugas untuk melakukan pelayanan dan pembimbingan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008, kenyataan ini diperoleh dari jawaban responden atas berbagai pertanyaan yang diajukan kepada pengelola haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 32**

**KETERLIBATAN PENGELOLA HAJI DALAM HAL PENYUSUNAN  
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN HAJI**

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Pernah	35	23,33
2.	Seringkali	15	10
3.	Tidak pernah	100	66,66
J U M L A H		150	100 %

**Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Berdasarkan data pada tabel 32 di atas dapat dilihat jawaban responden memberi jawaban hampir seluruh responden memberi jawaban tidak pernah terlibat dalam hal penyusunan program penyelenggaraan haji. Dari 150 responden diperoleh jawaban bahwa, 100 responden (66,66 %) menyatakan memberi jawaban tidak pernah terlibat dalam hal

penyusunan program kerja, hanya 35 responden (23,33 %) yang menyatakan pernah dan 15 responden (10 %) yang menyatakan seringkali.

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelola dan penyelenggara haji di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya dan termasuk di kecamatan belum memiliki suatu *planning* yang merupakan keharusan dalam manajemen yang baik.

#### **4. Adanya Sanksi bagi Masyarakat yang Melanggar Ketentuan Berhaji**

Faktor ini berpengaruh karena tegaknya suatu hukum banyak ditentukan oleh aturan-aturan yang terdapat dalam suatu undang-undang yang dapat menjamin tercapainya tujuan dari pada penerapan undang-undang tersebut.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam aturan hukum ini adalah adanya sanksi pidana pada Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 atas pelanggaran pertanggungjawaban dalam pelayanan, pembinaan, dan perlindungan yang dilakukan oleh pengelola haji.

Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya sanksi atas pelanggaran ketentuan berhaji telah terbukti berpengaruh terhadap tidak terlaksananya secara optimal sistem pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap pengelolaan haji terlebih lagi pada pembinaan pasca haji termasuk dalam hal ini pengadaan dana untuk pelayanan, pembinaan dan perbaikan pengelolaan haji.

Pengaruh ini diperoleh dari pernyataan petugas pengelola haji itu sendiri melalui kuisioner yang diedarkan yaitu sebagian besar responden menyatakan adanya sanksi pada Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008. Hal tersebut disebabkan karena undang-

undang tidak menetapkan adanya sanksi hukum tegas yang dapat membuat efek jera bagi pelanggaran terhadap aturan-aturan perhajian yang dapat gambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

**Tabel 33**  
**PENGARUH BERPENGARUHNYA SANKSI PADA**  
**UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TERHADAP**  
**MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak	125	83,33
2.	Ya	25	16,67
JUMLAH		150	100

***Sumber data : Data Primer yang diolah tahun 2010***

Berdasarkan tabel 33 di atas, dapatlah dilihat jawaban responden lebih banyak menganggap sanksi yang terdapat pada Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2009 belum mampu mengurangi animo masyarakat untuk melaksanakan haji termasuk kepercayaan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pengelola haji.

125 responden sebanyak 83,33 % responden yang menyatakan berpendapat bahwa sanksi pidana yang ada pada undang-undang tersebut belum dapat mengurangi keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. 25 responden (16,67 %) yang menyatakan berpengaruh terhadap pengelolaan haji dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang .

Dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang lebih banyak berkeinginan untuk melaksanakan haji walaupun ada aturan sanksi bagi yang melanggar ketentuan berhaji bagi pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang .

Jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidrap lebih banyak tidak terpengaruh terhadap adanya sanksi bagi yang melanggar ketentuan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Meskipun undang-undang telah menetapkan adanya sanksi pidana atas kelalaian pengelola dalam hal penyelenggaraan haji.

Ketika penelitian diarahkan untuk memperoleh data penyebab sehingga sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 belum berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk melaksanakan haji.

Responden lebih banyak menyatakan tidak berpengaruh terhadap adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam hal penerimaan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji Indonesia). Di bawah ini digambarkan sanksi pidana bagi pengelola yang melanggar ketentuan perhajian sebagai berikut :

“...dan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. ( Lima ratus juta rupiah ).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Undang-Undang RI., Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Bab VI Pasal 63 dan 64.

Tabel 34

**HAL-HAL YANG HARUS DISEMPURNAKAN PADA UNDANG-UNDANG RI.  
NOMOR 13 TAHUN 2008 DALAM PENYELENGGARAAN HAJI  
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Besarnya sanksi pidana	25	16,7
2.	Ketentuan ganti rugi pada Calon Haji	40	26,7
3.	Sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan haji	85	56,6
JUMLAH		150	100

**Sumber data : Data Primer yang diolah tahun 2010**

Berdasarkan data pada tabel 34 di atas dapat dilihat jawaban responden lebih banyak menyatakan bahwa hal-hal yang harus disempurnakan pada Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 agar calon haji lebih bertambah kepercayaannya kepada pengelola haji, adalah adanya sanksi pidana atas pelanggaran yang berkaitan dengan pelayanan, pertanggungjawaban dan pembinaan haji.

Dari 150 responden hanya 25 responden (16,67%) yang menyatakan aturan sanksi pidana pada Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 berpengaruh terhadap bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan haji (*Lihat tabel 33*). Pada tabel 34 menjelaskan 85 responden sebanyak 56,6 % menyatakan seharusnya Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 disempurnakan dengan adanya sanksi pidana berat atas pelanggaran ketentuan berhaji. 40 responden sebanyak 26,7 % menyatakan adanya tuntutan ganti rugi kepada pengelola bila terdapat pelanggaran ketentuan undang-undang mengenai perhajian

oleh pengelola, dan 25 responden sebanyak 16,7 % responden menghendaki adanya penambahan besarnya sanksi pidana kepada pengelola haji agar terdapat efek jera kepada pelanggarnya.

Dari hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak mengharapkan agar Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 dilengkapi, terhadap pelanggaran tentang sanksi pidana bagi yang melanggar aturan perhajian.

Dengan melihat analisa yang mengacu kepada kegiatan antara tabel 33 dan 34 di atas, jelas bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesenjangan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang, belum sepenuhnya dapat melaksanakan tujuan Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 yang tentunya juga dapat meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap calon jamaah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui peningkatan pengelolaan dan pemberdayaan pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah faktor ketentuan sanksi pidana yang belum memberikan efek jera bagi pengelola yang melanggar ketentuan berhaji.

Walaupun data ini merupakan pandangan masyarakat terhadap keberadaan penyelenggaraan haji dan tidak kepada pengelola haji itu sendiri, namun penulis menyadari dan berkeyakinan bahwa terlaksananya sistem pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji berdasarkan Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 banyak ditentukan oleh persepsi masyarakat, Bagaimana pun besarnya upaya yang dilakukan oleh pengelola haji tersebut, tetap tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat, maka akan sulit terealisasi, karena pelaksanaan Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji termasuk masyarakat itu sendiri.



Pertimbangan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi senantiasa dikembalikan pada paling minimal 4 (empat) faktor salah satu diantaranya; adalah warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut sedangkan faktor lainnya adalah:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan.
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum.<sup>65</sup>

Ketiga hal di atas sangat berpengaruh, namun salah satu yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah faktor kredibilitas petugas yang menegakkan aturan, kalau hal itu sudah dilakukan maka faktor lainnya pun ikut mendukung.

## **5. Mendapat Gelar/Titel “Haji/Hajjah”**

Setelah melakukan ibadah haji, salah satu fenomena di tengah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pemakaian gelar “Haji/Hajjah” di depan nama yang bersangkutan.

Tampaknya persepsi umat terhadap ibadah haji amat berlebihan, padahal tidak ada dasarnya sama sekali untuk memandang ibadah ini melebihi jenis ibadah lain. Urutan kelima bagi ibadah haji telah menimbulkan persepsi bahwa ibadah haji menjadi penyempurna dari segala jenis ibadah lain. Akibatnya seorang muslim yang telah menunaikan ibadah haji dianggap telah sempurna keislamannya. Pandangan ini tentu amat bersifat kuantitatif, dan belum tentu didasari dengan unsur kualitasnya. Ketika jumlah

---

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 57.

orang yang menjadi haji secara kuantitatif amat meningkat, dan orang kota pun telah merasa mapan dengan julukan “haji” tampaknya terjadi semacam inflasi. Masyarakat tidak lagi memandang atribut haji sebagai tolok ukur moral, masyarakat makin permisif, haji tinggal sebuah atribut tanpa kualitas istimewa.

Tabel berikut ini menunjukkan keinginan responden untuk memakai gelar “Haji/Hajjah”

**Tabel 35**  
**AKANKAH MEMAKAI GELAR HAJI (H) HAJJAH (HJ) SETELAH BERHAJI**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ya	115	76,66
2	Tidak	25	16,68
3	Kadang memakai kadang tidak	10	6,66
Jumlah		150	100

**Sumber data: Data Primer yang diolah tahun 2010**

Tabel 35 di atas menunjukkan adanya keinginan untuk memakai gelar “Haji/Hajjah”, sekitar 76,66 % responden menginginkan memakai gelar Haji/Hajjah” dalam kesehariannya, hanya 16,68 % yang tidak ingin memakai gelar “Haji/Hajjah”. Sebagian lagi menunjukkan kadang memakai kadang tidak sebanyak 6,66 %. Data ini menunjukkan masih kuatnya *image* di tengah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang akan pentingnya memakai gelar “Haji/Hajjah”, hanya intensitasnya saja yang berbeda, ada yang ingin memakai secara total, ada yang ingin kadang-kadang memakai, kadang-kadang tidak, dan ada yang memakai gelar “Haji/Hajjah” disesuaikan dengan kondisi.

Data ini juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, gelar “Haji/Hajjah” merupakan suatu gelar yang dianggap penting diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji.

Mengingat pentingnya gelar “Haji/Hajjah” diberikan kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, tabel berikut menunjukkan sejauhmana tingkat pentingnya gelar dan artinya gelar tersebut dalam kehidupan seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji.

**Tabel 36**

**JIKA SETELAH MELAKSANAKAN HAJI KEMUDIAN ADA ORANG YANG  
TIDAK MENYEBUT GELAR HAJINYA, APAKAH MENYAHUT ?**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ya	125	83,33
2	Tidak	25	16,67
Jumlah		150	100

**Sumber data: Data Primer yang diolah tahun 2010**

Tabel 36 di atas memberikan gambaran tingkat ketersinggungan seorang yang sudah berhaji, tetapi tidak disebutkan gelar “Haji/Hajjah” di depan namanya ketika dipanggil atau diundang. 83,33 % tetap akan memenuhi panggilan/undangan walaupun tidak disebut gelar “Haji/Hajjah” di depan namanya. Sebanyak 16,67 % yang menyatakan tidak akan memenuhi panggilan itu jika tidak disebut gelar “Haji/Hajjah” di depan namanya.

Data ini menunjukkan betapa pentingnya gelar “Haji/Hajjah” bagi seorang yang telah menunaikan ibadah haji di kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini juga sejalan dengan *image* yang berkembang di tengah masyarakat tentang pentingnya pemakaian gelar “Haji/Hajjah” bagi orang yang telah menunaikan ibadah haji.

Jika hal ini dianalisa tentang perlu tidaknya pemakaian gelar “Haji/Hajjah” di depan nama seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, maka tabel berikut akan menggambarkan seberapa pentingnya gelar itu bagi seseorang.

**Tabel 37**

**PERLU TIDAKNYA MEMBERIKAN GELAR HAJI KEPADA ORANG  
YANG SUDAH MELAKSANAKAN IBADAH HAJI**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat perlu	20	13,33
2	Perlu	100	66,67
3	Kurang perlu	10	6,67
4	Tidak perlu	20	13,33
Jumlah		150	100

**Sumber data : Data Primer yang diolah tahun 2010**

Tabel 37 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap perlu untuk memberikan gelar “Haji/Hajjah” kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, bahkan 13,33 % responden menganggap bahwa pemakaian gelar “Haji/Hajjah” itu sangat perlu, hanya sebagian kecil yang kurang perlu atau tidak perlu.

Data menunjukkan begitu pentingnya pemakaian gelar "Haji/Hajjah" pada orang yang telah melaksanakan ibadah haji pada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Data ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa persoalan haji sangat terkait dengan atribut yang akan dipakai jika seseorang telah melaksanakan ibadah haji. Di antara atribut itu adalah pemakaian gelar "Haji/Hajjah" dan pemakaian kopiah putih sebagai tanda bahwa orang tersebut telah melaksanakan haji.

Data ini juga menunjukkan bahwa ibadah haji bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sangat terkait erat dengan persoalan status sosial dan simbol-simbol kehajian, ditemukan adanya penghormatan yang lebih jika telah memakai kopiah haji dan menyandar gelar "Haji/Hajjah". Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, masalah ibadah haji sangat terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan dalam makna simbolik. Walaupun demikian, keinginan untuk mencapai haji *mabr r* tetap menjadi sebuah prioritas utama dari setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang keinginan untuk mencapai haji *mabr r*.

**Tabel 38**  
**KEINGINAN UNTUK MENDAPATKAN "HAJI MABR R"**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ya	150	100
2	Tidak	0	0
Jumlah		150	100

**Sumber data : Data Primer yang diolah tahun 2010**

100 % responden menyatakan berkeinginan untuk memperoleh haji *mabr r*. Keinginan ini adalah sesuatu yang sangat wajar, karena ukuran keberhasilan haji seseorang ditentukan oleh pencapaian haji *mabr r* tersebut. Secara teoritis memang ditemukan bahwa tujuan pelaksanaan ibadah haji itu adalah untuk mencapai haji *mabr r*, dan ibadah haji yang diterima oleh Allah swt. hanyalah haji *mabr r*.

Data ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa berkeinginan untuk memperoleh haji *mabr r*. Karena dianggap bahwa dengan haji *mabr r* akan mendapat balasan yang sangat besar dari Allah swt. baik balasan itu diterima di dunia maupun di akhirat kelak. Walaupun keinginan haji *mabr r* menjadi cita-cita semua orang, tetapi beragam bentuk harapan atau hasil yang ingin diperoleh dari haji *mabr r* itu. Berikut ini adalah tentang keinginan yang akan diperoleh setelah mencapai haji *mabr r*.

**Tabel 39**

**HARAPAN SETELAH MENCAPAI HAJI MABR R**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Mendapat ketenangan hidup di dunia	35	23,33
2	Mendapat balasan surga	65	43,33
3	Dihargai di tengah masyarakat	25	16,67
4	Mendapat gelar haji	25	16,67
Jumlah		150	100

**Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Tabel 39 di atas menunjukkan harapan responden setelah mencapai haji *mabr r*, atau hal-hal yang diinginkan dari pencapaian haji *mabr r*. 23,33 % responden menyatakan bahwa yang akan dicapai ketika memperoleh haji *mabr r* adalah mendapatkan ketenangan hidup di dunia. 43,33 % responden menyatakan bahwa hal yang diperoleh dari pencapaian haji *mabr r* adalah mendapat balasan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah swt. yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. 16,67 % responden menyatakan bahwa hasil pencapaian haji *mabr r* adalah mendapat gelar haji yang sebenarnya.

Data di atas menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan ibadah haji dengan orientasi dunia, yaitu memperoleh ketenangan hidup di dunia. Olehnya itu, ditemukan dalam kenyataan ketika pelaksanaan haji di Mekkah, hampir seluruh jamaah haji memanjatkan doa yang bernada orientasi untuk urusan dunia semata, seperti dipermudah rezeki, diperlancar dagangan dan urusannya di dunia serta meminta keutuhan rumah tangga dan keturunan.

Data ini memberikan bukti yang kuat besarnya pengaruh motivasi berhaji terhadap pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu sekitar 43,33 % responden yang menginginkan balasan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah swt. hal ini juga membuktikan bahwa hadis Rasulullah saw. menyatakan bahwa haji *mabr r* balasannya adalah surga, sudah menjadi sebuah tujuan dalam pelaksanaan ibadah haji.

Walaupun semua orang ingin melaksanakan haji dan memperoleh haji *mabr r* yang balasannya adalah surga, akan tetapi ketika kemampuan dana tidak mencukupi untuk seluruh anggota keluarga, maka tentunya akan dilakukan skala prioritas tentang siapa yang

harus didahulukan berhaji. Tabel berikut ini menggambarkan persepsi masyarakat tentang siapa yang diprioritaskan terlebih dahulu melaksanakan ibadah haji.

**Tabel 40**  
**KATEGORI YANG DIDAHULUKAN BERHAJI KETIKA MAMPU**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Isteri / perempuan	60	40
2	Suami / Laki-laki	40	26,66
3	Anak	10	6,67
4	Orang tua	40	26,67
5	Tidak tahu	0	0
Jumlah		150	100

**Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Tabel 40 di atas menunjukkan bahwa 40 % responden memprioritaskan isteri/perempuan untuk melaksanakan ibadah haji dibanding dengan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa tingginya keinginan masyarakat melaksanakan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang dari kaum perempuan dan hal tersebut juga dipengaruhi beberapa hal antara lain; tradisi/budaya, dan adanya penghargaan masyarakat kepada mereka yang sudah bertitel “hajji/hajjah” terutama pada acara-acara hajatan seperti pengantin, hal ini menjadi salah satu sebab lebih mendahulukan isteri ketimbang yang lainnya, kemudian menyusul prioritas kedua adalah suami/laki-laki dan orang tua sebanyak 26,67 % yang ada dalam keluarga.

Data ini memberikan gambaran bahwa keinginan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lebih dahulu menghajikan isterinya sangat tinggi, kemudian



menyusul suami dan orang tua. Hal ini senada dengan data pada uraian sebelumnya tentang kelompok usia yang menunaikan ibadah haji yang didominasi oleh kelompok perempuan dan orang yang sudah berusia lanjut.

Data ini juga menggambarkan bahwa responden lebih memprioritaskan suami/laki-laki untuk berhaji dan orang tua. Hal ini kelihatannya berbeda dengan data pada uraian sebelumnya tentang kelompok jamaah calon haji Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009/2010 menurut kategori jenis kelamin, data ini menunjukkan adanya dominasi perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2009/2010.

Hal disebabkan karena perempuan yang menjalankan ibadah haji tahun 2009/2010 juga dikategorikan sebagai orang tua dibanding sebagai perempuan. Jadi, kesan yang ditangkap adalah bahwa banyaknya perempuan menunaikan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009/2010 adalah karena perempuan itu sebagai orang tua yang harus lebih diprioritaskan melaksanakan ibadah haji.

Data di atas menunjukkan adanya beberapa pengaruh terhadap ketaatan berhaji masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, nampak dengan jelas adanya beberapa faktor yang kuat yang mempengaruhi pelaksanaan berhaji. Untuk mewujudkan semua itu, jamaah calon haji membutuhkan pengetahuan tentang manasik haji. Dalam Islam, ibadah haji dipandang sebagai ibadah yang penting.

Salah satu urgensi ibadah haji adalah penegasan Nabi Muhammad saw. bahwasanya haji *mabrur* tidak ada pahala yang pantas untuknya kecuali surga. Khususnya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk ketinggian ibadah haji diwujudkan

dengan pemberian kehormatan “Bapak Haji” dan berhak menyandang kopiah putih. Agaknya ibadah haji jika dibandingkan dengan ibadah lainnya tidak terletak pada amalan manasiknya saja, melainkan terletak pada makna dan hikmah yang terkandung di dalam manasiknya. Tabel berikut ini menunjukkan pentingnya bimbingan ibadah haji melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

**Tabel 41**

**PENTING TIDAKNYA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat penting	60	40,0
2	Penting	90	60,0
3	Kurang penting	0	0
4	Tidak penting	0	0
5	Tidak tahu	0	0
Jumlah		150	100

**Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Tabel ini menunjukkan bahwa 90,0 % responden menganggap pentingnya adanya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan 60,0 % menganggap sangat penting adanya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Hal ini menunjukkan adanya anggapan masyarakat yang menilai KBIH di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi calon haji di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Data ini juga memberikan gambaran akan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang akan bimbingan sebelum menunaikan ibadah haji. Dalam pandangan

masyarakat di daerah ini KBIH dianggap sebagai sebuah lembaga yang dapat memberikan bimbingan dan pentingnya pengetahuan terhadap ajaran Islam bagi seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa butuh bimbingan dan pengetahuan tentang haji, baik sebelum haji maupun sesudah pelaksanaan ibadah haji.

Tabel berikut ini akan menguraikan cara mendapat dana/uang untuk membayar Biaya bimbingan manasik pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

**Tabel 42**  
**CARA MENDAPATKAN UANG UNTUK MEMBAYAR**  
**BIAYA BIMBINGAN MANASIK PADA KBIH**

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Menabung	70	46,67
2	Meminjam uang/kredit	20	13,33
3	Dana talangan	-	0
4	Menjual barang-barang/tanah dll	35	23,33
5	Arisan	25	16,67
Jumlah		150	100

**Sumber data: Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Tabel 42 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 46,67 % responden menyatakan menabung untuk mampu membayar uang bimbingan pada KBIH, 13,33 % menyatakan meminjam atau kredit untuk pembayaran uang bimbingan pada KBIH, 23,33 % menyatakan menjual barang-barang/tanah dan lain-lain untuk membayar uang bimbingan KBIH, dan 16,67 % responden menyatakan mengikuti arisan untuk memperoleh pembayaran uang bimbingan pada KBIH.

Data ini memberikan gambaran bermacam-macam cara seseorang untuk memenuhi pembayaran bimbingan manasik pada KBIH, secara umum responden memberikan jawaban menabung untuk pemenuhan pembayaran biaya bimbingan manasik pada KBIH, yang tentunya menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya, dan juga terjadi kemungkinan melakukan penghematan biaya hidup supaya dapat menabung demi pelaksanaan ibadah haji.

Sebagian lagi mencari jalan dengan cara meminjam uang untuk berhaji, yang menanti setelah melaksanakan haji atau pulang ke tanah air menyicil kredit atau pinjaman tersebut. Sebagian lagi berupaya mencukupkan dana BPIHnya dengan meminta dana talangan dari penyelenggara haji, yang memang biasanya menyediakan dana talangan, yang pada akhirnya juga menjadi beban bagi yang bersangkutan setelah pulang melaksanakan haji.

Fenomena yang lain adalah banyaknya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjual asset keluarga atau barang-barang yang dimilikinya demi untuk menunaikan ibadah haji, dan untuk kategori ini tidak kecil jumlahnya, bahkan menempati urutan kedua setelah dengan cara menabung. Sebagian lagi yang lain berhaji dan membayar BPIH dengan jalan mengikuti arisan haji.

Cara yang dilakukan oleh jamaah calon haji Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memenuhi pembayaran BPIH ini menunjukkan tingginya semangat untuk melaksanakan ibadah haji, yang walaupun kelihatannya beberapa cara akan mempersulit kehidupannya setelah kembali melaksanakan ibadah haji di Mekkah. Dengan melihat bahwa bimbingan

haji sebagai suatu proses untuk memahami ajaran Islam, ini dimungkinkan untuk memberikan pemahaman kepada faktor-faktor di luar yang mempengaruhinya, terutama mengenali nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat secara umum.

Khusus dalam kaitannya dengan keberadaan KBIH di Kabupaten Sidenreng Rappang yang diprakarsai pembentukannya oleh masyarakat dan dibina oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan sebagian pengurusnya ada juga dari pihak pegawai/karyawan pemerintah, sementara masyarakat memandang KBIH sebagai institusi keagamaan semata, lebih banyak diyakini sebagai salah satu wujud ibadah kepada Allah swt. sekaligus sebagai profesi hidup. Karena berhubungan dengan peningkatan bimbingan calon jamaah haji maka perlu adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya. Untuk membuktikan apakah dugaan tersebut berpengaruh atau tidak, penulis menggunakan hasil angket yang diedarkan yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 43**  
**PANDANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDENRENG RAPANG**  
**TENTANG KEDUDUKAN KBIH**

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Lembaga Keagamaan	20	13,33
2.	Lembaga Sosial	30	20
3.	Lembaga Keagamaan dan sosial	100	66,67
J U M L A H		150	100

***Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010***

Berdasarkan data pada tabel di atas dapatlah dilihat jawaban responden bahwa hampir seluruh responden memberi jawaban menganggap KBIH tersebut sebagai intitusi

keagamaan juga berorientasi kepada usaha sosial dan sangat sedikit yang berpandangan bahwa KBHI sebagai institusi keagamaan atau institusi sosial saja.

Dari seratus lima puluh responden diperoleh jawaban dengan hasil 100 responden (66,67 %) yang berpendapat bahwa KBIH tersebut adalah istitusi keagamaan dan usaha sosial, 30 responden (20 %) yang berpandangan KBIH sebagai institusi sosial, sedangkan yang berpandangan sebagai institusi keagamaan saja sebanyak 20 responden (13,33).

Dari jawaban tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidrap yang berada di setiap kecamatan masih banyak menganggap bahwa keberadaan KBIH disamping sebagai institusi keagamaan yang memberikan bimbingan ilmu manasik kepada calon jamaah haji dan juga sebagai usaha sosial.

**Tabel 44**  
**Tempat Melakukan Bimbingan Pra Manasik Haji yang Dianggap Tepat**  
**Oleh Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sehubungan**  
**Keberadaan KBIH sebagai Institusi Keagamaan**

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Ulama sebagai pengelola	35	23,33
2.	Melayani/membantu proses pendaftaran Calon haji	65	43,34
3.	Membimbing mulai dari daerah sampai ke Mekkah	50	33,33
J U M L A H		150	100 %

**Sumber data : Data Primer yang Diolah tahun 2010**

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden sebanyak 65 responden (43,34 %) memilih KBIH untuk ditempati menerima bimbingan pra manasik haji karena dibina oleh para ulama. Sebanyak 35 responden (23,33 %) memberi jawaban,

bahwa KBIH sebagai intitusi keagamaan dan usaha sosial melayani/membantu proses pendaftaran calon jamaah haji hingga selesai, sebanyak 50 responden (33,33) memberi jawaban bahwa KBIH lebih tepat untuk ditempati belajar dan mendapat bimbingan ilmu manasik haji.

Dari 150 responden mewakili masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang menganggap bahwa keberadaan KBIH itu sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan bimbingan ibadah haji, seyogyanya dalam pelaksanaan bimbingan kepada calon jamaah haji harus berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, yang pada akhirnya mempermudah masyarakat muslim melaksanakan ibadah hajinya.

Jika dianalisis tabel 43 dikaitkan dengan tabel 44 dapatlah disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan KBIH di Kabupaten Sidenreng Rappang masih memiliki peranan penting dalam memberikan bimbingan manasik kepada calon jamaah haji sekaligus membantu masyarakat mulai pada saat pendaftaran di tanah air sampai di Mekkah.

Hasil analisis didukung oleh hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat muslim yang sudah memiliki kemampuan menunaikan ibadah haji tahun 2009. Menyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sudah tertarik untuk menerima bimbingan melalui lembaga-lembaga KBIH yang dibentuk oleh masyarakat karena disamping dibantu pada saat mendaftar sebagai calon jamaah haji tahun 2009/2010 juga dilayani dalam bentuk bimbingan dan diajari berbagai macam ilmu manasik dan

agama Islam yang pada akhirnya akan mempermudah dalam melaksanakan ibadah nantinya ketika berada di Mekkah.

Keberadaan KBIH dalam melakukan bimbingan memiliki sarana/media yang lengkap tentang ibadah haji termasuk penguasaan tentang kondisi dan budaya Arab Saudi, apalagi didukung oleh kepercayaan bahwa KBIH tersebut adalah dikelola oleh ulama yang pengetahuan agamanya tidak diragukan lagi yang tahu tentang masalah ibadah, dan ibadah haji ini seharusnya dijalankan secara pribadi-pribadi serta dibimbing tenaga yang profesional.<sup>66</sup>

Dari uraian di atas dapatlah dinyatakan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya masyarakat muslim yang memandang KBIH bukan hanya semata-mata sebatas institusi keagamaan (masalah ibadah semata) turut membantu calon jamaah mulai dari proses pendaftaran haji ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sampai kepada bimbingan ibadah di Mekkah.

Keadaan ini sekaligus membuktikan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Sidrap terhadap KBIH turut berpengaruh terhadap terlaksananya Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, peraturan perundang-undangan lebih menghendaki adanya pelayanan yang optimal, bimbingan yang efektif, dan sekaligus perlindungan kepada calon jamaah haji dapat terwujud, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana tertib, aman dan nyaman.

---

<sup>66</sup>Ali Yafid, Am.Pd, Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, "wawancara" di Pangkajene pada tanggal 30 Januari 2010



### C. Upaya-upaya Strategi yang dilakukan Penyelenggara haji di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Meningkatkan Pemahaman Ketaatan Berhaji

#### 1. Bimbingan Haji; Menuju Haji *Mabr r*

Salah satu rukun Islam adalah haji. Ketentuan syari'ah adalah hanya orang yang tergolong mampu secara fisik, sosial dan ekonomi serta dipanggil oleh Allah swt. berhaji harus dilakukan sesuai dengan syari'ah dan sempurna "*wa atimmul hajja wal ummrata lilllah*" (sempurnakanlah haji dan ummrahmu karena Allah swt.) *al-Baqarah*:196. Semua orang yang berhaji ingin memperoleh haji *mabr r*<sup>67</sup>. Keyakinan mereka sesuai dengan hadis shahih Bukhari-Muslim bahwa Rasulullah bersabda "*Tidak ada balasan bagi haji mabr r kecuali surga*". Dengan kata lain, surgalah tempat yang pantas bagi orang yang hajinya *mabr r*. Perkembangan haji mengalami peningkatan sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 – 2000. Krisis ekonomi pada tahun 1997 tidak berdampak pada penurunan jamaah haji.<sup>68</sup>

Perkembangan jamaah haji itu mengilhami para *kiai* untuk mengajarkan cara berhaji yang sesuai dengan syar'i. Para *kiai* sering melihat praktik berhaji sebagian umat Islam belum sesuai dengan syari'ah. Kesalahan umat melaksanakan syariah haji, maka *kiai*

<sup>67</sup>*Mabr r* berasal dari bahasa Arab yang artinya mendapatkan kebaikan atau menjadi baik. *Mabr r* akar katanya "*barra*" artinya berbuat baik atau patuh. Dari kata *barra* ini diperoleh kata *birrun*, *al-birru* yang artinya kebaikan. Haji *mabr r* adalah seseorang yang telah mendapatkan kebaikan (*birrun*) yang diterima oleh Allah Swt. Seseorang yang mendapatkan kebaikan atau haji yang pelakunya menjadi baik terutama meningkatnya komitmen sosial. Lihat : H. Abd Latif Bustami, *Kiai Politik Politik Kiai* (Malang: Pustaka Bayan, 2009), h. 135.

<sup>68</sup>Pada tahun 1998 mengalami peningkatan dari 195 ribu menjadi 201.910 jamaah dengan biaya setiap jamaah sebesar Rp. 8.805.000.-, pada tahun 1999-2000, jamaah haji mengalami penurunan setelah biaya ibadah haji dinaikkan menjadi Rp. 18.168.000.-. pada tahun 2001 terjadi peningkatan jumlah jamaah haji dengan biaya Rp. 19 juta. Tahun 2002, jumlah jamaah haji sama dengan sebelumnya dan terjadi peningkatan biayanya menjadi Rp. 22.181.700.-. Tahun 2003 mengalami peningkatan jumlah jamaah karena biaya haji turun menjadi Rp. 22 juta. Lihtat: *ibid*. h. 136.

ikut menanggung dosanya karena orang yang mengetahui syari'ah harus mengajarkan.<sup>69</sup> Sebagai contoh kecil adalah kewajiban haji melakukan *tawaf*.<sup>70</sup> dan orang *jumrah* (*ula*, *wustho*, *aqabah*) dan dalam praktiknya tidak melempar melainkan meletakkan kerikil karena jaraknya sangat dengan tonggak pelemparan (*jam rah*). Hal yang lain adalah hukum *m bit* dan pelaksanaan pembayaran dam (kambing, unta).

Dengan sendirinya dibutuhkan pendampingan berhaji oleh para *kiai*. *Kiai* oleh Kementerian Agama dilibatkan sebagai Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIH). Penentuan *kiai* itu melalui proses seleksi yang sifatnya cenderung formalitas. Biaya sebagian para *kiai* yang dilibatkan dalam TPIHD itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, maka diizinkan diselenggarakan haji oleh pihak swasta (ONH Plus), yaitu penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan kelompok bimbingan Ibadah haji. KBIH bermunculan di beberapa wilayah. Bahkan ada organisasi asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (AMPUH), Serikat Penyelenggara Haji dan Umrah (SEPUH), dan Asosiasi Pengusaha Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (AMPPUH).<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Hasil evaluasi haji tahun 2007 adalah belum optimalnya penyuluhan haji dan belum diberdayakannya KUA dalam proses penyuluhan haji dan pembinaan haji dan masih terdapat KBIH yang melakukan kegiatan di luar porsi bimbingan terjadinya pemungutan biaya bimbingan tidak proporsional. Latar belakang jamaah haji Indonesia sebagian besar berasal dari *tahfidiyah*, pendidikannya rendah dan pemahaman tentang ibadah haji belum mendalam. KBIH berpartisipasi dalam bimbingan dengan mewajibkan peserta itu untuk membayar dengan biaya tertentu, berkisar antara Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 2 juta per orang (Depag Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2008) Lihat. *Ibid.*, h. 136.

<sup>70</sup>Salah satu kewajiban haji, dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran di mulai garis diagonal hajar aswad dan berhenti di garis diagonal tersebut. Setiap selesai mengelilingi satu putaran menengadahkan telapak tangan ke *hajar aswad* sebagai pengganti mencium langsung.

<sup>71</sup>Pada tahun 2004 terdapat sekitar 120 biro haji. Pemerintah telah mencabut izin dari 10 perusahaan PIHK pada tahun 2002, 12 perusahaan pada 2003. Para *kiai* selalu menyatakan harus menerima dengan sabar

KBIH hanya terbatas melakukan bimbingan dan tidak boleh mengambil *living cost* dan pegawai Kementerian Agama dilarang menjadi pengurus KBIH.<sup>72</sup>

KBIH seluruh Indonesia berjumlah 1.879 tersebut di 33 Propinsi. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah bahwa bimbingan itu berlangsung sejak mulai pendaftaran sampai dengan kembalinya ke tanah air. Biaya ONH sesuai Keputusan Presiden Nomor 45/2003 terinci dalam tiga kategori, yaitu US\$ 2.575 (zona I), US \$ 2.675 (zona 2) dan US\$ 2.775 (zona 3) dengan kurs dollar AS sebesar Rp. 8.500,- Di samping itu setiap jamaah dikenakan biaya operasional dan administrasi perbankan sebesar Rp. 967.500,- sedangkan biaya ONH Khusus yaitu Rp. 38 juta (US\$ 4.500).<sup>73</sup>

Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), sebelum dikeluarkan Undang-undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 dikenal dengan ONH (Ongkos Naik Haji). Besarnya BPIH sangat bervariasi setiap tahunnya. Naik atau turunnya BPIH sangat ditentukan oleh fluktuasi harga biaya pada setiap komponen yang harus ditanggung langsung (*direct cost*) dalam proses penyelenggaraan haji itu sendiri, seperti biaya angkutan, pemondokan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain BPIH pada dasarnya ditentukan oleh kondisi pasar.

---

segala pelanggaran karena khawatir merusak pahala haji. Koneksi itu dimanfaatkan oleh penyelenggara untuk melakukan manipulasi. Pada bulan Juli 2005 telah ditahan Dirjen Binmas Islam dan Penyelenggara Haji dan Mantan Menteri Agama di Mabes Polri. Lihat: *ibid*.

<sup>72</sup>Pegawai Kementerian Agama memang tidak mengelola KBIH tetapi dengan kewenangannya mereka bisa mengatur sehingga terjadi praktik 'terima kasih dengan pemberian uang dan barang' (Tempo 23-29 Februari 2004). KBIH dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 374 A Tahun 1995 dan KMA Nomor 408 Tahun 1996 tentang KBIH. KBIH adalah organisasi, yayasan, majelis taklim atau lembaga keagamaan Islam sejenis yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji. KMA Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah. KBIH adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan haji.

<sup>73</sup>Dokumentasi LPJ Tahunan, Tahun 2008, Laporan Akhir Tahun Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008.

Kebijakan tabungan haji sebagai salah satu upaya untuk mempermudah dan memperlancar kepastian pendaftaran haji yang pada kenyataannya justru dijadikan salah satu upaya untuk menarik jumlah nasabah bagi pihak bank. Kondisi itu menyebabkan para nasabah yang telah terdaftar pada saat ONH<sup>74</sup> diumumkan secara resmi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tidak mampu melunasinya. Informasi batas terakhir sering tidak diketahui masyarakat pedesaan sehingga mereka dinyatakan tidak mampu melunasi BPHI dan gagal berangkat. Dengan demikian, jamaah haji cadangan ditetapkan sebagai jamaah haji sesuai dengan urutan dan ditenggarai petugas pendaftaran berkolusi.

Bank penerima setoran haji menerapkan kebijakan, yaitu sisa pelunasan ONH disesuaikan dengan kurs dollar saat itu, tabungan haji tidak dikenakan bunga<sup>75</sup>, dan biaya administrasi bank sebesar Rp. 115 ribu. Data pendaftar calon haji Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 1431 H./ 2009 M. yang berangkat dianalisis dari bank penerima setoran ONH didominasi oleh bank pemerintah.

Jumlah jamaah haji terdiri atas 45 kelompok, yaitu tergabung ke KBIH sebanyak 2.028 orang, sedangkan yang non KBIH sebanyak 630 orang. Jumlah KBIH dan jumlah jamaah KBIH dan jumlah calon jamaah haji yang tergabung dalam KBIH terdaftar di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

---

<sup>74</sup>Ongkos Naik Haji cenderung berdimensi ekonomi, sedangkan BPIH dinyatakan secara formal untuk ibadah haji.

<sup>75</sup>Bank BNI tidak menerapkan bunga untuk tabungan haji, Bank Mandiri memberikan tiga pilihan (bunga, tanpa bunga, dan bagi hasil), dan Bank Muamalat menerapkan sistem bagi hasil. Kondisi itu berbeda dengan deposito, di mana pihak Bank mengeluarkan bunga sesuai dengan jumlah uang yang dideposito. Bank Mandiri mengembangkan Komisi Penghimpun Dana Biaya Haji dengan ketentuan memberikan komisi sebesar Rp. 125 ribu per calon haji kepada yayasan, perorangan.

**Tabel 45**  
**JUMLAH KBIH DAN JUMLAH CALON JAMAAH HAJI YANG DIBIMBING**  
**PADA TAHUN 2008/2009**

No.	Nama-nama KBIH	Jumlah Jamaah
1.	KBIH al-Irsyad	135 Orang (3 Kelompok)
2.	KBIH Amanah Tawakkal	225 Orang (5 Kelompok)
3.	KBIH Ash-Shafah	450 Orang (10 Kelompok)
4.	KBIH An-Nur Group	225 Orang (5 Kelompok)
5.	KBIH Armina	180 Orang (4 Kelompok)
6.	KBIH Tawakkal	270 Orang (6 Kelompok)
7.	KBIH Ar-Raodatul Jannah	135 Orang (3 Kolompok)
8.	KBIH Annur Hikmah	180 Orang (4 Kelompok)
9.	KBIH DDI Sidrap	225 Orang (5 Kelompok)
J U M L A H		2.028. Orang ( 45 Kelompok)

*Sumber data : Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang 2008/2009*

KBIH al-Irsyad berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Ma'had DDI Pangkajene Sidrap. KBIH itu ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Kd. 21.16/III/Hj.02/HJ.2437/2010.

Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/215/Tahun 2009, tanggal 9 Oktober 2009 tentang biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah tahun 2009 sebesar Rp. 72.000.- per calon jamaah dan dibebankan dalam anggaran BPIH tahun 2009. BPIH itu terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 14.000, belanja barang sejumlah Rp. 20.000.-, belanja perjalanan sebesar Rp. 2.500.- biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 2.500.-, pembinaan jamaah haji dan pelatihan ketua rombongan dan ketua regu sebesar

Rp. 26.600.00., dan proses penyelesaian paspor haji Rp. 6.400., Penggunaan BPIH itu tergantung Kantor Wilayah Kementerian Agama masing-masing Propinsi. Bantuan operasional penyelenggara Haji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Haji Nomor: D/334 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2009. Untuk Biaya Penyelenggaraan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2008/2009 sejumlah 250 jamaah haji dengan anggaran sebesar Rp. 385.265.000.-, yang digunakan untuk kegiatan:

1. Sosialisasi Sistem Pendaftaran Haji	Rp. 150.000.000.-
2. Pembinaan Manasik Calon Haji	Rp. 32.000.000.-
3. Penataaan Tugas-tugas Karu dan Karom	Rp. 34.000.000.-
4. Rakor dengan KBIH, KUA dan Dinas Terkait	Rp. 80.000.000.-
5. Konsultasi dan Pelaporan	Rp. 3.000.000.-
6. Penyelesaian paspor	Rp. 23.000.000.-
7. Pengadaan ATK	Rp. 5.825.000.-
8. Tenaga Musiman (4 orang)	Rp. 7.500.000.-
9. Biaya operasional Pemberangkatan dan Pemulangan	Rp. 26.500.000.-
10. Rapat Evaluasi Penyelenggara Haji	Rp. 12.500.000.-
11. Biaya tak terduga ( Barcer )	Rp. 10.000.000.-
Dan keseluruhan yang dikeluarkan adalah	Rp. 385.265.000.- <sup>76</sup>

Pada tahun 2009 secara nasional diberangkatkan jamaah haji ke Saudi Arabiah sebanyak 210.000.- dengan rincian : jamaah haji biasa (189.000) jamaah haji ONH plus (21.000), dan petugas penyelenggara haji sebanyak 3.000. permasalahan yang dihadapi selalu menjadi klasik dan cenderung belum ada peningkatan pelayanan yang sebanding

<sup>76</sup>Jawaban LPJ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rapang tentang Biaya Haji Tahun 2009 terhadap pandangan dan tanggapan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

dengan biaya yang dikeluarkan. Perubahan istilah Ongkos Naik Haji (ONH) dengan biaya Penyelenggara Ibadah haji (BPIH) tidak berdampak pada pelayanan.

Menyangkut peran KBIH di Kabupaten Sidenreng Rappang Kasi Haji dan Umrah menjelaskan bahwa: "Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah forum Komunikasi (FK) KBIH dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Kabupaten Sidenreng Rappang. KBIH dibentuk untuk mengidentifikasi masalah bimbingan ibadah haji dan melakukan koordinasi dengan KBIH. Pengurus FK KBIH itu tersebar pada sebelas kecamatan.

Kehadiran organisasi ini tersebut belum mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah. Di sisi lain, jamaah mengalami ketakutan untuk berpikir kritis karena khawatir ibadah haji tidak *maqbul* dan tidak *mabrur*. Mereka cenderung menerima dan kepasrahan, sabar, dan tawakkal. Segala bentuk perlakuan yang mengecewakan yang dia terima sebagai balasan atas tindakan mereka. Mereka selalu mengembalikan perlakuan itu sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Sementara itu, para pembimbing haji selalu menekankan pentingnya sikap sabar bahwa perlakuan negatif itu sebagai ujian kesabaran. Semakin sabar seseorang maka kedudukan semakin tinggi. Mereka selalu memproduksi mitos tentang kebiasaan jamaah yang suka protes yang mendapatkan peringatan oleh Allah swt. berupa kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. *Kemabruran* seseorang ditentukan oleh sejauh mana seseorang mau menerima ujian".<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Dra. Hj. Jamaliah, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, di Pangkajene tanggal 23 Agustus 2009.

Salah satu KBIH, adalah KBIH Amanah Tawakkal yang melayani pendaftaran haji, bimbingan ibadah haji dan amanah haji. KBIH ini berada dalam naungan Yayasan NU Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam pelaksanaannya berada di bawah lembaga Organisasi masyarakat Islam (Ormas).<sup>78</sup>

KBIH Ar-Raodatul Jannah yang dikelola oleh Nadhatul Ulama Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan selama 3 rombongan masing-masing 45 orang, setiap jamaah dikenakan infaq sebesar Rp. 1 juta. Biaya itu meliputi pelayanan kesehatan dan manasik. Dalam KBIH itu disertakan tenaga dokter. Pasca haji mereka melakukan kegiatan untuk mengikat tali persaudaraan dengan pengajian dan bakti sosial.<sup>79</sup>

KBIH As-Shafah Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah yayasan As-Shafah dan Pondok Pesantren al-Urwatul Utsqa melaksanakan KBIH As-Shafah. As-Shafah memberikan pedoman bagaimana menunaikan haji yang sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad saw. target utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah diberikan mulai pendaftaran sampai dengan pulang dari tanah suci.

Bimbingan itu disajikan dalam materi; motivasi dan landasan dasar ibadah haji, praktik pelaksanaan di tanah suci dan persiapan pemberangkatan haji (ibadah, kehidupan sosial kemasyarakatan), materi khusus berhubungan dengan medis. Fasilitas bimbingan adalah jamaah mulai dari saat pendaftaran sampai pulang, urusan administratif secara keseluruhan dibantu petugas, 3 (tiga) bulan menjelang pemberangkatan peserta sudah

---

<sup>78</sup>PCNU Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 11 Majelis Cabang. Sebelas itu tersebar di 11 buah kecamatan dengan 125 ranting dan satu kecamatan memiliki 2 (dua) kepengurusan MWC, yaitu Kecamatan Tellu LimpoE, Kecamatan ini mempunyai 2 MWC, yaitu MWC NU Amparita dan MWC NU Massepe.

<sup>79</sup>H. Nuryadin, Ketua KBIH Ar-Raodatul Jannah, *Wawancara*, di Pangkajene, tanggal 29 Oktober 2009.



diberikan materi, konsultasi dibuka selama 24 jam, syarat pendaftaran adalah salah satunya membayar biaya infaq bimbingan.<sup>80</sup>

Di era globalisasi kecenderungan masyarakat dalam memilih lembaga pelayanan baik yang milik pemerintah maupun milik masyarakat / swasta lebih didominasi oleh tiga hal pokok yakni ; kualitas, harga dan pelayanan.

Berikut penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, :

“Bahwa lembaga pelayanan itu baik milik swasta maupun milik pemerintah dapat diminati oleh lapisan masyarakat jika lembaga tersebut telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena masyarakat hanya akan memilih lembaga yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut menurutnya bahwa masyarakat yang telah terdidik semakin terbuka, pada umumnya lebih rasional dan berpikir ke depan. Oleh sebab itu, di dalam memilih lembaga pelayanan di masa ini paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih lembaga pelayanan, yaitu; nilai agama, status sosial dan cita-cita atau gambaran hidup masa depan. Ketiga aspek ini yang lebih cenderung adalah status sosial dan cita-cita lebih mendominasi”.<sup>81</sup>

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa komitmen Kementerian Agama untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji akan terus dilakukan, sehingga tujuan penyelenggaraan haji secara bertahap akan dapat dicapai, yaitu memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada calon jamaah haji melalui

<sup>80</sup>H. Asri Kasman Lc. Ketua KBIH Ash-Shafah, Wawancara, di Rappang, tanggal 23 Juni 2009.

<sup>81</sup>Dr. H. Ahmad Rusydi, S.E.,M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, ”Wawancara” di Pangkajene pada tanggal 12 Desember 2009.

penyempurnaan sistem manajemen yang baik. Secara jujur harus diakui, bahwa penyelenggaraan ibadah haji saat ini telah terjadi peningkatan yang cukup berarti dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendaftaran, proses dokumen haji, sistem pembinaan haji, sistem pembinaan petugas, pengkloteran dan pemberangkatan serta pemulangan haji, pemondokan, pelayanan di Arab Saudi dan pemulangan di Tanah Air.

Di samping itu, diakui pula oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa masih ada persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan haji, tetapi persoalan tersebut bersifat teknis dan dapat ditanggulangi di lapangan dan tidak menyebabkan haji itu gagal. Oleh karenanya, penilaian bahwa dari dulu penyelenggaraan haji tidak efektif, merupakan penelitian tidak obyektif. Penilaian bahwa penyelenggaraan haji tidak dilakukan secara profesional juga tidak tepat. Karena apabila dilakukan tidak profesional, maka tidak mungkin dapat mengorganisasikan, mengatur dan memberangkatkan calon jamaah haji dalam jumlah yang cukup besar dengan profil yang sangat heterogen, dan hal ini dapat dilakukan dengan baik pada setiap tahunnya.

Penyelenggaraan haji yang dikelola oleh Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 selalu menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Hal yang disoroti oleh media massa, adalah persoalan fungsi regulator dan operator yang melekat pada Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji, sejak orde baru dan berlanjut sampai sekarang. Dua fungsi dalam satu tangan ini, dianggap merupakan titik lemah yang utama dalam penyelenggaraan haji.

Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal bagi calon jamaah haji dalam penyelenggaraan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Jika dicermati berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan haji saat ini, membandingkan kondisi lima tahun yang lalu, maka sebenarnya telah terjadi peningkatan yang cukup berarti. Pemerintah tidak pernah berhenti berupaya untuk melakukan perbaikan pelayanan ibadah haji, melalui langkah-langkah konkrit dan kebijakan yang bersifat teknis dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008, tentang penyelenggaraan haji di Indonesia, disamping telah mempunyai landasan hukum kuat, juga telah mengalami kemajuan, antara lain; 1) Memperjelas dan mempertegas tugas, kewenangan dan tanggung jawab otoritas Pemerintah dan semakin mantapnya partisipasi masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan haji, 2) Memantapkan penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional di bawah koordinasi Menteri Agama dengan memantapkan keterlibatan instansi/departemen terkait sesuai bidang masing-masing, 3) Mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui pemberdayaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota, pemberdayaan KBIH, IPHI, dan pembentukan satuan tugas di Maktab-Maktab, 4) semakin mengoptimalkan komponen BPIH karena dilakukan pembahasan intensif dan mendalam dengan DPR-RI, yang semula hanya dilakukan oleh Pemerintah sendiri, 5) Jamaah haji lebih terlindungi karena setiap pelanggaran yang merugikan jamaah haji akan kena sanksi. Dan adanya perjanjian antara penyelenggara haji khusus dan jamaahnya, 6) Adanya kepastian berangkat bagi calon jamaah yang telah membayar BPIH meskipun terjadi permasalahan atau musibah nasional”.<sup>82</sup>

Dengan berpatron pada kecenderungan masyarakat di atas maka langkah yang perlu yang ditempuh untuk meningkatkan minat masyarakat mendapatkan pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap :

#### **1. Membangun Hubungan Emosional yang baik dengan Masyarakat dalam Manajemen Pelayanan Disebut (*Human relation*) yang baik untuk Menanamkan Kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pelayanan Haji**

Dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam upaya menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan haji terkhusus

---

<sup>82</sup>Dra.Hj. Jamaliah, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, “Wawancara” di Pangkajene pada tanggal 16 September 2009.

kepada pengelola haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang memperbaiki manajemen ke dalam hal perbaikan sistem pelayanan, sarana pra sarana dan peningkatan sumber daya pengelola, sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan lapangan pekerjaan .

## **2. Memperbaiki mutu pelayanan.**

Menurut Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, bahwa penilaian maupun penerimaan masyarakat terhadap pelayanan haji cukup dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan implemantasi di lapangan yang kian dirasakan oleh masyarakat luas. Pada saat ini, lembaga pelayanan haji yang mempunyai kemampuan besar dalam melakukan pelayan dan bimbingan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, akan dikokohkan kedudukannya. Dalam artian bahwa masyarakat telah meihat kenyataan di lapangan bahwa lembaga pelayanan haji tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, maka masyarakat akan berlomba-lomba mendaftar pada lembaga pelayanan haji tersebut karena menginginkan pelayanan lebih baik ketimbang mendapat pada lembaga pelayanan haji yang tidak dipercaya dan tidak profesional.<sup>83</sup>

## **3. Memberikan Pelayanan yang baik**

Ketua Asosiasi KBIH Kabupaten Sidenreng Rappang, menyatakan bahwa di masa modern ini, kehidupan serba modern serta tekhnologi semakin canggi, maka masyarakat pun semakin berkembang maju mengikuti perkembangan zaman. Dalam memilih lembaga pelayanan haji juga semakin angresif, olehnya itu bentuk pelayanan

---

<sup>83</sup>Dra. Hj. Jamaliah, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidereng Rappang, "Wawancara" di Pangkajene pada tanggal 4 September 2009

terhadap masyarakat pun perlu profesional dalam hal pelayanan kepada masyarakat, yang dimulai dengan proses pendaftaran haji, bimbingan manasiknya maupun pelayanan ketika di Mekkah. Jika terhadap calon haji sebagai pelanggan primer perlu diperbaiki. Misalnya dalam suatu urusan proses pendaftaran sebagai calon haji, jika terjadi antrian yang panjang sampai berhari-hari bahkan sampai bertahun-tahun calon haji menunggu pelaksanaan hajinya, hal ini membuat kejemuan. Maka hendaknya lembaga pelayanan haji atau pihak pengelola haji perlu mengusahakan membuat sistem dan prosedur dengan baik agar kepuasan dari pihak yang membutuhkan pelayanan dapat terwujud.<sup>84</sup>

Dari ketiga hal yang diutarakan di atas, jika dibenahi dengan baik dan seksama maka besar kemungkinan masyarakat akan memberikan bantuan bahkan partisipasinya dalam pengembangan ke depan lembaga pelayan haji tersebut.

Apalagi dalam melakukan pembimbingan manasik, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat, termasuk memiliki media pembelajaran yang memadai, jika calon jamaah haji merasakan kepuasan dari lembaga pelayan haji tersebut atas pelayanannya, tentu akan mendapat simpati masyarakat dan akan menggunakan jasanya ketika akan melakukan ibadah lagi atau memberikan informasi kepada kerabat keluarganya untuk menggunakan jasa lembaga tersebut.

Salah satu alternatif solusi yang dilakukan oleh pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan mutu pelayanan haji dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang berkompeten.

---

<sup>84</sup>H. Asri Kasman., Lc., Ketua Asosiasi KBIH Kabupaten Sidenreng Rappang, "Wawancara" di Pangkajene pada tanggal 14 Desember 2009

Sebagaimana yang diutarakan oleh sekretaris IPHI Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

“Pemerintah, masyarakat dan keluarga harus bersatu dalam mempersatukan daya, dana dan usahanya dalam meningkatkan mutu pelayanan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 harus dilakukan oleh lembaga pelayanan haji dan semua instansi/departemen yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Keberhasilan suatu lembaga pelayanan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat jika suatu lembaga tanpa partisipasi masyarakat maka lembaga tersebut akan kering dan tandus. Dengan melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya lembaga pelayanan haji ada kecenderungan melakukan pelayanan haji kepada masyarakat belum profesional sampai ada calon jamaah yang tidak berangkat karena pelayanan yang tidak profesional dari lembaga pelayanan haji itu sendiri.”<sup>85</sup>

Menurut pendapat Ketua MUI Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa: sebenarnya masyarakat sangat keliru dalam meresponi lembaga pelayanan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebenarnya lembaga pelayanan haji sekarang ini memiliki akan prospek kerja yang luas yang sangat dibutuhkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap sebagai eksekutor pelaksana haji, yang membantu Kementerian Agama dalam hal pembimbingan manasik, proses pendaftaran jamaah, penerangan agama, maupun

---

<sup>85</sup>Drs. Abu Bakar Deni, MH. Sekretaris IPHI Kabupaten Sidenreng Rappang,”Wawancara”di Pangkajene pada tanggal 16 November 2009

melalui bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.<sup>86</sup>

Dengan melihat perkembangan masyarakat dan pertumbuhannya maka lembaga pelayanan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang selalu membuka tempat sumber informasi yang mengarah kepada kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman sebagai prospek peluang lapangan kerja. Hal ini akan membantu masyarakat dalam mengkonsumsi tenaga kerja dan peluang kerja lainnya.

Sementara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sedang ditenahi manajemen pelayanannya, yang mengarah kepada kualitas mutu pelayanannya melalui peningkatan sumber daya pengelola hajinya untuk lebih profesional. Salah satu upaya dalam menarik simpatik masyarakat terhadap lembaga pelayanan haji adalah pengembangan sumber daya manusia dengan jalan memberdayakan fungsi Kepala KUA Kecamatan se Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan pelayanan, bimbingan yang optimal kepada calon jamaah untuk menjadi calon jamaah haji yang mandiri, dalam arti melakukan ibadah haji dengan pengetahuan yang memadai tanpa bantuan dan bimbingan orang lain pada saat tiba di Mekkah.

Materi yang diberikan kepada calon jamaah haji di dalamnya berisi materi yang bersifat pengetahuan praktis mengenai hal keagamaan yang mendasar dan ilmu-ilmu lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya ilmu manasik. Hal ini dapat menambah pengetahuan calon jamaah haji guna memenuhi tuntutan masyarakat sehingga

---

<sup>86</sup>KH. Makkah Abdullah., Ketua MUI Kabupaten Sidenreng Rappang, "Wawancara" di Sidenreng Rappang pada tanggal 16 Juli 2009.

masyarakat nantinya memberikan dukungan dan partisipasinya dalam usaha pengembangan lembaga pelayanan haji pada masa-masa mendatang.

Menurut Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, hendaknya lembaga pelayanan haji melakukan upaya perbaikan pelayanan haji ke depan melalui pimpinan-pimpinan lembaga pelayanan haji hendaknya membuat terobosan baru dalam memberikan peluang kepada staf atau karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalnya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya S1, S2 dan S3 pada perguruan tinggi ternama sekaligus melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi/lembaga di mana ia menjadi pegawai/karyawan. Hal ini juga mendorong pegawai/karyawan untuk meningkatkan etos kerjanya, ketika pegawai yang mengajukan kenaikan golongan atau pangkat dan promosi jabatan lainnya perlu dipertimbangkan karena efeknya memberikan manfaat kepada lembaga, sekaligus pegawai/karyawan berpartisipasi dan memberikan kontribusinya terhadap pengembangan lembaga itu sendiri. Pada akhirnya, memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang kualitas pelayanan lembaga tersebut.<sup>87</sup>

Senada hal tersebut di atas Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa lembaga pelayanan haji dapat disebut profesional dan akuntabel bila memiliki sistem dan prosedur kelembagaannya mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan menempatkan personil yang dimilikinya ke dalam posisi atau peran ideal tertentu

---

<sup>87</sup>Ali Yafid, Am.Pd., Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, "Wawancara" di Sidenreng Rappang pada tanggal 12 November 2009.



sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga pelayanan yang dilakukan memuaskan bagi para pencari jasa.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa masyarakat yang sudah semakin terdidik dan terbuka, pada umumnya nasional, pragmatis, dan berpikir jangka panjang. Oleh karenanya dalam memilih suatu lembaga pelayanan haji, dapat mengembangkan pewarisan nilai-nilai agama dan kondisi masyarakat yang berbudaya. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga pelayanan, yaitu; nilai agama, status sosial, dan cita-cita (gambaran masa depan). Ketiga aspek tersebut dijadikan pertimbangan secara bersama-sama. Bahkan dua pertimbangan terakhir (status sosial dan cita-cita) cenderung lebih dominan.<sup>88</sup>

Hal tersebut dipertegas oleh Ketua STAI DDI Pangkajene Sidrap menyatakan bahwa posisi kemasyarakatan sekarang yang terpendang adalah status sosial ekonomi yang mapan termasuk dalam hal ini mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji dianggap memiliki status ekonomi yang mapan. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan mengemukakan alasan dan contoh tentang besarnya animo masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin menunaikan ibadah haji karena status sosial dianggap bergengsi di tengah masyarakat. Hal ini memberikan peluang kepada lembaga pelayanan haji untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dengan mempekerjakan pegawai/karyawan yang profesional. Karena lembaga ini lebih menjanjikan masa depan

---

<sup>88</sup>Drs.H. Hasanuddin Syafiuddin,M.Si. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, "Wawancara" di Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Desember 2009

atau setidaknya-tidaknya lebih membukakan jalan untuk memperoleh status sosial ekonomi yang mapan.<sup>89</sup>

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika lembaga pelayanan haji itu memiliki manajemen yang berorientasi kepada kepuasan pengguna jasa maka lembaga ini terus dapat eksis di masyarakat. Semakin lebar pula untuk membuka jalan memperoleh status sosial ekonomi yang mapan dan akan semakin menguat. Sebaliknya, jika lembaga pelayanan haji itu tidak mengelola lembaganya secara profesional dan akuntabel, ia akan dijauhi oleh pengguna jasa dan hal itu membuat semakin sempit jalan yang dijanjikannya kepada masyarakat, maka semakin cepat lembaga tersebut untuk “gulung tikar”

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat maka lembaga pelayanan haji terutama Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang hendaknya membangun :

1. Kualitas (*quality*)
2. Harga (*price*)
3. Service (*services*)<sup>90</sup>

Olehnya itu, untuk terwujudnya pelayanan yang optimal, seyogyanya lembaga pelayanan haji mempergunakan pendekatan *human relation* antar lembaga dengan masyarakat di sekitarnya dalam upaya memberi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

---

<sup>89</sup>Drs.KH. Alwy Rajab, Ketua STAI DDI Pangkajene Sidrap,”*Wawancara*” di Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Desember 2009

<sup>90</sup>Dr.H. Ahmad Rusydi, S.E.M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, ”*Wawancara*” di Pangkajene pada tanggal 12 Januari 2010.

pelayanan haji selama ini. Dalam Alquran Surah al-Rahman ayat 33, Allah swt. menjelaskan melalui firmanNya sebagai berikut :

يَمَعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

“Hai kelompok jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.”<sup>91</sup>

Quraish Shihab memberi penjelasan bahwa ayat di atas merupakan peringatan dan tantangan bagi mereka yang bermaksud menghindar dari tanggung jawab di hari kemudian. Ayat ini tidak berbicara dalam konteks duniawi tetapi semata-mata sebagai ancaman bagi yang hendak menghindar. Karena itu perintah di atas *tembuslah* bukan berarti untuk dilaksanakan, tetapi perintah yang menunjukkan ketidakmampuan manusia memenuhinya.<sup>92</sup>

Senada hal tersebut di atas ayat ini menyeruh jin dan manusia jika mereka sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, mereka boleh mencoba melakukannya, mereka tidak akan dapat berbuat demikian . jika mereka tidak mempunyai kekuatan; sedangkan mereka tidak mempunyai

<sup>91</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Edisi Baru; Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 505.

<sup>92</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, Volume 13 ( Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 520 - 521. Lihat pula: Jal luddin Muhammad bin Ahmad al-Mahally dan Jal luddin Abdurrahman bin Abi Bakrin al-Suyuty, *Tafsir al-Jal lain*, Juz II ( Surabaya: Syirkah Alamy, 1345 H., h. 205.

kekuatan sedikitpun dalam menghadapi kekuatan Allah swt.<sup>93</sup> Menurut sebagian ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa pengertian “*sultān*” pada ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Hal itu menunjukkan dengan ilmu manusia dapat menembus ruang angkasa.<sup>94</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa jika manusia ingin menguasai penjuru langit dan bumi maka hendaknya memiliki akan kekuasaan yang dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Oleh sebab itu maka hendaknya lembaga pelayanan haji perlu menyiapkan para calon haji dibimbing, dan dilayani dengan sebaik-baiknya sehingga *outputnya* berguna bagi kemaslahatan masyarakat luas. Dengan melihat prospek masa depan lembaga pelayanan haji yang produktif, tentunya masyarakat akan berminat untuk mengikuti bimbingan dan layanan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Dalam upaya pengembangan suatu lembaga yang menjadi faktor utamanya adalah pengembangan fungsi lembaga yang lebih profesional. Dalam hal ini tidak lepas dari dana dan sarana penghubung lainnya serta pengembangan sumber daya manusia yang diidam-idamkan oleh semua lapisan masyarakat. Disamping upaya pengembangan lembaga pelayanan haji yang berkualitas juga mengadakan pengembangan kurikulum manasik yang lebih mengarah kepada materi-materi praktis di lapangan demi memberikan kepercayaan masyarakat terhadap kepada masyarakat terutama calon jamaah haji. Dalam hal ini yang lebih bertanggung jawab adalah pihak pengelola masing-masing dan kemampuan lembaga pelayanan haji untuk mengkoordinasi semua program kerjanya agar sesuai dengan keinginan masyarakat.

---

<sup>93</sup>Departemen Agama RI., *Alqur'an dan Tafsirnya*, Juz IX ( Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 1995), h. 654.

<sup>94</sup>*Ibid.*

#### **D. Analisis Pemahaman Ketaatan berhaji dan Faktor yang Memengaruhi Kesenjangan Pelaksanaannya di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Melihat data yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian dapat ditelaah bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa faktor dominan yang memengaruhi terhadap kesenjangan pelaksanaan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain;

##### **1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan terhadap Ajaran Haji**

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa ada 63,33 % responden yang hanya kadang-kadang mengeluarkan zakat harta dan bahkan ada responden yang tidak pernah sama sekali mengeluarkan zakat harta sebanyak 35 %, padahal telah melaksanakan ibadah haji . Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang belum mengeluarkan zakat walaupun mereka sebenarnya telah melaksanakan ibadah haji ( *lihat tabel 17*).

Fakta di lapangan pun menunjukkan dari 150 responden diperoleh jawaban 75 responden (50 %) yang menyatakan tidak sama sekali menerima penyuluhan tentang zakat baik melalui lembaga zakat dan maupun para ulama di Kabupaten Sidenreng Rappang ( *lihat tabel 18*).

Dengan melihat analisis tersebut di atas bahwa lembaga zakat sudah melakukan Bimbingan dan penyuluhan namun belum optimal kepada masyarakat muslim yang sudah melaksanakan haji di Kabupten Sidenreng Rappang. Faktor ini diduga berpengaruh karena budaya hukum masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam merupakan salah satu faktor penentu berlakunya hukum Islam, apalagi terlaksananya Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2008 dan Undang-Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999 sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan atau persepsi masyarakat terhadap ajaran haji dan zakat.

## **2. Pelaksanaan Bimbingan Manasik haji belum Efektif dalam Meningkatkan Pemahaman calon haji.**

Dalam penelitian yang dilakukan di obyek penelitian tentang faktor yang berpengaruh dalam ketaatan berhaji bagi calon jamaah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis memahami bahwa ibadah haji yang dilaksanakan oleh seorang muslim tentu sangat erat hubungannya dengan kesiapan ilmu pengetahuan dan pemahaman konsep haji itu sendiri, melalui informasi haji yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dari hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang frekuensi menyimak, mendengar dan membaca fatwa “Ketaatan berhaji” yang menyatakan 76.66 % responden menyatakan pernah mendengar, membaca atau menyimak fatwa tersebut (*lihat tabel 19*). Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya hasil bacaan dan penyimak terhadap fatwa “ketaatan berhaji” itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan seseorang dan memberikan motivasi yang kuat sehingga masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan ibadah haji.

Hasil penelitian juga digambarkan bahwa sebanyak 75 orang (50 %) responden memperoleh informasi tentang pentingnya haji kemudian menjadikan tertarik untuk melaksanakannya. 16,66 % informasi haji diperoleh dari ulama dan cendekiawan muslim, selebihnya informasi melalui Kementerian Agama. Informasi yang diberikan oleh ulama hanya sekitar 16,67 % menunjukkan bahwa persoalan pemahaman dan ketaatan berhaji dalam hubungan antara masyarakat dan ulama kurang efektif dalam memberikan motivasi

kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Materi-materi berupa dakwah islamiyah yang diberikan oleh ulama secara persentase kurang menyentuh kepada persoalan-persoalan substansi berhaji.

Calon haji mendatangi ulama untuk mendapatkan bimbingan setelah calon jamaah haji sudah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji, bahwa peran ulama dalam persoalan haji hanya berfungsi sebagai petunjuk tentang syariat pelaksanaan ibadah haji. Peran KBIH., 15,33 % responden menyatakan ikut memberikan informasi tentang berhaji, KBIH hanya berfungsi membimbing langsung calon jamaah haji yang akan berangkat, tidak berfungsi secara optimal memberikan bimbingan sebelum seseorang mendaftar haji (*lihat tabel 20*).

Haji merupakan ibadah yang sangat istimewa bagi umat Islam, karena dijanjikan oleh Allah bahwa pahala haji *mabr r* adalah surga. Dengan melaksanakan haji, seorang muslim merasa telah menyempurnakan kelima rukun agamanya. Gelar haji di Indonesia juga merupakan status sosial yang dihormati sekaligus mengindikasikan tingkat kemampuan ekonomi penyangganya.

Sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah jamaah haji, maka komponen yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah tersebut juga semakin meningkat, termasuk dalam hal ini peningkatan pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Lebih dari itu, sikap sabar, tabah, menghindari perbuatan yang tidak senonoh (*rafats*), fasik (*fusuq*) dan berbantah-bantahan (*jidal*) yang dituntut bagi seseorang yang ingin mendapatkan haji *mabr r*, acap kali dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

Hal ini terjadi akibat tidak sedikitnya jumlah jamaah haji yang berpendidikan rendah (*lihat tabel 15*), kurangnya pengalaman berhaji sehingga potensi menjadi santapan empuk bagi oknum tersebut. Kurangnya efektifitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan haji selama ini, turut memengaruhi kualitas pemberian perlindungan kepada jamaah.

Akibat dari penyimpangan dan kurangnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji serta pengeksploitasian sikap ikhlas jamaah haji, maka sepanjang sejarah perhajian Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini senantiasa diwarnai oleh kemelut dan persoalan yang tidak berujung.

Mengubah pola pikir (*mindset*) dan pola tindak (*cultureset*) pengambil kebijakan dan para pembimbing dari kondisi sekarang yang dirasa belum efektif menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan, yaitu jamaah mandiri, merupakan keharusan. Oleh karena itu, suatu keniscayaan peningkatan dan penyempurnaan pola bimbingan secara terus menerus dan berkelanjutan dilakukan oleh penyelenggara haji, sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Sejalan dengan itu, bimbingan terhadap jamaah haji dalam bentuk perorangan, kelompok dan massal hendaknya diarahkan dalam rangka membentuk jamaah haji mandiri. Akan tetapi bimbingan yang dilakukan saat ini di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih secara tradisional melalui tatap muka dengan hasil kurang efektif.

Hasil pengamatan yang ditemukan pada obyek penelitian terhadap dampak pembinaan/bimbingan jamaah haji yang selama ini dilakukan, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dapat diamati dan ditemukan dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi masih adanya ketergantungan jamaah haji kepada petugas atau orang lain.



Hal ini mengindikasikan tingkat pengetahuan jamaah tentang proses ibadah haji sangat kurang, dan gambaran tidak adanya kemandirian dalam beribadah. Padahal seluruh jamaah haji mendambakan pada satu saatnya nanti setelah selesai menunaikan ibadah haji memperoleh haji *mabr r*. Haji *mabr r* tidak akan tercapai manakala tidak didukung pemahaman jamaah haji terhadap manasik dan ibadah lainnya serta dapat melaksanakannya sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Hal ini menjadi prasyarat kesempurnaan ibadah haji untuk memperoleh haji *mabr r*.

### **3.Lemahnya SDM Pengelola Haji/Lembaga Pelayanan Haji**

Untuk melakukan pelayanan yang bermutu pada sebuah lembaga berkualitas, mutlak diperlukan sumber daya yang profesional dan memiliki pengalaman kerja. Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban responden bahwa sebagian besar pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan dirinya tidak cukup memiliki pengalaman dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan haji, sebelum ia diangkat sebagai pengelola haji. Dari 150 responden diperoleh jawaban bahwa 95 responden (63.33%) yang menyatakan tidak pernah terlibat langsung dalam hal pengelolaan haji (*lihat tabel 31*).

Juga berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 150 responden diperoleh jawaban bahwa, 100 responden (66,66 %) menyatakan memberi jawaban tidak pernah terlibat dalam hal penyusunan program kerja, hal ini menunjukkan bahwa pengelola haji masih memiliki kemampuan belum memadai sehingga pelayanan dan bimbingan haji kurang optimal (*lihat tabel 32*).

Paradigma baru manajemen haji menekankan pada pemberdayaan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan (*knowledge workers*), yaitu sumber daya yang kreatif

dan inovatif yang mengedepankan *customer value* sebagai nilai yang mendasari penyelenggaraan haji melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Penerapan manajemen haji dalam suatu pola yang sinergis dengan manajemen modern bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan. Pemberdayaan ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk :

*Pertama*, melakukan reorganisasi struktural dan mengubah tipologi yang ada dalam birokrasi tradisional dengan menerapkan konsep manajemen secara integral, sehingga dapat mengikis sentralisasi kebijakan yang seringkali menghambat kreatifitas kerja SDM yang berilmu pengetahuan cenderung inovatif. Pemangkasan jabatan struktural pada tataran teknis akan sangat mendukung terciptanya SDM yang kreatif dan inovatif karena terdapat kebebasan dan keleluasan untuk mengembangkan potensi kinerja yang reaksional, bervisi ke depan dan kompetitif yang tidak dibatasi oleh kebijakan yang bersifat *top-down* dan kebijakan yang cenderung hirarkis.

*Kedua*, mengembangkan sumber dana (*financial resources*) pemerintah sebagai hasil efisiensi penggunaan dana dan mengubah pola pengelolaan dengan menekankan dimensi ekonomis melalui berbagai kegiatan bisnis yang tidak bertentangan dengan pemberdayaan umat Islam. Upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal dan pembentukan unit usaha yang relevan dengan tugas dan fungsi keagamaan.

*Ketiga*, memprediksi faktor-faktor kekuatan permintaan dan penawaran seluruh komponen biaya haji dengan menggunakan standar mata uang tertentu, Dollar AS., pembayarannya pun dilakukan dengan mata uang yang sama. Dalam hal ini penetapan biaya

haji harus dilakukan lebih awal, berdasarkan tenggang waktu yang efektif untuk sosialisasi. Pembayaran melalui sistem tabungan dengan penyetoran mata uang yang akan ditetapkan dalam biaya haji, sehingga subsidi yang seharusnya dapat didayagunakan untuk kepentingan lain yang lebih luas dapat dihilangkan. Mengingat syarat *istitmo'ah* adalah syarat mutlak harus dipenuhi oleh calon haji, sehingga apabila masih disubsidi berarti yang bersangkutan belum *istitmo'ah* untuk menunaikan ibadah haji.

*Keempat*, menciptakan iklim persaingan sempurna (*perfect competitive*) dalam penyediaan transportasi dan akomodasi yang menjadi komponen terbesar dalam biaya haji, sehingga akan diperoleh *real cost* yang akan berpengaruh terhadap kalkulasi haji.

*Kelima*, menerapkan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi yang telah dimiliki termasuk penataan dan penempatan sumber daya manusia berdasarkan spesifikasi kemampuan yang dimiliki ke arah *self-financing*.

#### **4. Adanya Sanksi bagi Masyarakat yang Melanggar Ketentuan berhaji.**

Berdasarkan hasil penelitian jawaban responden hanya 33 responden (16.67 %) yang menyatakan berpengaruh terhadap penyelenggaraan haji dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenren Rappang lebih banyak berkeinginan untuk melaksanakan haji walaupun ada aturan sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan haji dan tidak mengurangi kepercayaan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pengelolaan haji.

Dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang lebih banyak tidak berpengaruh terhadap adanya sanksi bagi yang melanggar ketentuan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari 150 responden yang menyatakan aturan sanksi pidana pada Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 berpengaruh terhadap bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan haji (*lihat tabel 33*). Sebanyak 85 % responden menyatakan seharusnya Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 disempurnakan dengan adanya sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan berhaji.

Dari hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak mengharapkan agar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dilengkapi, suatu pelanggaran tentang sanksi pidana berat bagi yang melanggar aturan perhajian.

Tentunya jika dianalisis bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesenjangan pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang, belum sepenuhnya dapat melaksanakan tujuan Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 yang tentunya juga dapat meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap calon jamaah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui peningkatan pengelolaan dan pemberdayaan pengelola haji di Kabupaten Sidenreng Rappang.

##### **5. Keinginan Kuat Mendapatkan Gelar/Titel “Haji/Hajjah”.**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang setelah melaksanakan ibadah haji keinginan untuk memakai gelar “Haji/Hajjah”, sekitar 76,66 % responden menginginkan memakai gelar Haji/Hajjah” (*lihat tabel 35*). Data

ini menunjukkan masih kuatnya *image* di tengah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang akan pentingnya memakai gelar “Haji/Hajjah”.

Hal ini menunjukkan bahwa pada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, gelar “Haji/Hajjah” adalah gelar yang dianggap penting diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji.

Hasil penelitian juga memberikan informasi sebanyak 16,67 % yang menyatakan tidak akan memenuhi panggilan atau undangan untuk hadir pada suatu acara jika tidak disebut gelar “Haji/Hajjah” di depan namanya (*lihat tabel 36*). Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya gelar “Haji/Hajjah” bagi seorang yang telah menunaikan ibadah haji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jika hal ini dianalisa tentang perlu tidaknya pemakaian gelar “Haji/Hajjah” di depan nama seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji.

Fakta di lapangan menunjukkan begitu pentingnya pemakaian gelar “Haji/Hajjah” pada orang yang telah melaksanakan ibadah haji pada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Data ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa persoalan haji sangat terkait dengan atribut yang akan dipakai jika seseorang telah melaksanakan ibadah haji. Di antara atribut itu adalah pemakaian gelar “Haji/Hajjah” dan pemakaian kopiah putih sebagai tanda bahwa orang tersebut telah melaksanakan haji. Walaupun demikian, keinginan untuk mencapai haji *mabr r* tetap menjadi sebuah prioritas utama dari setiap orang yang melaksanakan ibadah haji.

Pelanggaran dari penyelenggaraan ibadah haji dengan mentelantarkan calon jamaah haji dengan tidak melakukan pelayanan yang optimal dan bimbingan tidak maksimal diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bagi Penyelenggara Ibadah Khusus (PIHK) yang tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang telah diatur, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar). Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 pasal 63 dan 64.<sup>95</sup> Secara substansial aturan-aturan menyangkut pelanggaran terhadap penyelenggaraan haji baik dipandang sebagai kejahatan maupun dipandang sebagai alasan pelanggaran kemanusiaan telah ada dan berlaku di masyarakat.

Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu lembaga yang berwenang melakukan pelayanan, bimbingan dan perlindungan kepada calon jamaah haji telah menerima pendaftaran calon haji pada tahun 2009 sebanyak 237 (*lihat tabel 11*). Hal itu menunjukkan secara struktural bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan tugasnya dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku.

Pemahaman dan ketaatan berhaji yang dilakukan oleh umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memberikan dampak yang positif, terbukti dengan tetap meningkatnya angka kemiskinan tiap tahunnya di Kabupaten Sidenreng Rappang (*lihat tabel 5 dan 6*), yang idealnya semakin tinggi rasa kesadaran seorang muslim terhadap ajaran

---

<sup>95</sup>Undang-Undang RI., Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Bab VI Pasal 63 dan 64

agama yang dianutnya semakin tinggi pula rasa kepedulian sosialnya terhadap sesama. Adanya kesenjangan pelaksanaan rukun ke lima ini terbukti tiap tahunnya umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang antri melakukan pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji (*lihat tabel 10*).

Di sisi lain, ketaatan terhadap rukun lainnya misalnya pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan yang mencolok (*lihat tabel 17*). Terbukti pada hasil penelitian, bahwa zakat harta yang terkumpul di Badan Amil Zakat Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi harapan masyarakat. Masih banyaknya fakir miskin, anak-anak jalanan, *kaum dhuaf*, lembaga pendidikan Islam dan lembaga-lembaga sosial lainnya seperti pondok pesantren, panti asuhan masih menunggu uluran tangan/bantuan dari zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang memiliki harta yang berlebihan.

Bertolak dari pertimbangan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah bahwa pemahaman dan ketaatan berhaji yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang seharusnya memiliki fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan berlandaskan keadilan yang telah digariskan dalam ketentuan “*nas*”, baik pada konsep teoritik maupun operasionalnya.

Kenyataan, bahwa masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim Sidenreng Rappang, haji dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah swt. (ibadah *mahdah*), terlepas dari konteks dan tujuan yang berwawasan *mu'amalah ijtima'iyah*, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah swt. sehingga dirasakan bahwa ibadah haji hampir kehilangan

vitalitas dan aktualitasnya. Akibatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya di kalangan umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang masih cukup tinggi.

Lebih jelasnya, Ketua MUI Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa “Ibadah haji dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda, harta diharapkan memiliki fungsi spritual dengan pengertian sebagai sarana beribadah kepada Allah di samping juga berfungsi sosial, sebab yang dipentingkan oleh Islam supaya orang kaya memberikan pertolongan kepada orang miskin, hingga dapat memenuhi hajatnya, atau memberikan bantuan guna kepentingan umum dapat merealisasikan kepentingan tersebut”.<sup>96</sup>

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hendaknya ketaatan berhaji masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang diikuti dengan ketaatan berzakat, karena pada aspek ajaran zakat pun memiliki nilai sosial, di antaranya dalam bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Alquran memberikan wewenang yang besar kepada negara pemerintah untuk memungut, mengelola, dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.<sup>97</sup>

Penyelenggaraan ibadah haji itu merupakan kegiatan pelayanan publik dan berpedoman pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan umat Islam dengan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan, selain itu juga prinsip keadilan,

---

<sup>96</sup>KH. Makkah Abdullah, Ketua MUI Kabupaten Sidenreng Rappang, “Wawancara” di Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Januari 2010.

<sup>97</sup>KH. Makkah Abdullah, Ketua MUI Kabupaten Sidenreng Rappang, “Wawancara” di Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Januari 2010.



efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kegiatan tidak cukup dengan niat saja, akan tetapi perlu manajemen dan ditunjang sumberdaya manusia (SDM) yang baik serta dengan efisiensi yang menyeluruh merupakan keharusan namun tidak menghilangkan asas kemudahan, keadilan, keselamatan, dan kenyamanan.

Animo masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan ibadah haji sangat kuat tetapi pelaksanaan rukun Islam lainnya yang berdimensi sosial masih sangat lemah. Padahal haji dan rukun Islam lainnya termasuk bagian dari akidah, semestinya tidak ada kesenjangan dari pelaksanaan antara kelima rukun Islam ini, yaitu sebagai implementasi rasa cinta kepada Allah swt. diiringi rasa kerendahan hati dan keikhlasan si hamba kepada-Nya bukan hawa nafsu.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab ini dipahami bahwa, sebagian besar Umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang masih mementingkan *fardhu 'ain* daripada *fardhu kifayah*. Mereka lebih mementingkan ibadah *syahsiyah*, daripada hubungan sosial kemasyarakatan yang menjadi salah satu bagian dari kesempurnaan ibadah *jam'iyah*. Sementara ibadah *ijtimaiyah* kurang diperhatikan padahal hubungan dengan sesama manusia itu sama pentingnya dan idealnya berjalan serasi dan seimbang.

Pelaksanaan ibadah haji merupakan ibadah perseorangan (*fardhu'iyah*) yang disyaratkan apabila seorang muslim memiliki kemampuan untuk melaksanakannya satu kali dalam seumur hidup manusia. Hal ini menggambarkan bahwa syariat Islam, mengharapkan umat Islam dalam penggunaan harta itu secara proporsional dan memiliki multi manfaat bagi sesama muslim. Termasuk juga ibadah haji sebagai ibadah sosial.

Calon jamaah haji memberikan *dam* dan *qurban*-nya kepada mereka yang berhak menerima, dan berharap menerima pahala atau untung dari Allah swt. yang kelak diterimanya nanti di akhirat, sementara yang memperoleh untung di dunia dalam rangka meringankan kesulitan hidupnya. Perhatian umat Islam lebih banyak tertuju kepada kebaikan *ukhrawi* daripada kehidupan sosial, padahal kehidupan sosial membantu sesama manusia termasuk ajaran agama.

Adanya kesenjangan pelaksanaan ibadah haji dan ketaatan rukun Islam lainnya diakibatkan pemahaman dari substansi ibadah haji itu sendiri, dalam hal kurangnya masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan ibadah sosial dalam membantu meningkatkan taraf hidup fakir miskin.

Hal tersebut di atas terjadi disebabkan kurangnya pemahaman tentang substansi ajaran haji, ini merupakan indikasi sebagian masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mentaati hukum Islam yang sebenarnya. Hal itu menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat terhadap ketaatan berhaji belum sempurna.

Salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah teori “perubahan hukum”, dikaitkan dengan tiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa ada tiga unsur yang mempengaruhi hukum, yaitu :

1. Unsur struktur hukum.
2. Unsur substansi hukum.
3. Unsur kultur hukum.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1995), h.6 - 7

Teori tersebut dikembangkan oleh Soerjono Soekanto yang dikenal dengan teori efektifitas penegakan hukum, tentang 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum dan antara kelima itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, dan merupakan esensi dari penegakan hukum serta tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Adapun kelima faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum tersebut adalah ;

1. Faktor hukumnya
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana / fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan<sup>99</sup>

Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga yang menjalankan tugas atau kewenangan menyelenggarakan ibadah haji termasuk dalam struktur hukum (*legal institution*) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugasnya merupakan keharusan untuk menjaga mutu dan kualitas hasil kerjanya. Karena itu, suatu produk perundang-undangan memiliki kekuatan dan berdaya guna, maka dibutuhkan profesionalisme bagi pengelola haji sebagai lembaga yang memiliki kewajiban menjalankan undang-undang.

---

<sup>99</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ( Cet.I; Rajawali, 1986), h. 5

Melayani, membimbing, dan melakukan perlindungan hukum terhadap calon jamaah haji adalah menyangkut materi yang ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan sehingga masuk dalam unsur substansi hukum (*substantive rules of law*). Dalam peraturan menyangkut pelayanan jamaah calon haji ditentukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 .

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada obyek yang telah diteliti bahwa dari keseluruhan faktor yang memengaruhi adanya kesenjangan pelaksanaan ibadah haji (*'ub diyah*) dengan ketaatan kepada ibadah berdimensi sosial (*gaera mahd<sup>ah</sup>*) di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka yang paling dominan berpengaruh adalah ada dua faktor, yaitu; a) Kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap ajaran haji. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak mengeluarkan zakat harta sebanyak 35 %, padahal telah melaksanakan ibadah haji, yang sering mengeluarkan zakat harta hanya 13,34 % dan kadang-kadang tergantung pada keadaan atau sewaktu-waktu mengeluarkan zakat 63,33 % (*lihat tabel 17*). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang tentang kesadaran berzakat, sangat rendah/belum memadai, sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat.

b) Keinginan kuat untuk memperoleh gelar haji/hajjah setelah melaksanakan ibadah haji. Sebanyak 76,66 % masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang menginginkan memakai gelar “haji/hajjah”, hanya 16,68 % yang tidak ingin memakai gelar “Haji/Hajjah”. Sebagian lagi menunjukkan kadang memakai kadang tidak sebanyak 6,66 %

(lihat tabel 35.) Hal ini menunjukkan masih kuatnya prestise masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang bilamana seorang muslim telah melaksanakan ibadah haji. Gelar haji termasuk dianggap memiliki kehormatan dan penghargaan yang tinggi di tengah masyarakat, dengan motivasi inilah seorang muslim berkeinginan keras untuk melaksanakan ibadah haji (lihat tabel 35) .

Teori kedua yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah *Maslow's need hierarchy* salah satu teore motivasi yang cukup terkenal dan sampai dewasa ini tetap dikui bukan hanya para teoritis juga para praktisi yakni teori “*hierarki kebutuhan*” yang dikemukakan oleh Maslow. Dijelaskan bahwa motivasi manusia bergantung pada pemenuhan susunan hierarki kebutuhan.<sup>100</sup>

Kebutuhan-kebutuhan itu menentukan cara orang bertindak laku dan memotivasi diri mereka sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebanyak bergerak ke arah yang tinggi. Dikemukakan bahwa kebutuhan utama manusia berada pada tingkat pertama, yaitu kebutuhan fisiologis (*physiologis needs*). Setelah kebutuhan pertama ini terpenuhi atau terpuaskan barulah pindah pada kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan keamanan (*safety and security*). Setelah kebutuhan kedua telah terpenuhi barulah pindah pada kebutuhan ketiga. Proses seperti ini berjalan terus hingga kebutuhan terakhir atau kebutuhan tertinggi terpenuhi akan transenden (*needs for transcendence*).

---

<sup>100</sup>J.Westernan dan P. Donoghue, *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*, alih bahasa oleh Suparman, (Cet.III; Rineka Cipta, 1994), h. 127

Teori Maslow tentang kebutuhan manusia dikelompokkan dalam lima tingkatan yang tersusun dalam suatu hierarki yang dikutip dari buku M. Ngalim Purwanto, sebagai berikut :

1. *Kebutuhan fisiologis* : kebutuhan ini merupakan dasar, yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik kebutuhan seks dsb.
2. *Kebutuhan rasa aman dan perlindungan ( safety and security)* seperti terjamin keamanannya, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dsb.
3. *Kebutuhan sosial (social needs)* yang meliputi antara lain, kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, kerjasama.
4. *Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs)*, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat dsb.,
5. *Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization)* seperti antara lain kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimun, kreatifitas, dan ekspresi diri.<sup>101</sup>

Berdasarkan urutan tingkat kebutuhan menurut teori Maslow tersebut, kehidupan tiap manusia dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada mulanya kebutuhan manusia yang paling mendesak adalah kebutuhan fisiologis seperti; pangan, sandang, papan, dan

---

<sup>101</sup>M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* ( Ce. XVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 72

kesehatan. Jika kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan berikutnya yang mendesak ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi.

Apabila kebutuhan ini pun telah terpenuhi sehingga tidak dirasakan lagi sebagai kebutuhan yang mendesak, maka timbul kebutuhan berikutnya yang dirasakan mendesak, yaitu kebutuhan sosial seperti ingin masuk organisasi kemasyarakatan, ikut aktif dalam perkumpulan arisan keluarga, dsb. Jika kebutuhan ini pun telah terpenuhi sehingga tidak terasa lagi sebagai kebutuhan mendesak, timbul kebutuhan lagi yang dirasakan mendesak, yaitu kebutuhan akan penghargaan atau prestise. Demikian seterusnya sampai pada tingkat kebutuhan aktualisasi diri: ingin menjadi orang ternama, terkenal diseluruh negara atau dunia.

Analisis dari kedua teori yang telah dikemukakan di atas jika ditelaah dari hasil penelitian dan pembahasan pada disertasi ini sebagai berikut :

Tabel di atas ( *tabel 17* ) memberikan gambaran tentang kurangnya kesadaran hukum masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal pembayaran zakat harta sebanyak 35 %, padahal telah melaksanakan ibadah haji. Olehnya itu, penulis beranggapan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan zakat harta bagi umat Islam itu sangat berpengaruh dalam penegakan hukum Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang, karena dalam teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa faktor pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sangat memberikan pengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan hukum itu. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dari analisis di atas, bahwa hasil penelitian ini mendukung teori tersebut.

Teori yang kedua yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah teori “*hierarki kebutuhan*” yang dikemukakan oleh Maslow. Dijelaskan bahwa; a) motivasi manusia bergantung pada pemenuhan susunan hierarki kebutuhan, b) kebutuhan-kebutuhan itu menentukan cara bagaimana orang bertindak laku dan memotivasi diri mereka sendiri. Kalau ditelaah bahwa teori ini dapat dianulir (dibantah) berdasarkan hasil penelitian dari pemahaman ketatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan indikator sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis (*physiologis needs*) tidak menjadi halangan dalam menyempurnakan rukun Islam kelima. Motivasi ketaatan hanya kepada Allah swt. semata diimplementasikan dalam wujud kepatuhan dan ketundukkan melalui pelaksanaan ibadah haji. Dari lima rukun Islam yang disebutkan dalam hadits, ibadah haji dipandang sebagai rukun tertinggi dan berat pelaksanaannya, karena memerlukan kemampuan material, fisik dan mental. Berdasarkan **tabel 12** terungkap bahwa calon jamaah haji tahun 2008/2009 berdasarkan jenis pekerjaan/profesi yang terbanyak adalah profesi sebagai ibu rumah tangga yang berkisar 143 orang ( 63,4 %). Dari segi tingkat pendidikan yang terbanyak adalah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 111 (46,84 %). Uraian tersebut di atas memberikan gambaran tentang status ibu rumah tangga yang mendominasi ingin memenuhi ketaatan berhaji. Animo masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tinggi untuk melaksanakan haji, walaupun sebagian besar dari rumah tangga tersebut hidup dalam keadaan serba kekurangan. Fenomena ini memberikan penjelasan bahwa motivasi manusia bergantung pada pemenuhan susunan



hierarki kebutuhan tidaklah selamanya benar, karena fakta ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang pemenuhan kebutuhan fisiologis tidak menjadi halangan seseorang beribadah dengan mengharap pahala dari pelaksanaan ibadahnya itu.

2. Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan cenderung terabaikan (*safety and security*) dengan mendahulukan pelaksanaan ibadah haji. **Tabel 26** menunjukkan bahwa sebanyak 50 % responden menyatakan meminjam/kredit untuk membayar BPIH. 16,0 %, dan 18,0 % menyatakan menjual asset/harta untuk pelunasan membayar BPIH 18,0 %. Data ini memberikan gambaran bahwa calon jamaah haji meminjam/kredit untuk pemenuhan pembayaran BPIH, nanti setelah melaksanakan ibadah haji atau pulang ke tanah air menyicil kredit atau pinjaman tersebut. Fenomena ini adalah banyaknya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjual asset/harta keluarga yang dimilikinya demi melaksanakan ibadah haji. walaupun kelihatannya beberapa cara akan mempersulit kehidupannya. Hal tersebut menjadi bukti bantahan terhadap teori hierarki kebutuhan dengan menyebutkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum bergerak ke arah yang tinggi. Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan (*safety and security*) merupakan kebutuhan yang substansi bagi seseorang, namun ketika hal tersebut berkaitan dengan fenomena keagamaan dalam hal ini ketaatan berhaji cenderung terabaikan. Sebab aspek spritual lebih menjadi dorongan utama dalam pelaksanaan ibadah tersebut, dengan konsekuensi sifat ketabahan dan kesabaran lebih ditonjolkan jika menghadapi problem dan segala kesulitan hidup yang dijalannya yang penting dapat melaksanakan ibadah haji.

3. Pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri (*selft actualization*) lebih mendominasi motivasi melaksanakan berhaji. Mengamati profil pendidikan calon jamaah haji pada **tabel 16**, sebagian besar adalah masyarakat muslim biasa yang berpendidikan rendah, belum berpengalaman pergi jauh, hidup dalam kultur tradisional, tidak sedikit yang buta huruf. Khusus dalam masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang, bentuk ketinggian ibadah haji diwujudkan dengan pemberian gelar penghormatan "Bapak Haji atau Hajjah". Dalam masyarakat juga muncul gejala kalau para haji kemudian memperoleh posisi yang amat baik dalam tata pergaulan sosial, lebih-lebih dalam masyarakat pedesaan. Gengsi sosial bagi para "haji" terangkat sehingga mereka menempati strata sosial yang setara dengan para *informal leaders* lainnya. Simbol haji dianggap sebagai lambang moral, akibatnya seorang haji dengan serta merta menjadi tolok ukur dan kelompok acuan (*refference group*) atau teladan di masyarakat sehingga jika ada perilaku seorang oknum "haji" yang dianggap bertentangan dengan moral baik, maka jadilah orang tersebut sebagai bahan cercaan masyarakat. Tampaknya, ibadah haji merupakan jenis ibadah *mahdīah* yang banyak memberi peluang bagi masuknya berbagai unsur budaya lokal. Bukan saja dalam artian campur tangan dalam wujud pelaksanaan manasiknya, termasuk peluang masuknya berbagai ritual dan pengaruh budaya dalam pelaksanaan ibadahnya.

Berdasarkan fenomena di atas memberikan petunjuk bahwa teori Maslow yang menjelaskan bahwa kebutuhan utama manusia berada pada tingkat pertama, yaitu kebutuhan fisiologis (*physiologis needs*) cenderung terabaikan karena pelaksanaan haji di

Kabupaten Sidenreng Rappang lebih mengacu kepada *kebutuhan akan aktualisasi diri (selft actualization)* yang berisi seperti antara lain; kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki dengan memperoleh gelar haji/hajjah, pengembangan diri secara maksimum (menjadi panutan bagi orang muslim lainnya dalam tata pergaulan masyarakat di tempat ia berada), kreatifitas, dan ekspresi diri meningkat; dianggap sejajar dengan pemimpin formal lainnya, seperti gelar kehormatan stratafikasi sosial, pangkat dan gelar akademik .





## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dari pembahasan sebelumnya, sebagai hasil penelitian dalam disertasi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kecenderungan masyarakat akhir-akhir ini lebih memiliki animo yang besar untuk melaksanakan ibadah haji daripada kesadaran melakukan ibadah sosial. Bila ditilik dari fakta-fakta yang ada, maka masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih berminat menunaikan ibadah haji daripada melaksanakan rukun Islam lainnya. Hal ini diyakini sebagai kewajiban umat Islam terhadap Allah swt., yaitu bagi orang yang diberikan kesanggupan maka patut melakukan perjalanan ke *Bait All h* sebagai penyempurnaan keislamannya. Ibadah haji sesungguhnya mengajarkan ketaatan secara total kepada Sang Pencipta, menundukkan hawa nafsu, ikhlas, jujur dalam rangka menjalankan seruan-Nya. Pelaksanaan ibadah haji juga dipahami oleh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu cara menerima pahala surga bagi seorang muslim yang mencapai haji *mabr r*. Mereka menganggap bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan amalan jihad yang paling *afd al* dilakukan juga pelepasan dari dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lampau. Orang yang telah berhaji bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya dan sebagian calon jamaah haji menginginkan mati di Tanah Suci karena dianggap pintu jihad masuk surga.
2. Ketaatan berhaji masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan semangat yang kuat untuk mendaftar sebagai calon haji walaupun hanya sebagai daftar

tunggu. Keinginan kuat itu ditandai dengan mengikuti bimbingan ibadah yang dilakukan oleh masyarakat (KBIH) dan berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji secara berulang-ulang.

3. Faktor yang memengaruhi animo masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap ketaatan berhaji, terdapat beberapa faktor yang lebih dominan melatarbelakangi adalah;
  - a) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap ajaran haji,
  - b) Keinginan kuat untuk mendapatkan gelar “haji/hajjah” setelah melaksanakan ibadah haji, yang memiliki prestise tersendiri di tengah masyarakat, bangga ketika dipanggil “pak haji dan bu Hajjah”. Hal tersebut menyebabkan tingginya daftar peminat untuk melaksanakan ibadah haji dan menjadi daftar tunggu di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Ibu Rumah Tangga, yang pendidikan formalnya rata-rata hanya tamat sekolah dasar (SD).
4. Upaya yang dilakukan oleh pihak penyelenggara haji baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat/KBIH dengan melalui strategi;
  - a) Melakukan pembimbingan penyelenggaraan haji yang sesuai dengan undang-undang dan syari’at Islam demi terwujudnya jamaah haji yang mandiri dengan membangun hubungan emosional yang baik dengan masyarakat untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga haji melalui perbaikan sistem pelayanan, sarana pra sarana dan peningkatan sumberdaya pengelola, sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat,
  - b) Menyosialisasikan Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 sebagai landasan pijakan pemerintah dan masyarakat (KBIH) untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan, bimbingan, dan perlindungan bagi setiap warga negara yang melakukan

ibadah haji. dan c) Memberikan pelayanan yang baik, kehidupan serba modern serta teknologi semakin canggih, maka masyarakat pun semakin berkembang maju mengikuti perkembangan zaman. Dalam memilih lembaga pelayanan haji juga semakin agresif, oleh karena itu, bentuk pelayanan terhadap masyarakat pun perlu profesional dalam hal pelayanan kepada masyarakat, yang dimulai dengan proses pendaftaran haji, bimbingan manasiknya maupun pelayanan proses pendaftaran sebagai calon haji, jika terjadi antrian yang panjang sampai bertahun-tahun calon haji menunggu pelaksanaan hajinya, hal ini membuat kejemuan. Lembaga pelayanan haji atau pihak pengelola haji telah mengusahakan membuat sistem dan prosedur dengan baik agar kepuasan dari pihak yang membutuhkan pelayanan dapat terwujud .

5. Salah satu ukuran tingkat pengaruh ketaatan berhaji terhadap calon jamaah haji Kabupaten Sidenreng Rappang berupa semakin tinggi jumlah pendaftar jamaah haji setiap tahunnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Masyarakat dewasa ini lebih cenderung memilih Kantor Kementerian Agama untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun mendaftar di lembaga tersebut harus menunggu beberapa tahun sebagai calon jamaah haji melalui daftar tunggu (*Waiting list*) dibandingkan dengan lembaga lain. Untuk mendalami dan lebih memahami materi manasik dapat melalui bimbingan dan penyuluhan dari Kantor Kementerian Agama atau dari KBIH yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sudah memiliki izin operasional dari lembaga pemerintah.

## **B. Implikasi Penelitian**

Dari kesimpulan di atas telah dikemukakan rangkaian hasil pembahasan yang berkaitan dengan judul disertasi ini. Pembahasan tentang **"Ketaatan berhaji di**

**Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi analisis Kesenjangan Pemahaman dan Pelaksanaannya)”** Sebagai implikasi dari hasil penelitian dikemukakan dua teori yaitu;

a) Lawrence M. Freidman, teori “perubahan hukum”, dan teori tersebut dikembangkan oleh Soerjono Soekanto yang dikenal dengan teori efektivitas penegakan hukum. Dalam teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa faktor pemahaman tentang kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap ajaran haji sangat memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan hukum itu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap ajaran haji menunjukkan bahwa masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak mengeluarkan zakat harta sebanyak 35 %, padahal telah melaksanakan ibadah haji, yang sering mengeluarkan zakat harta hanya 13,34 % dan yang sewaktu-waktu mengeluarkan zakat sebanyak 63,33 %.

Hasil penelitian juga digambarkan bahwa sebanyak 75 orang (50 %) responden memperoleh informasi tentang pentingnya haji kemudian menjadikan tertarik untuk melaksanakan ibadah haji. Informasi yang diberikan oleh ulama hanya sekitar 16,67 % menunjukkan bahwa persoalan pemahaman dan ketaatan berhaji dalam hubungan antara masyarakat dan ulama kurang efektif dalam memberikan motivasi kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji.

Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa fatwa ketaatan berhaji itu sangat berpengaruh dalam penegakan hukum Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang, b) teori kedua teori “*hierarki kebutuhan*” yang dikemukakan oleh Maslow. Kalau ditelaah hasil penelitian ini bahwa teori Maslow dapat dianulir (dibantah) berdasarkan hasil penelitian dari pemahaman ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan indikator



bahwa ; pemenuhan kebutuhan fisiologis (*physiologis needs*) tidak menjadi halangan dalam menyempurnakan rukun Islam kelima.

Motivasi ketaatan hanya kepada Allah swt. semata-mata yang diimplementasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketundukkan melalui pelaksanaan ibadah haji. Fenomena ini memberikan penjelasan bahwa motivasi manusia bergantung pada pemenuhan susunan hierarki kebutuhan tidaklah selamanya benar, karena fakta ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang pemenuhan kebutuhan fisiologis tidak menjadi halangan seseorang beribadah dengan mengharap pahala dari pelaksanaan ibadahnya itu.

Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan cenderung terabaikan (*safety and security*) dengan mendahulukan pelaksanaan ibadah haji. Sebab aspek spritual lebih menjadi dorongan utama dalam pelaksanaan ibadah tersebut, dengan konsekuensi sifat ketabahan dan kesabaran lebih ditonjolkan jika menghadapi problem dan segala kesulitan hidup yang dijalaninya yang penting dapat melaksanakan ibadah haji.

Pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri (*selft actualization*) lebih mendominasi motivasi melaksanakan berhaji. Khusus dalam masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, bentuk ketinggian ibadah haji diwujudkan dengan pemberian gelar penghormatan "Haji atau Hajjah".

Gambaran tentang tingkat implementasi rukun Islam yang kelima bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melalui ketaatan berhaji dengan rukun Islam lainnya ada kesenjangan pada tataran pelaksanaannya. Animo masyarakat muslim sangat tinggi dalam melaksanakan ibadah haji dan kurangnya kesadaran mengamalkan aspek rukun Islam

lainnya yang berdimensi ibadah *ijtimaiyyah* karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memengaruhinya.

Mengubah pola pikir (*mindset*) dan pola tindak (*cultureset*) pengambil kebijakan dan para pembimbing dari kondisi sekarang yang dirasa belum efektif menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan, yaitu jamaah mandiri, merupakan keharusan. Oleh karena itu, suatu keniscayaan peningkatan dan penyempurnaan pola bimbingan secara terus menerus dan berkelanjutan dilakukan, sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Sejalan dengan itu bimbingan terhadap jamaah haji dalam bentuk perorangan, kelompok dan massal hendaknya diarahkan dalam rangka membentuk jamaah haji mandiri.

Oleh karena itu, sangat diperlukan membangun hubungan emosional yang sinergis antara lembaga penyelenggara haji baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (KBIH). Kehadiran Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 memang memberikan makna hukum dan koridor hukum, baik untuk masyarakat, swasta penyelenggara dan pemerintah. Pada awalnya kelahirannya perangkat Undang-Undang Haji memang cukup refresentatif untuk menjawab keluhan kesah masyarakat, ada beberapa kelemahan Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Otoritas dan kewenangan penyelenggaraan haji dimonopoli oleh Kementerian Agama sehingga ruang gerak antara kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan seringkali tumpang tindih .
2. Secara normatif pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-undang Haji terkesan akomodatif dan gamblang, tetapi pada tahap mekanisme dan kewenangan, karena bersifat "monopoli" hal ini berimplikasi pada tataran operasional yang bersifat

birokratis bukan profesional. Tidak mengherankan penyimpangan penyelenggaraan haji kerap terjadi setiap tahunnya.

3. Persoalan tersebut bukannya tanpa sebab karena pasal demi pasal Undang-undang Haji tersebut memberikan otoritas yang berlebih mengikuti gaya birokrat yang sering berjenjang monoton dan kurang melakukan terobosan yang bersifat esensial, secara tegas tidak pula berbicara pada tingkat pengawasan (*controlling*), jadi untuk mengharapkan penyelenggaraan haji yang baik dan sempurna masih jauh dari harapan dari semua pihak.

Pemahaman yang baik tentang ketaatan berhaji, akan menjadikan umat Islam semakin menjauhkan diri tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam masyarakat Islam, ibadah haji sangat rawan terjadinya praktik-praktik yang dapat merusak akidah seseorang, karena ibadah haji yang dilakukan merupakan ibadah yang sarat dengan simbol-simbol dan ritual yang memungkinkan seorang jamaah haji salah memahami ritual dan simbol yang dilakukan. Peranan KBIH sangatlah penting dalam memberikan penerangan yang jelas dan sesuai dengan ajaran Alquran dan sunnah Rasulullah saw. serta menghapus berbagai macam praktik pelaksanaan ibadah haji yang bertentangan dengan syari'at haji dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ahmad, Zainal, H. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Abu Daud Sulaiman, al-Imam al-Hafidz. *Sunan Abud Daud*, Cet. I Beirut, Libanon: 1998 M/1419 H.
- Adi Warman, A. Karim, Warman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- *Fiqh Zakat I Diterjemahkan* oleh Salman Harun dkk., Cet IV, Bandung: Lentera Antar Nusa dan Mizan, 1999.
- *Sejarah Pemikiran EKonomi Islam, The International Institut of Islamic Thoug*, Cet. II, Jakarta: 2002.
- Adam, Muctar. *Tafsir Ayat-Ayat Haji*, Cet. VII, Bandung: Mizan 1978.
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar, CV. Indobis Media Center, 2003.
- Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, Cet. II; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Asqalaniy, Ahmad bin Alin bin Hajar. *Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhariy*, Juz I, Mesir: Dar al-Ilmiyah, t.th.
- Amuli, Jawadi. *Shabo-ye-Shapo*, diterjemahkan oleh Najib Huesi al-Idrus dengan judul “Hikmah dan Maknah Haji”, Cet. VI, Jakarta: Cahaya, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*, Cet XI, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- , *Manajemen Penelitian*, Cet. VII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Arifin, Bustanul. *Pemahaman Hukum Islam Dalam Konteks Perundang-undangan*, Majalah Mimbar Hukum, NO. 108 Tahun VII, Mei. H. 14.
- Arsyad, Azhar. *Manajemen Pendidikan Bahasa Arab: Sebuah Tinjauan Teologis, Kultural dan Psikodinamik*, “Pidato Pengukuhan Guru Besar” IAIN Alauddin Makassar, tanggal 11 Januari 2001.
- Baz, Abdullah Aziz bin Abdullah bin. *Haji Bersama Rasulullah*, diterjemahkan oleh Cecep Syamsul Hari, Cet. I; Bandung: al-Bayan, 1996, 1996.

- al-Baqiy, Muhammad Fu'ad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- al-Bukhari, Abu Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardizbat. *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Buni, Jamaluddin. *Problematisa Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- CD Room Hadits, *Kitab al-Hajj, Bab Wujub al-Umrah wa Fadliha*, hadis nomor 1650.
- CD Rom Hadits, *Kitab al-Hajj, Bab Wuj b al-Umrah wa Fadliha* hadis nomor 1442 .
- Daradjat, Zakiah. *Haji Ibadah yang Unik*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Ruhama, 1992.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru; Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- , *Bunga Rampai Perhajian* Cet.I, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001.
- , *Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2005.
- , *Dinamika Perhajian*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008 M./1429 H.
- , *Pembakuan Sarana Alat Peraga Bimbingan Manasik Haji* Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2006.
- , *Bimbingan Manasik Haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji, 2005.
- , *Panduan Perjalanan Haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji, 2003.
- , *Do'a, Dzikir Dan Tanya Jawab Ibadah haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010.

- , *Pola Pembinaan Jamaah Haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji, 2005.
- , *Realitas dan Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Cet. I; Jakarta: PT. Mediacita, 2003.
- , *Perspektif Pembinaan KBIH dan Pasca Haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.
- , *Panduan Pelestarian Haji Mabruur*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006.
- , *Pusat Informasi Haji (Standarisasi)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010.
- , *Petunjuk Tayamum dan Shalat Dalam Perjalanan Haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2000.
- , *Pedoman Penyelesaian Dokumen Haji Tahun 2008* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008.
- , *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama Sulawesi Selatan, *Buku Registeri Haji*, Kantor Kepala Bidang Haji, tahun 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Struktur Departemen Agama RI*, Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2005.
- , *Mendialogkan Agenda Reformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta : Media Cita, 2004.
- , *Indonesia dan haji*, Empat karangan di bawah redaksi Dick Dowes dan Nico Kaptein seri INIS 30.
- al-Dimasyqy, Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husayni al-Husniy. *Kif ayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz I, Bandung: Syirkah al-Ma'arif li al-thabah' wa al-Nasyr, t.th.

- Edwin Nasution, Mustafa, dkk., *Pengenalan Ekonomi Islam* Cet. II; Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Farid, Ishak. *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1999.
- Faisal, Sanafiah. *Format Penelitian Sosial Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Fikri, Ali. *Kisah-Kisah Imam Madzhab*, Cet.I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Gayo, Iwan. *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Cet. II; Jakarta; Pustaka Warga Negara, 2001.
- Gassing, A. Qadir, H., *Fiqh Lingkungan, Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, “Pidato Pengukuhan Guru Besar” IAIN Alauddin Makassar, tanggal 8 Februari 2005.
- al-Gazali, Abu Hamid. *Asrar al-Hajj*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul “Rahasia Haji dan Umrah”, Cet. II; Bandung: Karisma, 1993.
- , *Asrar al-Hajj*, Cet. II; Beirut Alam Kutub, 1985.
- Ghozi, Ali ed., *Pedoman Menuju Haji Mabrur*, Jakarta: PT. Wahana Dinamika Karya, 2002.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, diterjemahkan oleh Ghuftron A. Mas’adi, Cet. I Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Halima, *Hukum Pidana Syari’at Islam*, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Harahap, H. Sumuran. *Lintasan Sejarah Perhajian*, Jakarta: Dirjem Bimas Islam dan Haji, 1996.
- al-Hanafi, Muhamad bin Ahmad. *Kisah Para Rasul*, diterjemahkan oleh Mahfud dan Ali Efendi, Jakarta: Rihla Press, 2003.
- Haq, Hamka. *Membangun Paradigma Teologi Bagi Pelaksanaan Syari’at Islam*, “Pidato Pengukuhan Guru Besar” IAIN Alauddin Makassar, tanggal 15 Nopember 2001.
- Hidayat, Kamaruddin. “Dari Pondok Indah Ke Makkah al-Mukarramah”, kata pengantar pada Nurcholish Madjid, *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*, Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.

- Ibrahim, Abu Sinn, Ahmad. *Manajemen Syari'ah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006.
- Isnan, Dewi Nurjulianti dkk. *Muhammad sebagai Pedagang*, Cet. I Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1995.
- Ismail, M, Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela , Peningkar, dan Pemalsunya*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani press, 1995.
- , Ilmu Hadis, Cet. I; Bandung: Angkasa, 1989.
- Al-Khulli, al-Bahi. *Kitab Haji dan Umrah*, Penerjemah Fuad M. Facruddin, Kairo: Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam, t.th.
- Keputusan Bersama Meteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan 47 tahun 1991 tentang *Pembinaan Amil Zakat, infak dan shadaqah*.
- Keputusan Menteri Agama RI., No 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Lubis, Nabilah. *Menyikap Rahasia Ibadah Haji*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Labib MZ., *Rahasia Ketajaman Hati*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2005.
- Mahmud Syaltout, Syeik. *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- , *al-Islam Aqidatu wa al-Syariat*, diterjemahkan oleh H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali MA dengan judul "Islam sebagai Akidah dan Syari'ah", Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Manzur, Muhammad bin Muharram bin Muharram ibn. *Lisan al-Arab*, Juz III; Mesir : Dar al-Mishriyyah, t.th.
- Mas-adi, Ghufuran A. *Bekal Menuju Tanah Suci: Haji, Menangkap Makna Fisikal dan Spritual*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Masyhuruddin,H. *Ibn Taimiyah dan Pembaharuan Tasawuf*, dalam Simuh, *et.all (ed.)Tasawuf dan Krisis* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IAIN Walisongo Press, 2001.



- Mardalis. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Margono. S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1970.
- Mugninyah. Muhammad Jawad, *al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Masykur AB dkk., dengan judul 'Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali'', Cet. II; Jakarta: Lentera, 1996.
- Mughirah. Bukhari Abi Abdillah Muhammad ibn Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Darus: Salam Riyad, 1998.
- Muhammad Abd' al-Havy, Abi al-Hasan t, al-Kan wiy al-Hindi. *Iq mah al-Hujjah, 'Ala anna al-Ikts r fi al-Ta'abbudi Laesa Yad'a*, Cet. III; t.tp.: Maktabah al-Mathba'ah al-Islamiyah.
- Muhammad Syahr r, *al-Kit b wa al-Qur' n ;Qir 'ah Mu' shirah*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikir dengan judul, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet.I; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Muchtar,Rusdi. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* Cet.I; Jakarta: PT. Nusantaralestari Ceriapratama, 2009.
- al-Munawwar, Said Aqil Husin. *Fikih Haji: Penuntun Jamaah Haji Mencapai Haji Mabruur*, Cet. I; Jakarata: Ciputat Press, 2003.
- , *Penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*, makalah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, *Mendialogkan Agenda Reformasi Penyelenggaraan Haji*, Cet. I; Jakarta: PT. Mediacita, 2004.
- Nidjam, Achmad, Alatief Hanan. *Manajemen Haj*, Cet. IV, Jakarta: Media Cita, 2006.
- Usman, Iskandar. *Istihs n dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Qadhir, Abdurrahman. *Zakat. Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. II Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardhawiy,Yusuf. *Musykilah al-Fikr wa Kaifah 'Alajaha al-Islam*, Cet.II; Kairo: Maktabah Wahbah, 1975.

- , *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syariah al-Islam*, diterjemahkan oleh Abdullah Hakam Shah dengan judul: *Islam Agama Ramah Lingkungan* Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Qutb, Muhammad. *Ma'f him Yanbagi 'an Tushahah*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin dengan judul "Koreksi atas Pemahaman Ibadah", Cet. I; Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997.
- al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad ; Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial* ( Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah*, Beirut: Darul Fikri, Jilid II, 1992.
- Saleh, Wantjik, K. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Salim, Muin, Abd. *Metodologi Tafsir; Sebuah Rekonstruksi Epistemologis*, "Pidato Pengukuhan Guru Besar" IAIN Alauddin Makassar, tanggal 28 April 1999.
- Syariati, Ali. al-Hajj, diterjemahkan oleh Mahyuddin dengan judul "Haji" Cet. III; Bandung: Pustaka, 1995.
- Shiddiqi, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran*, Cet. I, Bandung, Mizan, 1992.
- , *Tafsir Am nah*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1992.
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iy Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1996.
- , *Haji Bersama M. Quraish Shihab*, Cet. II; Bandung: Mizan, 1999.
- , Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,; Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, Volume 13, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Al-Siba'i, Mustafa. *al-Sunnah wa Mak natuh fi al-Islami*, t.t.: Dar al-Qaumiyyah, 1996.
- Su'ud, Abu. *Haji: Antara Syara' dan Mitos*, Cet. I; Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.
- Susielo, R.. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Polteie, 1979.
- Singarumbun, Masrin, dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Surve*, Cet. I, Jakarta: PT Aksara Alp3es Indonesia, 1989.

- Sya'rawiy, Mutawalli. *100 Suwal Mujaawab fi al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I. t.tp.: Maktabah al-Turaz al-Islamy, t.th.
- Syaltut, Muhammad, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, t.th.
- al-Syahrawi, M. Mutawalli. *Rahasia Haji Mabru*, Edisi Bahasa Indonesia, Cet. V; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- as-Suyuthi, Imam. *Tarikh Khilafah*, diterjemahkan oleh Samsun Rahman, dengan judul "Sejarah Penguasa Islam", Cet. I Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Thalib, sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonisia*, Jakarta: BT Press, 1975.
- Thalib, M. *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1987.
- , *Undang-Undang Perkawinan, UU. No, 1 tahun 1974*, Cet. II, Surabaya, Pustaka Tirta Mas, 1990.
- Tebba, Sudirman. *Haji Pasca Perang Teluk*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Thomson, Ahmad. *Pengalaman Seorang Muallaf: Haji Karena Mencari ilahi*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Usman, Husain dan Pornomo Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, Cet. II, Jakarta: PT. Aksara, 2000 Masrin Singarumbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet. I, Jakarta: PT Aksara Alfabes Indonesia, 1989.
- Usa, Muslih. *Pendidikan Islam Dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Bab II Pasal 2.*
- Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Bab I Pasal 13.*
- Wachols, Jhon M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet, ke 19; Jakarta: Gramedia, 1990.
- al-Zarqa, Mushthafa Ahmad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosioal; Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Zas, Maisarah. *Haji dan Pencerahan Jati Diri Muslim*, Cet. I; Bandung: CV Alfabeta, 2005.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**( CURRICULUM VITAE )**

## I. IDENTITAS :

**N a m a** : **UMAR YAHYA, S.Ag.M.Ag.**

**NIP** : 196812021996031001

**Pangkat / Golongan Ruang** : Penata Tk. I, ( III/d)

**Pangkat Akademik** : Lektor

**Tempat & Tanggal Lahir** : Pangkajene, 12 Desember 1968

**Perkejaan** : 1. Dosen tetap STAI DDI Pangkajene Sidenreng Rappang  
2. PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap

**Jabatan** : 1. Pembantu Ketua III STAI DDI Pangkajene Sidrap  
2. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

**Pendidikan Terakhir** : S2 (Universitas Muslim Indonesia, Makassar tahun 2003)

**Alamat** : BTN Griya Pratama Blok D. No. 1 Pangkajene Sidenreng Rappang

Tlp. (0411) 7008428, HP. 081342629538

## II. PENDIDIKAN :

JENJANG PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN LULUS	TEMPAT
Sekolah Dasar	SD NegeriNo. 2 Pangkajene Sidrap	1983	Pangkajene
SLTP	MTs. As’adiyah, Pondok Pesantren As;’adiyah Pusat Sengkang	1986	Sengkang

SLTA	MA. As'adiyah, Pondok Pensantren As'adiyah Pusat Sengkang	1989	Sengkang
Sarjana S1	IAIN ALAUDDIN UJUNGPANDANG	1995	Makassar
Pascasarjana (S.2/ Magister)	UMI / Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam	2003	Makassar
Pascasarjana (S.3 / Doktor) Sementara Proses Penyelesaian	UIN ALAUDDIN MAKASSAR / Konsentrasi Hukum Islam	2008  Sampai sekarang	Makassar

### III. PENGALAMAN JABATAN

NO	JABATAN	TAHUN	KETERANGAN
1	Kepala Sub Seksi Kemasjidan Kandepag Kabupaten Sidrap	2001- 2002	
2	Kepala KUA Kecamatan Wattang Pulu Kandepag Kabupaten Sidrap	2003 – 2004	
3	Kepala KUA Kecamatan Tellu LimpoE Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidrap	2005 - 2008	
4.	Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Sidrap	2009 sampai sekarang	
5.	Pembantu Ketua III STAI DDI Pangkajene Sidrap	2005 sampai Sekarang	

## IV. PENGALAMAN ORGANISASI

NO	ORGANISASI	TAHUN	TEMPAT
1	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	1993	Ujung Pandang
2	MUI Kabupaten Sidrap	2001 - Sekarang	Pangkajene
3	NU Kabupaten Sidrap	2005 - Sekarang	Pangkajene
4	BAZ Kabupaten Sidrap	2007 - Sekarang	Pangkajene
5	STAI DDI Pangkajene Sidrap	2001 - Sekarang	Pangkajene
6.	Pengurus Daerah DDI Sidrap	1997 - Sekarang	Pangkajene

## V. PENGALAMAN LUAR NEGERI

NO	NEGARA TUJUAN	KEGIATAN	TAHUN
1	MALAYSIA	STUDI BANDING PENGELOLAAN ZAKAT	2009
2	MAKKAH	IBADAH UMRAH	2011

Sidrap, 05 Agustus 2011

Yang Bersangkutan,

UMAR YAHYA, S.Ag.M.Ag.

DAFTAR LAMPIRAN I  
DAFTAR NAMA-NAMA YANG MENJADI RESPONDEN

No.	Nama-nama	Jabatan	Organisasi
1.	Dr.H.Ahmad Rusydi, MM	Kepala Kantor	Kementerian Agama Kab. Sdrap
2.	Drs.H.Hasanuddin S.,M.Si	Sekretaris Daerah	Pemda Kabupaten Sidrap
3.	Drs. H. Anwar, M.Si	Kepala Kantor	Litbang BAPPEDA
4.	Hj. A. Dala, S.Sos.	Kepala Bagian Kesra	Pemda Kabupaten Sidrap
5.	Dra. Hj. Jamaliah	Kepala Seksi	Kementerian Agama Kab. Sidrap
6.	Drs. H. Marzuki, MM	Kepala Seksi	Kementerian Agama Kab. Sidrap
7.	Drs. Akkas	Kepala Seksi	Kementerian Agama Kab. Sidrap
8.	Drs. Abd Azis	Kepala Seksi	Kementerian Agama Kab. Sidrap
9.	Irman, S.Ag.	Kepala Seksi	Kementerian Agama Kab. Sidrap
10.	Drs.H. Kaharuddin, M.Ag	Kasubag. TU	Kementerian Agama Kab. Sidrap
11.	H. Gaffar, S.Ag.	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
12.	H. Jumali, S.Ag.	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
13.	Drs. Kamaluddin, M.Si.	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
14.	Sudirman, S.Hi.	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
15.	M. Suhri, S.Ag.	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
16.	M. Syukri, S.Ag.	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
17.	Mustafa, S.Ag.	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
18.	Arwan, S.Ag.	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
19.	H.Palwi Rahman, M.Ag.	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
20.	Drs. Arifin	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
21.	Abd. Rahim, S.Ag.	Kepala KUA Kec.	Kementerian Agama Kab. Sidrap
22.	H. A. Ranggong	Ketua	IPHI Sidrap
23.	Drs.H. Abu Bakar, MH.	Sekretaris	IPHI Sidrap
24.	Drs.H.M. Tahir	Ketua	PD Muhammadiyah Sidrap
25.	H.Muh. Asri Kasman, Lc.	Ketua	PC Nahdatul Ulama Sidrap
26.	Wahidin, SHi.	Sekretaris	PC Nahdatul Ulama Sidrap
27.	KH.Makkah Abdullah	Ketua	MUI Kabupaten Sidrap
28.	Drs.Sadiliah Kadir,MA	Sekretaris	MUI Kabupaten Sidrap
29.	Drs. Fatahillah, MH.	Ketua	PD DDI Kabupaten Sidrap
30.	Abd, Jawad, S.Ag.	Sekretaris	PD DDI Kabupaten Sidrap
31.	KH. Radhiy	Ketua	MDI Kabupaten Sidrap
32.	Drs.H.Ishaq Ibrahim,M.Pd	Ketua	Al-Irsyad Kabupaten Sidrap

No.	Nama-nama	Jabatan	Organisasi
33.	KH. Makkah Abdullah	Ketua	FKUB Kabupaten Sidrap
34.	Dr.H.Aminuddin, M.Ag.	Ketua	FPS Kabupaten Sidrap
35.	Dra.Hj.Nurhayati	Ketua	Aisyiah Kabupaten Sidrap
36.	Dra.Hj. Saenab	Ketua	Muslimat NU Kabupaten Sidrap
37.	Drs. H. M. Alwy Rajab	Ketua	STAI DDI Pangkajene Sidrap
38.	Drs. Mansur, M.Ag.	Puket I	STAI DDI Pangkajene Sidrap
39.	Drs.H. Kadir, HD, M.Ag	Puket II	STAI DDI Pangkajene Sidrap
40.	H. Asri, Kasman, LC.	Ketua	Forum KBIH Kab. Sidrap
41.	H. Burhanuddin, LC	Ketua	KBIH Kabupaten Sidrap
42.	H. Patahuddin Sukkara	Ketua	KBIH Kabupaten Sidrap
43.	H. Bunyamin, Lc.	Ketua	KBIH Kabupaten Sidrap
44.	H. Ramli, BA.	Ketua	KBIH Kabupaten Sidrap
45.	H. Nuryadin	Ketua	KBIH Kabupaten Sidrap
46.	H. Muh. Sa'ad	Ketua	KBIH Kabupaten Sidrap
47.	Drs. H. M. Basir Rauf	Ketua	KBIH Kabupaten Sidrap
48.	H. Adnan Basir, S.Ag.	Ketua	KBIH Kabupaten Sidrap
42.	H. Pelita Umar	Anggota DPRD	DPRD Kabupaten Sidrap
43.	H. Ali Hafid, Am.Pd.	Anggota DPRD	DPRD Kabupaten Sidrap
44.	H. Sanre Manike	Anggota DPRD	DPRD Kabupaten Sidrap
45.	H. Zainal S.Sos	Anggota DPRD	DPRD Kabupaten Sidrap
46.	Ir. H. Hamsir	Anggota DPRD	DPRD Kabupaten Sidrap
47.	Ir. Baharuddin Andang	Anggota DPRD	DPRD Kabupaten Sidrap
50.	A. Syukri Ilham, SE	Anggota DPRD	Ketua DPRD Kabupaten Sidrap
51.	Sutanto, S.Sos.	Anggota DPRD	DPRD Kabupaten Sidrap
52.	Drs.H.M.Syukri A Dalle	Ketua	Perhimpunan Petugas Syara' Sidrap
53.	Drs.A.Sadiliah K.	Sekretaris	FKUB Kabupaten Sidrap
54.	Dra.Hj. Khaerati	Ketua	Aisyiyah Kabupaten Sidrap
55.	AG. KH. Muh. Said	Mustasyar	NU Cabang Kabupaten Sidrap
56.	AG. KH. Muh. Thoai	Mustasyar	NU Cabang Kabupaten Sidrap
57.	AG. KH. Husain Badwi	Mustasyar	NU Cabang Kabupaten Sidrap
58.	AG. KH. Suparman Idrus	Mustasyar	NU Cabang Kabupaten Sidrap
59.	AG. H. Imran Yusuf,LC.	Syuriah	NU Cabang Kabupaten Sidrap
60.	Drs. H. Abd. Latif	Ketua	MUI Kecamatan MariengngaE
61.	Abd. Malik Tibe, S.Hi.	Anggota	MIU Kabupaten Sidrap
62.	Drs. H. M. Alwy Akil	Syuriah	NU Cabang Kabupaten Sidrap
63.	H. Kamil LC.	Syuriah	NU Cabang Kabupaten Sidrap



No.	Nama-nama	Jabatan	Organisasi
64.	Dra. Haekal Wahab.M.TP	Kadis Bid. Ekonomi	Pemda Kabupaten Sidrap
65.	H. Syamsuddin, MAP	Ketua	MUI Kecamatan Sidenreng
66.	Drs.H. Abd. Muis KM.	Komisi Pengawas	BAZ Kabupaten Sidenreng Rappang
67.	Drs.Muh. Ridwan Thayeb	Komisi Pengawas	BAZ Kabupaten Sidenreng Rappang
68.	Drs.H. Hasanuddin S,M.Si	Ketua Badan	BAZ Kabupaten Sidenreng Rappang
68.	H. Rusman, SE	Anggota	BAZ Kabupaten Sidenreng Rappang
69.	H. Irwan Ali L.C.	Imam Besar	Masjid Agung Al-Markaz Sidrap
70.	Surajuddin ,S.Ag,M.Ag.	Koord. Bid.Dakwah	MUI Kabupaten Sidrap
71.	Salman Mas'udi	Sekretaris	MUI Kecamatan Pancarijang
72.	Mashudi Tayyeb	Anggota	MUI Kecamatan Pancarijang
73.	Wahidin ar-Arrafny	Sekretaris	NU Cabang Kabupaten Sidrap
74.	Syamsuddin, S.Ag.	Anggota	NU Cabang Kabupaten Sidrap
75.	Syarifuddin,S.Pt,MM	Ketua	MWC. NU Kabupten Sidrap
76.	Muh. Dahlan S,Ag.,	Sekretaris	MUI Kecamatan MaritengngaE
77.	Ali Yafied, A.Ma.Pd.	Ketua	BKPRMI Kabupaten Sidrap
78.	Muh.Yusuf, A.Mt. S.Pdi	Anggota	BKPRMI Kabupaten Sidrap
79.	Mustamin, S.Pdi.	Anggota	BKPRMI Kabupaten Sidrap
80.	Drs.H. Bunyamin, M.Pd.	Sekretaris	BKPRMI Kabupaten Sidrap
81.	H. Hamrin Hatib, SE.	Pembina	BKPRMI Kabupaten Sidrap
82.	Mariyati, S.Ag	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
83.	Muhajirin, S.Ag	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
84.	Amiruddin, S.Ag.	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
85.	Syamsuddin, S.Pdi	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
86.	Khairuddin, S.Ag.	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
87.	Jumiyati, S,Ag.,MH.	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
88.	Drs.Antong, M.Pd.	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
89.	Kustini Jide, S.Pdi.	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
90.	Siswadi, S.Pdi,MSi	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
100	Nurhayati, S.Pdi.	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
101	Namirah, S.Pdi	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
102	Dra. Henny S., M.Pd.	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
103	Syarifuddin.S,Ag,MM	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
104	Hariyani, S.Ag.	Dosen	STAI DDI Pangkajene Sidrap
105	Sudarta, S.Ag.	Ketua	Fatayat NU Kabupaten Sidrap
106	Drs. Nurdin Ali	Sekretaris	MUI Kecamatan Watang Pulu
107	Syarifuddin, S.Ag,	Ketua	MUI Kecamatan Watang Pulu

No.	Nama-nama	Jabatan	Organisasi
108	Baktiar, S.Ag,M.Si	Kasubag Agama	Pemda Kabupaten Sidrap
109	Drs. H Abd. Jabbar	Anggota	MUI Kabupaten Sidrap
110	Mustamin, S.Ag.	Ketua	LPTQ Kecamatan Watang Pulu
111	Agus Mahmud, S.Pdi	Ketua	LPTQ Kabupaten Sidrap
112	Hj. Jamilah Makkiya,S.Ag	Anggota	LPTQ Kabupaten Sidrap
113	Drs. Muh. Adril Ismail	Anggota	MUI Kabupaten Sidrap
114	H. Muh. Said Saad Lc.	Ketua	al-Wahdah Islamiyah Kab. Sidrap
115	H. Hafidz, S.Pdi.	Sekretaris	al-Wahdah Islamiyah Kab. Sidrap
116	Bohari, S.Pd.	Anggota	al-Wahdah Islamiyah Kab. Sidrap
117	Bustamin Abu Azzam	Anggota	al-Wahdah Islamiyah Kab. Sidrap
118	Syamsul Alam, S.Pdi	Anggota	LDI Kecamatan Watang Pulu
119	Drs. Abd. Malik	Anggota	LDI Kecamatan Watang Pulu
120	Ir. Syahrir, M.Pd.	Anggota	LDI Kecamatan Watang Pulu
121	Drs. Madaling	Anggota	MUI Kabupaten Sidrap
122	Andi Aliaman	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
123	Drs. Aco Alimuddin	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
124	M. Arfah, BA	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
125	Muhammadong, SP.	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
126	Mansyur Asir	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
127	KM. Abd. Azis	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
128	Mansur Tajam	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
129	H. Muhammadiyah	Ketua	MUI Kecamatan Watang Pulu
130	Agussalim Asmir	Sekretaris	MUI Kecamatan Watang Pulu
131	Drs. H. Labahang	Anggota	MUI Kecamatan Watang Pulu
132	Syamsu Alam	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
133	Herlina Dekke, S.Hi	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
134	Saenab, S.Hi	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
135	Norma Bahu	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
136	Awiyah	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
137	Hasna, S.Pdi	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
138	Hatima, S.Hi	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
139	Junilda, S.Pdi	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
140	Nurhayati, S.Pdi	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
141	Syamasiyah, S.Pdi	Calon Haji	Masyarakat Kabupaten Sidrap
142	Drs. Agussalim	Anggota	MUI Kabupaten Sidrap
143	Syamsu Alam, A.Ma.	Anggota	MUI Kabupaten Sidrap

No.	Nama-nama	Jabatan	Organisasi
144	Rusli M.,	Anggota	BKPRMI Kabupaten Sidrap
145	M. Asri	Anggota	BKPRMI Kabupaten Sidrap
146	Mustari Sede	Anggota	BKPRMI Kabupaten Sidrap
147	Muh. Zakaria, S.Pd.	Anggota	BKPRMI Kabupaten Sidrap
148	H. Rusdi Masse	Dewan Pertimbangan	BAZ Kabupaten Sidrap
149	Ir. H. Dollah Mando	Komisi Pengawas	BAZ Kabupaten Sidrap
150	H. Abd. Majid,SE,M.Si	Sekretaris Pengawas	BAZ Kabupaten Sidrap

**Sumber Data : Hasil Pengelolaan data Kuesioner**



**KETAATAN BERHAJI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**( Studi Analisis Kesenjangan Pemahaman dan Pelaksanaannya )**



*Disertasi*

*Diajukan untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar  
Konsentrasi Hukum Islam*

O l e h :

UMAR YAHYA  
NIM. 80100307014

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2011

Daftar Angket Penelitian Disertasi

KETAATAN BERHAJI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
(STUDI ANALISIS KESENJANGAN PEMAHAMAN DAN LAKSANAANNYA)



O l e h :

U m a r Y a h y a

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2010

## Angket Penelitian Disertasi

# KETAATAN BERHAJI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (STUDI ANALISIS KESENJANGAN PEMAHAMAN DAN PELAKSANAANNYA )

.....

### A. Pengantar

Kepada para responden yang kami muliakan

Dengan hormat disampaikan bahwa penelitian ini berjudul "*KETAATAN BERHAJI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (STUDI ANALISIS KESENJANGAN PEMAHAMAN DAN PELAKSANAANNYA)*" dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik Pendidikan doktor (S3) program dirasah Islamiyah konsentrasi Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Identitas peneliti :

N a m a : Umar Yahya

NIM : 80100307014

Semester : IV ( Genap )

Program Pendidikan : Doktor

Program Studi : Dirasah Islamiyah ( Islamic Studies)

Konsentrasi : Hukum Islam

Alamat : BTN. Griya Pratama Blok D No. 1 Pangkajene Sidrap No. Tlp. (0421) 7008428, HP. 081342629538.-

Tujuan Penelitian ini antara lain adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Analisis Kesenjangan Pelaksanaannya dan Upaya Mewujudkan Keserasiannya). Lebih jauh akan dikemukakan pula kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga dapat diperoleh informasi tentang pengaruhnya terhadap upaya pengembangan pengelolaan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Studi pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidrap, 11 KUA Kecamatan, 12 KBIH, IPHI Kabupaten Sidrap, dan masyarakat muslim yang akan dan sesudah melaksanakan ibadah haji, dijadikan sampel dalam penelitian ini dan memperkuat informasi dalam penelitian ini.

Di samping itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis aspek-aspek manajemen haji secara konseptual dengan fokus pada manajemen haji secara empirik dalam rangka mencari solusi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan umat Islam terutama kepada *Mustati'* dan umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji pada penyelenggara dan pengelola haji di Kabupaten Sidrap dikelola secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **B. Petunjuk**

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama, kemudian jawablah dengan jujur, baik dan obyektif.
2. Pilihlah jawaban yang telah tersedia dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap tepat.

### **C. Daftar Pertanyaan**

1. Menurut pengamatan Anda, bagaimana ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di daerah Anda ?
  - a. baik sekali
  - b. baik
  - c. cukup
  - d. kurang
2. Menurut pengamatan Anda, bagaimana pengelolaan/penyelenggaraan haji di Sidenreng Rappang, termasuk di daerah Anda ?
  - a. baik sekali
  - b. baik
  - c. cukup
  - d. kurang
3. Menurut pengamatan Anda, bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan penyelenggaraan/pengelolaan dan pembinaan haji, khususnya masyarakat sekelilingnya ?
  - a. baik sekali
  - b. baik
  - c. cukup
  - d. kurang
4. Menurut pengamatan Anda, apa yang menjadi motivasi utama masyarakat Islam (muslim) untuk melaksanakan haji ?
  - a. Menyempurnakan ke-Islaman dan sebagai bagian dari rukun Islam

- b. Sistem pelayanan dan pengelolaan haji yang sudah profesional dan akuntabel (bertanggung jawab)
  - c. Bergelar haji dan mendapat tempat terhormat di masyarakat
  - b. Kewajiban agama yang wajib ditunaikan/dilaksanakan.
5. Dalam ketaatan berhaji beserta pengelolaannya di Kabupaten Sidrap, orientasi yang harus diutamakan adalah aspek ;
- a. Keuntungan material
  - c. Ingin dikenal oleh masyarakat
  - b. Peningkatan mutu Keimanan/ke-Islaman
  - d. Pelayanan dan Kenyamanan umat
6. Ada berapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan berhaji di Sidenreng Rappang, antara lain :
- a. Adanya pemahaman masyarakat terhadap ajaran haji belum komprehensif, baik tekstual maupun kontekstual.
  - b. Aspek pengelolaan haji di Sidenreng Rappang belum optimal,
  - c. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran haji yang dapat memberikan efek jera dan menyebabkan timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap ajaran haji itu sendiri.
  - d. Prestise/harga diri
  - e. Benar semua
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan berhaji di atas (nomor 6), menurut pandangan Anda, manakah yang paling besar pengaruhnya :
- a. Adanya pemahaman masyarakat terhadap ajaran haji belum komprehensif, baik tekstual maupun kontekstual.
  - b. Aspek pengelolaan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal,
  - c. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran haji yang dapat memberikan efek jera dan menyebabkan timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap ajaran haji itu sendiri.
  - d. Prestise/harga diri



8. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan pelaksanaan haji dengan membayar zakat di atas (nomor 7), menurut pandangan Anda, manakah yang paling kurang pengaruhnya ?
- a. Adanya pemahaman masyarakat terhadap ajaran haji belum komprehensif, baik tekstual maupun kontekstual.
  - b. Aspek pengelolaan haji di Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal,
  - c. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran haji yang dapat memberikan efek jera dan menyebabkan timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap ajaran haji dan itu sendiri.
  - d. Prestise/harga diri
9. Aspek-aspek yang bisa dijadikan indikasi berkualitas tidaknya ketaatan berhaji seseorang di Kabupaten Sidrap ?
- a. Kemampuan ilmu dan penguasaan manasik haji (Tata cara berhaji)
  - b. Memiliki kemampuan keuangan yang lebih, sehingga berkecukupan membiayai keluarga yang ditinggalkan .
  - c. Memiliki kesehatan jasmani yang cukup, sehingga mampu melaksanakan semua rangkaian ibadah haji
  - d. Mendapat Bimbingan Manasik dari KBIH Sebelum berangkat ke tanah suci.
  - e. Ada perubahan prilaku/akhlak setelah melaksanakan ibadah haji
  - f. ....
  - g. ....
10. Aspek di atas (nomor 9) menurut pandangan Anda, mana paling dominan :
- a. Kemampuan ilmu dan penguasaan manasik haji (Tata cara berhaji)
  - b. Memiliki kemampuan keuangan yang lebih, sehingga berkecukupan membiayai keluarga yang ditinggalkan .
  - c. Memiliki kesehatan jasmani yang cukup, sehingga mampu melaksanakan semua rangkaian ibadah haji
  - d. Mendapat Bimbingan Manasik dari KBIH Sebelum berangkat ke tanah suci.

e. Perubahan perilaku setelah melaksanakan ibadah haji

f. dst.

11. Ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa motivasi/dorongan kuat, sehingga animo masyarakat bercita-cita untuk melaksanakannya, antara lain :

a. Ingin menyempurnakan Keislaman

b. Mencari keridhoan Allah Swt. sebagai wujud *Ta'abbudiyah* (pengabdian semata) kepada Allah semat.

c. Prestise / harga diri

d. Ingin bergelar haji dan terpancang di masyarakat

12. Menurut pendapat Anda, bagaimana peranan visi dan misi pada lembaga/pengelola haji itu ?

a. Sangat penting

b. Penting

c. Biasa-biasa saja

d. Tidak penting

13. Menurut pendapat Anda, siapa sebaiknya yang merumuskan visi dan misi lembaga pengelola haji itu ?

a. Kepala Kantor/Unit Kerja

b. Pegawai Tata Usaha

c. Staf / Karyawan

d. Dirumuskan secara bersama-sama unsur pimpinan dan staf/karyawan

14. Menurut pengamatan Anda, bagaimana peranan Pimpinan/Kepala Kantor dalam memutuskan suatu masalah ?

a. Sangat dominan

- b. Hanya memutuskan saja, jika telah diputuskan dalam rapat/pertemuan
  - c. Biasanya diserahkan kepada para pembantunya
  - d. Diserahkan sepenuhnya kepada rapat unsur pimpinan
15. Menurut pendapat Anda, sejauhmana perlunya analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan pengelola haji itu ?
- a. Penting sekali
  - b. Penting
  - c. Cukup penting
  - d. Tidak penting
16. Menurut pendapat Anda, pelayanan haji yang berkualitas adalah :
- a. Pelayanan yang mampu mengembangkan seluruh potensi umat Islam (Calon Haji) baik aspek pengetahuan, kepribadian akhlak, dan keterampilan .
  - b. Pelayanan yang banyak diminati masyarakat, khususnya para pejabat dan pengusaha
  - c. Pelayanan yang mahal biayanya
  - d. Benar semua
17. Menurut pengamatan Anda, bagaimana sistem pendaftaran haji di Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidrap, dimana Anda terlibat di dalamnya ?
- a. Sudah ada dan sifatnya baku
  - b. Sudah ada dan baku, namun sering dilanggar
  - c. Belum ada, sehingga pendaftaran disesuaikan kebutuhan
  - d. Sistem pendaftaran haji disesuaikan lamaran yang masuk.

18. Menurut pengamatan Anda, dalam penerimaan tenaga administrasi/karyawan pengelola haji yang diutamakan (diprioritaskan) adalah mereka :
- a. Yang memiliki keahlian (profesionalitas) dan ijazahnya sesuai dengan keahliannya
  - b. Yang memiliki keahlian (profesionalitas), walaupun ijazahnya tidak sesuai
  - c. Alumni sendiri dan memiliki keahlian
  - d. Yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan
  - e. Siapa saja yang melamar terlebih dahulu
19. Bagaimana sistem penggajian/kesejahteraan yang diberlakukan pada pengelola Haji Kantor Dep. Agama Kabupaten Sidrap, dimana Anda terliba di dalamnya ?
- a. Berdasarkan aturan pemerintah misalnya lama masa kerja, jenjang latar belakang pendidikan, dan jabatan yang di duduki di kantor.
  - b. Gaji (honor) berdasarkan jumlah jam pekerjaan yang telah diselesaikan
  - c. Gaji (honor) disesuaikan dengan uang yang masuk pada bulan itu
  - d. Gaji (honor) tidak perlu ditetapkan karena mengajar sebagai wujud jihad/pengabdian (ikhlas beramal)
20. Waktu penerimaan gaji (honor) yang diterima oleh pegawai dan karyawan Pengelola/Penyelenggara Haji di Kabupaten Sidrap
- a. Setiap bulan
  - b. Setiap akhir penyelesaian penugasan/pekerjaan
  - c. Disesuaikan dengan keadaan kas bendahara
  - d. Benar semua

21. Keberadaan sarana dan prasarana pengelola/penyelenggara haji, misalnya komputer, meubeler, peralatan adalah :
- a. Sebagian besar bantuan dari pemerintah (Pemda, Dep.Agama, Diknas)
  - b. Sebagian besar dibeli dari hasil usaha yayasan
  - c. Seluruhnya dibeli atas bantuan ketua yayasan / pendiri
  - d. Sebagian besar dibeli atas sumbangan masyarakat setempat
  - e. Dibeli dari sebagian dari hasil pembayaran jema'ah/peserta bimbingan
22. Seluruh guru/karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berdasarkan, yaitu :
- a. Uraian tugas masing-masing struktur organisasi yang berlaku
  - b. Uraian tugas yang diberikan/diserahkan ke pimpinan
  - c. Uraian tugas sesuai kesepakatan hasil musyawarah
  - d. Terserah kesadaran guru/karyawan karena belum ada uraian tugas yang ditetapkan.
23. Dalam rangkaian pelaksanaan bimbingan/pengajaran tentang manasik haji kepada jema'ah dilaksanakan :
- a. Setiap saat, sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya
  - b. Evaluasi bahan bimbingan/pengajaran dilaksanakan setiap selesai bimbingan/pengajaran.
  - c. Evaluasi bimbingan/pengajaran sepenuhnya kepada pimpinan
  - d. Penyampaian Bahan ajar/bimbingan dimodifikasi sesuai waktu dan situasi jema'ah/peserta bimbingan.
24. Siapa yang berhak melakukan penilaian terhadap efektif tidaknya penerimaan materi/bahan ajar manasik haji, yaitu :
- a. Kyai/pemateri secara mutlak
  - b. Kyai bersama Ustadz/ guru yang mengajar dan pembimbing lainnya
  - c. Penilaian kolektif
  - d. Benar semua

25. Menurut pengamatan Anda, bagaimana sikap pimpinan (kyai) dalam menegakkan kedisiplinan pada saat pemberian bimbingan/pengajaran manasik haji :
- a. Tegas, artinya siapa saja yang melanggar dikenakan sanksi tanpa melihat penyebabnya
  - b. Tegas dan bijaksana, artinya siapa saja yang melanggar ditegakkan aturan, namun dipelajari, terlebih dahulu penyebabnya.
  - c. Terkadang tidak disiplin, kalau yang melanggar “orang dekat”, maka aturan tidak ditegakkan .
  - d. Pimpinan tak mau tahu dengan masalah kedisiplinan karena pimpinan menyerahkan segala aktivitasnya kepada kekuasaan Allah Swt.
26. Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap pimpinan ketika memimpin rapat/musyawarah, yaitu :
- a. Sangat menghormati suara terbanyak, sehingga menjadi hasil keputusan
  - b. Biasanya hasil keputusan berdasarkan keinginan pimpinan
  - c. Pimpinan sangat senang jika pendapatnya disetujui rapat.
  - d. Pimpinan biasanya “mencatat” peserta rapat yang menentang pendapatnya.
  - e. Jika ada rapat, biasanya pimpinan menunjuk seseorang untuk mewakilinya
27. Menurut pengamatan Anda, bagaimana hubungan pimpinan (Kepala Instansi/KBIH/IPHI) dengan pemerintah setempat sebagai pemegang kebijaksanaan (bupati, camat, dan lurah/kepala desa) :
- a. Baik sekali
  - b. Baik
  - c. Cukup baik
  - d. Kurang baik

28. Menurut pengamatan Anda, bagaimana hubungan pimpinan (Kepala Instansi/KBIH/IPHI) dengan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, agama, dan pengusaha, yaitu :
- a. Baik sekali
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
29. Menurut sepengetahuan Anda, apa keterlibatan pemerintah (bupati/camat/lurah/desa) dengan manajemen pengelolaan/penyelenggaraan haji ;
- a. Sebagai pembina kepengurusan
  - b. Sebagai pengurus harian
  - c. Sebagai mitra kerja tanpa ada hubungan organisatoris.
  - d. sebagai pemegang kebijakan/penguasa wilayah
30. Menurut sepengetahuan Anda, apa keterlibatan tokoh masyarakat/pengusaha dengan manajemen pengelolaan/penyelenggaraan haji tahun ini (2010)
- a. sebagai pembina kepengurusan
  - b. sebagai pengurus harian
  - c. sebagai mitra kerja tanpa ada hubungan organisatoris
  - d. sebagai donatur tetap
  - e. Sebagai peserta bimbingan/jema'ah
31. Departemen Agama memiliki program pengelola/penyelenggara haji, sebagai lembaga yang strategis sekaligus peningkatan mutu bimbingan/pengajaran yang dikenal dengan istilah “tiga pelayanan kepada masyarakat” yaitu ; pelayanan administrasi, bimbingan dan perlindungan kepada umat Islam yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji.

Menurut pengamatan Anda, program pelayanan apa saja yang dikembangkan pada pengelola/penyelenggara Haji/KBIH/IPHI

- a. Telah melaksanakan ketiga program tersebut dengan baik
- b. Ketiga program pelayanan tersebut sudah diprogramkan oleh pengelola/penyelenggara haji/KBIH/IPHI
- c. Program pengelola/penyelenggara Haji/KBIH/IPHI hanya memusatkan perhatiannya kepada bidang Ta'lim saja.
- d. Komponen pengelolaan haji hanya memusatkan perhatiannya kepada bidang ta'abudiyah (ibadah) saja.

32. Menurut penilaian Anda, apa strategi pengelola/penyelenggara Haji dalam mengupayakan menserasikan ketaatan berhaji dan membayar zakat (dan rukun Islam lainnya) di Kabupaten Sidrap.

- a. Meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap substansi (inti) ajaran haji dan zakat.
- b. Meningkatkan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan/penyelenggaraan haji, mis.; sumber daya manusia, sarana prasarana, dan regulasi (produk perundang-undangan haji).
- c. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran haji dan tidak membayar zakat padahal sudah tergolong muslim yang mampu (Mustati' dan Muzakki)
- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap ajaran haji dan zakat itu sendiri.
- e. Semuanya benar

33. Upaya peningkatan mutu pelayanan haji dalam menghadapi tantangan masa kini/kontemporer, perlu ditopang sarana yang memadai, misalnya komputer, internet, pelatih yang profesional, dana yang memadai serta diprogramkan secara sistematis.

Menurut pengamatan Anda, apakah sarana tersebut sudah tersedia pada pengelola haji



- a. Komputer
- b. Internet
- c. Pelatih yang profesional
- d. Dana yang memadai
- e. Renstra: Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan Program kerja

14. Sejauhmana pemahaman saudara tentang ketaatan berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang,

- a. Pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidrap sudah baik, dengan keberadaan Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, IPHI Kabupatenn Sidrap, KBIH Kabupaten Sidrap, Majelis Taklim di Kabupaten Sidrap dan Ormas Islam (Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama) yang ada di Kabupaten Sidrap
- b. Pemahaman dan Ketaatan berhaji di Kabupaten Sidrap belum Optimal, karena kurangnya waktu Calon haji untuk mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari pengelola haji.
- c. Pemahaman dan Ketaatan berhaji di Kabupaten Sidrap masih kurang, diakibatkan SDM pengelola masih lemah, sarana dan prasarana masih kurang dan regulasi haji belum memberikan sanksi berat bagi yang melanggar peraturan haji.
- d. Pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidrap masih memperhatikan diakibatkan pembinaan dan penyuluhan tentang manasik haji masih kurang, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidrap maupun Ormas Islam lainnya.
- e. Pemahaman dan ketaatan berhaji di Kabupaten Sidrap tergantung sejauhmana kesiapan Calon haji itu sendiri membekali dirinya dengan pengetahuan agama Islam yang memadai baik didapatkan di pendidikan formal maupun nonformal. Terutama dalam lingkup keluarga (informal).

#### IDENTITAS KORESPONDEN

Nama Lengkap :  
Pendidikan Terakhir :  
Jabatan :  
Alamat :  
Tanda Tangan :

**Terima kasih,**

*“SEMOGA PARTISIPASI DAN SUMBANGSI ANDA, MENJADI AMAL IBADAH DI SISI ALLAH SWT. SEKALIGUS MENJADI SUMBANGSI PEMIKIRAN PADA PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN/PENYELENGGARAAN HAJI”*



Kerangka Konseptual (*Conceptual Frame Work*) Pemahaman dan Ketaatan Berhaji :



## ملخص البحث

الإسم : عمر يحيى  
رقم التسجيل : 80100307014  
القسم الدراسي : الشريعة  
موضوع البحث : إهتمام مجتمع منطقة سيدنرينج رفانج (Rappang Sidenreng)  
بمناسك الحج (دراسة تحليلية عن الفجوة بين فهم والتطبيق)

إن المسئلة الهامة فى هذا البحث وجود الفجوة بين فهم مجتمع منطقة سيدنرينج رفانج (Sidenreng Rappang) عن مناسك الحج و أثره فى ادائه. وتبحث هذه المسئلة بتفصيل ما يلى: كيف صورة فهم المجتمع عن مناسك الحج، وما عناصر التى تؤدى إلى عدم موافقة فهمهم الحج و إهتمامهم به، وماذا يحاول المسؤولون برعاية الحج فى إصلاح فهم المجتمع عن الحج وتطوير إهتمامهم به.

يواجه البحث إلى محاولة تطبيق مناسك الحج وامثال أركان الإسلام الأخرى معدلة متوازنا عند المجتمع الإسلامى على أن الحج ركن من اركان الإسلام الذى يحتوى القيم الألوهية و عناصر الإجتماعية والإقتصادية. فهذا هو الذى يجعل هذا البحث مهما عند الباحث بجانب انه يقع فى المجتمع واقعا.

استخدم هذا البحث العلمى تحليل البيانات الوصفية النوعية، وهو شكل من أشكال معالجة البيانات باستكشاف ظواهر المجتمع الإسلامى موضوعية فى المجال عن إرادة قوية لأداء فريضة الحج أكثر من مرة، والعوامل التى تؤثر على مناسك الحج، فضلا عن الجهود المبذولة فى تحسين إدارة الحج وتنفيذ أركان الإسلامى الأخرى. فأما المنهج المتبع لمعالجة هذه المشاكل هو باستخدام دراسة سوسيولوجية القانونية والمعيارية لاهوتية، والنهج التاريخي. وأما أساليب جمع البيانات هي باستخدام أسلوب الملاحظة والمقابلات والوثائق.

فى هذه الدراسة عدد من العوامل التى تؤثر على المجتمع الإسلامى فى حي Sidenreng Rappang إلى الفجوة بين إهتمامهم بالحج و عبادتهم الاجتماعية الأخرى، و أكثر عاملا يؤدى إليها هي:

أ) عدم وجود الوعي القانوني العام والتمسك بتعاليم الحج (35 ٪). ب) رغبة قوية لنيل لقب "الحاج / الحاجة " بعد اداء فريضة الحج بمكانتها الخاصة في المجتمع المحلي (76,66 ٪). إذا كان يتم تحليل كل من العوامل، فمن المفهوم أن المجتمع الإسلامي في منطقة Sidenreng Rappang الذين يفهمون حقا حول وجوب تنفيذ الحج لا يزيد من 21,34 ٪، و أن الذين يفهمون عواقب أداء مناسك الحج لا تزال مرتفعة في 78.66 ٪. هذا يدل على أن مستوى الفهم للمجتمع الإسلامي عن أحكام الحج، سواء من حيث إشاراته، والعلم به، والمتطلبات والنتائج المترتبة على مناسك الحج لا تزال ناقصة. أشرت لمن يريد الحج وخاصة للقادرين على أداءه ابتغاء وجه الله خالصا ولنيل درجة التقوى، بالإضافة إلى الجوانب الشخصية من التقوى والورع والاجتماعية. فالواقع أن المجتمع الإسلامي في منطقة Sidenreng Rappang لا يفهمون جوهر معاني الحج نظرا من عدة أمور : أ) المستوى الثقافي للحجاج أغلبهم المرحلة الابتدائية (46.84 ٪)، ب) مصدر المعلومات عن الحج من خلال الروابط العائلية (50 ٪)، ج) للحجاج المحتملين في 2009/2008 على أساس نوع العمل / المهنة أكثرهن ربات البيوت (63.4 ٪).

أما الآثار المترتبة على هذا البحث يتطلب ضرورة زيادة الفهم وتنفيذ ركن الإسلام الخامس لمنطقة Sidenreng Rappang من خلال إهتمامهم بالحج مع امتثال أركان الإسلام الأخرى حتى لا يكون هناك أي فجوة في مستوى التنفيذ. فمن الضروري إقامة علاقة تعاونية بين مؤسسات إدارة الحج، سواء قامت بها الحكومة أو المحلي (KBIH) .